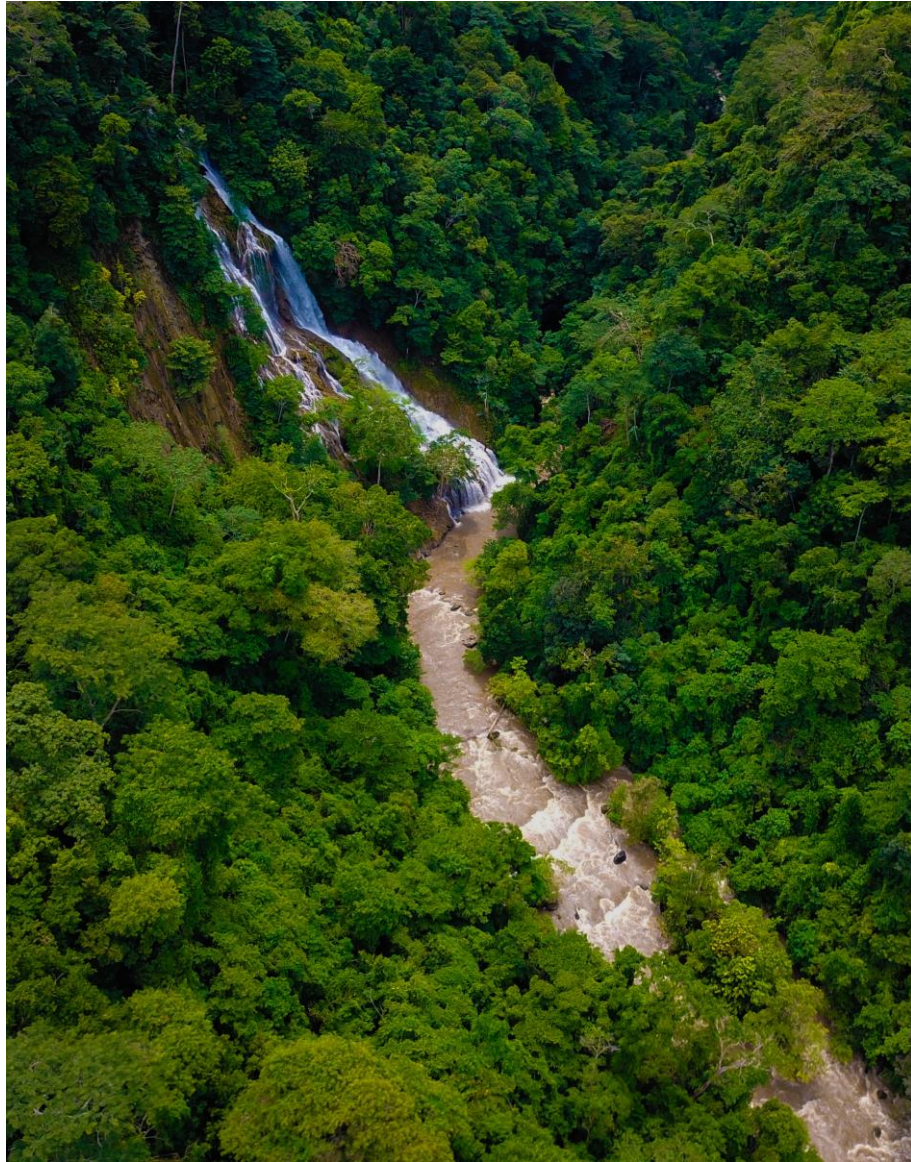


Merawat peradaban di berbagai tapak, geliatnya
berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang
memeratakan kesejahteraan antar wilayah



L a p o r a n K i n e r j a 2 0 1 9
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Objek wisata alam Air Terjun Lapopu yang terletak di Resort Waimanu, Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti, Pulau Sumba. Foto oleh Dwi Putro Notonegoro

L A P O R A N K I N E R J A

TAHUN 2019



K E M E N T E R I A N L I N G K U N G A N H I D U P D A N K E H U T A N A N

L A P O R A N K I N E R J A 2 0 1 9

K E M E N T E R I A N L I N G K U N G A N H I D U P D A N K E H U T A N A N

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN : 978-602-51606-8-4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut yang telah menyumbangkan foto-foto untuk menghiasi Laporan Kinerja ini. Mereka adalah (diurut sesuai abjad):

Abdul Kholik (Biro Perencanaan), Aisha Kemala (Biro Perencanaan), Akhmad David Kurnia Putra (BTN Aketajawe Lolobata), Amaliah Kurniasih (Biro Perencanaan), Arfan Adhi Kurniawan (Biro Perencanaan), Asri (BTN Taka Bonerate), Chaeril Eril (BTN Bantimurung Bulusaraung), Chris Awang (BBTN Lore Lindu), Djanuar Arifin (Dit.PPKPL), Dian Armayanti (KPHP Unit VI), Dwi Putro Notonegoro (BTN Matalawa), Fajrul Barokah (Setditjen PSKL), Feby Fajrin (Biro Perencanaan), Hendrawan (BTN Wakatobi), Indra Pradana (BTN Bantimurung Bulusaraung), Ineke Tya Claudya S. P. (Biro Perencanaan), Intan Widhiati (Daops Tinanggea), Iskandar (Setditjen KSDAE), Marwedhi Nurratyo (Biro Perencanaan), Mahardhika Cahaya Utama (Biro Perencanaan), Mugi Restunaesha (Biro Perencanaan), Pramono Susetyo (Dit. PPKPL), Raden Firman Santoso (Biro Perencanaan), Samsir (Daops Tinanggea), Saud Oloan Simamora (BTN Kelimutu), Taufan Kharis (BKSDA Sumatera Selatan), Triandu (Biro Perencanaan).

Foto sampul depan dan belakang adalah foto yang diambil dari Air Terjun Bantimurung yang terletak di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Air terjun yang ramai dikunjungi wisatawan ini diabadikan oleh Indra Pradana, BTN Bantimurung Bulusaraung.

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:



<https://bit.ly/LKJ-KLHK-2019>

©copyright Biro Perencanaan 2020



KELOLA DI BATAS NEGERI NUSA CENDANA

Satu sungai, satu perencanaan, satu pengelolaan terpadu, ikhtiar tiada henti di gugusan Nusa Tenggara Timur. Rupabumi lanskap Timor yang ditopang Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina. Lahan budidaya masyarakat bergantung pada aliran sungai yang menjalar di seujur daerah aliran sungai ini. Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri

----- Dikutip dari Buku “**DETAH TAPAK RENJANA KINERJA**” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan -----

DAFTAR ISTILAH

A

ASN: Aparatur Sipil Negara

B

B3: Bahan Beracun dan Berbahaya

BBKSDA: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

BLI: Badan Litbang dan Inovasi

BLU: Badan Layanan Umum

BOD: *Biochemical Oxygen Demand*

BP2SDM: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPS: Badan Pusat Statistik

BTN: Balai Taman Nasional

C

CA: Cagar Alam

D

Daops: Daerah Operasional

Dalkalhutla: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DAS: Daerah Aliran Sungai

Ditjen: Direktorat Jenderal

DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta

G

Gakkum: Penegakan Hukum

H

Ha: Hektar

HA: Hutan Adat

HD: Hutan Desa

HHBK: Hasil Hutan Bukan Kayu

HKm: Hutan Kemasyarakatan

HTR: Hutan Tanaman Rakyat

I

IDR: Indonesian Rupiah

IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU: Indikator Kinerja Utama

IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPHPS: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

IUCN: *International Union for Conservation of Nature*

IUPHHK-HA: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam

IUPHHK-HTR: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan

Tanaman Rakyat

J

Jabar: Jawa Barat

Jateng: Jawa Tengah

Jatim: Jawa Timur

K

Kab: Kabupaten

Kaltara: Kalimantan Utara

Kalteng: Kalimantan Tengah

Kaltim: Kalimantan Timur

Karhutla: Kebakaran Hutan dan Lahan

KEE: Kawasan Ekosistem Esensial

Kepri: Kepulauan Riau

Kg: Kilo gram

KK: Kepala Keluarga

KLHK: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPH: Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPHL: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

KPHP: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

KSDAE: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KTH: Kelompok Tani Hutan

KUMHAM: Hukum dan Hak Asasi Manusia

KUPS: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

L

LHK: Lingkungan Hidup dan Kehutanan

M

m³ : meter kubik

Malut: Maluku Utara

MAP: Mata Anggaran Penerimaan

Mdpl : Meter di atas Permukaan Laut

METT: *Management Effectiveness Tracking Tools*

MPA: Masyarakat Peduli Api

DAFTAR ISTILAH

N

NASA: *National Aeronautics and Space Administration*
No: Nomor
NOAA: *National Oceanic and Atmospheric Administration*
NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
NTB: Nusa Tenggara Barat
NTT: Nusa Tenggara Timur
Nusra: Nusa Tenggara

P

Pabarat: Papua Barat
PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum
PDASHL: Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
PDB: Produk Domestik Bruto
Perpres: Peraturan Presiden
PHPL: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PKTL: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PN: Prioritas Nasional
PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS: Pegawai Negeri Sipil
POLHUT: Polisi Kehutanan Indonesia
Polri: Polisi Republik Indonesia
Polsek: Kepolisian Sektor
PP: Peraturan Pemerintah
PPI: Pengendalian Perubahan Iklim
PPKL: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PS: Perhutanan Sosial
PSKL: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSLB3: Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun

R

Renja: Rencana Kerja
Renstra: Rencana Strategis
RHL: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKP: Rencana Kerja Pemerintah
Rp: Rupiah
RPP: Rancangan Peraturan Pemerintah
RUP: Rencana Umum Pengadaan

S

s.d: Sampai dengan
Sarpras: Sarana Prasarana
Satgas: Satuan Tugas
SDA: Sumber Daya Alam
SDM: Sumber Daya Manusia

Setjen: Sekretariat Jenderal
Setditjen: Sekretariat Direktorat Jenderal
SK: Surat Keputusan
SM: Suaka Margasatwa
SMART: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
SPTN: Seksi Pengelolaan Taman Nasional
SRN: Sistem Registri Nasional
SS1: Sasaran Strategis 1
SS2 : Sasaran Strategis 2
SS3 : Sasaran Strategis 3
Sulteng: Sulawesi Tengah
Sultra: Sulawesi Tenggara
Sulut: Sulawesi Utara
Sumbar: Sumatera Barat
Sumsel: Sumatera Selatan
Sumut: Sumatera Utara

T

TA: Tahun Anggaran
TB: Taman Buru
Th: Tahun
Tipihut: Tindak Pidana Kehutanan
TN: Taman Nasional
TNBTS: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
TNGC: Taman Nasional Gunung Ciremai
TNI: Tentara Nasional Indonesia
TORA: Tanah Objek Reforma Agraria
TPHL: Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya
TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka
TSL: Tumbuhan dan Satwa Liar
TWA: Taman Wisata Alam

U

UPT: Unit Pelaksana Teknis
USA: *United State of America*
USD: *United State Dollar*
UU: Undang-Undang

W

Wisman: Wisatawan Mancanegara
Wisnu: Wisatawan Nusantara

Y

YOY: *Year over year*

LINGKUNGAN HIDUP DAN 2015 -

0,99 juta ha

Penghutan kembali kawasan hutan dan lahan terdegradasi

0,44 juta ha per tahun
Laju penyusutan hutan.

35.743 unit

Jumlah bangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk DAM Penahan, DAM pengendali dan pengendali jurang



3,48 juta ha

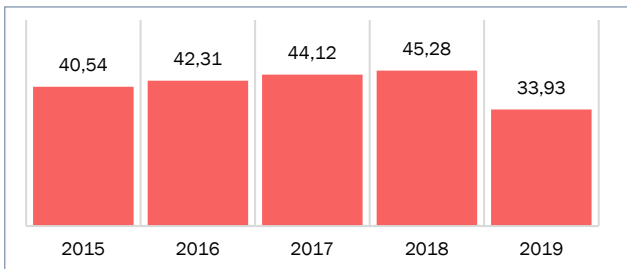
Lahan gambut yang dibasahi kembali di areal konsesi (hutan tanaman industri dan perkebunan) dan lahan milik masyarakat

3.619 izin

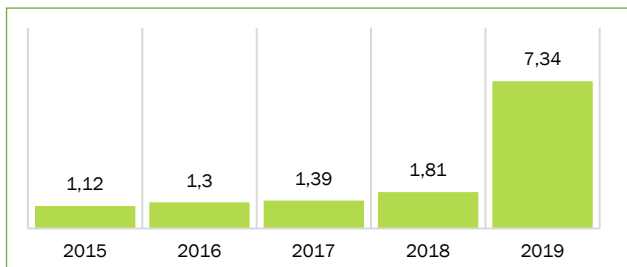
Jumlah izin yang diawasi untuk mengurangi beban lingkungan hidup

546 perusahaan

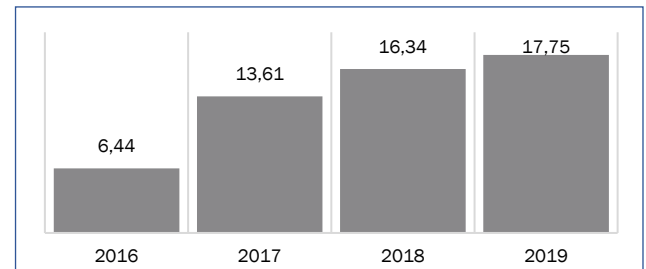
Jumlah perusahaan yang dikenakan sanksi administrasi



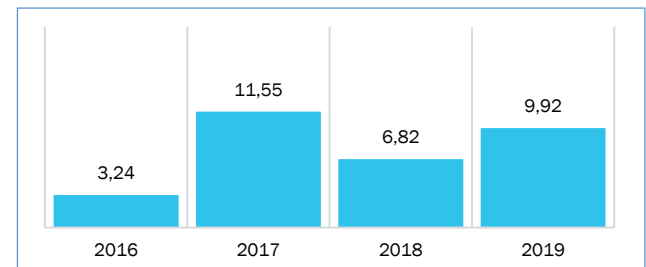
Penanganan Sampah (Juta Ton)



Pengurangan Sampah (Juta Ton)



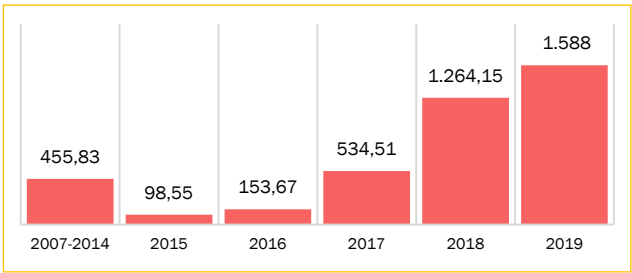
Penurunan Limbah B3 (Juta Ton)



Penurunan Limbah Padat Non B3 (Juta Ton)

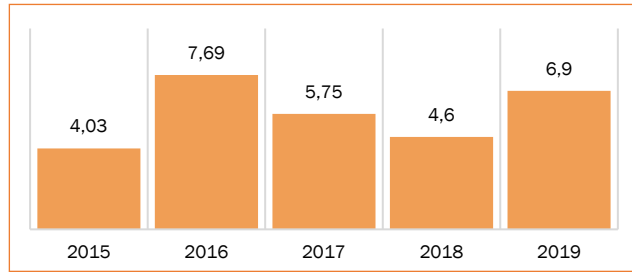
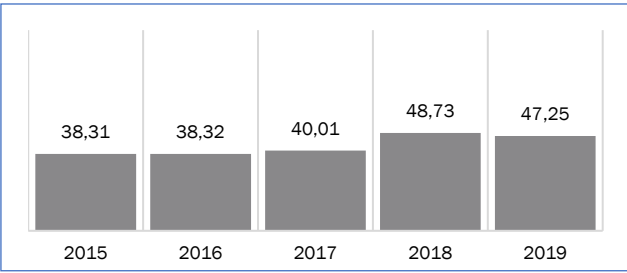
KEHUTANAN DALAM ANGKA - 2019

Potensi sumberdaya hutan yang semakin dapat diaktualisasikan untuk mendorong pembangunan wilayah



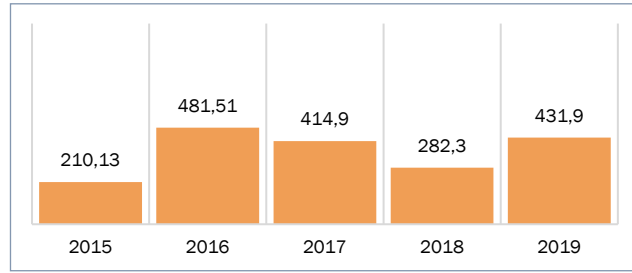
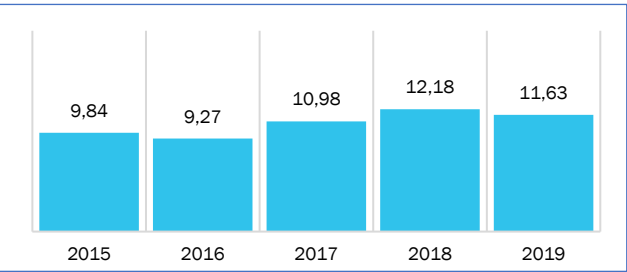
Hutan Sosial
(Ribu ha)

Produksi Kayu
Bulat
(Juta M3)



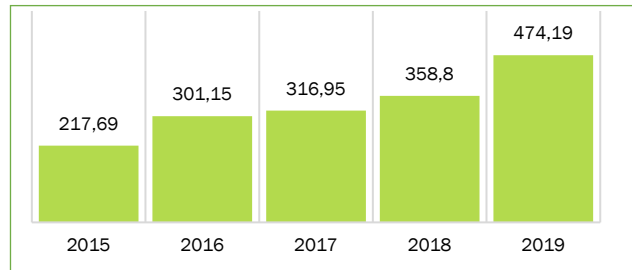
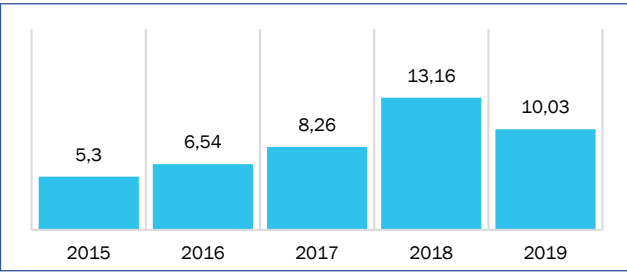
Wisatawan
Nusantara
(Juta Orang)

Ekspor Kayu
Olahan
(US\$ Miliar)



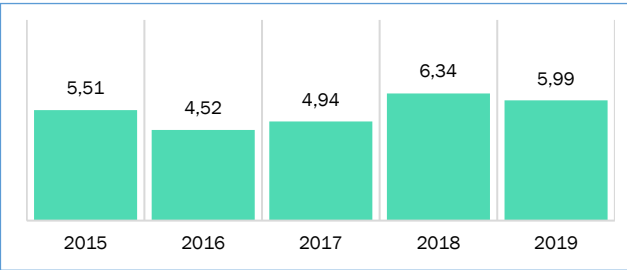
Wisatawan
Mancanegara
(Ribu Orang)

Ekspor TSL
(Rp. Triliun)



Produksi HHBK
(Ribu Ton)

PNBP
(Rp. Triliun)



PENGANTAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Detak dari tapak hutan dan lingkungan di Tahun 2019 sebagai tahun penghujung Kabinet Kerja semakin memberi keyakinan bahwa upaya perubahan paradigma dalam menata kerja birokrasi Kementerian ini menjadi berafirmasi terhadap kepentingan masyarakat semakin menunjukkan hasil yang nyata. Cuplikan kisah dan data tersebut kami hantarkan kepada pembaca sekalian.

Hutan Sosial sebagai program unggulan Kementerian ini dalam mengangkat harkat dan martabat para petani dengan menyediakan akses kelola pada kawasan hutan menunjukkan percepatan capaian yang semakin cergas. Luas akses hutan sosial yang diterbitkan izin mencapai 1,58 juta hektare dari target 1 juta hektare. Dengan luas tersebut, rata-rata setiap bulan terbit izin hutan sosial seluas 132,41 ribu hektare per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yakni di tahun 2018 dimana laju terbitnya izin hutan sosial sebesar 105,30 ribu hektare per bulan. Secara akumulatif, hutan sosial yang telah diterbitkan izin aksesnya dari 2015 sampai dengan akhir 2019 mencapai 3,59 juta hektare dan dikelola oleh 712.560 kepala keluarga. Legalitas pengelolaan hutan oleh masyarakat ini menjadi penting sebagai katalisator akselerasi pertumbuhan perekonomian daerah, ditandai dengan semakin merebaknya sentra-sentra perekonomian lokal baru yang mengusahakan hasil hutan dan jasa lingkungan. Komoditas bermunculan mulai dari kopi dan madu di Hutan Desa Tibussan hingga biogas yang dimanfaatkan untuk memasak di Hutan Nagari Jorong Simancuang di Sumatera Barat

Peluh dan keringat para penjaga hutan konservasi dalam mengelola kawasannya juga patut kita apresiasi. Efektivitas pengelolaan terus menunjukkan grafik yang meningkat, dimana pada tahun 2019 ini 100 unit kawasan konservasi

dinyatakan efektif dalam melakukan pengelolaannya, sehingga secara kumulatif 255 unit kawasan konservasi memperoleh nilai pada kategori efektif (nilai METT lebih dari 70%). Angka tersebut diamini dengan guliran ekonomi yang semakin menunjukkan peningkatan.





Sebuah Jip melaju di tanah berpasir di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tamadun lanskap vulkanik di bagian timur Jawa ini menjadi magnet wisatawan dari seluruh dunia. Kendaraan jip merupakan satu-satunya kendaraan yang menjadi sarana angkut wisatawan menaklukkan tanjakan dan lautan pasir. Setiap harinya 600 jip lalu lalang di kawasan prioritas pariwisata nasional ini, mengantar wisatawan, menjemput rupiah. Foto oleh Aisha Kemala Wijayanti. Sedangkan foto halaman sebelumnya, kaum perempuan menanam padi di pesawahan yang menghampar dilebah subur Simancuang. Hutan Nagari Simancuang menyokong pasokan air sepanjang tahun untuk kebutuhan pertanian. Selain itu masyarakat memanfaatkan limbah ternak sapi untuk dijadikan biogas. Langkah ini mengurangi kebutuhan kayu bakar yang di ambil dari alam. Foto oleh Raden Firman Santoso.



Peningkatan wisatawan di kawasan konservasi ternyata tidak serta merta meningkatkan tekanan terhadap kawasan. Mari kita telisik data di TN Bromo Tengger Semeru. Taman nasional mencatat jumlah pengunjung lokal maupun mancanegara secara umum meningkat pada 2016 sampai 2019. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga mengurangi ketergantungan warga desa penyangga kawasan konservasi TN Bromo Tengger Semeru. Data luas kawasan yang dirambah menunjukkan tren menurun mulai dari 2014 hingga 2018. Bahkan pada 2017 perambahan nihil. Manisnya rupiah juga mengalir hingga setiap insan yang membuka jasa dan usaha di kawasan konservasi. Tengok saja Taman Nasional Kepulauan Seribu yang mampu menggulirkan Rp 400 miliar bagi perekonomian lokal di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Determinasi dan tekad kuat dalam melakukan perbaikan tata kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mulai membersihkan harapan dan kepercayaan publik. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, serapan investasi dalam negeri di bidang LHK menunjukkan tren yang meningkat. Sebagai perbandingan, angka penanaman modal dalam negeri pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,053 triliun meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi Rp. 9,36 triliun pada 2019. di bidang Industri Kehutanan juga menunjukkan peningkatan investasi dari Rp. 1,53 triliun pada 2018 menjadi Rp. 1,58 triliun di 2019. Penanaman modal asing merespon kelesuan ekonomi global tercatat menurun dari US\$ 43,21 juta pada tahun 2018 menjadi US\$ 36,3 juta pada 2019.

Dalam menopang devisa negara, selain pariwisata alam di kawasan konservasi, ekspor kayu olahan juga menjadi salah satu andalan sektor kehutanan.

Pada tahun 2019 nilainya mencapai US\$ 11,64 miliar (sedikit mengalami penurunan 4,04% dibandingkan tahun 2018 sebagai akibat melambatnya perekonomian global dan perang dagang AS-RRT). Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar juga mengalami penurunan. Angka pada tahun 2019 sebesar Rp. 10,03 triliun, lebih rendah dibanding angka tahun 2018 yang angkanya sebesar Rp. 13,16 triliun

Kontribusi sub sektor kehutanan pada produk domestik bruto dari wilayah hulu pada tahun 2019 sebesar Rp. 104,11 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.97,38 triliun. Secara umum tren PDB sub sektor kehutanan terus meningkat dari tahun 2015. Pada tahun 2015 sebesar Rp.82,30 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 87,54 triliun dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 91,56 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak tahun 2019 tercatat sebesar Rp.5,99 triliun, dari target sebesar Rp.3,9 triliun turun dari capaian tahun 2018 sebesar 6,34 triliun. Besarnya angka pendapatan negara bukan pajak ini memberi kontribusi PNBPK KLHK sebesar 1,47% pada PNBPK nasional yang sebesar Rp. 405 triliun.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, upaya penegakan hukum LHK menorehkan capaian-capaian yang memberikan efek gentar (*deterrence effects*) bagi para pelaku perusakan lingkungan dan kehutanan. Pada tahun 2015-2019 telah dilakukan 1.180 operasi pengamanan hutan, menangani 3.611 pengaduan, mengawasi 4.367 izin usaha, memberikan 1.098 sanksi administrasi, termasuk di dalamnya adalah mendorong 858 hakim bersertifikasi lingkungan. Pertama kali dalam sejarah, penyelesaian sengketa lingkungan hidup menghasilkan 11 putusan inkrah dengan total vonis ganti rugi perdata Rp.19,5 triliun, putusan perdata terbesar yang pernah ada di Indonesia.



Areal hutan lindung bekas tambang timah di Pulau Belitung ini dipulihkan dan diberikan izin hutan sosial yang kemudian menghidupi masyarakat sekitar dengan berkebun. Areal hutan sosial ini dikelola oleh Hkm Juru Seberang, sekelompok pemuda dari Desa Juru Seberang Belitung yang sadar akan masa depan negeri Laskar Pelangi ini tidak akan secerah kilatan bijih timah sehingga bertekad mereklamasi lubang-lubang bekas tambang menjadi objek wisata baru dan kebun buah. Kebun buah seluas 160 hektare ini fokus budidaya tanaman buah manga, lengkeng, sirsak, sukun dan jambu mete. Foto oleh Marwedhi Nurratyo.

Foto halaman berikutnya, masyarakat Tibussan umumnya memanfaatkan Hutan Desa Tibussan dengan menanam kopi. Menjelang musim panen, bunga-bunga kopi menyediakan pakan bagi lebah. Setali dua ikat, selain memetik biji kopi, Masri berburu madu. Masri mengolah madu secara sederhana, hasilnya ia jual seharga dua ratus ribu rupiah per botol. Foto oleh Triandu

Sejurus dengan afirmasi kehadiran negara di tapak hutan, upaya perbaikan lingkungan juga terus digelorakan dengan mengurangi beban-beban lingkungan. Upaya-upayanya terangkai dalam program pengurangan timbulan sampah dan penanganan sampah, pembasahan areal gambut, pemulihan kerusakan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

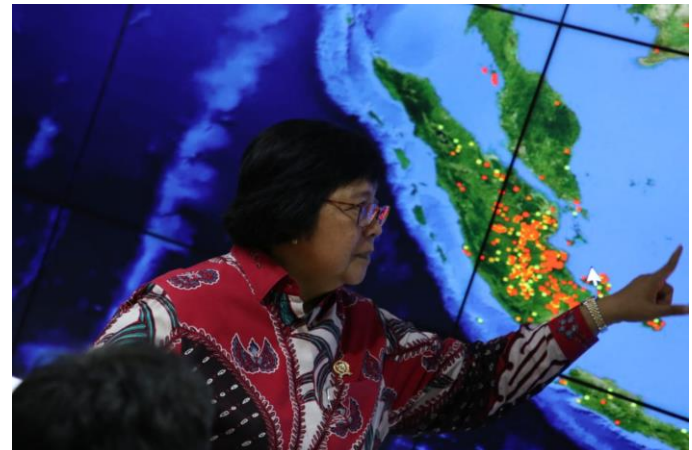
Perubahan budaya dalam pengelolaan sampah menempatkan paradigma *circular economy* sebagai pendekatan yang menguntungkan banyak masyarakat dalam penanganan sampah. Beriringan dengan peningkatan jumlah nasabah bank sampah sebesar 7% dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 40 juta per bulan. Pemanfaatan sampah menjadi gas metan sebesar 2 mega watt di Tempat Pemrosesan Akhir Benowo mengalirkan pemasukan sebesar Rp. 1,2 miliar per bulan.

Keceriaan dan kegembiraan masyarakat menjadi kunci bagi kami dalam menilai keberhasilan sebuah program. Keberhasilan memulihkan lahan gambut tak hanya dilihat dari luasan pembasahan. Namun juga hadirnya kembali perikehidupan masyarakat di tengah lahan gambut yang kembali basah. Kami mencupliknya di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Lunang III, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebuah gambaran anak-anak yang sedang mengail ikan di lahan gambut sembari menghabiskan waktu luangnya. Meski begitu, banyaknya sekat kanal yang dibangun dan luasan pembasahan tetap kami catat sebagai raihan. Luas pembasahan lahan gambut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di laksanakan di lahan masyarakat selama tahun 2015 - 2019 seluas 9.950 ha. Pembasahan lebih luas didorong oleh Kementerian pada pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan lewat pengaturan dan pemantauan tinggi muka air. Hasilnya seluas 2,226 juta ha telah dibasahi kembali di areal konsesi hutan tanaman industri. Sedangkan untuk konsesi perkebunan luasnya mencapai 1,247 juta ha.

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu fokus utama program KLHK pada tahun 2019 mengingat berdasarkan prakiraan dari BMKG, musim kemarau pada tahun 2019 akan lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Bahaya kebakaran hutan dan lahan ditargetkan dapat dilindungi pada 7 (tujuh) provinsi rawan karhutla. Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran sebesar 74,71% dari target 100%. Luas kebakaran hutan dan lahan berdasarkan sistem monitoring karhutla SiPongi hingga bulan Desember 2019 secara nasional adalah sebesar 1.592.010 hektare. Sementara luas kebakaran pada 7 provinsi rawan kebakaran sebesar 1.130.870 hektar. Pencegahan melalui patrol terpadu dilakukan personil Manggala Agni bersama TNI/POLRI, dan dilaksanakan di 1.082 desa, melebihi target 746 desa. Operasi pemadaman juga dilakukan melalui pemadaman darat maupun pemadaman udara (*water bombing*).

Upaya penegakan hukum bidang karhutla sepanjang tahun 2019 juga memegang peranan penting dimana 71 izin dan 26 perusahaan dilakukan pengawasan. 5 sanksi administrasi diterbitkan, serta 1 sanksi pidana dikenakan.





Keceriaan anak-anak bermain di saluran air di Nagari Jorong Simancuang, Sumatera Barat menandakan lingkungan yang aman. Jauh dari riuhnya zaman, anak-anak Simancuang lebih dekat dengan alam lingkungannya. Udara bersih, air murni, hutan hijau menciptakan lingkungan yang sehat bagi mereka. Foto oleh Raden Firman Santoso.

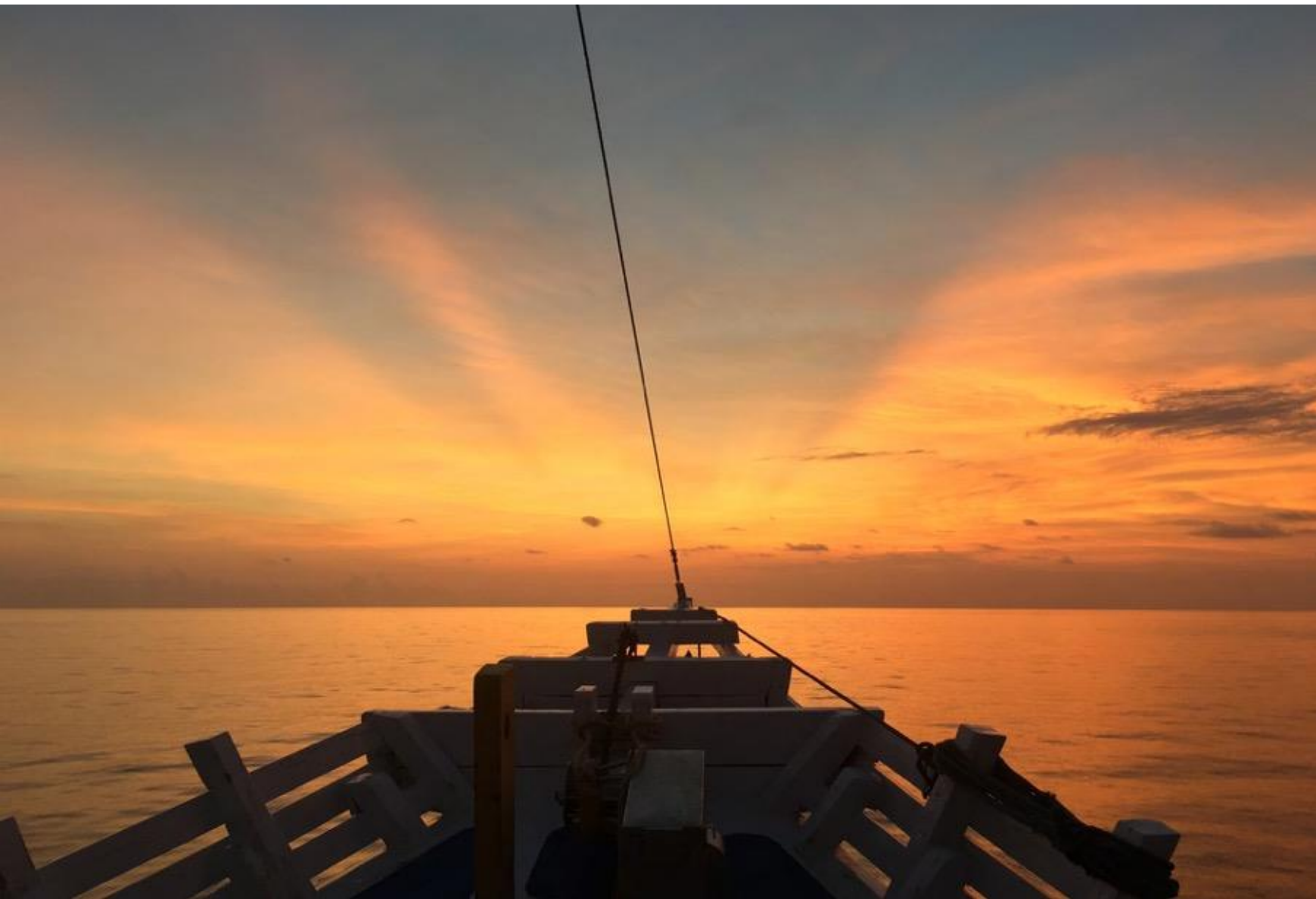
Foto halaman berikutnya oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri dan Arfan Adhi Kurniawan.

Setelah kita semua menyelesaikan tahun 2019 dengan segala karsa dan cipta dalam usaha memperbaiki lingkungan dan hutan, yang terpenting adalah artikulasi konkrit bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seusai dengan Rencana Strategis 2015-2019, milestone pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 adalah entitas pembangunan LHK sudah dapat diartikulasikan dalam dukungan pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan wilayah). Melihat begitu gegap gempitanya masyarakat menyambut dengan gembira program-program KLHK, serta dari semakin meningkatnya indikator makro perekonomian, dapat disimpulkan bahwa milestone terakhir dalam rencana lima tahunan ini telah dapat kita hantarkan. Satu hal yang tidak kalah penting, mengelola dan memperbaiki tapak hutan dan lingkungan adalah investasi bagi generasi penerus bangsa.

Di bagian akhir ini izinkan kami menutup kisah bahwa peluh yang mengalir untuk memperbaiki lingkungan dan hutan, suatu saat akan menjadi penyangga kehidupan anak-anak Suku Anak Dalam di kawasan TN Bukit Duabelas, atau sebagai ranah bermain bagi Zaini dan Zainuri si kembar yang gemar memancing di sekat kanal di Nagari Sambungo, Kabupaten Pesisir Selatan atau sebagai masa depan bagi Maya dan Trisa yang selalu membantu orang tuanya bekerja di persemaian permanen Fatukoa, DAS Benain-Noelmina. Disitulah KLHK hendak berperan: mengelola tapak, merawat peradaban.

Jakarta, Februari 2020.





Menyambut petang di lanskap perairan yang bergelimang keanekaragaman hayati menopang kehidupan manusia di kepulauan Wakatobi. Foto oleh Chris Awang.

KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS 1

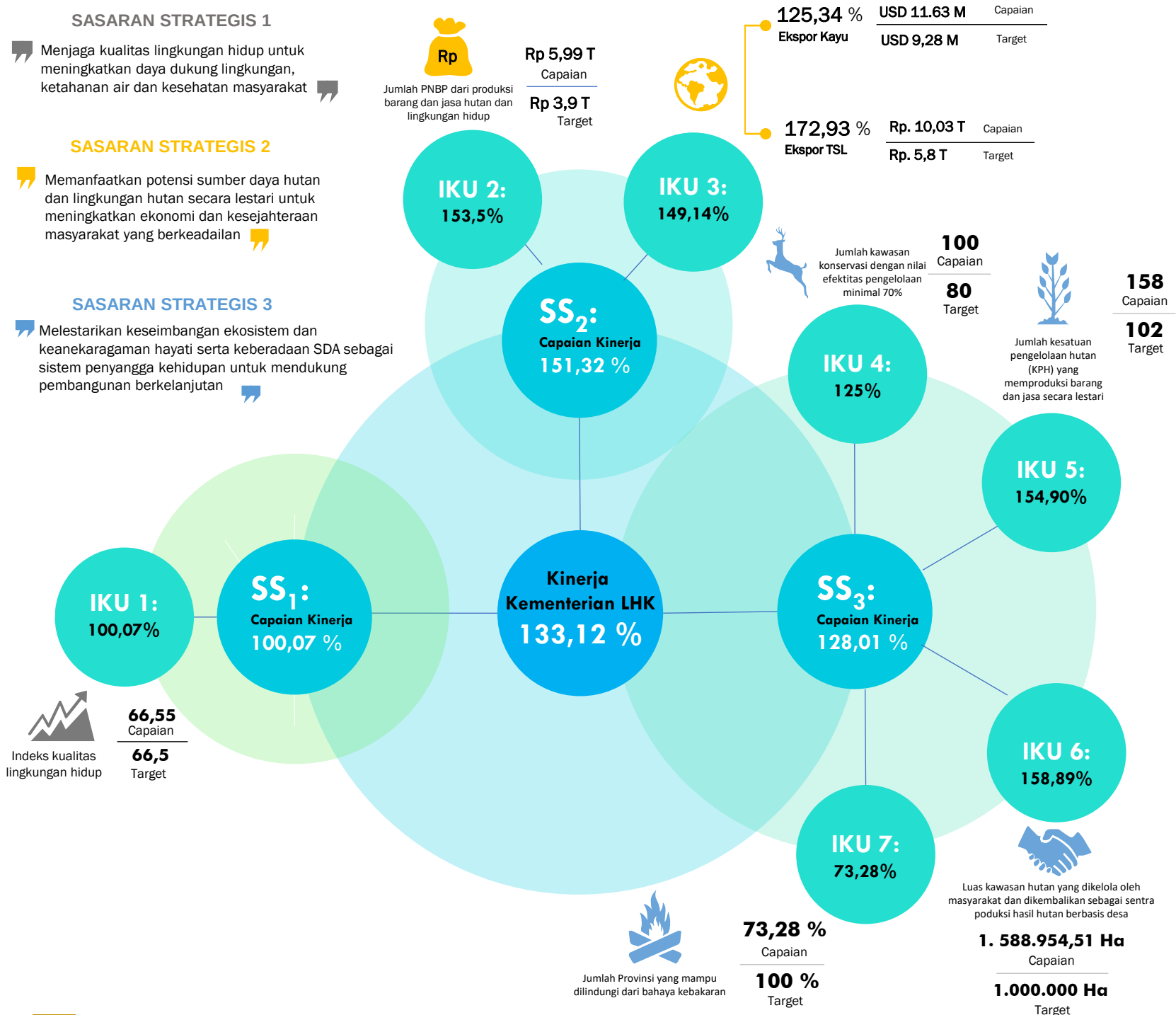
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS 2

Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 3

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan



PENILAIAN TUJUAN

Merawat peradaban di berbagai tapak, geliatnya berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang pemeratakan kesejahteraan antar wilayah.

TUJUAN	ENTITAS DAN MILESTONE MENUJU PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN	STATUS CAPAIAN TERHADAP PEMBANGUNAN
Entitas pembangunan LHK sudah dapat diartikulasikan dalam mendukung pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan wilayah)	TAMAN NASIONAL Seluruh taman nasional telah dikelola dan mampu mendukung menjaga peradaban. Sebagai besar telah diyakini mampu mendorong geliat ekonomi wilayah melalui produksi barang dan jasa berupa pariwisata dan hasil hutan bukan kayu.	☆☆☆☆☆
	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Seluruh kesatuan pengelolaan hutan telah diintervensi dan dikelola. Mengurangi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar telah didorong untuk produksi barang dan jasa, dan diyakini mampu mendorong geliat ekonomi wilayah melalui produksi barang dan jasa berupa pariwisata dan hasil hutan bukan kayu.	☆☆☆
	DAERAH ALIRAN SUNGAI : Seluruh daerah aliran sungai prioritas telah diintervensi, dan sebagian besar diyakini mampu menjaga manfaat ke pertanian, pemukiman dan energi listrik. Meski demikian, di beberapa daerah aliran sungai masih ditemui bencana hidrologi.	☆☆
	HUTAN SOSIAL Seluruh hutan sosial telah diintervensi dan dikelola. Sebagai besar telah didorong untuk produksi barang dan jasa, mengurangi konflik tenurial dan diyakini mampu mendorong geliat ekonomi wilayah melalui produksi barang dan jasa berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, tanaman pangan di bawah tegakan, dan pariwisata.	☆☆☆☆
	KABUPATEN/KOTA Sebagian kabupaten/kota telah diintervensi untuk mendorong <i>circular economy</i> dalam pengelolaan sampah dan limbah. Namun demikian, hanya sebagian kecil kabupaten/kota yang telah mengimplementasikannya, dan telah dapat diyakini mampu mendukung pembangunan nasional	☆☆

Catatan :
Penilaian pada skala 1-5 yang ditunjukkan dengan tanda bintang (☆). Tanda bintang 1 menunjukkan status di entitas kurang berhasil, dan tanda bintang 5 menunjukkan sangat berhasil.



Kapal-kapal semakin banyak seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung di Labuan Bajo. Selain digunakan untuk berlayar menikmati pulau-pulau sekitar, wisatawan juga menjadikan kapal ini sebagai penginapan apung. Seiring dengan banyaknya wisatanya masyarakat Labuan Bajo semakin terlibat dalam kegiatan pariwisata. Foto oleh Mahardhika Cahaya Utama.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2020

Plt. Inspektur Jenderal
Kementerian LH dan Kehutanan



Ir. Laksmi Wiyanti, M.CP
NIP 19690206 199503 2 001



Cekakak-pita biasa / Common Paradise-kingfisher atau nama latin *Tanysiptera galatea* yang terabadikan di dekat sarangnya. Burung yang mempunyai warna bulu cantik ini dapat di jumpai di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata tepatnya di Resort Ake Jawi. Foto oleh Akhmad David Kurnia Putra.

DAFTAR ISI

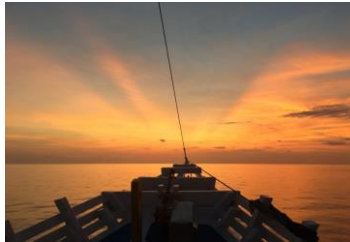
01

Kata Pengantar **vii**



02

Kinerja
KLHK 2019 **xv**



03

Pernyataan
Telah Direviu **xviii**



04

Pendahuluan **1**



05

Perencanaan
Kinerja **7**



06

Akuntabilitas
Kinerja **11**



07

Penutup **220**





Suasana matahari terbenam di atas pemukiman Suku Bajo yang mengapung di hamparan laut di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Eksotika Taman Nasional Wakatobi. Foto oleh Amaliah Kurniasih

PENDAHULUAN

1

PENDAHULUAN

Kementerian LHK mendapatkan pagu APBN sebesar Rp 9.076.472.682.000 pada tahun 2019 atau naik sekitar Rp1 triliun dari tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan anggaran tersebut selain untuk pencapaian program nasional, juga untuk memprioritaskan program-program kerakyatan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, mitigasi bencana, serta upaya menekan laju pemanasan global. Kementerian LHK beruaha memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, yang dirumuskan dalam tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019. Melalui tiga dari lima Prioritas Nasional Pemerintah, yaitu: 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; dan 3) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Dalam program prioritas nasional yang pertama, KLHK ikut andil dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan Reforma Agraria serta pengelolaan sumberdaya alam melalui Perhutanan Sosial. KLHK juga turut memastikan terciptanya peningkatan kualitas lingkungan terhadap perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat. Pada program prioritas nasional yang kedua, KLHK mendukung peningkatan ekspor dan nilai tambah produk kehutanan antara lain peningkatan hasil, pengembangan industri pengolahan hasil, peningkatan mutu, sertifikasi dan standarisasi hasil, penguatan kelembagaan dan usaha kehutanan, hingga peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah kehutanan. KLHK juga memiliki tugas khusus dalam peningkatan nilai tambah jasa produktif melalui percepatan pengembangan tujuh kawasan pariwisata serta penguatan destinasi unggulan.

Dalam program prioritas nasional ketiga, KLHK ikut andil dalam peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air melalui pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem, ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air, serta peningkatan regulasi, kelembagaan dan kesadaran dalam pengelolaan air.



Wisatawan sedang mengabadikan momen di Pulau Padar Taman Nasional Komodo, dibantu oleh petugas yang sedang berjaga. Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri



Hal tersebut juga sebagai wujud peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan melalui pencegahan kerusakan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), penanggulangan kerusakan LH, rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA dan LH, hingga penguatan kelembagaan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum bidang SDA dan LH.

Pengukurannya mencakup 3 aspek, yakni (1) Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU); (2) Pengukuran Prioritas Nasional (PN); dan (3) Pengukuran Capaian Aksi Tematik yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

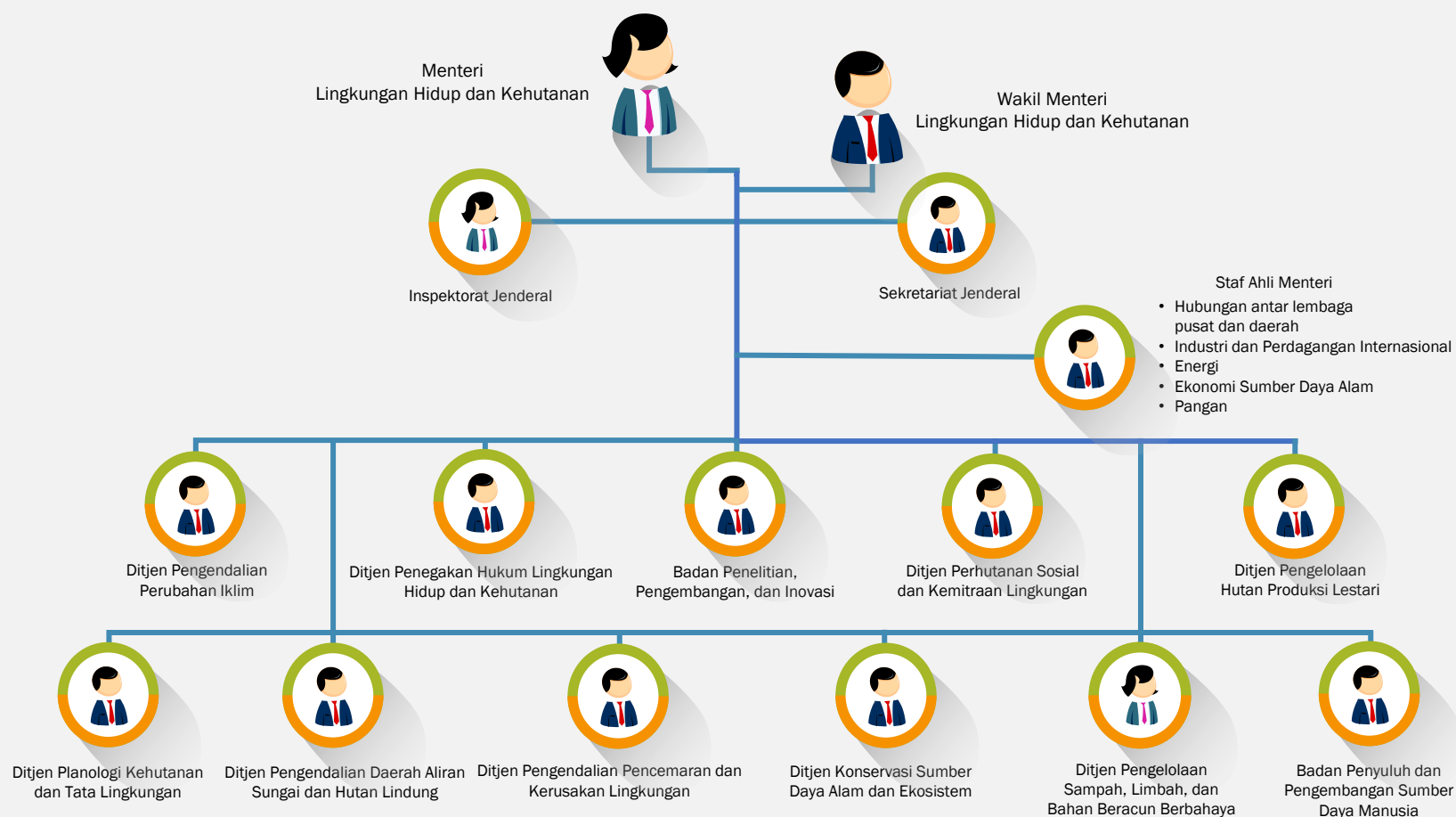
Pengukuran IKU didasarkan pada 7 indikator, yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Nilai ekspor hasil hutan; (4) Kawasan konservasi dengan METT (*management effectiveness tracking tools*); (5) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (6) Akses kelola hutan oleh masyarakat; dan (7) Tujuh provinsi dilindungi dari kebakaran.

Sasaran strategis tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya disetiap program yang relevan, sebagai sasaran program, sedemikian rupa sehingga seluruh program memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Seluruh kinerja dan sasaran strategis pembangunan LH dan Kehutanan pada akhirnya untuk melihat tujuan pembangunan hingga 2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, dimana pada tahun 2019 Presiden menetapkan Wakil Menteri LHK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 dalam menyelenggarakan tugasnya Kementerian LHK mempunyai tugas yang diemban dengan 10 fungsi. 13 program pembangunan disusun untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian LHK yang didukung oleh 16.206 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 13 unit Eselon I. Sebaran terbesar terdapat di Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 6.620 pegawai. Sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah ASN paling sedikit sebanyak 208 pegawai. Berdasarkan unit kerja, Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki unit kerja terbanyak dengan 80 unit kerja. Sedangkan Inspektorat Jenderal hanya memiliki 5 unit kerja.



PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KEMENTERIAN LHK

6 Unit Kerja Pusat	Ditjen. Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3	230
6 Unit Kerja Pusat	Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	252
5 Unit Kerja Pusat	Inspektorat Jenderal	208
5 Unit Kerja Pusat 5 UPT	Ditjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	326
6 Unit Kerja Pusat 5 UPT	Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim	452
5 Unit Kerja Pusat 5 UPT	Ditjen. Penegakan Hukum LHK	973
6 Unit Kerja Pusat 16 UPT	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	811
5 Unit Kerja Pusat 12 UPT	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	942
18 Unit Kerja Pusat	Sekretariat Jenderal	966
6 Unit Kerja Pusat 22 UPT	Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.315
5 Unit Kerja Pusat 15 UPT	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi LHK	1.454
6 Unit Kerja Pusat 36 UPT	Ditjen. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.657
6 Unit Kerja Pusat 74 UPT	Ditjen. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6.620

Total : 85 Unit Kerja Pusat 190 UPT 16.206 PNS



Upacara peringatan Hari Ulang tahun KORP RI, 29 November 2019 diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta upacara. Foto oleh Abdul Kholik



Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menyuguhkan keindahan pantai yang sangat eksotik. Pasir putihnya lembut, bibir pantainya memiliki panjang 7,2 km. Keindahan pantai ini mampu memikat para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke lokasi ini. Foto oleh Amaliah Kurniasih.

PERENCANAAN KINERJA

2

Panorama Danau Tiga Warna, Taman Nasional Kelimutu. Keindahannya mampu menarik wisatawan. Foto oleh Saud Oloan Simamora.

RENCANA STRATEGIS

2015-2019

Tujuan besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertuang pada Rencana Strategis tahun 2015-2019.

TUJUAN PEMBANGUNAN

“Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.”

MILESTONE PEMBANGUNAN LHK 2015 - 2019

2015

Reorganisasi selesai, internalisasi dan adaptasi system, persiapan akses kelola dan reforma agraria

2016

Perbaikan DAS dan peningkatan IKLH, intervensi KPH, sanctuary di 20 TN dan penyiapan modal sosial

2017

Peningkatan kualitas DAS, penurunan degradasi hutan, peningkatan produksi hutan, peningkatan IKLH, perbaikan akses kelola dan penurunan konflik.

2018

Entitas pembangunan LHK (TN, KPH, hutan social, Kab/Kota dan DAS) telah diyakini mampu meningkatkan produksi hasil hutan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan

2019

Entitas pembangunan LHK sudah dapat diartikulasikan dalam dukungan pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan wilayah)

RENCANA KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS 1

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
66,5-68,6

SASARAN STRATEGIS 2

Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp. 3,9 triliun

Ekspor kayu olahan
US\$ 9,28 miliar

Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar
Rp. 5,8 triliun

SASARAN STRATEGIS 3

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



Kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70
80 unit

Kesatuan pengelolaan hutan yang melakukan pengelolaan
102 unit

Izin Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
1.000.000 ha

Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang mampu dilindungi
7 provinsi



Perkampungan Suku Bajo yang terletak di Desa Mola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajo mendirikan rumah – rumahnya di atas hamparan laut yang luas. Foto oleh Hendrawan

AKUNTABILITAS KINERJA

3

Keindahan Pulau Tinabo mempunyai magnet besar untuk memanggil parawisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Taka Bonerate. Foto oleh Asri.



Penanaman mangrove bersama dengan Kelompok Pencinta Alam, Mahasiswa AKKP, Mahasiswa ITB, dan Masyarakat Desa Kabita. Penanaman ini dilakukan untuk memulihkan ekosistem mangrove yang ada di Desa Kabita, Taman Nasional Wakatobi. Foto oleh Hendrawan.

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

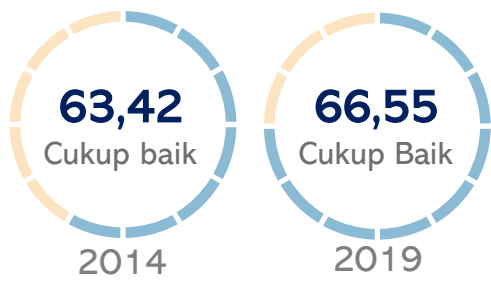
“ *Lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali. Berada pada toleransi perikehidupan manusia meski ditengah kebutuhan pembangunan nasional yang terus tumbuh.* ”



Hutan Nagari Jorong Simancuang, Sumatera Barat senantiasa memasok air di lahan-lahan pertanian di bawahnya. Sinergi di lembah subur ini telah menopang kehidupan masyarakat sekaligus memberi sumbangan global bagi perbaikan lingkungan hidup. Foto oleh Raden Firman Santoso.

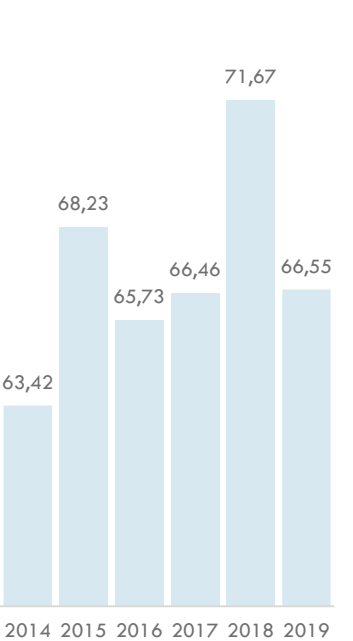
IKHTISAR KINERJA

Kualitas lingkungan hidup meningkat secara numerik dibanding 2014 dan memenuhi target pembangunan 2019 (atau sebesar 100,09%).

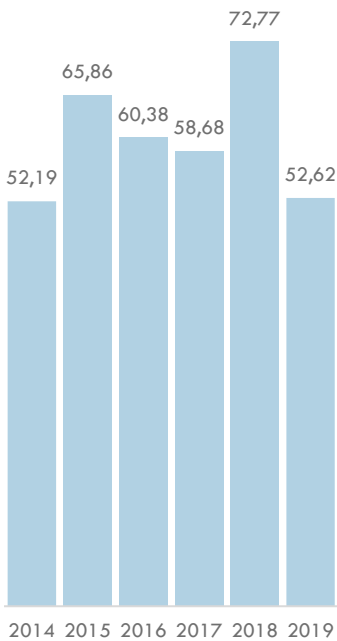


Rencana	66,5
Capaian	66,55
Kinerja 2019	100,09%
Y o Y (2018-2019)	▼ 7,14%
Capaian 2019 terhadap Renstra 2015-2019	100,09%

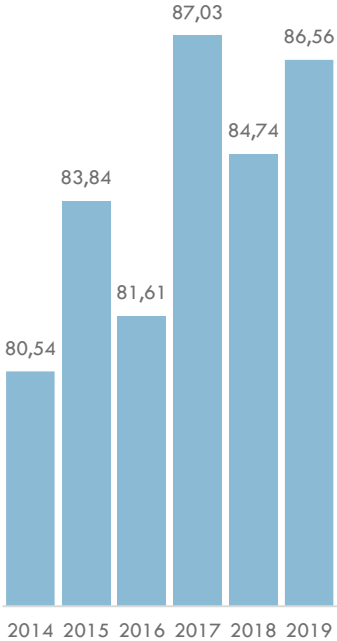
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



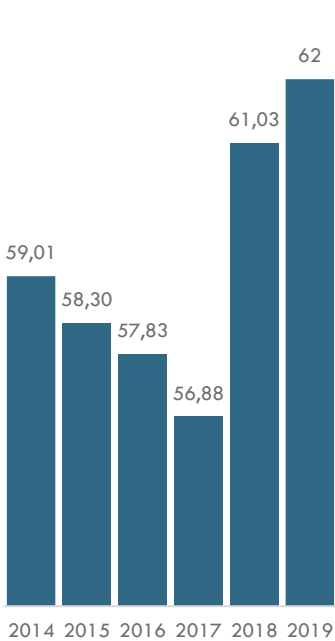
Indeks Kualitas Air



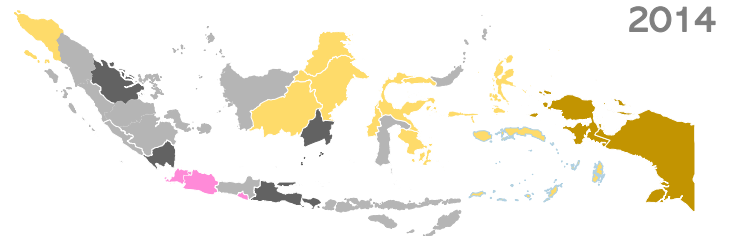
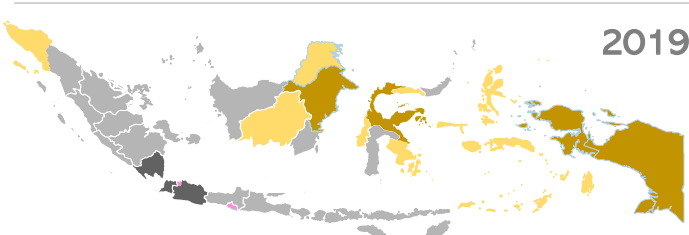
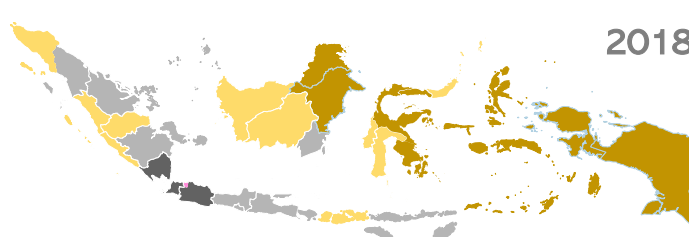
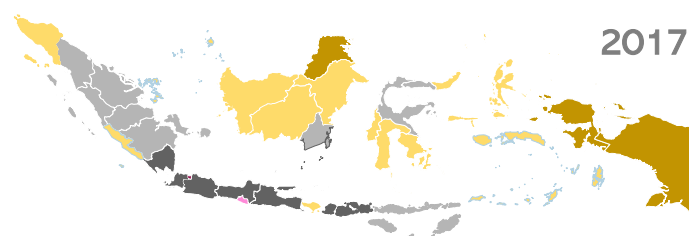
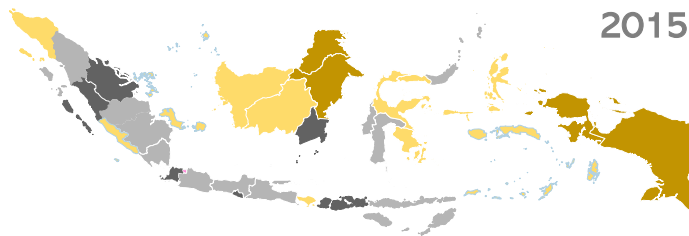
Indeks Kualitas Udara



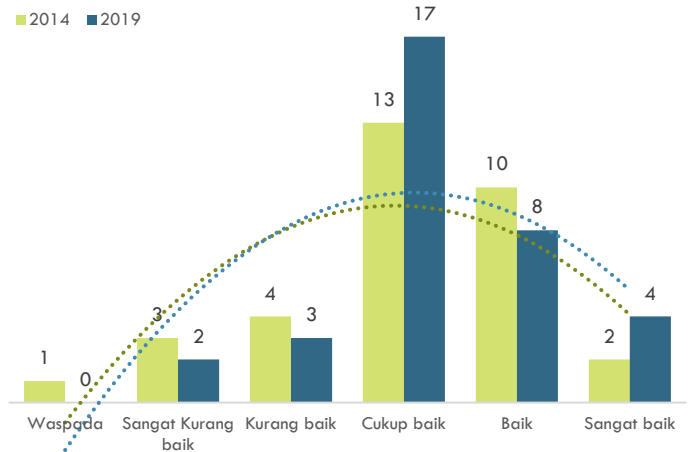
Indeks Tutupan Hutan dan Lahan



SEBARAN KATEGORI IKLH DI SETIAP PROVINSI 2014 - 2019

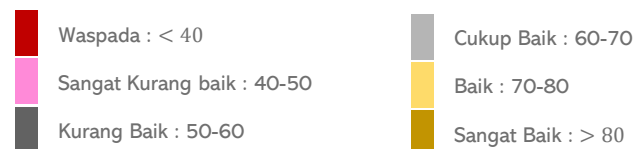


Kondisi lingkungan hidup di tingkat provinsi pada kategori waspada dan sangat kurang semakin mengecil. Berangsur membaik kategorinya pada selang cukup baik dan baik pada tahun 2019.



Catatan : Grafik di atas menunjukkan sebaran kategori IKLH Provinsi. Angka menunjukkan jumlah provinsi. Kalimantan Utara dimasukkan perhitungannya ke dalam provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014

Kategori IKLH



INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	72,60	74,83	73,55	77,70	79,36	76,12
2	Sumatera Utara	61,53	69,37	66,47	69,77	64,41	62,49
3	Riau	52,59	53,07	56,73	68,64	68,43	62,47
4	Kepulauan Riau	69,27	73,11	70,19	70,34	66,50	67,00
5	Jambi	62,04	61,85	64,01	64,98	71,00	68,06
6	Bengkulu	66,76	76,92	72,43	70,18	74,32	64,41
7	Sumatera Barat	68,91	59,07	60,06	68,16	78,69	69,64
8	Sumatera Selatan	61,62	69,06	67,27	69,18	68,11	61,41
9	Bangka Belitung	60,21	71,26	66,88	67,85	67,68	64,85
10	Lampung	56,42	63,04	60,34	59,72	59,89	57,37
11	Banten	43,67	55,36	60,00	51,58	57,00	51,09
12	DKI Jakarta	36,88	43,79	38,69	35,78	45,21	42,84
13	Jawa Barat	45,06	63,49	51,87	50,26	56,98	51,64
14	Jawa Tengah	60,63	60,78	58,75	58,15	68,27	60,97
15	DI Yogyakarta	49,53	50,99	51,37	49,80	62,98	49,24
16	Jawa Timur	56,48	62,67	58,98	57,46	67,08	60,25
17	Bali	59,81	73,71	72,59	70,11	66,62	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	69,39	58,82	56,53	56,99	75,16	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	62,98	63,79	59,23	61,92	69,01	69,67
20	Kalimantan Barat	68,31	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92
21	Kalimantan Selatan	57,51	57,47	59,07	69,38	68,78	61,94
22	Kalimantan Tengah	70,37	74,09	74,71	71,47	75,71	74,20
23	Kalimantan Timur	74,00	81,15	76,85	75,65	85,90	80,87
24	Kalimantan Utara				81,87	86,88	78,98
25	Sulawesi Selatan	64,07	67,01	70,54	73,24	74,83	67,61
26	Sulawesi Tenggara	72,14	75,18	75,24	70,86	83,17	72,03
27	Sulawesi Tengah	76,40	76,43	68,78	69,39	83,34	80,23
28	Sulawesi Barat	72,29	68,78	64,54	74,47	79,89	72,03
29	Gorontalo	75,52	71,08	69,30	67,46	84,09	74,97
30	Sulawesi Utara	65,69	66,27	67,07	70,81	74,95	65,15
31	Maluku	74,79	76,33	71,66	75,12	81,23	79,55
32	Maluku Utara	77,22	75,97	72,46	74,55	88,25	78,44
33	Papua Barat	84,51	82,33	83,01	85,69	91,50	83,96
34	Papua	80,65	81,01	81,35	81,47	83,88	81,79

INDEKS KUALITAS AIR

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	A c e h	54,57	71,32	70,36	80,00	75,71	60,56
2	S u m a t e r a U t a r a	56,67	76,00	75,43	78,33	63,06	51,11
3	R i a u	47,53	46,39	50,75	65,23	73,68	53,55
4	K e p u l a u a n R i a u	64,29	84,67	80,00	66,67	57,85	54,00
5	J a m b i	52,75	57,50	61,00	57,50	81,21	58,49
6	B e n g k u l u	62,67	88,33	80,97	80,80	82,08	47,64
7	S u m a t e r a B a r a t	53,71	31,04	40,00	64,56	83,98	53,19
8	S u m a t e r a S e l a t a n	66,19	88,67	84,05	77,62	88,15	64,45
9	B a n g k a B e l i t u n g	61,30	81,67	82,08	72,50	82,13	69,29
10	L a m p u n g	60,86	71,85	68,10	55,56	68,73	55,74
11	B a n t e n	42,86	72,75	80,00	35,98	67,32	43,11
12	D K I J a k a r t a	34,00	22,35	24,62	21,33	51,93	41,94
13	J a w a B a r a t	39,00	75,30	32,86	29,00	65,77	45,59
14	J a w a T e n g a h	51,09	47,45	46,73	45,43	77,77	51,64
15	D I Y o g y a k a r t a	39,00	21,84	26,97	20,19	81,63	35,37
16	J a w a T i m u r	49,11	48,25	40,08	37,08	74,43	50,79
17	B a l i	60,89	87,67	89,09	79,50	77,67	65,33
18	N u s a T e n g g a r a B a r a t	53,50	23,59	27,19	79,50	74,63	40,23
19	N u s a T e n g g a r a T i m u r	52,48	55,19	35,18	39,63	58,09	59,48
20	K a l i m a n t a n B a r a t	64,81	82,33	80,80	80,00	69,38	50,00
21	K a l i m a n t a n S e l a t a n	44,00	36,00	43,78	73,57	75,80	55,31
22	K a l i m a n t a n T e n g a h	49,17	70,89	82,22	62,35	61,15	56,80
23	K a l i m a n t a n T i m u r	54,80	77,90	79,77	73,33	86,19	62,01
24	K a l i m a n t a n U t a r a				72,96	81,86	52,22
25	S u l a w e s i S e l a t a n	44,00	72,43	75,44	77,62	82,62	58,40
26	S u l a w e s i T e n g g a r a	54,74	80,00	80,00	64,67	86,17	50,55
27	S u l a w e s i T e n g a h	60,67	73,33	49,33	56,44	75,95	62,59
28	S u l a w e s i B a r a t	58,63	56,00	45,13	73,89	82,43	56,15
29	G o r o n t a l o	48,49	49,67	52,62	40,00	81,93	57,20
30	S u l a w e s i U t a r a	50,00	50,46	59,62	57,69	78,50	45,48
31	M a l u k u	48,11	78,61	58,81	71,33	67,40	57,56
32	M a l u k u U t a r a	50,83	65,19	64,62	63,64	88,01	53,61
33	P a p u a B a r a t	58,00	76,67	76,67	82,50	81,25	53,89
34	P a p u a	54,67	80,00	76,00	77,33	61,78	47,29

INDEKS KUALITAS UDARA

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	91,20	89,44	86,30	89,84	88,33	91,08
2	Sumatera Utara	87,23	88,15	79,20	87,32	85,72	86,58
3	Riau	60,30	60,30	72,40	90,90	89,91	90,47
4	Kepulauan Riau	95,53	86,61	78,60	95,47	90,83	90,59
5	Jambi	91,26	82,93	88,10	89,39	88,04	87,17
6	Bengkulu	86,48	92,51	85,40	92,55	91,63	92,69
7	Sumatera Barat	89,16	88,48	82,90	89,87	88,37	89,40
8	Sumatera Selatan	89,25	79,64	81,60	88,88	85,32	87,13
9	Bangka Belitung	90,39	95,61	80,40	94,97	89,09	91,94
10	Lampung	85,98	82,26	77,50	85,02	82,98	86,63
11	Banten	53,15	50,65	58,80	75,36	71,63	74,98
12	DKI Jakarta	46,28	78,78	56,40	53,50	66,57	67,97
13	Jawa Barat	59,24	74,63	78,60	77,85	72,80	74,93
14	Jawa Tengah	82,64	81,32	77,30	83,91	82,97	84,81
15	DI Yogyakarta	82,01	90,58	87,60	88,08	84,25	85,19
16	Jawa Timur	73,20	89,21	83,20	85,49	81,80	83,06
17	Bali	86,61	92,35	88,30	91,40	88,97	89,85
18	Nusa Tenggara Barat	92,83	92,27	81,20	88,02	87,17	87,40
19	Nusa Tenggara Timur	77,13	77,13	82,70	91,18	86,83	88,18
20	Kalimantan Barat	84,57	91,57	81,50	89,12	88,68	90,07
21	Kalimantan Selatan	88,35	87,60	85,60	89,02	87,75	88,78
22	Kalimantan Tengah	92,69	89,87	83,80	92,25	87,07	88,83
23	Kalimantan Timur	83,96	96,20	80,20	88,87	83,36	90,31
24	Kalimantan Utara				95,83	90,95	93,79
25	Sulawesi Selatan	90,43	76,80	85,80	88,66	93,56	89,56
26	Sulawesi Tenggara	92,56	83,61	83,50	91,04	89,85	90,01
27	Sulawesi Tengah	85,99	89,12	87,90	94,38	89,09	92,98
28	Sulawesi Barat	92,23	89,21	86,40	91,45	89,26	89,97
29	Gorontalo	96,20	96,20	88,30	94,79	92,17	86,88
30	Sulawesi Utara	88,55	92,72	86,70	94,32	91,07	92,41
31	Maluku	91,81	82,33	87,30	85,64	84,99	88,72
32	Maluku Utara	96,94	96,94	86,20	96,00	90,77	92,38
33	Papua Barat	91,03	91,03	93,40	95,63	90,41	92,64
34	Papua	84,24	84,24	89,60	90,01	89,89	92,56

INDEKS TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	72,17	66,50	66,38	66,87	75,37	76,57
2	Sumatera Utara	45,89	50,32	50,21	50,18	49,44	52,95
3	Riau	50,60	52,66	49,45	54,51	48,37	48,15
4	Kepulauan Riau	53,30	54,31	56,53	54,24	54,75	59,06
5	Jambi	47,09	49,29	48,21	52,29	50,56	60,90
6	Bengkulu	55,03	56,68	56,31	45,44	55,52	55,78
7	Sumatera Barat	65,13	58,04	57,97	54,58	67,46	67,16
8	Sumatera Selatan	37,47	47,92	43,93	48,08	40,17	39,84
9	Bangka Belitung	36,77	45,20	45,33	44,01	40,78	41,21
10	Lampung	30,92	42,01	41,66	43,87	35,93	36,65
11	Banten	37,16	45,85	45,91	45,44	38,28	39,16
12	DKI Jakarta	31,99	33,62	35,97	33,32	24,14	24,66
13	Jawa Barat	38,98	46,29	46,09	45,50	38,51	38,70
14	Jawa Tengah	51,33	55,38	53,86	48,38	50,12	50,08
15	DI Yogyakarta	33,08	43,16	42,49	43,30	33,03	32,69
16	Jawa Timur	49,47	53,59	54,99	51,71	50,52	50,23
17	Bali	38,90	49,25	48,44	47,11	41,56	41,34
18	Nusa Tenggara Barat	63,72	60,15	60,03	61,27	66,56	65,67
19	Nusa Tenggara Timur	60,23	60,25	59,67	56,70	63,84	63,42
20	Kalimantan Barat	58,73	59,28	58,87	58,58	64,19	59,76
21	Kalimantan Selatan	44,51	50,97	50,64	51,50	49,29	46,78
22	Kalimantan Tengah	69,54	64,66	62,25	62,72	78,12	76,27
23	Kalimantan Timur	80,93	72,30	72,14	67,48	87,59	87,94
24	Kalimantan Utara				78,07	87,59	
25	Sulawesi Selatan	50,10	55,59	55,43	58,40	54,94	58,06
26	Sulawesi Tenggara	69,87	65,25	65,48	60,37	75,91	74,67
27	Sulawesi Tengah	81,01	69,23	69,03	60,37	84,58	83,89
28	Sulawesi Barat	67,59	63,03	62,69	62,17	70,96	70,48
29	Gorontalo	80,28	68,30	67,56	60,37	79,64	79,37
30	Sulawesi Utara	60,30	58,30	57,93	63,02	60,19	59,45
31	Maluku	82,04	70,13	69,57	70,08	88,78	89,17
32	Maluku Utara	82,22	68,34	68,03	66,65	86,54	86,61
33	Papua Barat	99,51	80,05	79,98	80,63	100,00	100,00
34	Papua	97,44	79,35	79,17	78,18	95,94	99,58

Kementerian menempuh berbagai upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan : (1) memperbaiki tata kelola agar semakin dapat mengendalikan laju penyusutan hutan; (2) menjaga hulu daerah aliran sungai sebagai destinasi wisata baru, beriringan dengan tumbuhnya geliat ekonomi dari berbagai komoditas hasil tanaman masyarakat; (3) membangun tabat kanal untuk memulihkan daya hidup dan interaksi sosial warga; (4) mengurangi beban lingkungan dengan penyediaan teknologi yang semakin ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sembari mempertahankan perikehidupan masyarakat dan dunia usaha



Sebanyak 21 Duta Besar dan Perwakilan Tetap negara sahabat untuk ASEAN membersihkan Taman Wisata alam Angke Kapuk, Jakarta, dalam ASEAN coastal clean up bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 30 November 2019. Acara ini diselenggarakan oleh Committee of Permanent Representatives to ASEAN Bersama Kementerian LHK. Foto oleh Pramono Susetyo.



0,44 juta hektar per tahun.

Perbaikan tata kelola yang semakin dapat mengendalikan laju penyusutan hutan.

0,99 juta hektar.

Perbaikan vegetasi di lahan kritis. Mempertahankan tegakan hutan rakyat, terakhir 18, 8 juta m3 dan bangunan konservasi tanah dan air sebanyak 35.743 unit.

3,48 juta hektar.

Pemulihan ekosistem gambut di hutan tanaman industri, areal perkebunan dan lahan milik masyarakat.

1,41 miliar giga joule

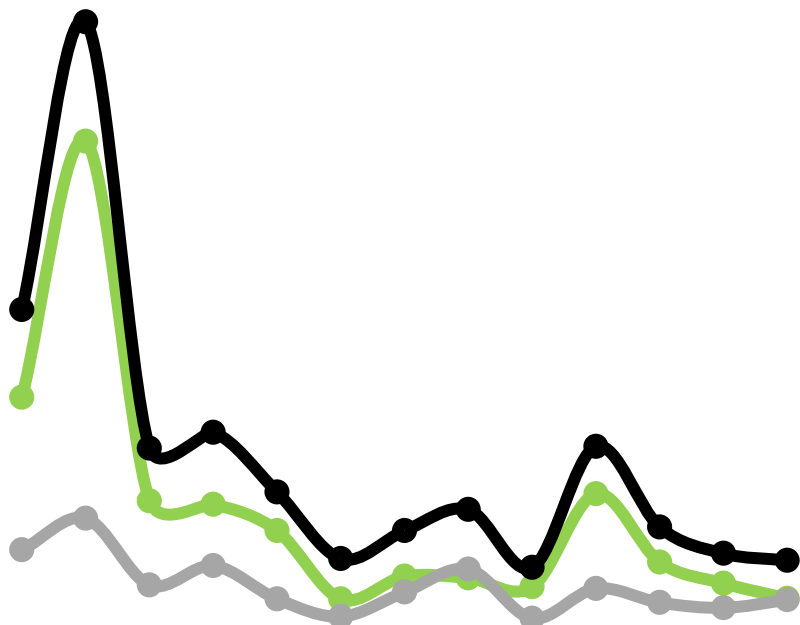
Efisiensi energi dari berbagai perusahaan untuk mengurangi beban lingkungan. Efisiensi juga dilakukan terhadap air, limbah padat non B3 dan limbah B3.

23 lokasi

Pemulihan terumbu karang dengan total media sebanyak 1.703 substrat, 30.6333 bibit karang dan luasan total yang ditransplantasi sekitar 22,57 ribu meter persegi.

A. PENYUSUTAN HUTAN INDONESIA

” Perbaikan tata kelola yang semakin dapat mengendalikan laju penyusutan hutan ”



	1990-1996	1996-2000	2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
FOREST AREA	1,37	2,83	0,78	0,76	0,61	0,22	0,35	0,34	0,29	0,82	0,43	0,31	0,223
NON FOREST AREA	0,5	0,68	0,3	0,41	0,22	0,12	0,26	0,39	0,11	0,28	0,2	0,17	0,216
INDONESIA	1,87	3,51	1,08	1,17	0,83	0,45	0,61	0,73	0,4	1,09	0,63	0,48	0,44



LUAS PENYUSUTAN HUTAN PER PULAU

0,0896 juta hektare
Sumatera

0,0186 juta hektare
Jawa

0,1430 juta hektare
Bali – Nusa Tenggara

0,1430 juta hektare
Kalimantan

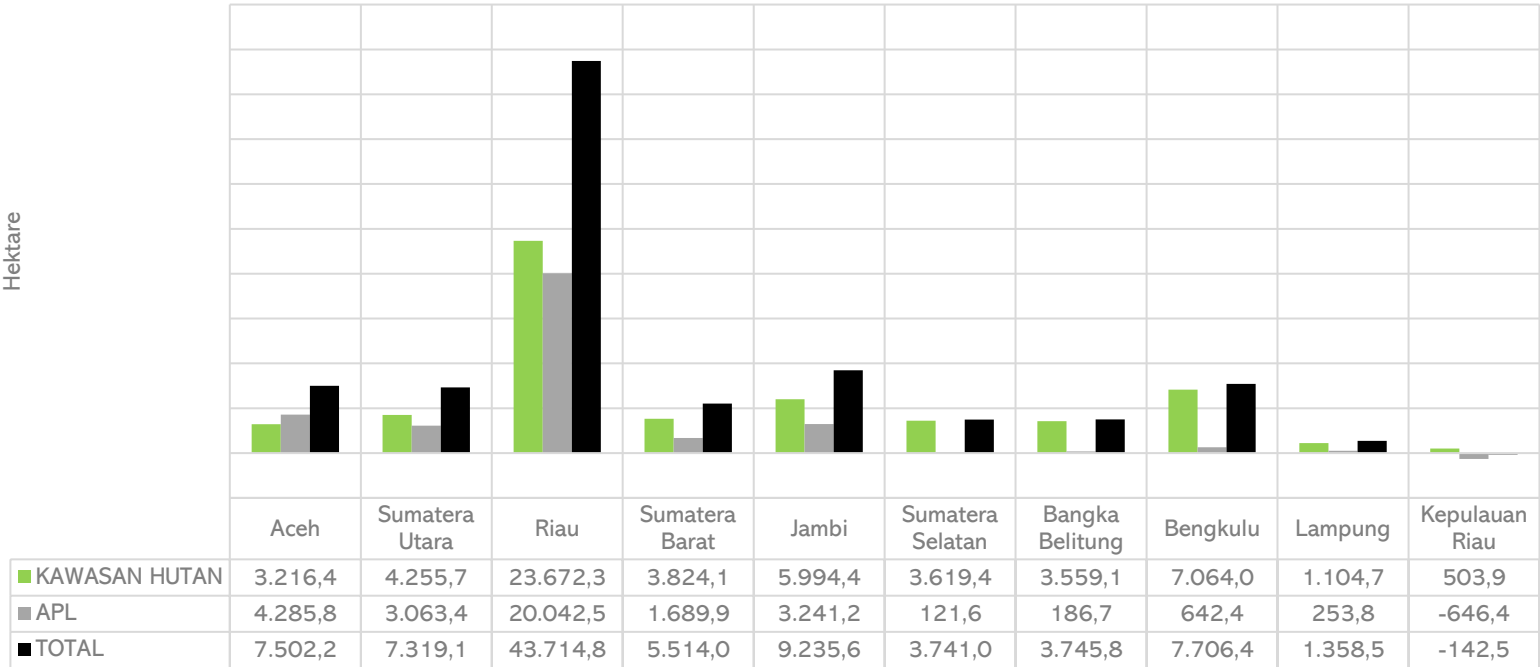
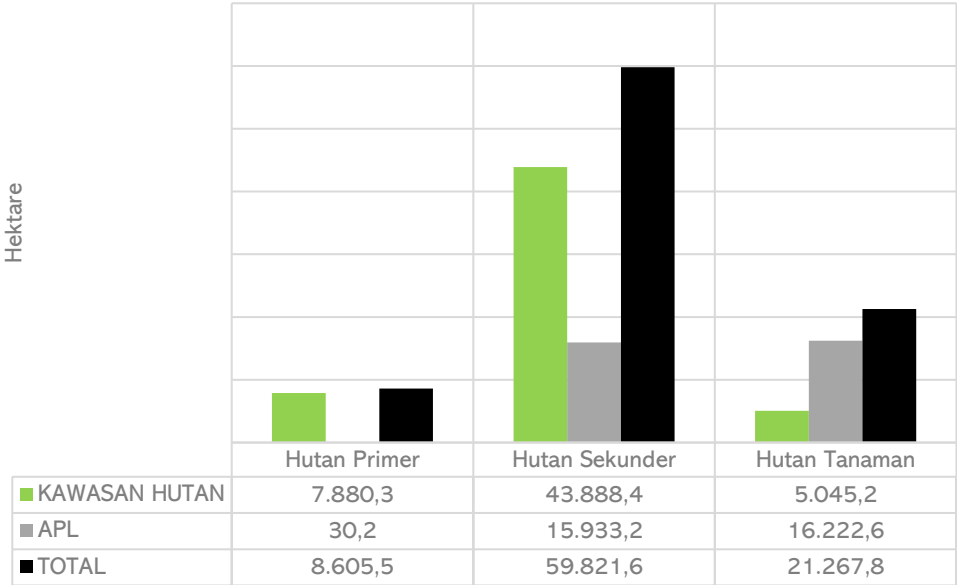
0,0608 juta hektare
Sulawesi

0,9295 juta hektare
Maluku-Papua

PENYUSUTAN HUTAN SUMATERA

89.694,9 hektare

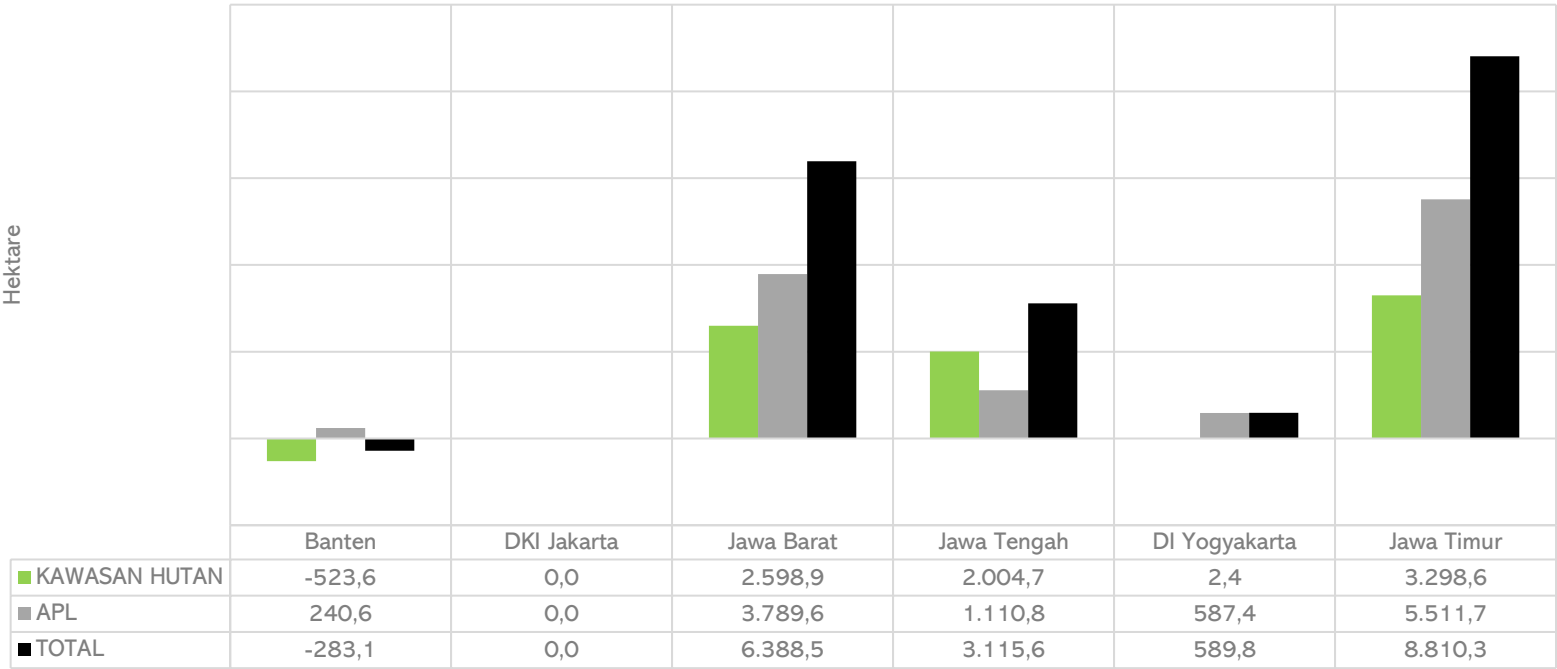
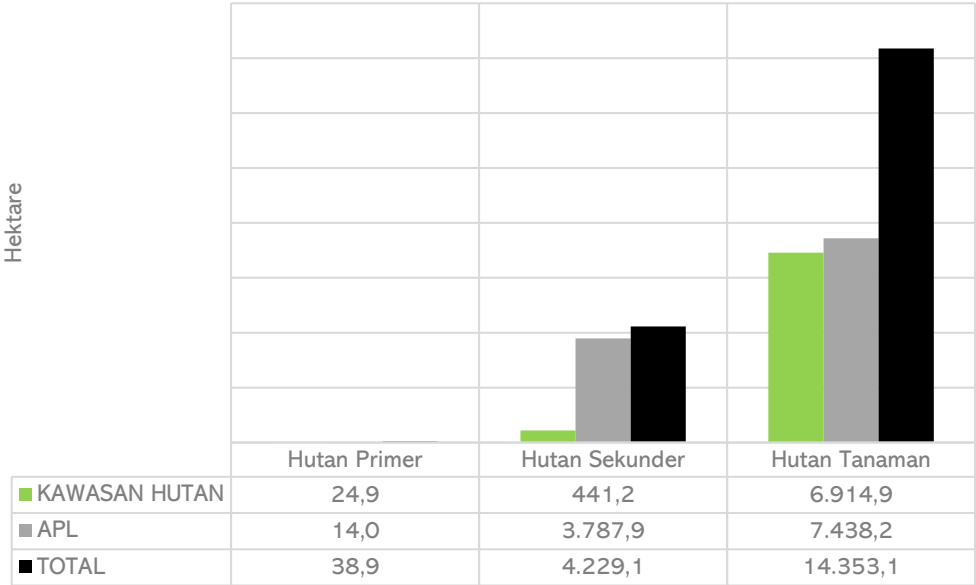
Penyusutan hutan selama 2017-2018



PENYUSUTAN HUTAN JAWA

18.621,1 hektare

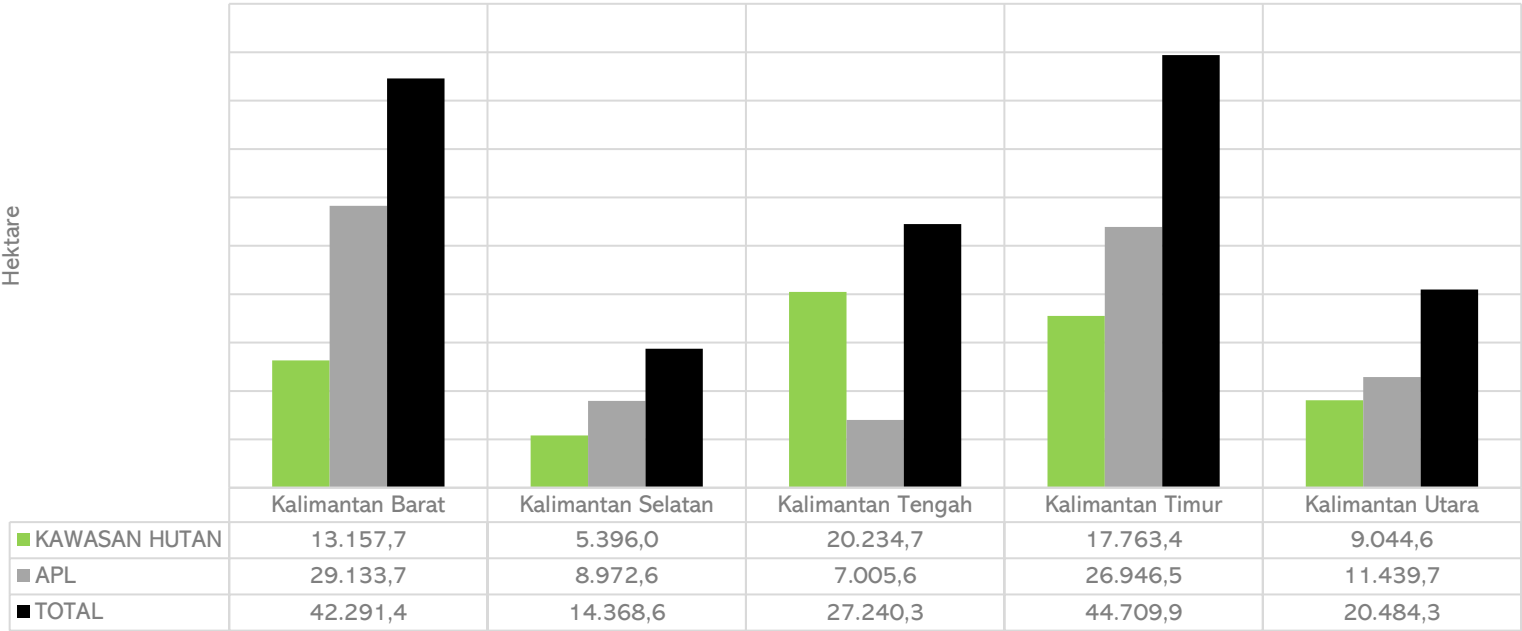
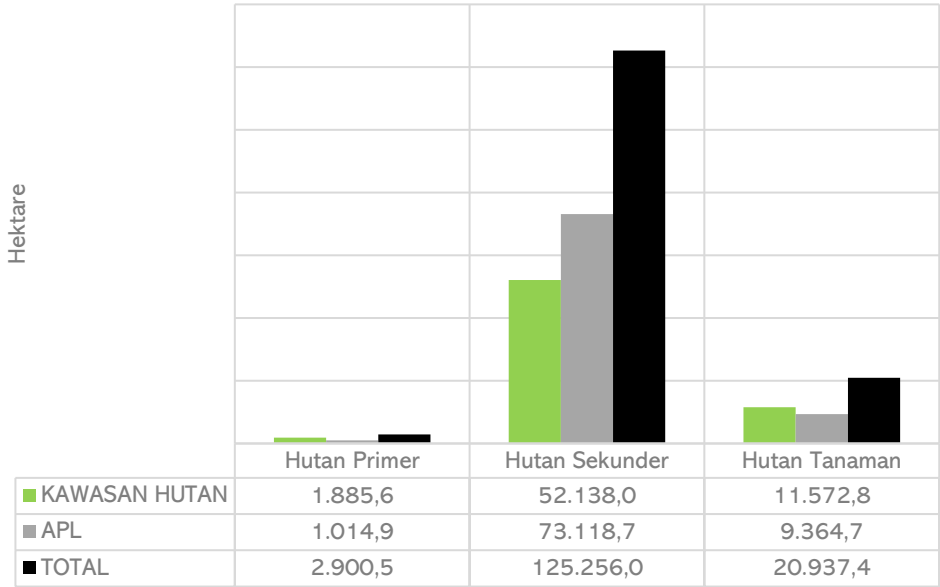
Penyusutan hutan selama 2017-2018



PENYUSUTAN HUTAN KALIMANTAN

143.094,6 hektare

Penyusutan hutan selama 2017-2018

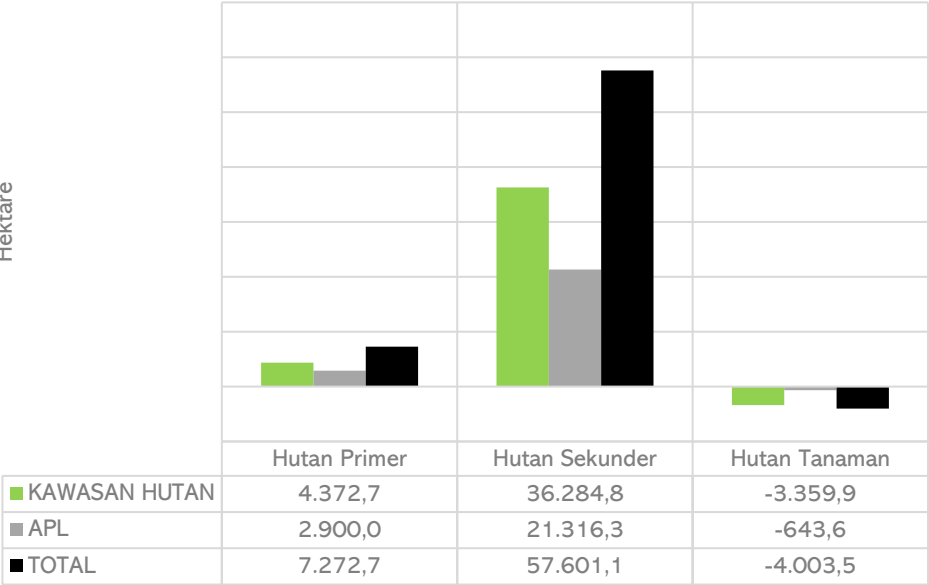


PENYUSUTAN HUTAN SULAWESI

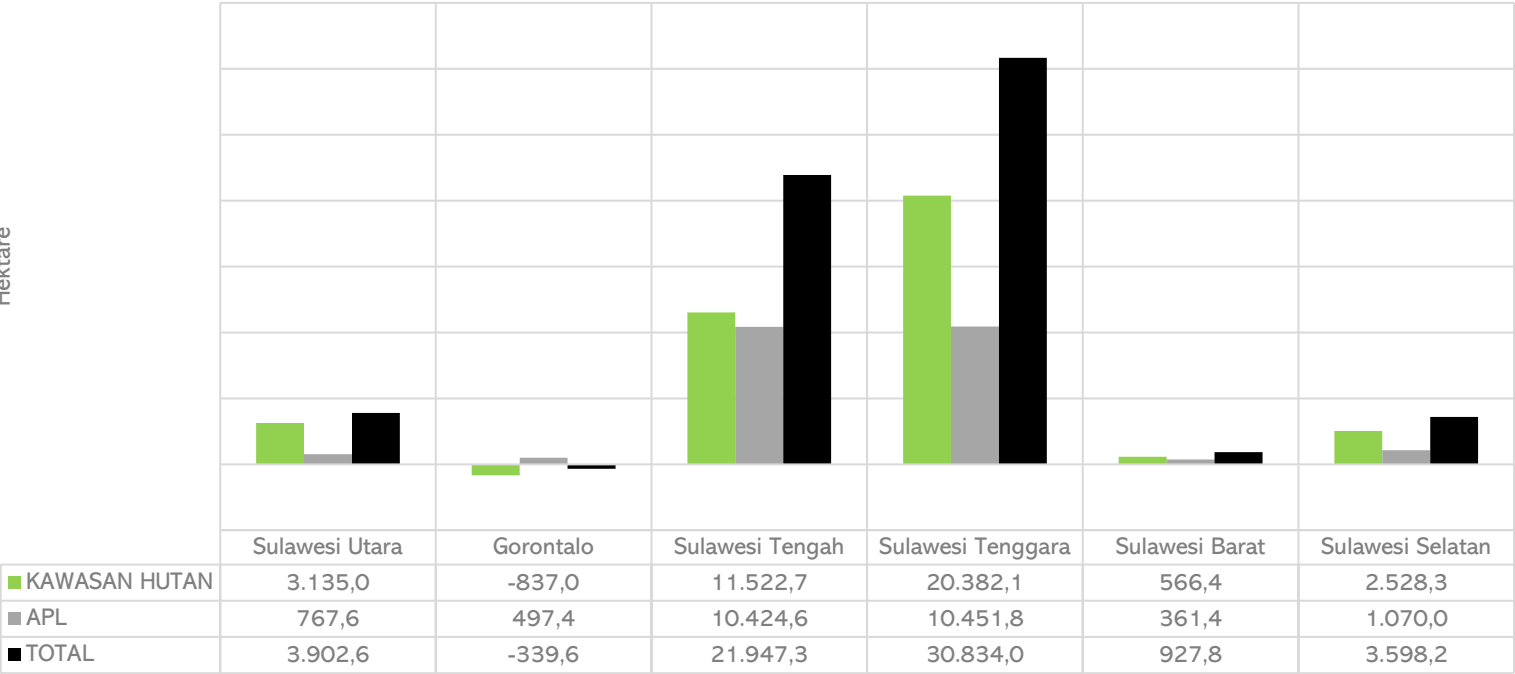
60.870,3 hektare

Penyusutan hutan selama 2017-2018

Hektare



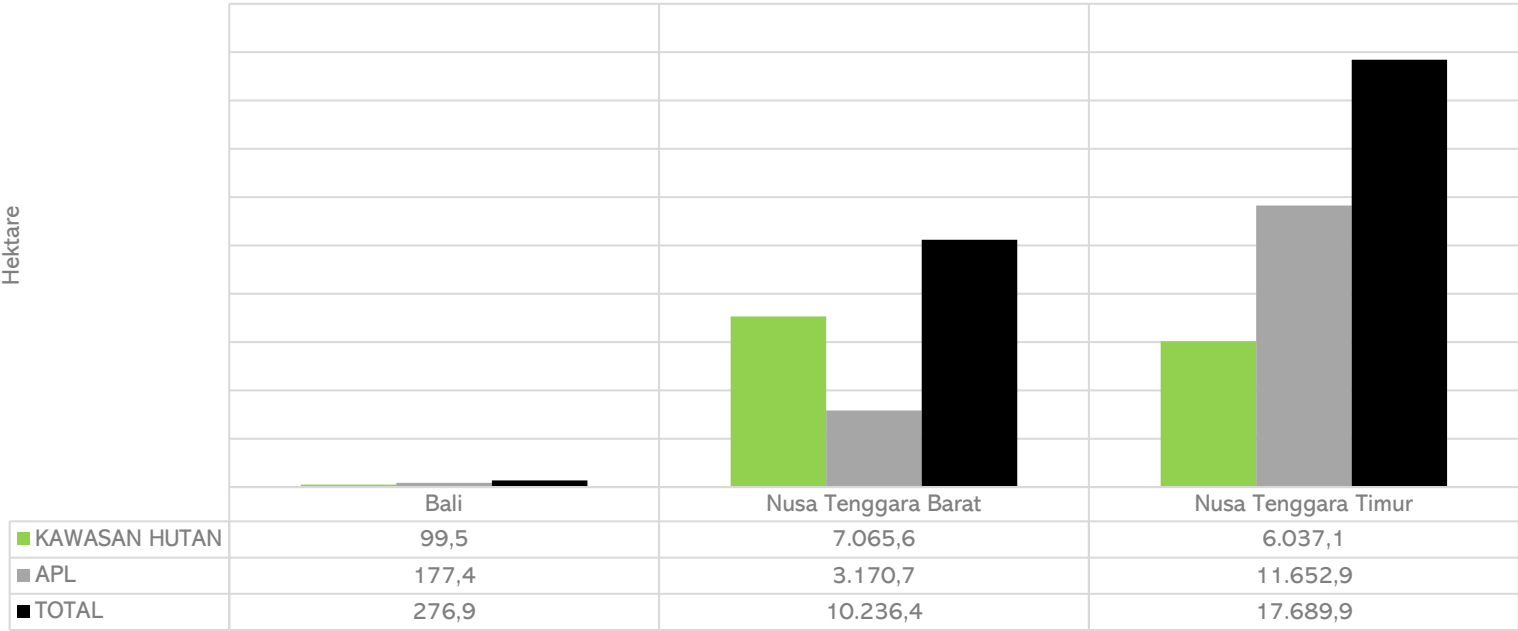
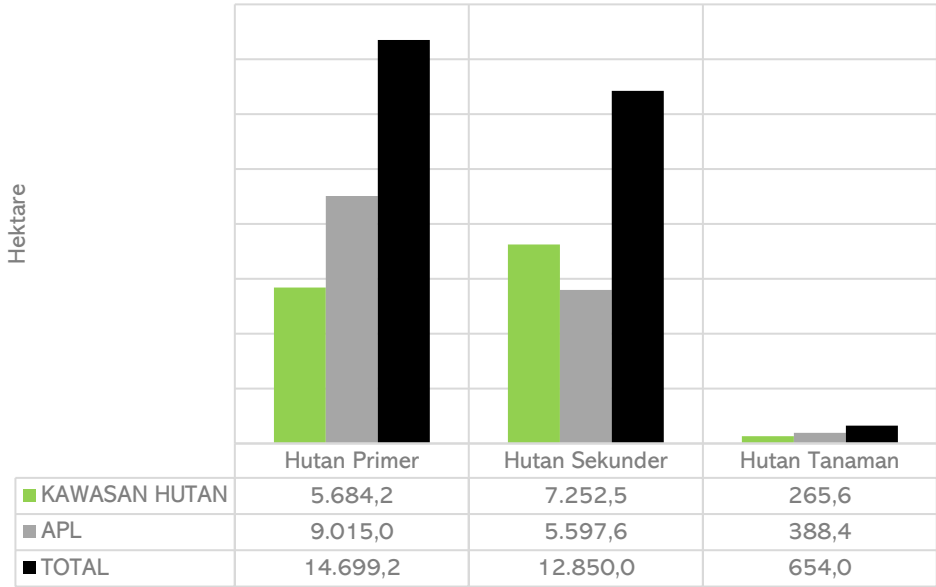
Hektare



PENYUSUTAN HUTAN BALI-NUSA TENGGARA

28.203,2 hektare

Penyusutan hutan selama 2017-2018

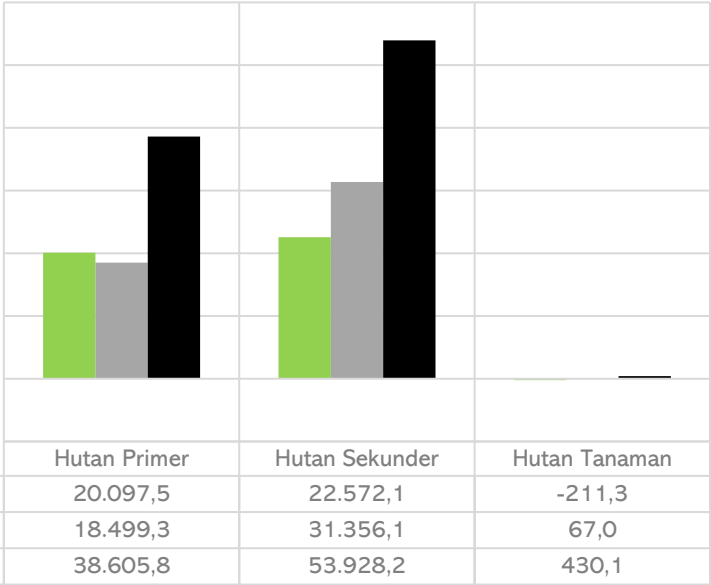


PENYUSUTAN HUTAN MALUKU-PAPUA

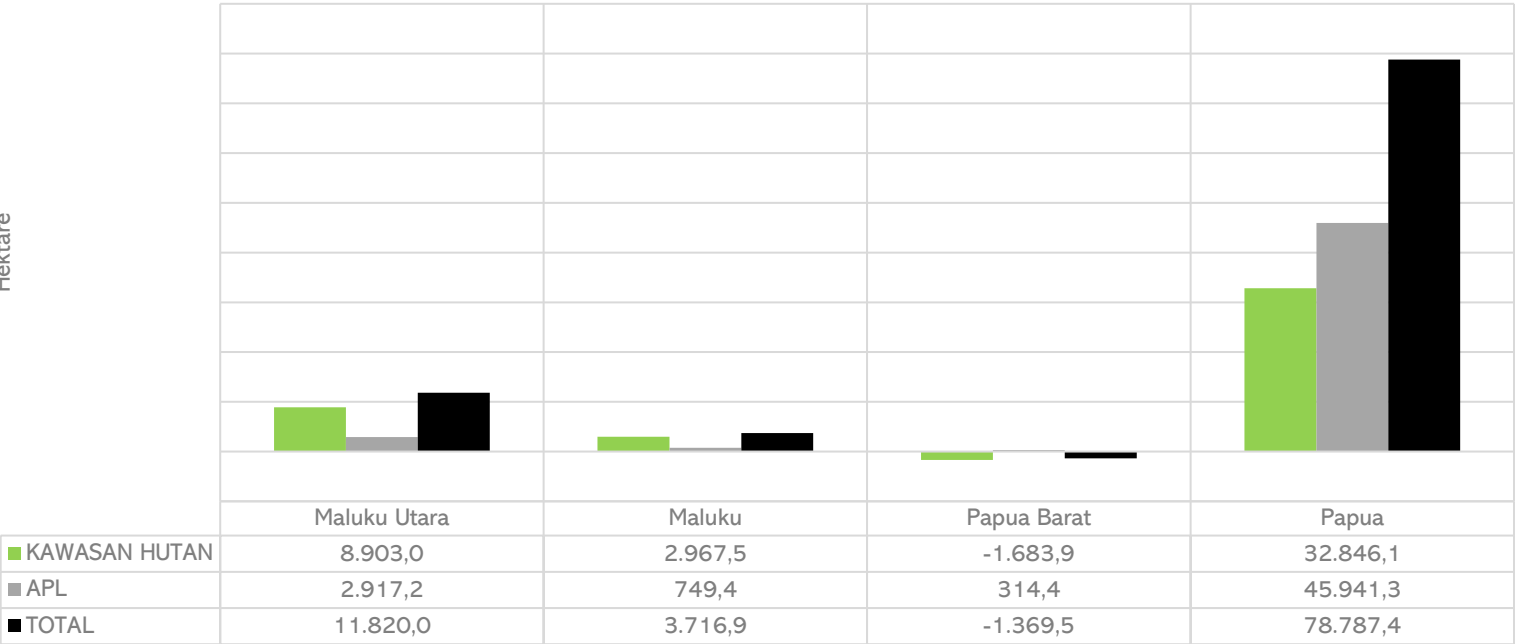
92.955,0 hektare

Penyusutan hutan selama 2017-2018

Hektare

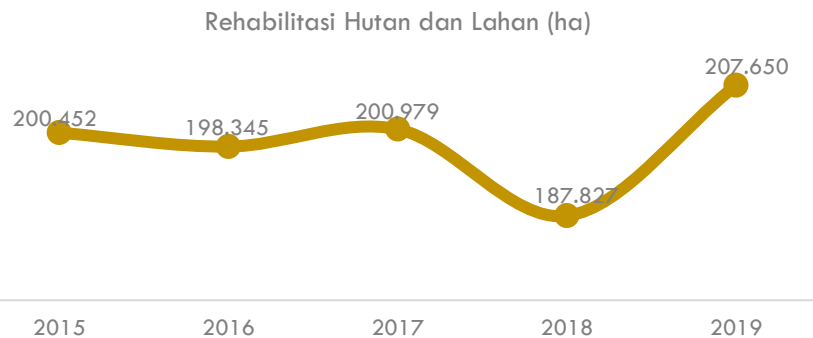


Hektare



B. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

“Menjaga hulu daerah aliran sungai sebagai destinasi wisata baru, beriringan dengan tumbuhnya geliat ekonomi dari berbagai komoditas hasil tanaman masyarakat.”



Atas : Berhulu di Gunung Merapi, Sungai Opak telah mengayunkan pendulum ekonomi sebagai destinasi wisata baru. Kesadaran kaum milenial telah membangkitkan semangat untuk menjaga sepanjang daerah aliran sungai ini. Foto oleh Feby Fajrin.

Bawah : DAS Way Sekampung telah menghidupi Bendungan Batutegi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas 28 MW, selain menunjang area persawahan dan air baku. Aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan juga telah menumbuhkan komoditas penggerak ekonomi masyarakat, diantaranya Gaharu dan dodol Sirsak. Foto oleh Triandu.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

No	Provinsi	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bali	5.687	4.259	4.913	4.706	750	20.315
2	Banten	-	7	3.943	2.862	9	6.821
3	Bengkulu	4.577	6.308	4.628	5.841	771	22.125
4	DI Aceh	5.594	1.830	4.673	4.109	14.218	30.424
5	DI Yogyakarta	4.866	52	6.728	6.066	-	17.712
6	DKI Jakarta	-	-	3.943	-	-	3.943
7	Gorontalo	3.208	3.556	4.357	4.020	12.375	27.516
8	Jambi	3.279	3.490	5.540	3.462	1.000	16.771
9	Jawa Barat	10.484	19.853	29.180	19.584	18.291	97.392
10	Jawa Tengah	30.686	20.805	8.001	16.958	12.057	88.507
11	Jawa Timur	21.269	13.233	8.486	12.349	19.368	74.705
12	Kalimantan Barat	4.730	5.397	5.447	5.719	11.000	32.293
13	Kalimantan Selatan	2.341	18.732	6.508	6.762	8.300	42.643
14	Kalimantan Tengah	1.510	3.539	4.424	4.245	475	14.193
15	Kalimantan Timur	2.417	4.074	5.343	3.977	3.750	19.561
16	Kalimantan Utara	52	-	3.943	-	-	3.995
17	Kep. Bangka Belitung	466	1.953	4.523	1.667	575	9.184
18	Kep. Riau	890	398	4.329	1.012	400	7.029
19	Lampung	14.273	12.411	5.370	9.594	16.500	58.148
20	Maluku	445	2.599	4.518	1.969	2.150	11.681
21	Maluku Utara	3.420	978	4.361	1.339	500	10.598
22	Nusa Tenggara Barat	6.712	6.220	4.748	5.727	3.750	27.157
23	Nusa Tenggara Timur	9.932	8.562	4.553	7.927	6.000	36.974
24	Papua	5.922	4.784	5.916	2.235	1.050	19.907
25	Papua Barat	3.741	1.920	5.281	2.179	350	13.471
26	Riau	2.178	4.386	5.456	5.181	14.824	32.025
27	Sulawesi Barat	6.136	3.472	4.566	3.470	2.000	19.644
28	Sulawesi Selatan	12.323	11.385	5.693	10.469	19.600	59.470
29	Sulawesi Tengah	2.290	3.485	4.413	3.665	200	14.053
30	Sulawesi Tenggara	9.381	3.658	4.974	3.642	375	22.030
31	Sulawesi Utara	6.792	4.287	4.388	5.374	450	21.291
32	Sumatera Barat	5.136	6.648	4.528	6.245	1.551	24.108
33	Sumatera Selatan	4.367	9.311	6.073	7.456	17.679	44.886
34	Sumatera Utara	5.348	6.753	7.232	8.016	17.332	44.681
Jumlah		200.452	198.345	200.979	187.827	207.650	995.253

REHABILITASI HUTAN PEMEGANG IPPKH

No	Provinsi	Realisasi Penanaman (hektare)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bali	-	-	-	-	-	0
2	Banten	-	-	-	-	-	0
3	Bengkulu	17,50	45,18	-	-	-	62,68
4	DI Aceh	-	-	13,22	-	-	13,22
5	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	0
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0
7	Gorontalo	-	-	-	136,62	-	136,62
8	Jambi	-	294,98	204,00	566,06	47,02	1112,06
9	Jawa Barat	-	-	-	-	-	0
10	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	0
11	Jawa Timur	-	-	-	66,00	-	66
12	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	0
13	Kalimantan Selatan	472,52	1.664,00	4.222,89	6.845,47	3.472,12	16677
14	Kalimantan Tengah	140,00	25,86	2.312,60	3.981,37	1.217,66	7677,49
15	Kalimantan Timur	3.963,00	783,10	6.053,00	11.670,33	4.548,69	27018,12
16	Kalimantan Utara	545,00	287,94	140,92	772,62	257,62	2004,1
17	Kep. Bangka Belitung	91,00	-	-	684,00	98,38	873,38
18	Kep. Riau	-	-	5,00	507,40	-	512,4
19	Lampung	-	-	-	-	-	0
20	Maluku	-	-	12,28	-	-	12,28
21	Maluku Utara	450,00	509,29	3.156,02	1.490,88	781,63	6387,82
22	Nusa Tenggara Barat	-	-	28,00	75,00	-	103
23	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	0
24	Papua	-	50,00	-	-	-	50
25	Papua Barat	-	-	60,00	50,00	-	110
26	Riau	-	-	-	331,50	592,00	923,5
27	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	0
28	Sulawesi Selatan	680,00	-	-	38,75	63,68	782,43
29	Sulawesi Tengah	-	127,40	6,00	930,00	542,00	1605,4
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	325,00	110,00	435
31	Sulawesi Utara	-	38,00	1.263,00	1.427,00	-	2728
32	Sumatera Barat	40,00	-	-	16,00	-	56
33	Sumatera Selatan	-	941,84	942,45	631,48	62,00	2577,77
34	Sumatera Utara	-	51,26	199,96	103,50	-	354,72
Jumlah		6.399,02	4.818,84	18.619,34	30.648,98	11.800,77	72.286,95

REKLAMASI HUTAN PEMEGANG IPPKH

No	Provinsi	Luas dibuka (hektare)	Luas direklamasi (hektare)	Serah terima (hektare)
1	Bali	-	-	-
2	Banten	-	-	-
3	Bengkulu	27,87	2,69	-
4	DI Aceh	12	12	-
5	DI Yogyakarta	-	-	-
6	DKI Jakarta	-	-	-
7	Gorontalo	233,40	18,97	-
8	Jambi	3.872,86	336,69	3,26
9	Jawa Barat	481,61	80,91	-
10	Jawa Tengah	-	-	-
11	Jawa Timur	680,02	194,47	-
12	Kalimantan Barat	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	21.628,38	10.558,44	347,49
14	Kalimantan Tengah	7.871,73	1.723,97	49,48
15	Kalimantan Timur	39.808,22	16.021,12	1.075,36
16	Kalimantan Utara	2.072,78	777,69	777,69
17	Kep. Bangka Belitung	279,19	183,66	-
18	Kep. Riau	196,50	22,61	-
19	Lampung	244,91	48,35	-
20	Maluku	-	-	-
21	Maluku Utara	-	-	-
22	Nusa Tenggara Barat	2.834,23	831,26	-
23	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
24	Papua	45,67	-	-
25	Papua Barat	-	-	-
26	Riau	1.294,13	188,40	-
27	Sulawesi Barat	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	126,12	8,95	-
29	Sulawesi Tengah	471,44	176,64	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-
31	Sulawesi Utara	494,61	51,15	-
32	Sumatera Barat	-	-	-
33	Sumatera Selatan	1.655,27	227,70	-
34	Sumatera Utara	43,60	43,60	-
Jumlah		88.172,06	34.470,50	2.937,14

KONSERVASI TANAH DAN AIR

No	Provinsi	Bangunan KTA (Unit)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bali	50	-	194	37	10	291
2	Banten	-	-	-	-	-	0
3	Bengkulu	-	-	-	60	-	60
4	DI Aceh	100	-	248	230	20	598
5	DI Yogyakarta	560	249	2.146	670	10	3635
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0
7	Gorontalo	38	90	200	159	247	734
8	Jambi	-	7	10	50	60	127
9	Jawa Barat	4.048	738	2.292	1.786	522	9386
10	Jawa Tengah	934	40	2.121	479	790	4364
11	Jawa Timur	289	70	2.660	2.495	320	5834
12	Kalimantan Barat	-	-	400	84	10	494
13	Kalimantan Selatan	-	-	231	25	60	316
14	Kalimantan Tengah	-	-	-	40	-	40
15	Kalimantan Timur	105	-	250	64	10	429
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	0
17	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	0
18	Kep. Riau	-	-	-	40	-	40
19	Lampung	-	-	750	260	150	1160
20	Maluku	-	-	-	15	10	25
21	Maluku Utara	-	-	-	50	-	50
22	Nusa Tenggara Barat	7	-	775	305	88	1175
23	Nusa Tenggara Timur	-	-	250	175	110	535
24	Papua	-	-	-	-	-	0
25	Papua Barat	-	-	-	25	-	25
26	Riau	-	-	260	266	140	666
27	Sulawesi Barat	-	-	-	90	-	90
28	Sulawesi Selatan	285	12	1.473	797	230	2797
29	Sulawesi Tengah	5	-	20	121	-	146
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	25	-	25
31	Sulawesi Utara	5	-	250	72	-	327
32	Sumatera Barat	-	-	-	304	41	345
33	Sumatera Selatan	-	-	224	380	20	624
34	Sumatera Utara	56	-	709	320	320	1405
Jumlah		6.482	1.206	15.463	9.424	3.168	35.743

PERKEMBANGAN STANDING STOCK HUTAN RAKYAT

No	Provinsi	Standing Stock Hutan Rakyat (M ³)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bali	767.250	1.034.781	760.000	500.000	708.698
2	Banten	240.123	52.009	72.000	500.000	181.571
3	Bengkulu	111.794	127.508	100.000	100.000	53.242
4	DI Aceh	196.662	1.052.018	196.000	100.000	138.110
5	DI Yogyakarta	553.977	1.631.880	2.500.000	2.000.000	495.425
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	72.230	850	75.000	175.000	13.678
8	Jambi	58.500	127.934	60.000	100.000	52.543
9	Jawa Barat	325.869	53.959	443.000	3.000.000	267.317
10	Jawa Tengah	6.804.699	6.377.443	2.100.000	3.500.000	6.604.124
11	Jawa Timur	5.568.501	5.923.986	8.300.000	2.500.000	5.430.861
12	Kalimantan Barat	303.316	163.658	300.000	300.000	244.764
13	Kalimantan Selatan	28.136	113.758	28.000	350.000	30.416
14	Kalimantan Tengah	86.387	9.322	35.000	350.000	27.835
15	Kalimantan Timur	34.650	7	87.000	250.000	23.902
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
17	Kep. Bangka Belitung	53.847	161.861	55.000	55.000	4.705
18	Kep. Riau	53.723	13.626	55.000	55.000	40.762
19	Lampung	74.227	127.232	100.000	1.500.000	15.675
20	Maluku	106.110	80.747	100.000	100.000	47.558
21	Maluku Utara	56.250	-	57.000	100.000	42.536
22	Nusa Tenggara Barat	308.707	1.717.984	350.000	350.000	250.155
23	Nusa Tenggara Timur	1.322.775	585.110	1.000.000	500.000	1.167.614
24	Papua	36.115	177.070	36.000	200.000	22.437
25	Papua Barat	63.000	-	63.000	150.000	4.448
26	Riau	125.388	5.021	225.000	225.000	66.836
27	Sulawesi Barat	50.045	872	50.000	150.000	45.507
28	Sulawesi Selatan	721.663	643.021	725.000	1.500.000	663.111
29	Sulawesi Tengah	39.366	-	40.000	150.000	35.186
30	Sulawesi Tenggara	1.134.000	28.006	900.000	500.000	978.839
31	Sulawesi Utara	356.913	622.232	360.000	200.000	298.361
32	Sumatera Barat	158.168	103.872	60.000	60.000	99.616
33	Sumatera Selatan	292.248	-	300.000	300.000	233.969
34	Sumatera Utara	676.165	2.073.810	700.000	500.000	617.613
Jumlah		20.780.804	23.009.579	20.132.000	20.320.000	18.907.142

PENANAMAN HASIL KERJASAMA BERBAGAI KEMENTERIAN DAN TNI TERMASUK PERGURUAN TINGGI 2015-2019

No	BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG (BPDASHL)	KEMENRISTEK, KEMENAG DAN KEMENDIKBUD		TNI DAN POLRI		LAIN-LAIN		TOTAL	
		JUMLAH BATANG	LUAS (HA)	JUMLAH BATANG	LUAS (HA)	JUMLAH BATANG	LUAS (HA)	JUMLAH BATANG	LUAS (HA)
1	Krueng Aceh	128.538	321,35	37.000	92,50	-	-	165.538	413,85
2	Asahan Barumon	6.990	17,48	-	-	-	-	6.990	17,48
3	Wampu Sei Ular	98.445	246,11	-	-	-	-	98.445	246,11
4	Indragiri Rokan	312.960	782,40	31.170	77,93	-	-	344.130	860,33
5	Sei Jang Duriangkang	11.040	27,60	1.400	3,50	22.150	55,38	34.590	86,48
6	Agam Kuantan	61.135	152,84	-	-	-	-	61.135	152,84
7	Ketahun	10.178	25,45	-	-	-	-	10.178	25,45
8	Batanghari	30.605	76,51	-	-	-	-	30.605	76,51
9	Musi	80.459	201,15	3.175	7,94	-	-	83.634	209,09
10	Baturusa Cerucuk	10.750	26,88	-	-	-	-	10.750	26,88
11	Way Seputih Sekampung	136.435	341,09	-	-	-	-	136.435	341,09
12	Citarum Ciliwung	10.700	26,75	-	-	-	-	10.700	26,75
13	Cimanuk Citanduy	20.765	51,91	-	-	500	1,25	21.265	53,16
14	Pemali Jratun	158.295	395,74	-	-	-	-	158.295	395,74
15	Serayu Opak Progo	351.659	879,15	-	-	-	-	351.659	879,15
16	Solo	32.805	82,01	-	-	-	-	32.805	82,01
17	Brantas	304.683	761,71	36.682	91,71	-	-	341.365	853,41
18	Unda Anyar	30.253	75,63	-	-	-	-	30.253	75,63
19	Dodokan Moyosari	179.560	448,90	-	-	-	-	179.560	448,90
20	BEnain Noelmina	4.175	10,44	-	-	-	-	4.175	10,44
21	Kapuas	21.975	54,94	12.000	30,00	24.350	60,88	58.325	145,81
22	Kahayan	46.415	116,04	-	-	-	-	46.415	116,04
23	Barito	34.450	86,13	1.680	4,20	-	-	36.130	90,33
24	Mahakam Berau	14.350	35,88	1.300	3,25	-	-	15.650	39,13
25	Tondano	97.393	243,48	-	-	-	-	97.393	243,48
26	Bone Bolango	140.239	350,60	400.000	1.000,00	-	-	540.239	1.350,60
27	Palu Poso	37.813	94,53	-	-	-	-	37.813	94,53
28	Lariang Mamasa	4.850	12,13	-	-	-	-	4.850	12,13
29	Jeneberang Saddang	48.165	120,41	-	-	7.200	18,00	55.365	138,41
30	Sampara	29.800	74,50	-	-	-	-	29.800	74,50
31	Waehapu Batu Merah	8.503	21,26	-	-	-	-	8.503	21,26
32	Ake Molamo	30.838	77,10	-	-	-	-	30.838	77,10
33	Remu Ransiki	69.070	172,68	-	-	-	-	69.070	172,68
34	Memberamo	1.400	3,50	-	-	-	-	1.400	3,50
TOTAL		2.565.691	6.414,23	524.407	1.311,02	54.200	135,50	3.144.298	7.861

Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi (Ha)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
IUPHHK-HA	34.333,21	36.737,00	18.726,50	25.988,87	55.614,00	171.399,58
IUPHHK-HT	358.912,20	387.305,90	516.277,00	239.539,50	330.072,81	1.832.107,41
RE	3.943,19	17.815,65	23.241,00	12.532,19	369.077,25	426.609,28
KPHP	940,00	2.343,60	6.632,00	2.444,00	23.597,20	35.956,80
Total	398.128,60	444.202,15	564.876,50	280.504,56	778.361,26	2.466.073,07



Ekosistem hutan rawa gambut yang terjaga mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Foto oleh Taufan Kharis.

C. PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

“*Tabat kanal tak hanya memulihkan daya hidup dan interaksi sosial warga, namun kesempatan membentuk keseimbangan berusaha baru di areal gambut.*”

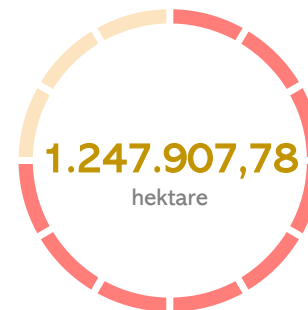


3.484.637,72
hektare

Luas pemulihan ekosistem gambut selama 2015-2019.



Luas pemulihan ekosistem gambut pada hutan tanaman industri yang dilakukan melalui perbaikan tata kelola air. Menyebar 9 provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.



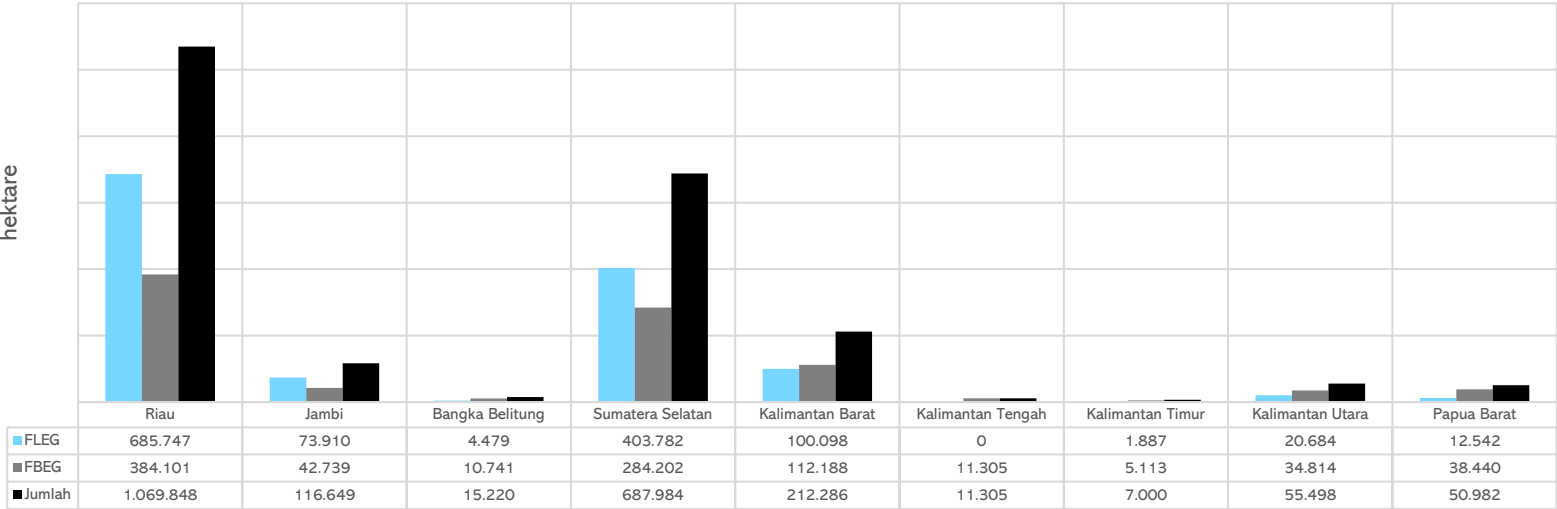
Luas pemulihan ekosistem gambut pada areal perkebunan yang dilakukan melalui perbaikan tata kelola air. Menyebar di 17 provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua



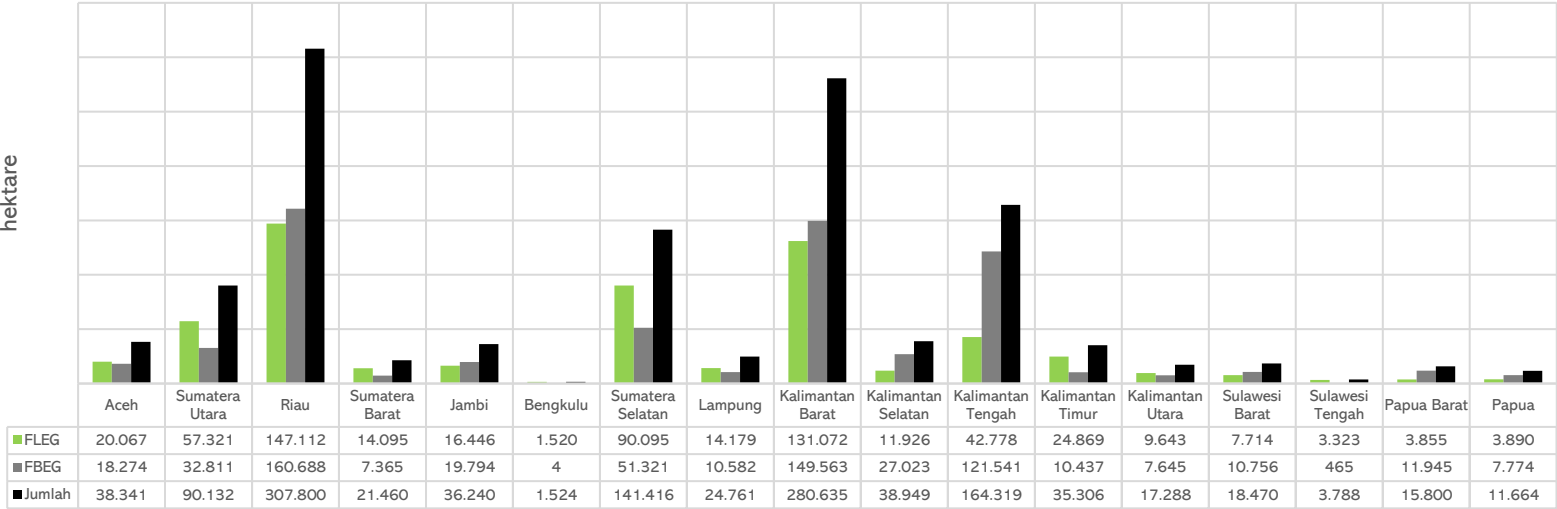
Luas pemulihan ekosistem gambut di lahan milik masyarakat. Menyebar di 8 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT OLEH UNIT USAHA

Pemulihan Ekosistem Gambut di Hutan Tanaman Industri



Pemulihan Ekosistem Gambut di Usaha Perkebunan



Keterangan : ekosistem gambut terbagi untuk perlindungan (Fungsi lindung ekosistem gambut, FLEG) dan untuk budidaya (fungsi budidaya ekosistem gambut, FBEG).

PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DI LAHAN MILIK

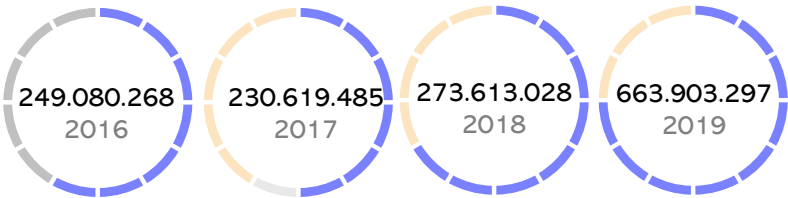
PROVINSI	KABUPATEN	2015		2016		2017		2018		2019		Jumlah	
		TK (unit)	LD (hectare)	TK (unit)	LD (hectare)	TK (unit)	LD (hectare)	TK (unit)	LD (hectare)	TK (unit)	LD (hectare)	TK (unit)	LD (hectare)
Aceh	Nagan Raya	-	-	12	168	24	336	10	170	9	162	55	838
	Aceh Barat Daya	-	-	10	140	27	378	11	187	-	-	49	719
	Aceh Jaya	-	-	-	-	10	150	10	170	9	162	29	482
	Aceh Barat	-	-	-	-	10	150	12	204	10	180	32	534
	Aceh Selatan	-	-	-	-	11	165	-	-	-	-	11	165
	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	11	187	-	-	11	187
	Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	12	204	-	-	12	204
	Total Aceh			22	308	82	1179	66	1122	28	504	199	3.127
Sumatera Utara	Asahan	-	-	-	-	-	-	10	140	10	190	20	330
	Labuhan Batu	-	-	-	-	8	160	10	140	9	171	27	471
	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	8	160	10	140	10	190	28	490
	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	10	140	9	171	19	311
	Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	10	140	-	-	10	140
	Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	9	126	-	-	9	126
	Total Sumut			0	0	16	320	59	826	38	722	113	1.868
Jambi	Tanjung Jabung Timur	-	-	21	294	-	-	-	-	-	-	21	294
	Muaro Jambi	-	-	28	392	-	-	-	-	-	-	28	392
	Total Jambi			49	686	0	0	0	0	-	-	49	686
Sumatera Barat	Agam	-	-	-	-	-	-	8	136	-	-	8	136
	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	8	136	-	-	8	136
	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	10	170	-	-	10	170
	Total Sumbar			0	0	0	0	26	442	-	-	26	442
Riau	Siak	-	-	8	112	-	-	-	-	-	-	8	112
	Indragiri Hilir	-	-	11	154	-	-	-	-	-	-	11	154
	Bengkalis	3	14	46	644	-	-	-	-	-	-	46	658
	Pelalawan	-	-	13	182	-	-	-	-	-	-	13	182
	Dumai	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
	Total Riau	5	63	78	1092	0	0	0	0	-	-	80	1155
Kalimantan Barat	Mempawah	2	20	10	140	-	-	-	-	-	-	10	140
	Kubu Raya	-	-	10	140	-	-	-	-	-	-	10	140
	Ketapang	-	-	14	196	-	-	-	-	-	-	14	196
	Total Kalbar	2	20	34	476	0	0	0	0	-	-	34	496
Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	-	-	8	112	16	320	9	162	9	171	42	720
	Kutai Timur	-	-	8	112	8	160	9	162	-	-	25	282
	Kutai Barat	-	-	-	-	8	160	9	162	9	171	26	493
	Berau	-	-	-	-	-	-	9	162	-	-	9	162
	Paser	-	-	-	-	-	-	9	162	-	-	9	162
	Total Kaltim	-	-	16	224	32	640	36	810	18	342	111	2016
Kal. Tengah	Pulau Pisau	2	40	3	42	-	-	-	-	-	-	3	82
	Kapuas	3	50	3	42	-	-	-	-	-	-	3	82
	Total Kalteng	5	90	6	84	0	0	9	162	-	-	15	246
JUMLAH TOTAL		12	173	205	2.870	130	2.139	196	3.200	84	1.568	618	9.950

Catatan : TK adalah tabak kanal, dan LD adalah luas terdampak

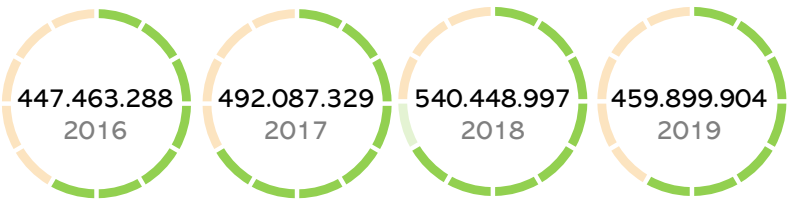
D. PENURUNAN BEBAN PENCEMAR DARI DUNIA USAHA

”Efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang semakin meningkat dalam proses produksi untuk mengurangi beban lingkungan.”

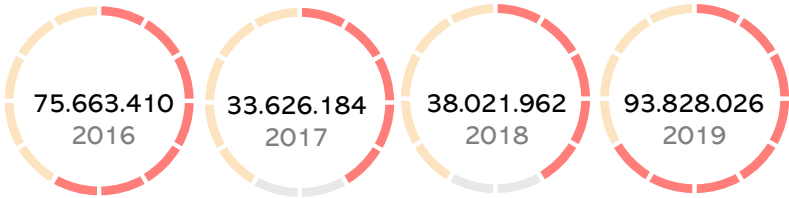
Efisiensi Energi (Giga Joule)



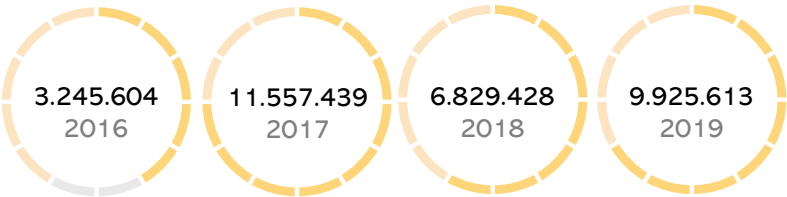
Efisiensi Air (m3)



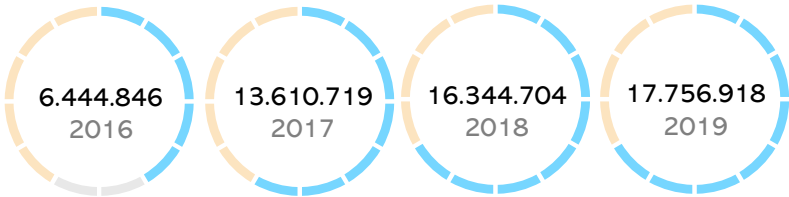
Penurunan Emisi (ton CO2Eq)



Penurunan Limbah Padat Non B3 (ton)



Penurunan Limbah B3 (ton)



PEMULIHAN EKOSISTEM PESISIR

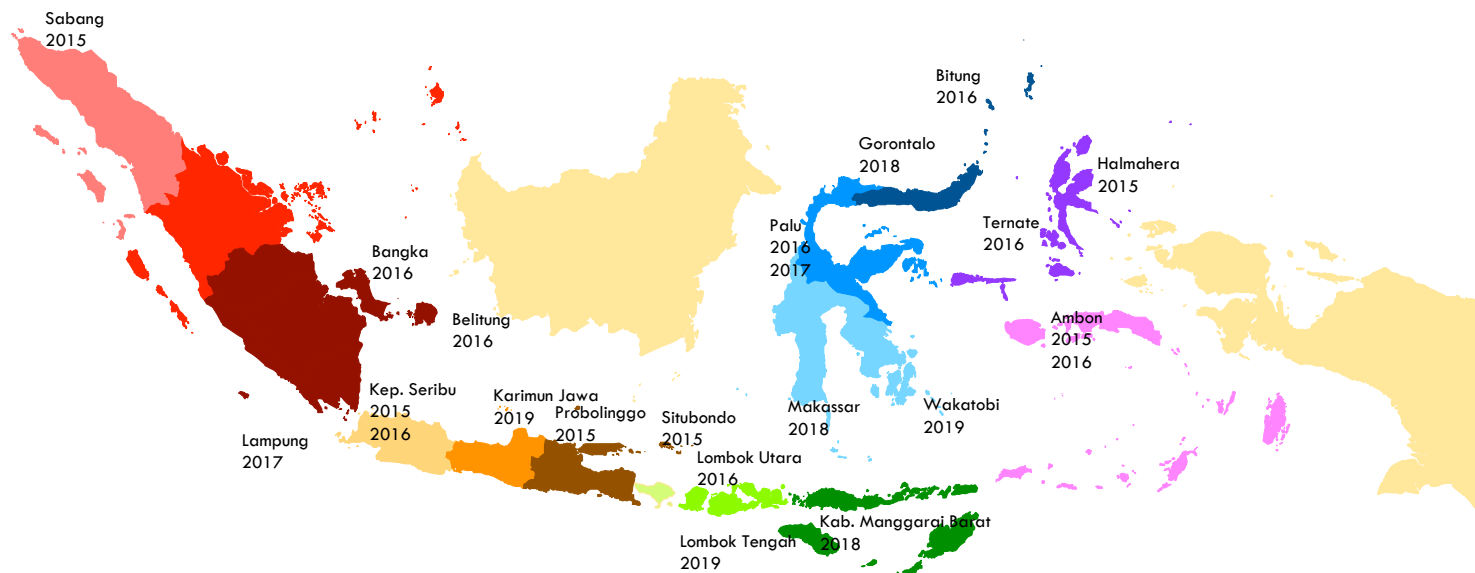
“*Membangun kepedulian sekaligus mengembalikan pesisir pantai sebagai serambi depan halaman Indonesia.*”

Kementerian telah melakukan transplantasi karang di 23 lokasi. Mencakup 2.112 media substrat dengan 31.713 bibit karang dengan luasan total areal yang ditransplantasi sekitar 7.253 meter persegi. Usaha ini dibarengi dengan aksi bersih pantai di 49 kawasan pantai dengan jumlah total peserta 21.348 orang. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 48.236,28 kilogram. Mencakup sebanyak 86,78 persen adalah sampah anorganik dan 13,22 persen adalah sampah organik. Sedangkan untuk kegiatan pembersihan tumpahan minyak, Kementerian ini telah melakukannya di 11 lokasi. Khusus untuk kota Batam dan Kab. Bintan, aktifitas pemberisahan minyak dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2016



Aksi bersih pantai di Tumpeng Karang, Pandeglang, Banten, yang dilakukan pada tahun 2019. Aksi serupa di tahun 2019 dilakukan Pantai Leato Selatan (Gorontalo), Manado (Sulawesi Utara), Angke Kapuk (DKI Jakarta), dan Pantai Mertasari (Bali). Foto oleh Djanuar Arifin.

Sebaran Lokasi Transplantasi Karang 2015-2019





Karang yang semakin sehat telah mengembalikan keragaman jenis ikan, sekaligus menghidupkan destinasi wisata untuk generasi muda yang semakin menyukai belanja pengalaman di wilayah pesisir.

Pemulihan terumbu karang di Bitung Sulawesi Utara. Foto di sebelah kiri diambil pada tahun 2016, sedangkan foto di sebelah kanan tahun 2019.



Pemulihan terumbu karang di Ternate, Maluku Utara. Foto di sebelah kiri diambil pada tahun 2016, sedangkan foto di sebelah kanan tahun 2019.



Pemulihan terumbu karang di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto di sebelah kiri diambil pada tahun 2018, sedangkan foto di sebelah kanan tahun 2019.



Foto oleh Djanuar Arifin.

PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN DARI LIMBAH TAHU TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH (Unit)	KAPASITAS PRODUKSI (KG KEDELAI / HARI)	PENURUNAN BEBAN PENCEMAR BOD (KG/HARI)	EMISI GRK SETARA CO2 (KG/HARI)	POTENSI MANFAAT			
							BIOGAS (M3/HR)	SUBTISUSI ENERGI (LPG) KG/HR	EKONOMI (RP/HR)	JUMLAH KK
1	2016	Kab Gorontalo	1	500	20,00	367,50	15,00	6,90	34.500,00	8
2	2017	Kab Pemalang	1	300	12,00	220,50	9,00	4,14	20.700,00	5
3	2017	Kota Pekalongan	1	500	20,00	367,50	15,00	6,90	34.500,00	8
4	2018	Kab. Indramayu	1	400	16,00	294,00	12,00	5,52	27.600,00	6
5	2018	Kab. Jepara	4	1.350	54,00	992,25	40,50	18,63	93.150,00	20
6	2018	Kab. Garut	1	700	28,00	514,50	21,00	9,66	48.300,00	11
7	2018	Kota Padang Sidempuan	1	100	4,00	73,50	3,00	1,38	6.900,00	2
8	2018	Kab Tapanuli Selatan	1	100	4,00	73,50	3,00	1,38	6.900,00	2
9	2018	Kab Pemalang	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
10	2018	Kab Batang	1	500	20,00	367,50	15,00	6,90	34.500,00	8
11	2018	Kab Penajam Passer Utara	1	150	6,00	110,25	4,50	2,07	10.350,00	2
12	2018	Kab Malang	2	600	24,00	441,00	18,00	8,28	41.400,00	9
13	2018	Kab Batu	1	300	12,00	220,50	9,00	4,14	20.700,00	5
14	2018	Kab Magelang	1	875	35,00	643,13	26,25	12,08	60.375,00	13
15	2018	Kab Wonosobo	1	400	16,00	294,00	12,00	5,52	27.600,00	6
16	2018	Kab Minahasa	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
17	2018	Kab Trenggalek	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
18	2018	Kab Cianjur	3	700	28,00	514,50	21,00	9,66	48.300,00	11
19	2018	Kota Bogor	1	150	6,00	110,25	4,50	2,07	10.350,00	2
20	2018	Kab Tuban	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
21	2018	Kab Lampung Timur	2	350	14,00	257,25	10,50	4,83	24.150,00	5
22	2018	Kab Kutai Timur	1	700	28,00	514,50	21,00	9,66	48.300,00	11
23	2018	Kab Lombok Tengah	1	250	10,00	183,75	7,50	3,45	17.250,00	4
24	2018	Kota Pekanbaru	1	500	20,00	367,50	15,00	6,90	34.500,00	8
25	2018	Kota Palembang	1	1.000	40,00	735,00	30,00	13,80	69.000,00	15
26	2018	Kab Purbalingga	1	450	18,00	330,75	13,50	6,21	31.050,00	7
27	2018	Kab Luwu Utara	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
28	2019	Kabupaten Gorontalo	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
29	2019	Kabupaten Batang	1	100	4,00	73,50	3,00	1,38	6.900,00	2
30	2019	Kota Bogor	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
31	2019	Kabupaten Bogor	1	1.250	50,00	918,75	37,50	17,25	86.250,00	19
32	2019	Kabupaten Kutai Timur	1	150	6,00	110,25	4,50	2,07	10.350,00	2
33	2019	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	300	12,00	220,50	9,00	4,14	20.700,00	5
34	2019	Kota Metro	2	150	6,00	110,25	4,50	2,07	10.350,00	2
35	2019	Kabupaten Malang	1	100	4,00	73,50	3,00	1,38	6.900,00	2
36	2019	Kabupaten Magelang	1	1.000	40,00	735,00	30,00	13,80	69.000,00	15
37	2019	Kabupaten Luwu Utara	1	200	8,00	147,00	6,00	2,76	13.800,00	3
38	2019	Kota Blitar	1	450	18,00	330,75	13,50	6,21	31.050,00	7

PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN DARI LIMBAH TERNAK TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH (Unit)	JUMLAH TERNAK	PENURUNAN BEBAN PENCEMAR BOD (KG/HARI)	EMISI GRK SETARA CO2 (KG/HARI)	POTENSI MANFAAT			
							BIOGAS (M3/HR)	SUBTISUSI ENERGI (LPG) KG/HR	EKONOMI (RP/HR)	JUMLAH KK
1	2015	Kab. Bandung	10	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14
2	2015	Kota Depok	3	48	3,77	129,60	23,04	10,60	52.992,00	12
3	2015	Kab Boyolali	10	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14
4	2015	Kab Sukoharjo	10	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14
5	2015	Kab Sidoarjo	34	45	3,54	121,50	21,60	9,94	49.680,00	11
6	2015	Kab Tulungagung	10	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14
7	2015	Kota Malang	10	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14
8	2016	Kab Gorontalo	4	47	3,69	126,90	22,56	10,38	51.888,00	11
9	2016	Kab Blitar	10	46	3,62	124,20	22,08	10,16	50.784,00	11
10	2016	Kab Bandung	5	20	1,57	54,00	9,60	4,42	22.080,00	5
11	2017	Kab Bojonegoro	8	42	3,30	113,40	20,16	9,27	46.368,00	10
12	2018	Kab. Gresik	8	141	11,08	380,70	67,68	31,13	155.664,00	34
13	2018	Kab Garut	3	20	1,57	54,00	9,60	4,42	22.080,00	5
14	2018	Kab Sidoarjo	2	50	3,93	135,00	24,00	11,04	55.200,00	12
15	2018	Kab Boalemo	3	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
16	2018	Kota Samarinda	6	32	2,52	86,40	15,36	7,07	35.328,00	8
17	2018	Kab Malang	12	65	5,11	175,50	31,20	14,35	71.760,00	16
18	2018	Kota Batu	8	63	4,95	170,10	30,24	13,91	69.552,00	15
19	2018	Kab Wonosobo	2	44	3,46	118,80	21,12	9,72	48.576,00	11
20	2018	Kab. Bogor	24	131	10,30	353,70	62,88	28,92	144.624,00	31
21	2018	Kab Minahasa	2	8	0,63	21,60	3,84	1,77	8.832,00	2
22	2018	Kab Minahasa Utara	3	12	0,94	32,40	5,76	2,65	13.248,00	3
23	2018	Kab Minahasa Selatan	3	14	1,10	37,80	6,72	3,09	15.456,00	3
24	2018	Kab Mimika	8	46	3,62	124,20	22,08	10,16	50.784,00	11
25	2018	Kab Ponorogo	8	44	3,46	118,80	21,12	9,72	48.576,00	11
26	2018	Kab Ngawi	8	40	3,14	108,00	19,20	8,83	44.160,00	10

PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN DARI LIMBAH TERNAK TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH (Unit)	JUMLAH TERNAK	PENURUNAN BEBAN PENCEMAR BOD (KG/HARI)	EMISI GRK SETARA CO2 (KG/HARI)	POTENSI MANFAAT			
							BIOGAS (M3/HR)	SUBTISUSI ENERGI (LPG) KG/HR	EKONOMI (RP/HR)	JUMLAH KK
27	2018	Kab Magetan	1	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
28	2018	Kab Pacitan	3	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
29	2018	Kab Cianjur	1	6	0,47	16,20	2,88	1,32	6.624,00	1
30	2018	Kab Kutai Timur	2	160	12,58	432,00	76,80	35,33	176.640,00	38
31	2018	Kab Takalar	4	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
32	2018	Kab Jeneponto	3	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
33	2018	Kab Gowa	3	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
34	2018	Kab Tuban	11	75	5,90	202,50	36,00	16,56	82.800,00	18
35	2018	Kab Bojonegoro	9	47	3,69	126,90	22,56	10,38	51.888,00	11
36	2018	Kab Soppeng	2	30	2,36	81,00	14,40	6,62	33.120,00	7
37	2018	Kab Lombok Barat	1	4	0,31	10,80	1,92	0,88	4.416,00	1
38	2018	Kab Lombok Tengah	4	12	0,94	32,40	5,76	2,65	13.248,00	3
39	2018	Kab Lombok Timur	5	20	1,57	54,00	9,60	4,42	22.080,00	5
40	2018	Kab Tulang Bawang Barat	19	88	6,92	237,60	42,24	19,43	97.152,00	21
41	2018	Kab Penajam Passer Utara	3	45	3,54	121,50	21,60	9,94	49.680,00	11
42	2018	Kab Bulungan	34	136	10,69	367,20	65,28	30,03	150.144,00	33
43	2018	Kota Tanjungbalai	3	22	1,73	59,40	10,56	4,86	24.288,00	5
44	2018	Kab Toraja Utara	4	40	3,14	108,00	19,20	8,83	44.160,00	10
45	2018	Kab Sukoharjo	6	28	2,20	75,60	13,44	6,18	30.912,00	7
46	2019	Kabupaten Takalar	4	19	1,49	51,30	9,12	4,20	20.976,00	5
47	2019	Kabupaten Bantaeng	5	16	1,26	43,20	7,68	3,53	17.664,00	4
48	2019	Kabupaten Sidenreng Rappang	3	9	0,71	24,30	4,32	1,99	9.936,00	2
49	2019	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	5	19	1,49	51,30	9,12	4,20	20.976,00	5
50	2019	Kabupaten Ogan Ilir	7	347	27,27	936,90	166,56	76,62	383.088,00	83
51	2019	Kabupaten Gorontalo	5	58	4,56	156,60	27,84	12,81	64.032,00	14
52	2019	Kabupaten Bogor	2	60	4,72	162,00	28,80	13,25	66.240,00	14

PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN DARI LIMBAH TERNAK TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH (Unit)	JUMLAH TERNAK	PENURUNAN BEBAN PENCEMAR BOD (KG/HARI)	EMISI GRK SETARA CO2 (KG/HARI)	POTENSI MANFAAT			
							BIOGAS (M3/HR)	SUBTISUSI ENERGI (LPG) KG/HR	EKONOMI (RP/HR)	JUMLAH KK
53	2019	Kota Tarakan	15	105	8,25	283,50	50,40	23,18	115.920,00	25
54	2019	Kota Balikpapan	1	100	7,86	270,00	48,00	22,08	110.400,00	24
55	2019	Kabupaten Lombok Barat	5	24	1,89	64,80	11,52	5,30	26.496,00	6
56	2019	Kabupaten Lombok Timur	6	21	1,65	56,70	10,08	4,64	23.184,00	5
57	2019	Kabupaten Lombok Tengah	7	43	3,38	116,10	20,64	9,49	47.472,00	10
58	2019	Kota Manado	2	30	2,36	81,00	14,40	6,62	33.120,00	7
59	2019	Kabupaten Minahasa Utara	2	50	3,93	135,00	24,00	11,04	55.200,00	12
60	2019	Kabupaten Minahasa Selatan	3	22	1,73	59,40	10,56	4,86	24.288,00	5
61	2019	Kabupaten Minahasa	2	19	1,49	51,30	9,12	4,20	20.976,00	5
62	2019	Kabupaten Pringsewu	8	30	2,36	81,00	14,40	6,62	33.120,00	7
63	2019	Kabupaten Lampung Selatan	8	27	2,12	72,90	12,96	5,96	29.808,00	6
64	2019	Kabupaten Pesawaran	8	42	3,30	113,40	20,16	9,27	46.368,00	10
65	2019	Kabupaten Kampar	3	200	15,72	540,00	96,00	44,16	220.800,00	48
66	2019	Kabupaten Kubu Raya	5	15	1,18	40,50	7,20	3,31	16.560,00	4
67	2019	Kabupaten Kayong Utara	5	15	1,18	40,50	7,20	3,31	16.560,00	4
68	2019	Kabupaten Malang	2	19	1,49	51,30	9,12	4,20	20.976,00	5
69	2019	Kabupaten Gunung Kidul	1	15	1,18	40,50	7,20	3,31	16.560,00	4
70	2019	Kabupaten Toraja Utara	3	140	11,00	378,00	67,20	30,91	154.560,00	34
71	2019	Kabupaten Lampung Timur	8	30	2,36	81,00	14,40	6,62	33.120,00	7
72	2019	Kabupaten Purbalingga	3	54	4,24	145,80	25,92	11,92	59.616,00	13
73	2019	Kabupaten Garut	5	27	2,12	72,90	12,96	5,96	29.808,00	6
74	2019	Kabupaten Gresik	1	40	3,14	108,00	19,20	8,83	44.160,00	10
75	2019	Kabupaten Bima	5	16	1,26	43,20	7,68	3,53	17.664,00	4

E. PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

” Penyediaan teknologi yang semakin ramah terhadap lingkungan dan kesehatan. Sembari mempertahankan perikehidupan masyarakat ”



PENGUATAN KEBIJAKAN DAN REGULASI NASIONAL

Peraturan Presiden tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri



PENGENALAN TEKNOLOGI BEBAS MERKURI

9 kabupaten di 8 provinsi



PENGHAPUSAN DAN PENARIKAN ALAT KESEHATAN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

85 rumah sakit di 23 provinsi



PENGURANGAN MERKURI DI SEKTOR ENERGI

Penerapan perangkat pengontrol polusi udara di pembangkit listrik



PENINGKATAN KAPASITAS

Dilakukan di 34 provinsi



PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI

Lebak di 2019 dan kajian awal di Pulau Buru



TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI

Menghilangkan ketergantungan penggunaan merkuri di Banyumas dengan Kampung Ilmu



PENEGAKAN HUKUM

Penertiban tambang sinabar ilegal di Pulau Seram dan penertiban tambang emas skala kecil ilegal di Pulau Buru



DIPLOMASI INTERNASIONAL

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Pertemuan Para Pihak ke 4 Konvensi Minamata pada 2021

PEMANFAATAN LIMBAH SEBAGAI USAHA EKONOMI

” *Mengurangi beban lingkungan sembari mengayunkan langkah ekonomi masyarakat* ”

DARI SAMPAH PLASTIK MENJADI ASPAL

Cerita pemanfaatan sampah plastik di Maros dan Kulon Progo.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemanfaatan sampah plastik jenis LDPE (kantung kresek) di Jalan Dakota, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas aspal yang dicampur dengan plastik lebih kuat sebesar 40 persen.

Kebutuhan bahan bakunya dijelaskan bahwa untuk mengaspal 1 kilometer jalan yang terdiri atas 2 lajur selebar 7 meter dengan ketebalan 4 sentimeter, setidaknya dibutuhkan plastik resek sekitar 2,5 – 3 ton. Penyediaan bahan bakunya pun melimpah. Datanya diperkirakan dalam setahun 10 miliar lembar atau 85.000 ton kantung plastik terbuang di lingkungan.

Di Kulon Progo, DIY, pelajar sekolah mengumpulkan sampah plastik berupa kantung kresek di sekolah. Diperkirakan, dalam sebulan akan menuai 2 juta plastik. Langkah ini menyambut ajakan Kementerian PUPR untuk menyediakan 8,5 ton plastik yang akan digunakan sebagai bahan campuran aspal. Selain melibatkan pelajar, Kulon Progo juga akan memberdayakan bank sampah sebanyak 37 unit. Bank sampah akan menerima setoran plastik kresek dari pihak sekolah. Selanjutnya menyediakan tabungan untuk anak-anak sekolah yang menyortir sampah.

Sumber : <https://properti.kompas.com> dan <https://news.detik.com>. Keduanya diunduh pada tanggal 31 Januari 2020.

DARI OLI BEKAS MENJADI SOLAR

Cerita pemanfaatan pengolahan limbah B3 di TPA Sampah Regional Banjarbakula, Kota Banjarbaru

Keberadaan alat berat dalam jumlah yang banyak di perusahaan tambang batubara dan perusahaan kelapa sawit menyisakan oli bekas yang masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kondisi ini mengilhami Kementerian LHK dan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengolahnya menjadi solar HSD (*high speed diesel*).

Proses olahannya dilakukan melalui destilasi (penyulingan) pada temperature 350 derajat celsius. Oli bekas yang dicampur dengan *natrium hidroksida* (NaOH) sekitar 10 persen dari bahan bakunya. NaOH ini berfungsi sebagai katalis dan tak ikut dalam rekasi. Proses ini akan menghasilkan solar yang cukup baik, mendekati solar yang memiliki setana (*cetane number*) sebesar 48. Artinya hampir sama dengan produk biosolar yang dipasarkan oleh Pertamina.

Pengolahan oli bekas menjadi solar HSD berlangsung selama 5 hari (5 x 24 jam). Dalam sekali produksi, TPA ini menghasilkan 5.000 liter solar HSD. Angka itu merupakan 70 persen dari bahan baku oli bekas. Sedangkan residunya, sebesar 30 persen bahan baku, digunakan sebagai bahan bakar selama pengolahan.

Pengolahan limbah ini difasilitasi oleh Kementerian LHK dengan bantuan teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Fasilitas ini merupakan percontohan yang skala produksinya masih pada angka 10.000 liter per bulan. Sekiranya dimaksimalkan akan mencapai 20.000 liter per bulan.

Secara ekonomi, harga ideal per liter solar HSD sebesar Rp.8.500,- karena tergolong ke dalam solar industri. Meskipun begitu, harga solar ini masih di bawah harga biosolar. Ditambah lagi beberapa perusahaan telah menyampaikan minatnya untuk membeli. Namun demikian, solar HSD ini belum dikomersialkan.

Sumber : Kompas, Rabu 29 Januari 2020. Halaman 15. Judul Artikel Pemrosesan Oli Bekas Diolah Jadi Solar.

F. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan skala penegakan hukum sebagai upaya perbaikan kondisi lingkungan.

3.619

Penanganan Pengaduan

1.098

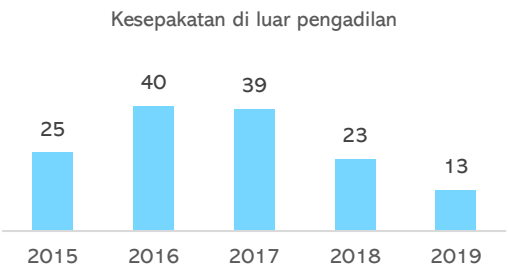
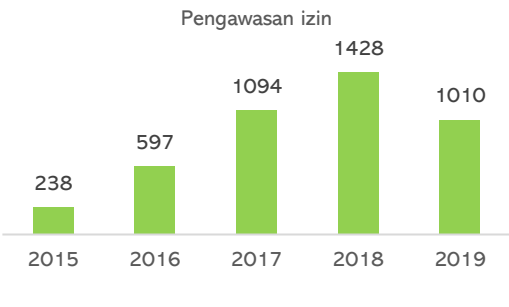
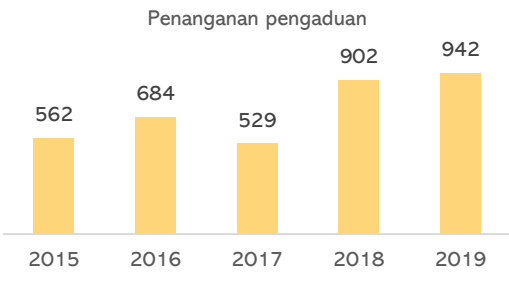
Sanksi administrasi

26

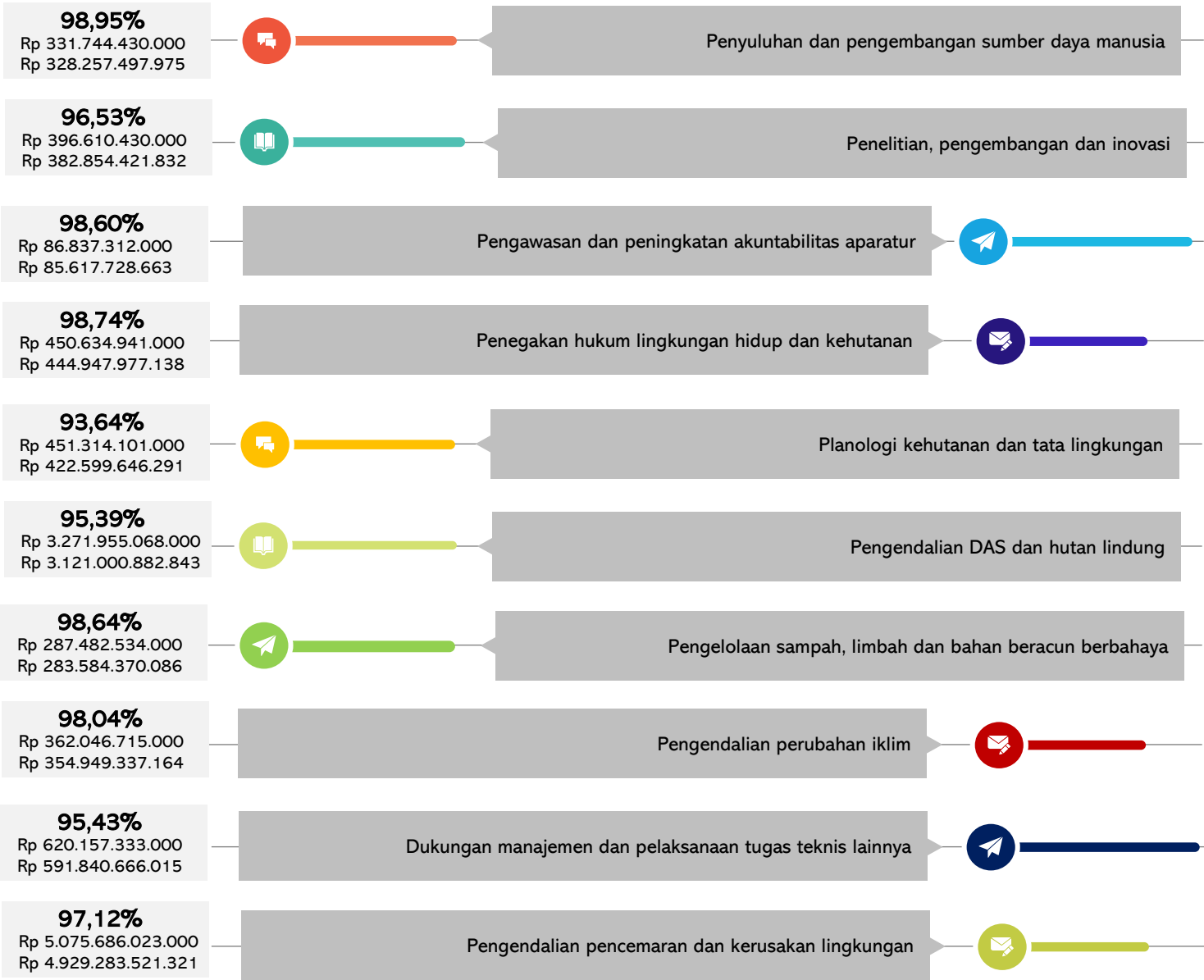
Gugatan perdata melalui pengadilan. Sebelas diantaranya inkrah dengan nilai putusan sebesar Rp.19,4 triliun



Foto oleh Ditjen Penegakan Hukum LHK



EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 1



Persentase Realisasi Anggaran (input) **95,73 %**

Persentase Capaian (output) **100,09 %**

Efisiensi **0,95**

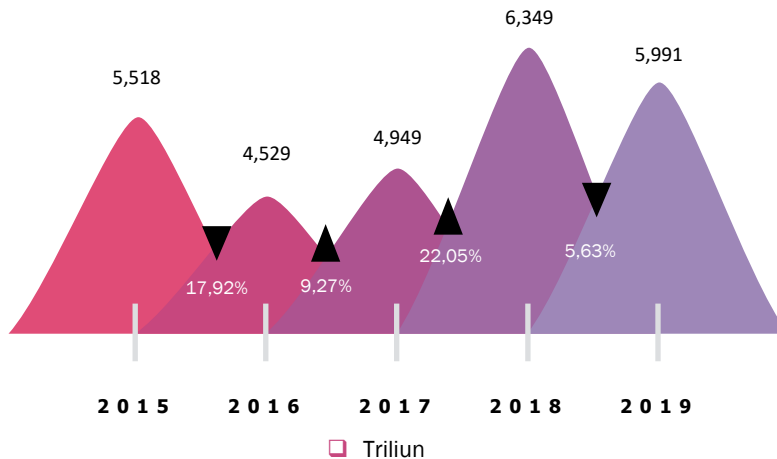
kategori **Efisien**

Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 1 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 1, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.



Puncak Bulusaraung yang terdiri dari gugusan pegunungan Karst yang terletak di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung membentuk lanskap nan mempesona. Foto oleh Chaeril Eril.

Penerimaan negara sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan taman nasional melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.



Ikhtisar Kinerja	Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rencana	Rp. 3,9 Triliun
Capaian	Rp. 5,991 Triliun
Kinerja 2019	153,61 %
Y o Y (2018-2019)	▼ 5,63 %
Capaian 2015-2019 terhadap Renstra	153,57 %



Rp. 5.194,42 Miliar

Pendapatan Kehutanan : Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi



Rp. 364,36 Miliar

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan : Pendapatan Bunga dari rekening pembangunan hutan, Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahar atau pejabat lain, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara

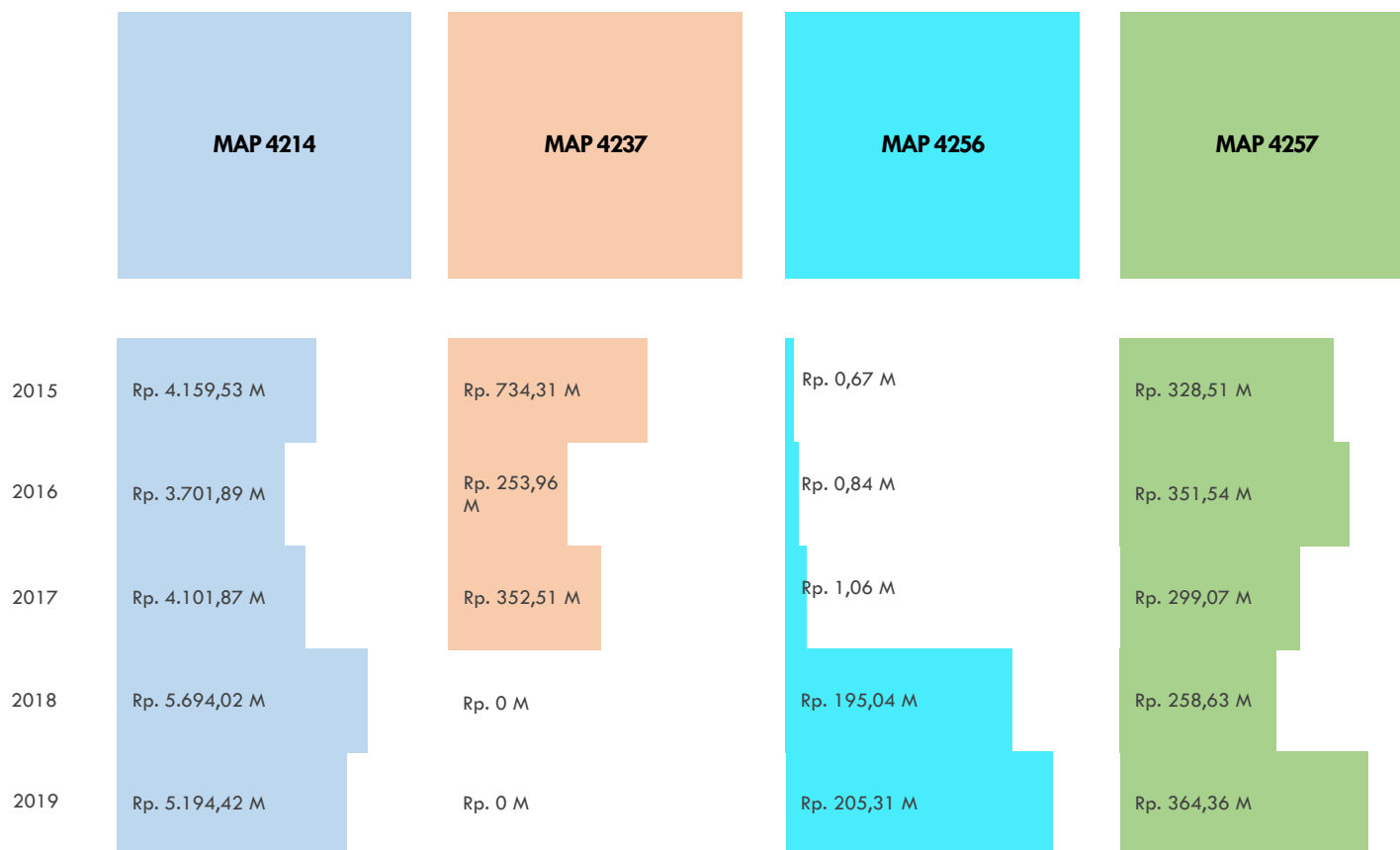


Rp. 205,31 Miliar

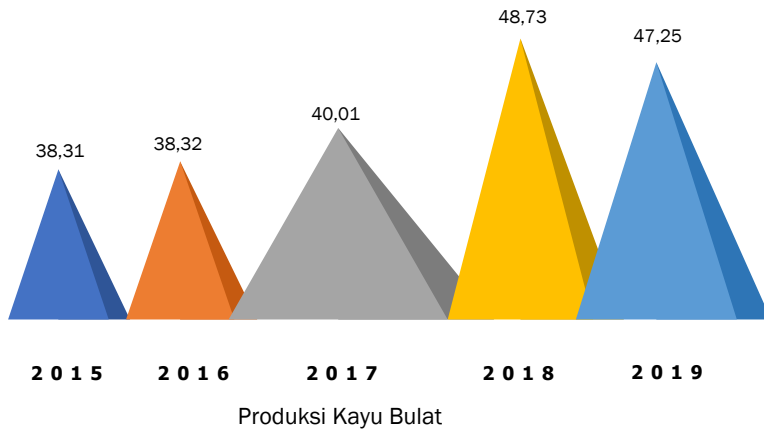
Pendapatan Jasa Lainnya : Pendapatan wisata alam, Pendapatan Iuran Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendapatan JAsa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK MENURUT MATA ANGGARAN PENERIMAAN

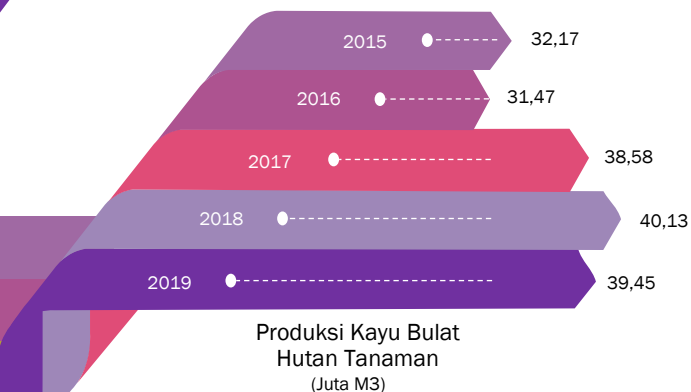
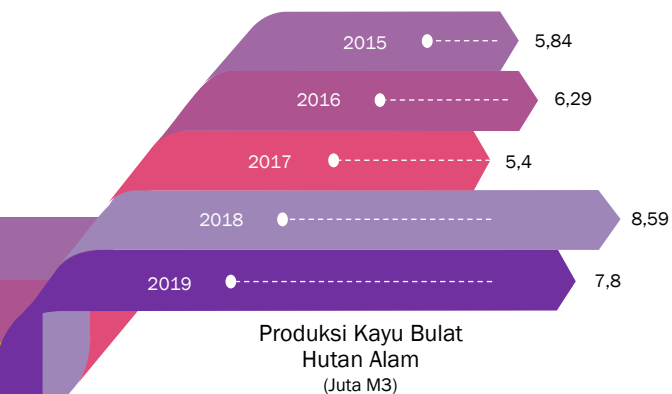
Perkembangan penerimaan negara menurut mata anggaran pendapatan mengalami penataan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018. Pungutan masuk wisata alam yang sebelumnya berada pada mata anggaran penerimaan (MAP) 4237 namun demikian secara konsisten pendapatan yang bergabung bersama Pendapatan luran dan Denda, pindah ke MAP 4256 menjadi Pendapatan Jasa Lainnya dalam bentuk pendapatan wisata alam. Demikian halnya dengan pendapatan bunga dari rekening pembangunan hutan yang tergabung dalam Pendapatan Bunga (MAP 4257) yang sebelumnya termasuk dalam bagian MAP 4233.



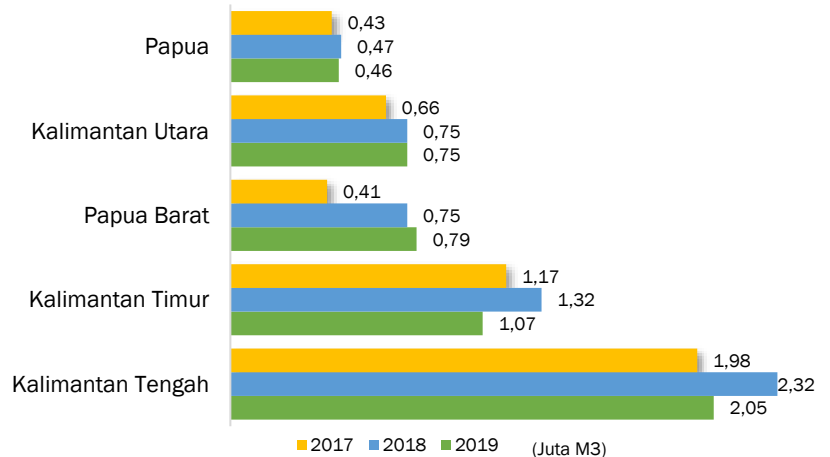
PENDAPATAN NEGARA DARI PRODUKSI KAYU BULAT INDONESIA



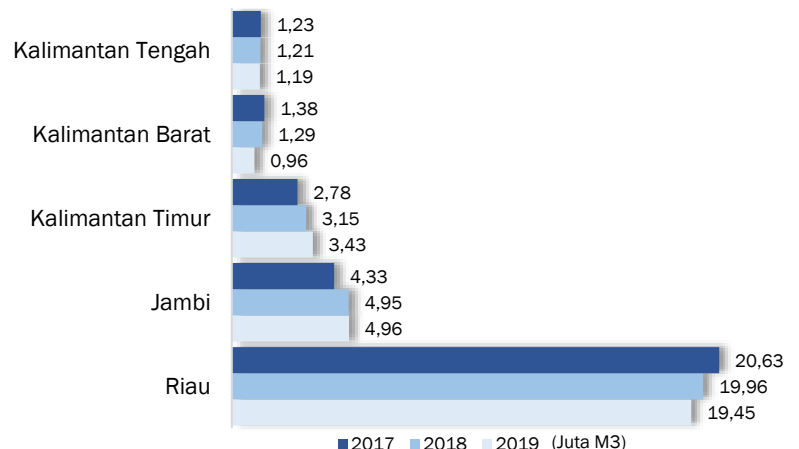
Produksi kayu bulat merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Produk hulu ini telah menggerakkan ekspor dalam bentuk pulp (bahan baku kertas), furniture dan kayu olahan. Kalimantan Tengah dan Riau menjadi produsen utama produksi kayu bulat baik untuk hutan alam dan hutan tanaman. Provinsi lain berkejaran mengikuti di belakangnya. Kayu bulat yang diproduksi ini berasal dari hutan alam dan hutan tanaman yang pengelolaannya dilakukan oleh pemegang ijin.



❖ Provinsi terbanyak produksi kayu bulat hutan alam

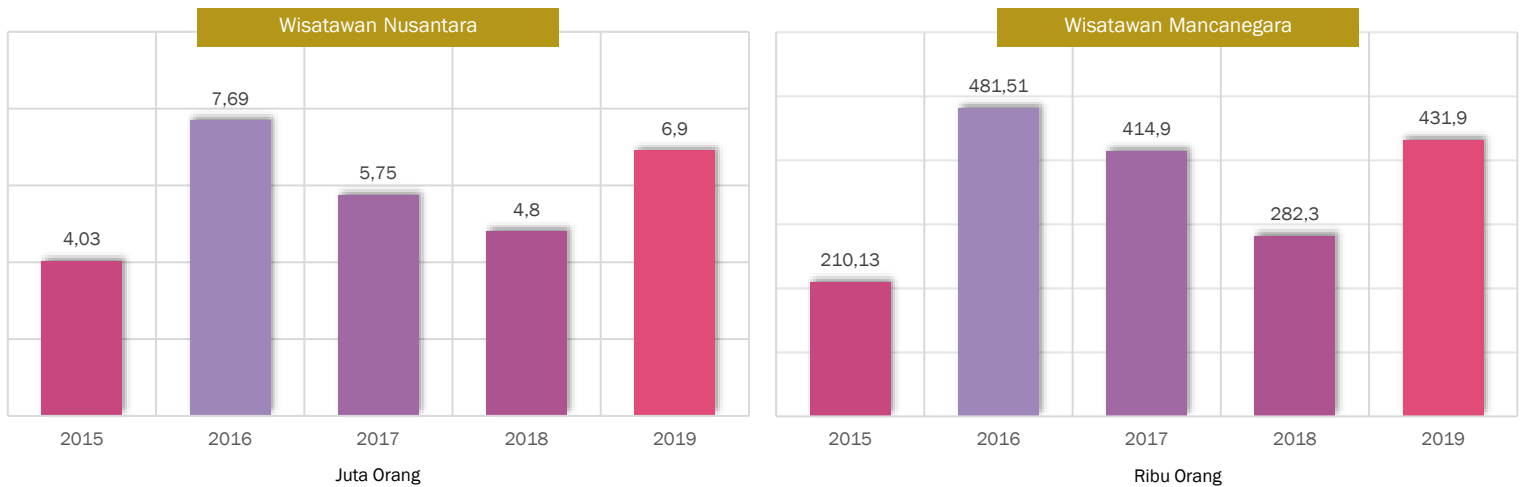


❖ Provinsi terbanyak produksi kayu bulat hutan tanaman

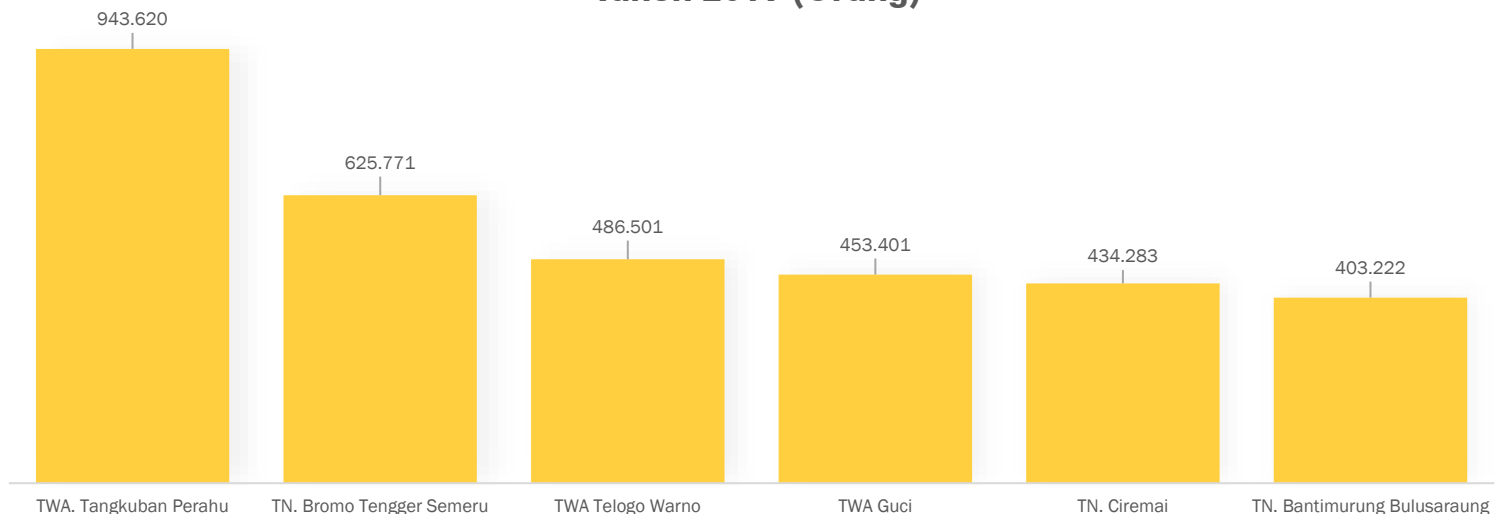


PENDAPATAN NEGARA DARI KUNJUNGAN WISATAWAN

Indonesia, negara yang terdiri dari banyak daerah yang memiliki potensi pariwisata khususnya wisata alam. Belanja pengalaman ini menjadi salah satu penggerak sektor perekonomian. Tak hanya kaum milenial saja yang senang dengan pengalaman wisata alam, dari semua kalangan menunjukkan geliatnya dalam belanja pengalaman tak terlupakan ini. Kunjungan wisata yang relatif meningkat menunjukkan perputaran roda ekonomi yang semakin membaik



6 Destinasi Wisata dengan Kunjungan Tertinggi Tahun 2019 (Orang)



REKAPITULASI PNBP BIDANG JASA LINGKUNGAN
MASUK OBJEK WISATA ALAM

No	Satuan Kerja	Jumlah PNBP (Rp)
1	BTN Komodo	37.998.313.500
2	BBTN Bromo Tengger Semeru	23.935.261.500
3	BBKSDA Jawa Barat	18.024.522.750
4	BKSDA Jawa Tengah	8.492.835.000
5	BBTN GN. Gede Pangrango	7.982.922.500
6	BTN Bali Barat	6.399.566.000
7	BTN Tanjung Putting	5.917.468.000
8	BTN Baluran	4.884.048.500
9	BTN Alas Purwo	4.765.923.000
10	BBKSDA Jawa Timur	4.635.990.000
11	BKSDA Bali	4.464.950.500
12	BTN Gunung Rinjani	3.925.748.000
13	BTN Bunaken	3.390.450.000
14	BTN Kelimutu	3.085.384.500
15	BTN Bantimurung Bulusaraung	2.739.309.000
16	BTN Gunung Ceremai	2.404.975.000
17	BTN Gunung Merbabu	2.352.980.500
18	BBTN Gunung Leuser	2.162.644.000
19	BTN Gunung Halimun Salak	1.647.300.500
20	BKSDA DKI Jakarta	1.137.070.000
21	BKSDA Sumatera Selatan	1.075.500.000
22	BTN Way Kambas	968.385.500
23	BTN Gunung Merapi	942.687.500
24	BTN Meru Betiri	700.784.000
25	BKSDA Sulawesi Utara	698.847.500
26	BBTN Teluk Cendrawasih	696.740.000
27	BKSDA Kalimantan Selatan	663.870.000
28	BKSDA Nusa Tenggara Barat	650.467.500
29	BBKSDA Sulawesi Selatan	530.742.500
30	BBTN Lore Lindu	516.505.500
31	BTN Kepulauan Togean	469.165.000
32	BTN Wakatobi	401.315.000
33	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	320.626.000
34	BBTN Kerinci Seblat	304.015.000
35	BTN Karimun Jawa	299.135.000
36	BTN Kutai	292.913.000
37	BTN Kepulauan Seribu	279.177.000
38	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi W	276.369.500

No	Satuan Kerja	Jumlah PNPB (Rp)
39	BKSDA Bengkulu	247.634.000
40	BTN Ujung Kulon	228.642.000
41	BKSDA Kalimantan Timur	227.477.500
42	BTN Tambora	118.942.500
43	BTN Takabone Rate	114.315.000
44	BBTN Bukit Barisan Selatan	105.057.500
45	BBTN Betung Kerihun Sentarum	99.469.500
46	BTN Sebangau	90.190.000
47	BKSDA Kalimantan Tengah	83.320.000
48	BKSDA Sulawesi Tenggara	71.865.000
49	BTN Lorentz	70.420.000
50	BTN Manusela	65.610.000
51	BKSDA Kalimantan Barat	60.713.000
52	BBKSDA Sumatera Utara	56.066.500
53	BTN Gunung Palung	50.540.000
54	BKSDA Sumatera Barat	49.250.000
55	BTN Bogani Nani Wartabone	47.305.000
56	BTN Bukit Dua Belas	41.696.500
57	BKSDA Sulawesi Tengah	32.880.000
58	BKSDA NAD	28.160.000
59	BTN Berbak Sembilang	27.330.000
60	BTN Bukit Baka Bukit Raya	25.845.000
61	BTN Siberut	22.500.000
62	BTN Rawa Aopa Watumuhai	20.061.000
63	BTN Aketajawe Lolobata	17.358.000
64	BTN Tesso Nilo	14.227.500
65	BTN Bukit Tiga Puluh	14.140.000
66	BKSDA D.I Yogyakarta	12.471.000
67	BTN Wasur	10.964.000
68	BBKSDA Riau	8.932.000
69	BBKSDA Papua Barat	2.170.000
70	BKSDA Maluku	2.105.000
71	BTN Batang Gadis	801.000
72	BBKSDA Papua	-
73	BKSDA Jambi	-
74	BTN Kayan Mentarang	-
A	Jumlah TN	120.924.901.000
B	Jumlah KSDA	41.578.465.750
C	Jumlah TN + KSDA	162.503.366.750
D	Dit. PJLHK	8.682.229.795
Jumlah Total		171.185.596.545

REKAPITULASI PNPB DARI MENANGKAP/MENGAMBIL/MENGANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PER SATUAN KERJA TAHUN 2019

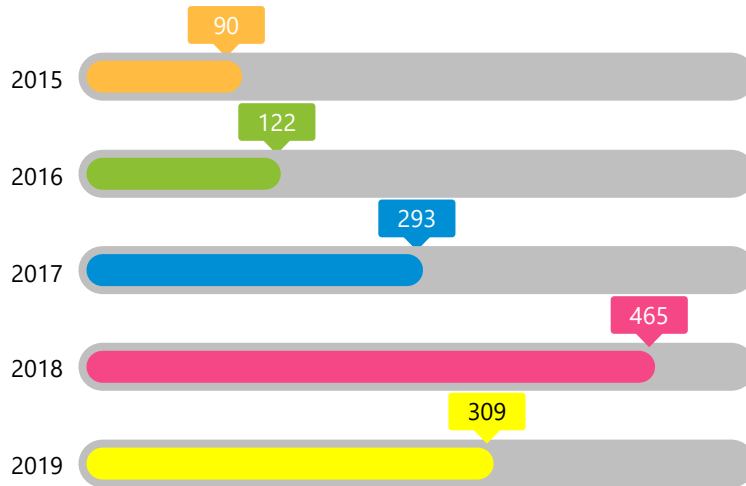
NO	UPT	Jumlah (Rp)
1	Direktorat KKH	16.060.544.335
2	BBKSDA Sumut	659.378.455
3	BBKSDA Riau	277.462.795
4	BBKSDA Jabar	676.998.523
5	BBKSDA Jatim	1.032.383.840
6	BBKSDA NTT	14.318.116
7	BBKSDA Sulsel	126.913.000
8	BBKSDA Papua	581.190.903
9	BBKSDA Papua Barat	140.934.650
10	BKSDA NAD	94.967.200
11	BKSDA Sumbar	65.871.025
12	BKSDA Jambi	103.167.360
13	BKSDA Sumsel	471.138.800
14	BKSDA Bengkulu	138.823.680
15	BKSDA Jakarta	314.915.000
16	BKSDA Jateng	457.306.460
17	BKSDA Yogyakarta	122.125.000
18	BKSDA Bali	140.191.912
19	BKSDA NTB	57.795.000
20	BKSDA Kalbar	627.373.740
21	BKSDA Kalteng	119.501.110
22	BKSDA Kalsel	131.247.000
23	BKSDA Kaltim	55.840.000
24	BKSDA Sulteng	155.264.268
25	BKSDA Sultra	75.057.516
26	BKSDA Sulut	52.075.320
27	BKSDA Maluku	137.869.036
JUMLAH		22.890.654.044

Sumber :
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

PENEGAKAN HUKUM UNTUK MENJAGA HAK-HAK NEGARA ATAS HUTAN DAN HASIL HUTAN

Banyaknya aktifitas penebangan kayu tidak sah, termasuk memungut/mengedarkan tumbuhan dan satwa liar telah merugikan negara. Operasi pengamanan dilakukan sebagai bentuk menghadirkan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Total Operasi Pengamanan dan Pemulihan Hutan dan Hasil Hutan



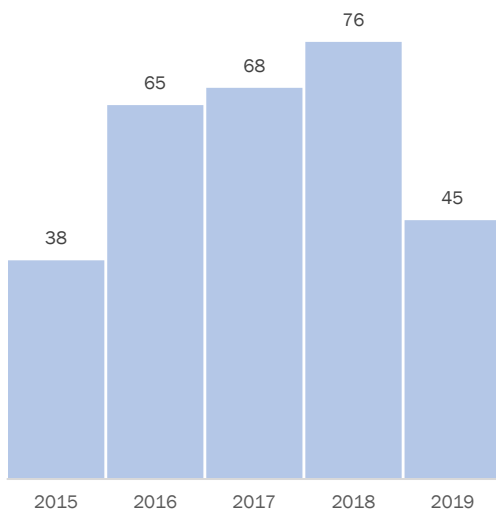
Hasil Operasi

Operasi pemulihan kawasan hutan ➤ 22.633,455 Ha

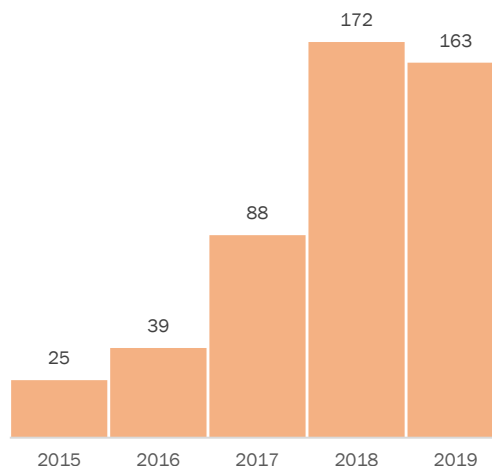
Operasi peredaran TSL ➤ 227.420 ekor satwa
12.698 buah bagian tubuh

Operasi pembalakan liar ➤ 36.770,11 m³

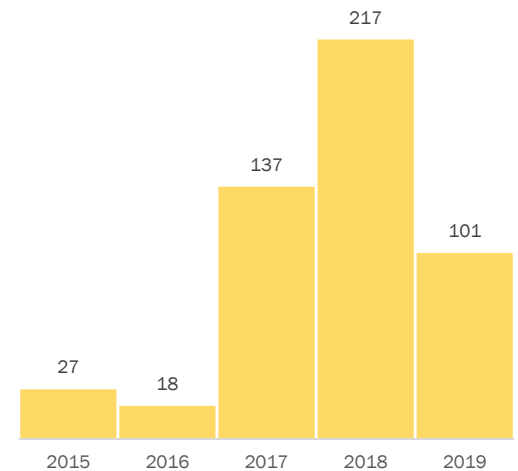
Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar



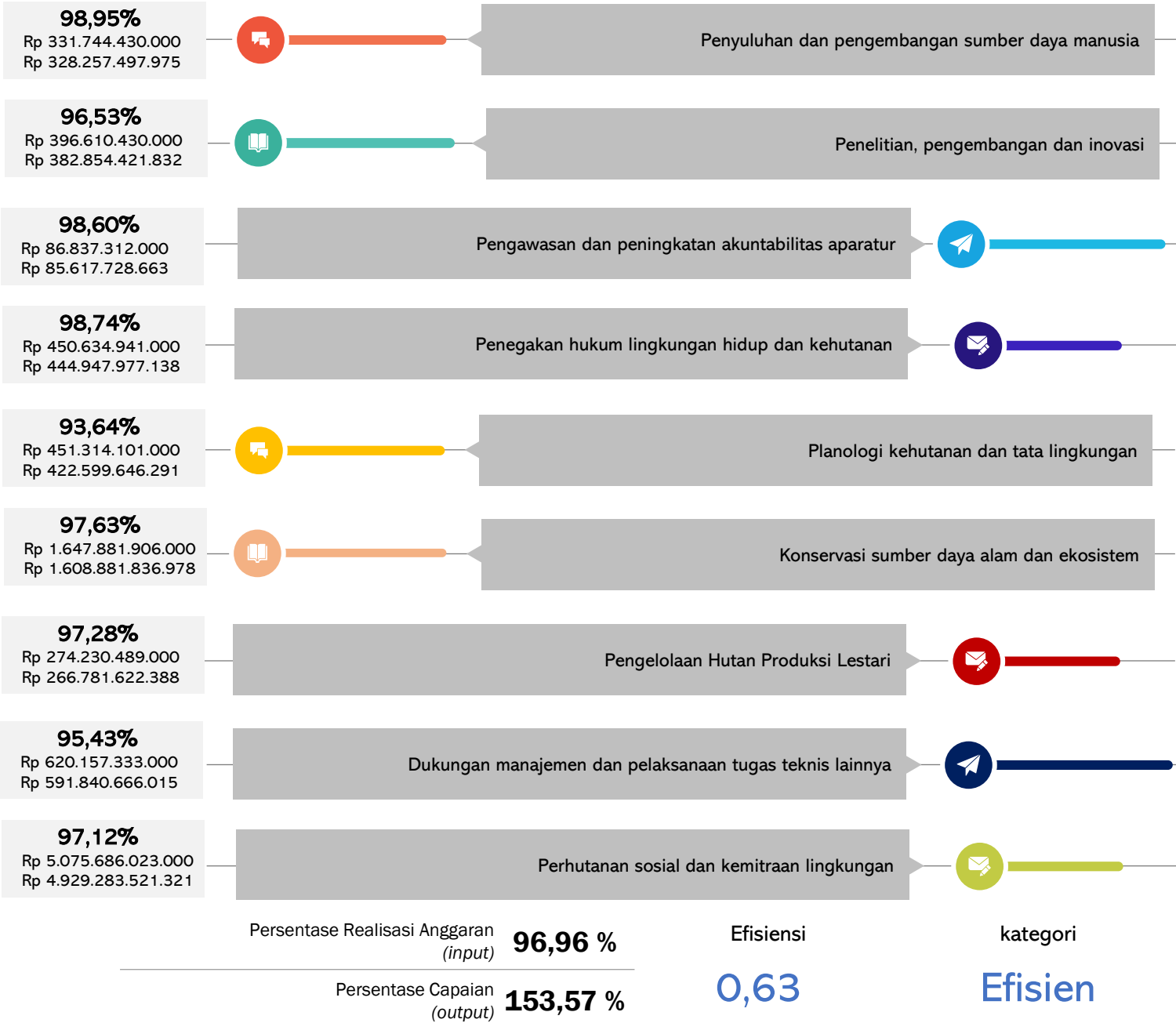
Operasi Pembalakan Liar



Operasi Perambahan Hutan



EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 2

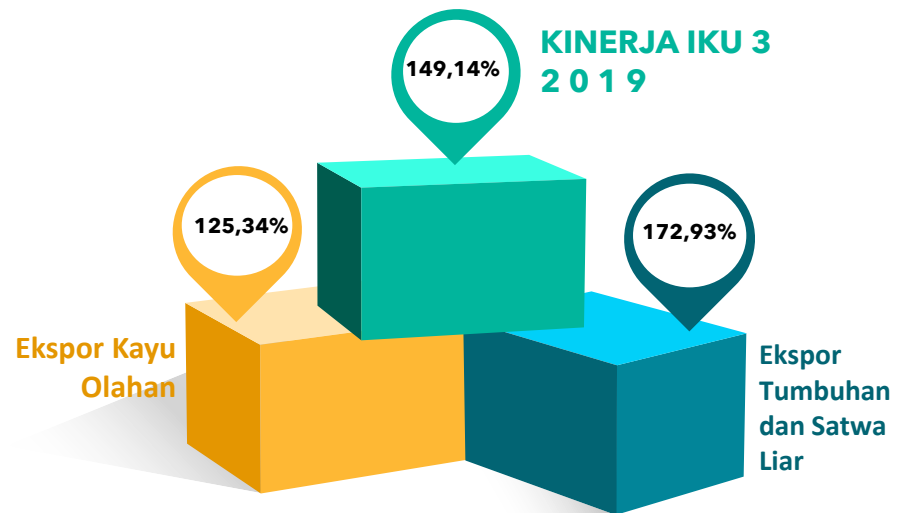


Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 2 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 2, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.



Patung kayu ukir karya kelompok pengrajin Bina Karya di Desa Bobung, Kab. Gunung Kidul tertata dengan rapi di Sanggar yang biasa digunakan kelompok untuk menyambut wisatawan. Pengunjung dilibatkan dalam pembuatan kerajinan berbahan baku Pulai dan Sengon tersebut, dimulai dari mengukir, melukis pola, hingga pewarnaan dengan cara dibatuk. Satu patung ukir dihargai sebesar Rp.40.000- Rp. 60.000 bergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan motif. Foto oleh Mugi Restunaesha.

Ikhtisar Kinerja	Kayu Olahan	TSL
Rencana	US\$ 9,28 M	IDR 5,8 T
Capaian	US\$ 11,63 M	IDR 10,03 T
YoY (2017-2018)	▼ 4,12%	▼ 29,25%
Capaian 2015-2019 terhadap renstra	133,28%	159,74%



Nilai Ekspor hasil hutan disumbangkan dari produk kayu olahan dan TSL. Nilai ekspor kayu olahan Tahun 2019 sebesar US\$ 11,63 Miliar. Perolehan tersebut turun sebesar 4,12% dibandingkan capaian Tahun 2018. Perbandingan rencana dan capaian Tahun 2019 menggambarkan kinerja sebesar 125,34,% untuk ekspor kayu olahan. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar 172,93% dengan capaian mencapai Rp. 10,03 triliun. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 29,25%. Perbandingan kumulatif nilai ekspor 2015 - 2018 dengan target kinerja hingga 2015 - 2019 memberikan angka 133,30% untuk kayu olahan dan 159,74% untuk TSL.

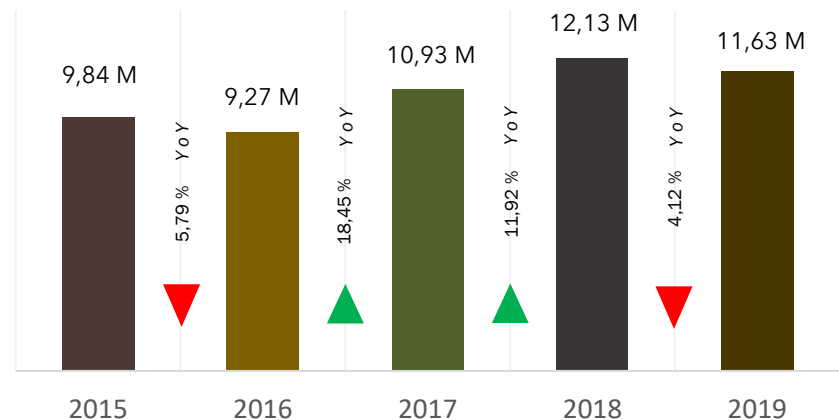
Menyambut lembut sinar fajar di Ranu Kumbolo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi ini merupakan salah satu spot *camping* yang digemari oleh para pendaki. Foto oleh BBTN Bromo Tengger Semeru

EKSPOR PRODUK KAYU OLAHAN

“ Industri pengolahan kayu yang semakin menopang devisa negara. Ditandai dengan nilai ekspor kayu olahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ”

Rencana	capaian	kinerja 2019	YoY (2019-2018)	Capaian 2015-2019 terhadap renstra
9,28 M	11,63 M	125,34%	▼ 4,12%	133,30%

NILAI EKSPOR KAYU OLAHAN 2015 - 2019



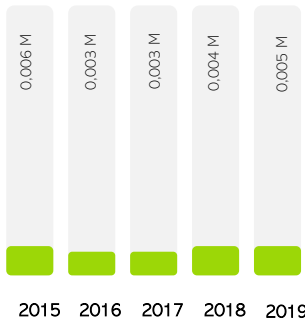
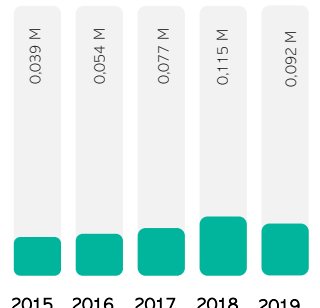
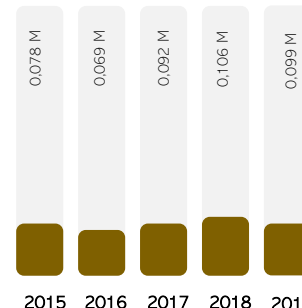
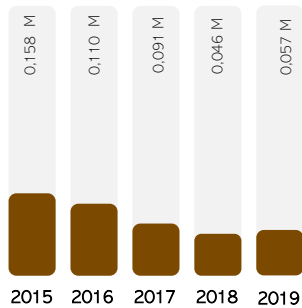
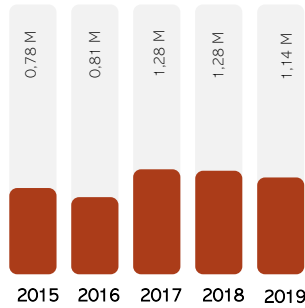
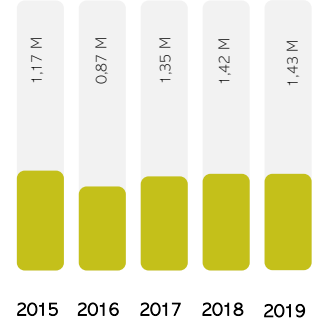
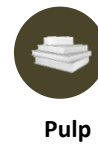
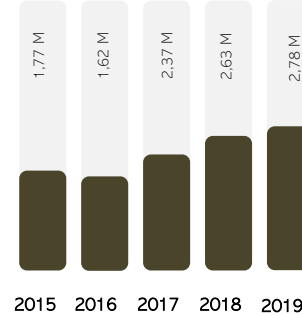
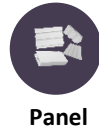
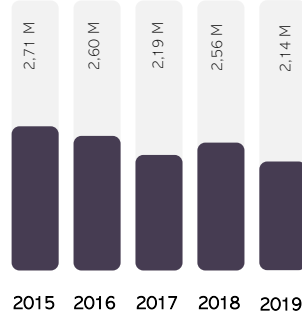
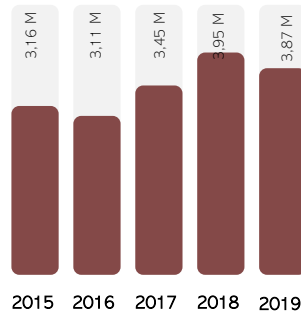
Ekspor produk kayu olahan memberikan kinerja positif terhadap nilai ekspor di sektor kehutanan Target nilai ekspor kayu olahan tahun 2019 sebesar USD 9,28 Miliar

Capaian Nilai ekspor kayu olahan Tahun 2019 sebesar 125,34% Dari target atau sebesar US\$ 11,63 Miliar. Perolehan tersebut turun sebesar 4,12% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Sementara jika dibandingkan berdasarkan target renstra sebesar USD 40,37 Miliar, telah terealisasi sebesar USD 53,82 Miliar atau 133,30%.

Foto dibawah diambil oleh Abdul Kholik.



NILAI EKSPOR KAYU OLAHAN BERDASARKAN JENIS PRODUK 2019 (Angka dalam US\$)

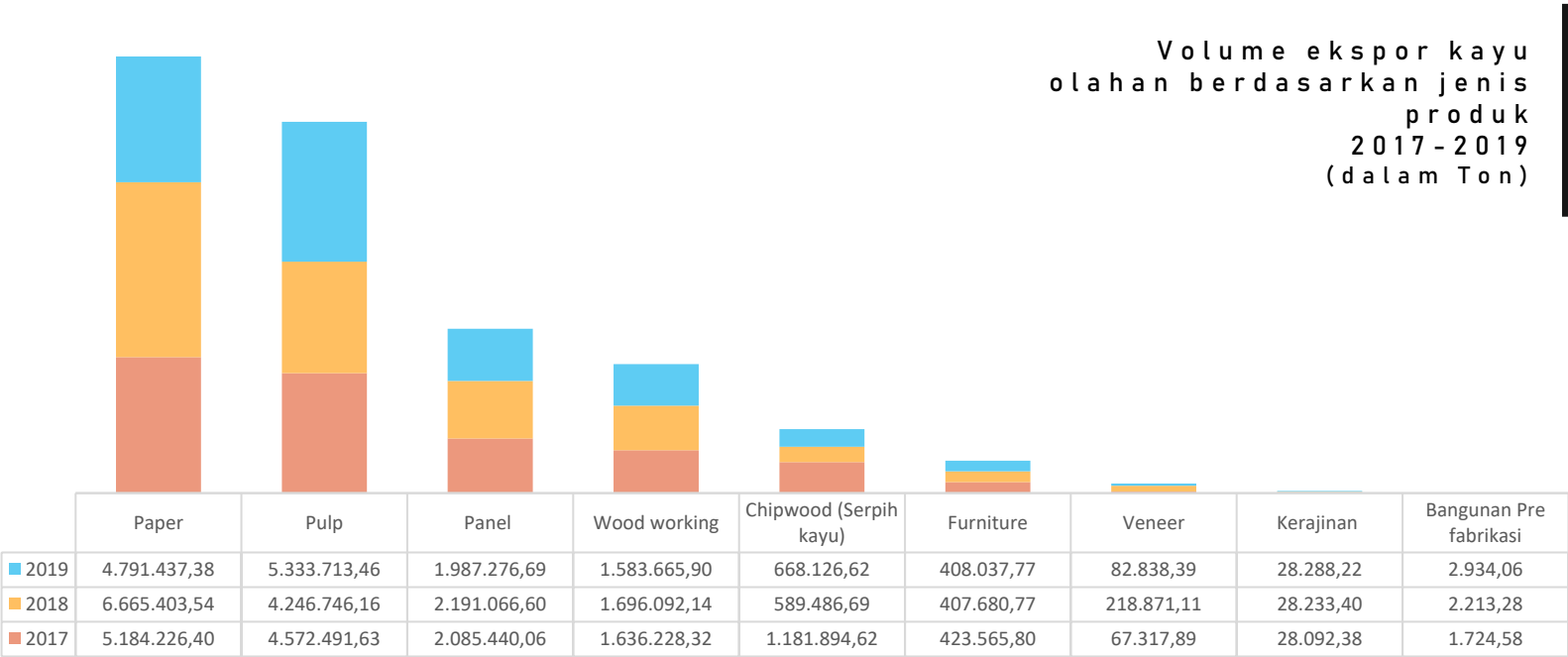


Kayu yang dihasilkan dari Hutan Tanaman Rakyat tidak hanya untuk kebutuhan produksi lokal namun mendukung ketersediaan bahan baku ekspor kayu olahan Foto oleh : Abdul Kholik





Membatik dengan apik, pengrajin di Desa Bobung, Kab. Gunung Kidul dengan telaten memoles lilin pada tiap lekuk pola yang digambarkan di atas topeng ukir. Dalam sehari, 3 orang pengrajin dapat membatik sebanyak 50 topeng ukir. Topeng ini kemudian dihargai Rp.100.000 - Rp. 400.000 bergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan motif. Foto oleh Mugi Restunaesha



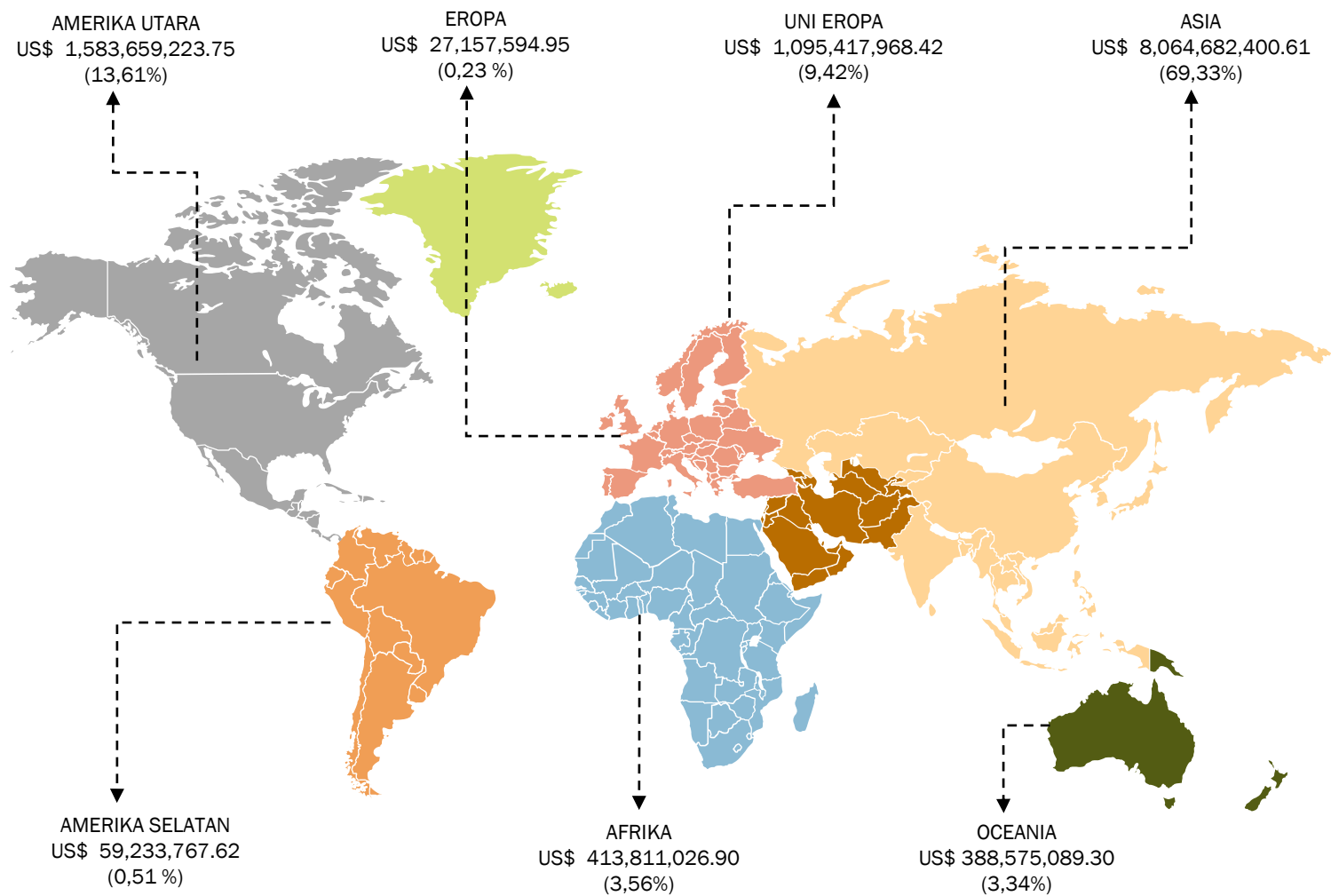
NILAI EKSPOR KAYU OLAHAN PER REGION 2019



NILAI EKSPOR KAYU OLAHAN PER PROVINSI 2015 - 2019 (US\$)

NO	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Sumatera Selatan	64.867.089	55.326.970	646.032.287	1.131.077.610	1.403.958.194	3.301.262.149,04
2	Riau	1.002.684.030	747.218.004	755.072.937	624.667.734	556.483.004	3.686.125.709,21
3	Sumatera Utara	311.139.665	286.958.046	352.661.419	380.826.486	295.974.695	1.627.560.311,62
4	Jambi	251.518.554	275.177.186	287.303.839	239.378.654	287.490.492	1.340.868.724,50
5	Lampung	6.245.218	6.812.051	7.356.129	8.662.761	9.995.685	39.071.843,82
6	Kepulauan Riau	9.032.672	13.985.988	10.620.639	8.781.941	8.998.662	51.419.902,76
7	Bengkulu	-	192.723	1.161.709	3.350.268	2.152.027	6.856.726,29
8	Sumatera Barat	315.056	352.714	612.110	622.319	694.197	2.596.395,65
9	Kep. Bangka Belitung	276.999	-	-	-	-	276.998,94
10	DKI Jakarta	3.711.498.692	3.689.168.844	4.085.182.512	4.514.279.999	4.330.107.835	20.330.237.883,35
11	Jawa Timur	1.410.441.498	1.364.209.851	1.650.805.725	1.780.226.715	1.677.284.783	7.882.968.571,82
12	Jawa Tengah	1.387.311.328	1.313.914.526	1.505.332.662	1.560.718.270	1.486.065.269	7.253.342.056,60
13	Jawa Barat	374.662.534	362.512.498	385.712.109	402.552.194	387.111.795	1.912.551.129,60
14	Banten	238.173.462	199.961.507	235.528.395	238.197.407	217.580.637	1.129.441.408,00
15	DI Yogyakarta	40.433.424	41.219.550	61.445.126	73.375.735	61.665.384	278.139.218,43
16	Bali	42.889.813	46.333.510	64.280.931	74.021.568	88.778.241	316.304.063,51
17	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	95.279	251.524	346.803,00
18	Kalimantan Selatan	225.634.717	233.267.108	247.347.777	315.940.757	217.298.338	1.239.488.696,00
19	Kalimantan Timur	339.159.243	257.117.002	179.843.673	259.706.396	185.750.976	1.221.577.288,50
20	Kalimantan Barat	153.268.863	140.948.231	145.982.546	152.014.906	101.666.615	693.881.160,59
21	Kalimantan Utara	43.512.478	32.603.633	64.782.026	92.716.894	77.001.455	310.616.486,03
22	Kalimantan Tengah	39.927.022	38.329.946	55.314.028	45.679.238	57.293.139	236.543.373,14
23	Sulawesi Selatan	25.547.290	15.281.193	32.552.460	58.656.833	33.092.263	165.130.038,85
24	Sulawesi Tengah	8.684.852	6.442.830	10.575.797	5.938.271	3.065.490	34.707.238,68
25	Maluku	-	-	-	116.378	1.249.210	1.365.587,86
26	Gorontalo	25.000	-	-	169.868	39.893	234.761,85
27	Sulawesi Utara	451.250	66.086	7.084	231.727	37.250	793.396,10
28	Maluku Utara	-	-	-	-	20.723	20.723,17
29	Sulawesi Tenggara	195.743	-	-	-	-	195.743,48
30	Papua	151.621.646	129.945.693	145.834.975	154.018.416	133.784.249	715.204.978,98
31	Papua Barat	4.187.703	7.861.678	3.354.100	5.572.216	7.700.723	28.676.419,19
Total		9.843.705.841	9.265.207.367	10.934.702.991	12.131.596.840	11.632.537.071	53.807.750.109

NILAI EKSPOR KAYU OLAHAN PER BENUA 2019

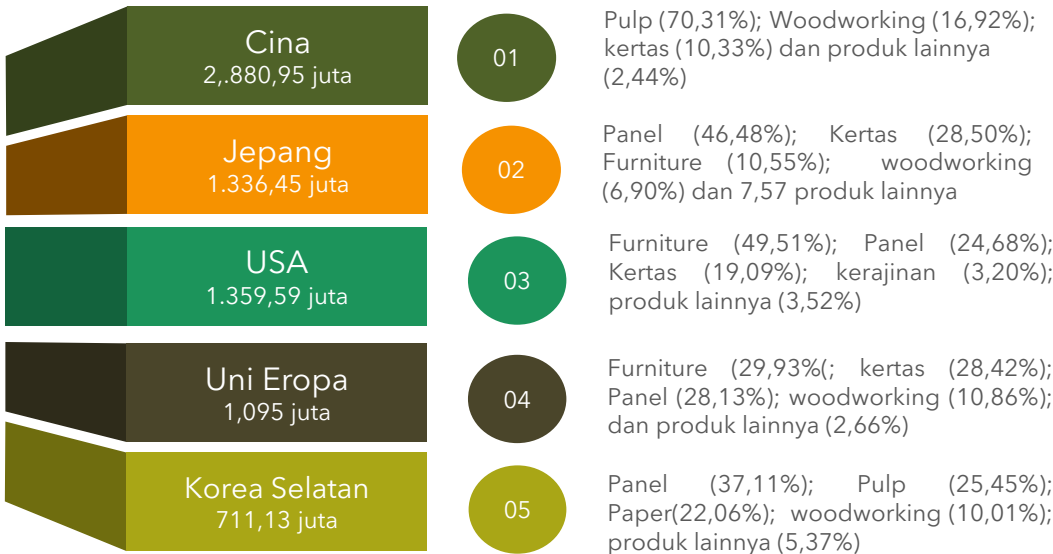


LIMA NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBESAR PRODUK KAYU OLAHAN (ANGKA DALAM US\$ JUTA)

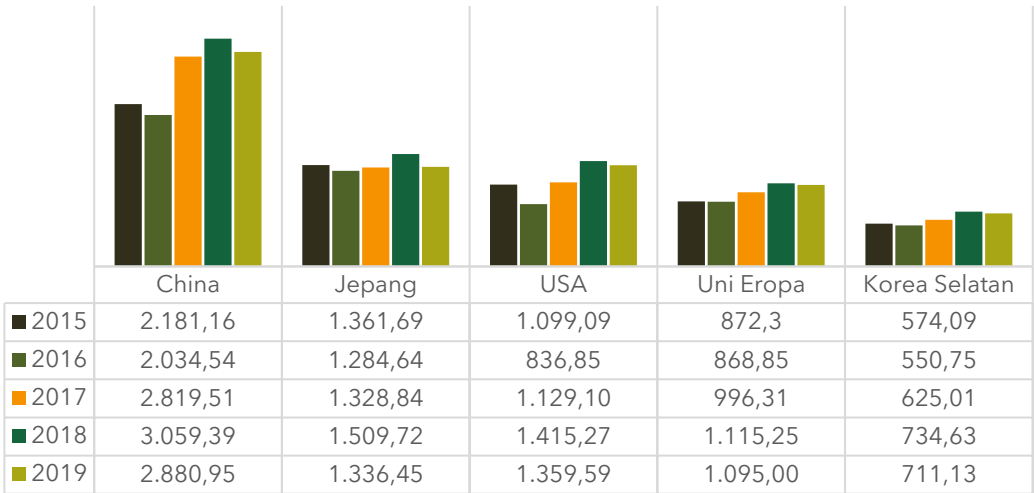
Negara-negara tujuan ekspor kayu olahan dari Indonesia pada 2019 masih didominasi oleh negara di Asia. Negara dengan nilai ekspor tertinggi ditempati oleh Cina. Selama 5 tahun berturut-turut, Cina selalu menjadi negara dengan tujuan ekspor tertinggi. Cina berkontribusi sebesar 24,77% terhadap total nilai ekspor di 2019. Jenis produk kayu olahan dengan nilai ekspor terbesar adalah Pulp sebesar 70,31%.

Diurutan kedua, Jepang berkontribusi sebesar 11,75% terhadap total nilai ekspor 2019 dengan nilai ekspor terbesar berasal dari Panel sebesar 46,48%. Posisi ketiga ditempati oleh Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 11,69% dari total nilai ekspor 2019, dengan nilai ekspor terbesar berasal dari Furniture (49,51%). Posisi keempat ditempati oleh Uni Eropa dengan kontribusi sebesar 9,39% terhadap total nilai ekspor 2019. Sementara di posisi ke lima diisi oleh Korea Selatan dengan kontribusi sebesar 6,11%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor dari kelima negara cenderung turun.



NILAI EKSPOR 5 NEGARA PENGEKSPOR KAYU OLAHAN
TERBESAR 2015 - 2019 (JUTA USD)



Salah satu satwa liar yang menjadi penyumbang perekonomian nasional adalah jalak bali. Ring yang dipasang pada kaki memuat informasi mengenai asal-usul salah satu satwa liar yang dilindungi dan berguna sebagai alat tagging legalitas TSL yang diedarkan/diperdagangkan di pasar, dan menjadi pembeda antara jalak bali hasil penangkaran dan jalak bali alam. Foto oleh Marwedhi Nurratyo



PERKEMBANGAN EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

TAHUN 2015 - 2019

KINERJA EKSPOR TSL

172,93%

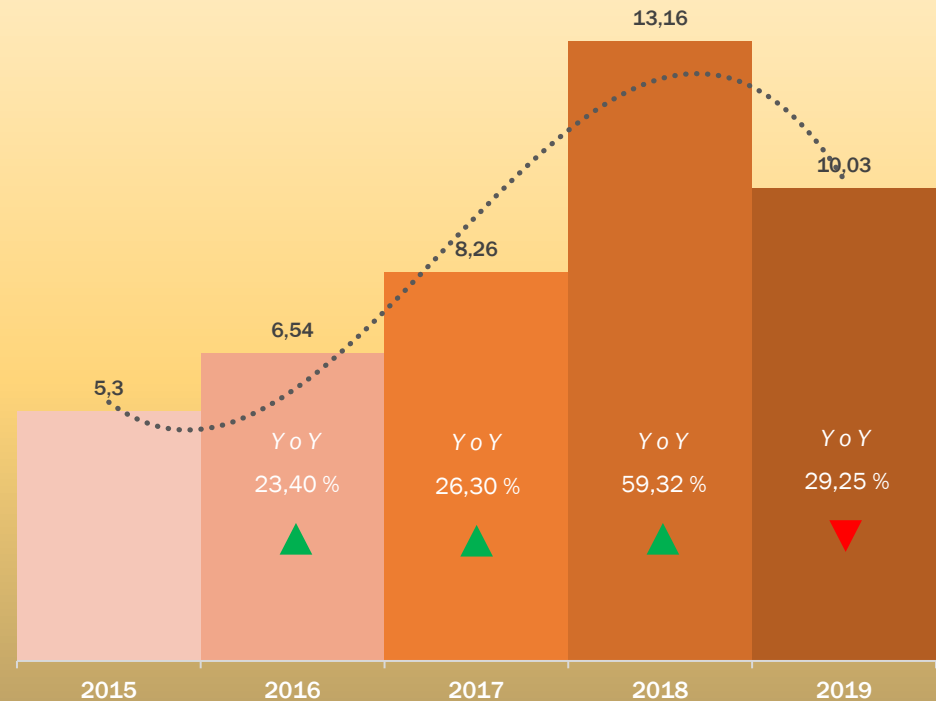
Target : IDR 5,8 triliun
Capaian : IDR 10,03 triliun

YoY ▼ - 29,25 %
(LKj 2018: 13,16 T)

Nilai Ekspor hasil hutan selain dari produk kayu olahan, juga ditentukan oleh devisa hasil TSL yang diekspor. Nilai ekspor TSL Tahun 2019 sebesar Rp. 10,03 triliun dari target sebesar Rp. 5,8 triliun, yang berarti tercapai 172,93%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, perolehan devisa ini mengalami penurunan sebesar 29,25%. Penurunan ekspor ini dikarenakan kelesuan ekonomi global serta akibat perang dagang antara AS-RRT yang merupakan 2 negara terbesar pengimpor TSL dari Indonesia.

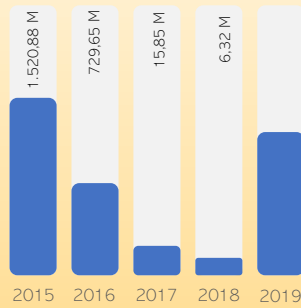
Apabila capaian dalam 5 (lima) tahunan dibandingkan, secara umum terjadi lompatan ekspor TSL dalam lima tahun dimana nilai devisa pada tahun 2019 ini dua kali lipat nilai ekspor pada tahun 2015.

NILAI EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
IDR triliun

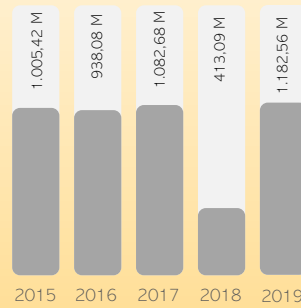


NILAI EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PER KOMODITI

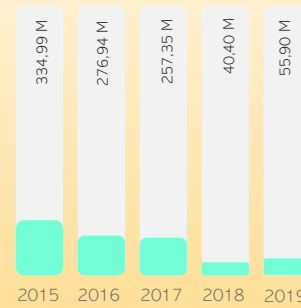
angka dalam miliar rupiah



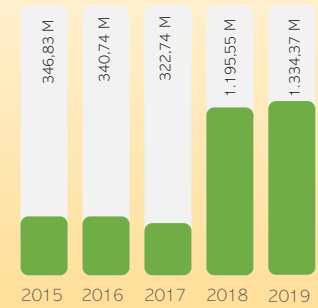
Mamalia
mammals



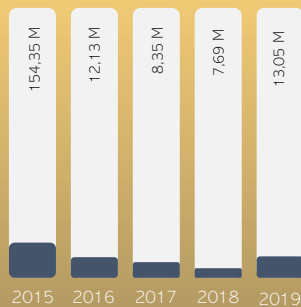
Reptil (alam)
Reptile-Wild



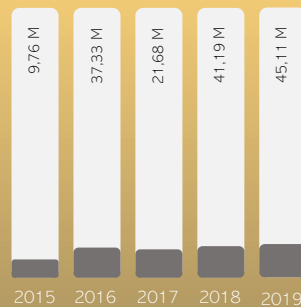
Reptil (tangkai)
Reptile-Captive



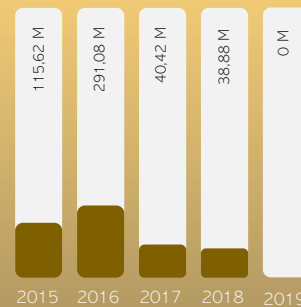
Ikan
Fish



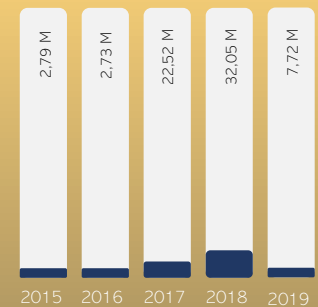
Burung
birds



Buaya
crocodiles



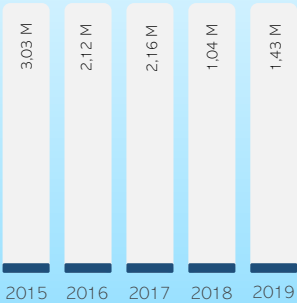
Karang
corals



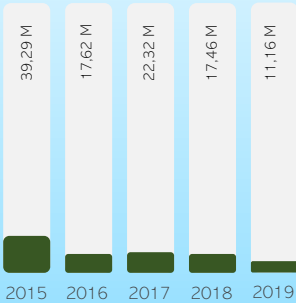
Hewan berbuku
arthropoda

NILAI EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PER KOMODITI

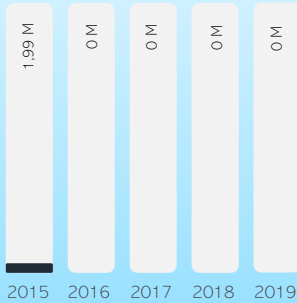
angka dalam miliar rupiah



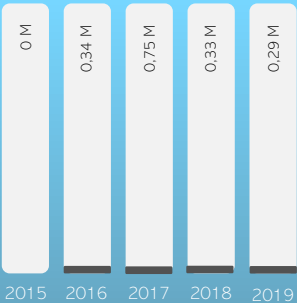
Pakis
fern



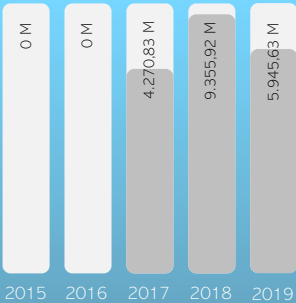
Anggrek
orchids



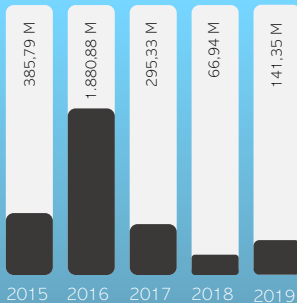
Ramin
ramin



Hewan lunak
mollusca



Sonokeling
rosewood



Gaharu
agarwood



PROPORSI EKSPOR TSL

APPENDIX CITES vs NON APPENDIX

Appendix 2 CITES: Penyumbang terbesar Ekspor TSL

Apabila dilihat dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa penyumbang ekspor TSL terbesar adalah dari jenis-jenis appendix CITES atau termasuk jenis-jenis yang dilindungi. Secara proporsi, produk ekspor TSL dari appendix-II CITES mendominasi ekspor TSL dengan proporsi 87,14% dibandingkan dengan non-appendix.

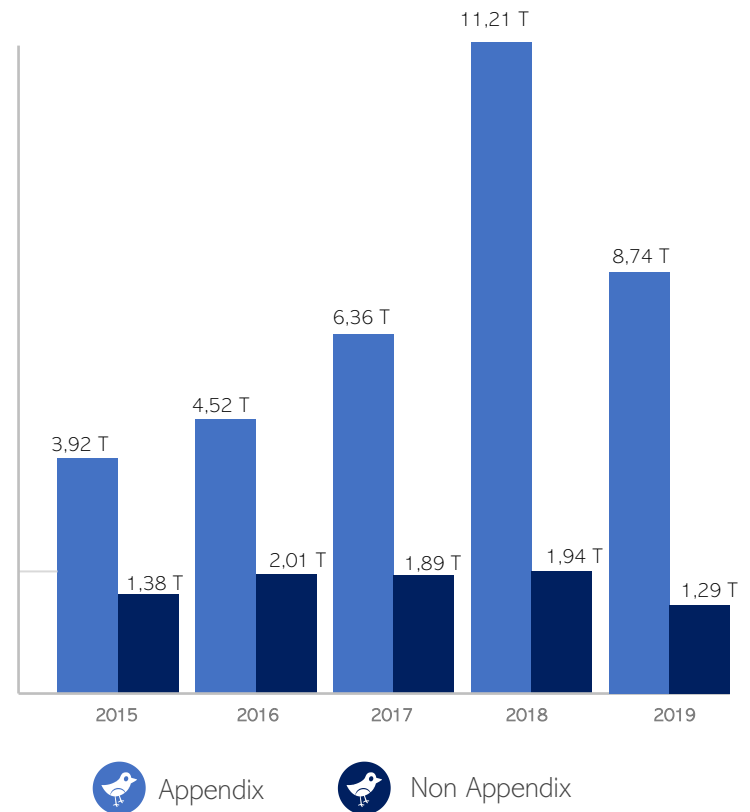
Dilihat dari tren setiap tahun, proporsi ekspor TSL dari jenis appendix juga terus meningkat. Pada tahun 2015 nilainya hanya 3,92 triliun rupiah kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2018 dimana sebesar 11,21 triliun rupiah disumbang oleh jenis-jenis appendix.

Hal di atas dapat diartikan 2 (dua) hal. Pertama, penangkaran TSL berhasil dengan semakin meningkatnya jenis-jenis Appendix II yang menyuplai kebutuhan TSL. Kedua, kuota TSL selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga jenis komoditas TSL dari jenis yang dilindungi dan dipenuhi dari tangkapan alam masih di bawah kuota edar dan tangkap yang telah ditentukan.

Proporsi ekspor
TSL 2019

87,14%
Appendix

12,86%
Non Appendix



JUMLAH PEMEGANG IZIN USAHA EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR TERDAFTAR

NO	Komoditi	Pemegang Izin (Unit)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koral	37	37	37	59	65	66
2	Reptil	79	79	79	84	84	98
3	Gaharu	32	32	32	43	43	37
4	Flora (termasuk pakis)	7	7	7	6	10	15
5	Ikan	5	5	5	42	42	61
6	Arthropoda	4	4	4	11	11	20
7	Ramin	6	6	6	1	1	0
8	Buaya	13	13	13	18	18	24
9	Burung	29	29	29	32	32	47
10	Ampibi	10	10	10	12	12	23
11	Mamalia	15	15	15	25	25	30
12	Moluska	1	1	1	5	5	6
13	Sonokeling	0	0	0	89	89	111
14	Pasak Bumi	0	0	0	0	1	3
Jumlah		238	238	238	427	438	541

FAKTA - DATA

541_{unit}

Usaha berizin yang dapat
mengedarkan tumbuhan
dan satwa liar ke luar
negeri

Komoditas dengan jumlah usaha terbanyak

Sonokeling
111 unit usaha

Reptil

Nilai devisa yang dihasilkan

IDR18,48
miliar / perusahaan

Pada tahun 2019, jumlah perusahaan pengedar TSL ke luar negeri yang telah memiliki sertifikat untuk melakukan ekspor sejumlah 541 perusahaan. Jumlah ini meningkat 123,51 persen bila dibandingkan dengan jumlah usaha TSL yang dapat melakukan ekspor ke luar negeri pada tahun 2018 (438 unit). bila dilihat ke belakang selama 5 (lima) tahunan, menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan cukup signifikan. Kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan turut berkontribusi terhadap tren peningkatan jumlah unit usaha ini.

Apabila dilihat dari jenis komoditas, selain Ramin, seluruh komoditas menunjukkan tren peningkatan investasi. Komoditas paling banyak diminati oleh para pelaku usaha peredaran luar negeri TSL adalah Sonokeling dengan 111 unit usaha, kemudian disusul komoditas Reptil dengan 98 unit usaha. Sedangkan komoditas terkecil pada tahun 2019 ini adalah Ramin, dimana tidak ada satupun unit usaha yang menjalankan usaha di bidang komoditas ini. Peringkat terendah ke dua adalah Pasak Bumi, dengan 3 unit usaha, dan semakin menunjukkan tren peningkatan jumlah usaha.

Bila dirata-rata untuk setiap unit usaha, maka devisa yang dapat dihasilkan adalah 18,48 miliar rupiah per tahun.

REKOMENDASI

Deregulasi dan kontrol atas penggunaan kuota tangkap TSL yang jelas akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan di bidang peredaran TSL ke luar negeri ini.

JUMLAH INVESTASI

INDUSTRI PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE LUAR NEGERI

NO	Komoditas	Jumlah Investasi (dalam juta rupiah)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koral	159.100	159.100	159.100	253.700	279.500	283.800
2	Reptil	32.750	32.750	32.750	34.822	34.822	40.526
3	Gaharu	8.000	8.000	8.000	10.750	10.750	9.250
4	Flora (termasuk pakis)	1.750	1.750	1.750	1.500	2.500	3.750
5	Ikan	1.250	1.250	1.250	10.500	10.500	18.900
6	Arthropoda	1.000	1.000	1.000	2.750	2.750	5.200
7	Ramin	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000	-
8	Buaya	6.500	6.500	6.500	9.000	9.000	12.000
9	Burung	8.700	8.700	8.700	9.600	9.600	14.100
10	Ampibi	3.000	3.000	3.000	3.600	3.600	6.900
11	mamalia	11.100	11.100	11.100	18.500	18.500	22.200
12	moluska	580	580	580	1.380	1.380	1.580
13	Sonokeling	-	-	-	366.795	366.795	371.195
14	Pasak Bumi	-	-	-	-	250	650
Jumlah		239.730	239.730	239.730	723.897	750.947	790.051

Industri tumbuhan dan satwa liar menunjukkan tren investasi yang semakin meningkat sejak 2014 hingga 2019. pada tahun 2014 industri TSL hanya berhasil menyerap investasi sebesar 239,73 miliar rupiah. Angka ini berlipat pada 5 (lima) tahun kemudian menjadi 790,05 miliar rupiah dalam setahun. Meningkatnya investasi ini turut dipicu masuknya jenis Sonokeling menjadi salah satu appendix CITES dari sebelumnya bukan merupakan jenis yang dilindungi. Investasi dari sektor Sonokeling sendiri memang sudah besar, sehingga turut meningkatkan investasi TSL secara keseluruhan.

Apabila dilihat dari jenis komoditas, secara umum seluruh komoditas menunjukkan tren peningkatan investasi, hanya saja untuk komoditas ramin, trennya semakin menurun dan di tahun 2019 tidak ada investasi untuk komoditas kayu ramin ini. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya substitusi bahan baku parquette (lantai kayu) dengan semakin majunya teknologi, sehingga kayu ramin yang dulu merupakan jenis kayu berserat halus sehingga nyaman bila digunakan sebagai lantai, menjadi tersubstitusi oleh jenis-jenis lantai atau papan parquette lain. Peningkatan paling signifikan ditunjukkan oleh komoditas ikan yang mencatatkan peningkatan 1512% dari investasi tahun 2014.

REKOMENDASI

Kemudahan berusaha turut meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modal di sektor industri tumbuhan dan satwa liar. Bila dilihat dari tren di atas, pertumbuhan paling signifikan pada 2017-2019 merupakan periode dimana tata kelola pengajuan izin berusaha mengalami perbaikan dan penyempurnaan untuk memudahkan para investor menanamkan modal.

FAKTA - DATA

IDR **790,05** miliar
 Jumlah investasi peredaran TSL ke
 Luar Negeri untuk tahun 2019

Komoditas dengan investasi tertinggi

 **Koral**
 283,8 miliar rupiah

 **Sonokeling**
 371,19 miliar rupiah

JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSERAP PADA BIDANG PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE LUAR NEGERI

NO	Komoditas	Jumlah tenaga kerja pada penangkaran/peredaran TSL(orang)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koral	1.295	1.295	1.295	1.925	1.985	2.000
2	Reptil	5.898	5.898	5.898	5.948	5.948	6.088
3	Gaharu	448	448	448	532	532	490
4	Flora (termasuk pakis)	150	150	150	140	190	240
5	Ikan	72	72	72	442	442	540
6	Arthropoda	68	68	68	138	138	238
7	Ramin	600	600	600	300	300	-
8	Buaya	260	260	260	310	310	370
9	Burung	2.700	2.700	2.700	2.730	2.730	2.880
10	Ampibi	220	220	220	250	250	460
11	mamalia	814	814	814	914	914	964
12	moluska	13	13	13	65	65	75
13	Sonokeling	-	-	-	7.916	7.916	8.246
14	Pasak Bumi	-	-	-	-	15	45
Jumlah		12.538	12.538	12.538	21.610	21.735	22.646

Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, pada tahun 2019 serapan tenaga kerja sebesar 22.625. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan walaupun tidak signifikan (serapan tenaga kerja 2018 sebesar 21.735 orang).

Bila dilihat dari komoditasnya, tenaga kerja terbanyak untuk penangkaran satwa adalah pada komoditas jenis reptil dengan 6.088 orang karyawan, sedangkan untuk tumbuhan komoditas sonokeling menempati posisi pertama jumlah tenaga kerja dengan 8.246 orang pekerja.

Bila dilihat dari nilai ekspor yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 10,03 triliun, maka didapatkan angka sebesar 441,96 juta rupiah devisa negara yang dihasilkan oleh setiap pekerja pada industri tumbuhan dan satwa liar.

Seluruh tumbuhan dan satwa liar yang diekspor adalah bahan baku untuk kemudian diolah menjadi produk yang akan memberikan nilai tambah bagi negara-negara pengimpor TSL.

REKOMENDASI

Industri pengolahan TSL di dalam negeri perlu diberikan stimulan agar nilai tambah hasil pengolahan TSL dapat dinikmati oleh perusahaan dalam negeri.

FAKTA - DATA

22.626 orang
Tenaga kerja terserap

Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan serapan tenaga kerja industri TSL pada tahun 2014

Komoditas dengan tenaga kerja terbanyak

Reptilia
6.088 tenaga kerja

Sonokeling
8.246 tenaga kerja

TUJUAN UTAMA EKSPOR TSL

5 negara tujuan ekspor TSL (importir) terbesar



Tujuan ekspor tumbuhan dan satwa liar masih didominasi oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), disusul Singapura, Amerika Serikat, Saudi Arabia dan Taiwan. Perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2019 turut menurunkan nilai ekspor TSL pada tahun 2019.

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRT pada tahun 2019 juga berkontribusi pada penurunan ekspor TSL dari Indonesia. Hal ini dikarenakan 2 (dua) dari 5 (lima) besar negara pengimpor TSL adalah RRT dan Amerika Serikat, sehingga jika terjadi

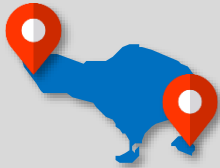
ketegangan antara dua negara tersebut, dampaknya akan langsung berimbas pada negara-negara mitra dagangnya.

Alternatifnya, para pengusaha eksportir tumbuhan dan satwa liar perlu membuka jalur-jalur importir baru selain ke RRT dan Amerika Serikat. Meskipun membuka pasar baru membutuhkan upaya dan determinasi yang kuat dari para stakeholder, pasar-pasar baru sebenarnya terbuka seperti Saudi Arabia dan pasar Eropa.



Jalak Bali

Leucopsar Rothschildi



Habitat



Pakan

- Serangga
- Cacing
- Jangkrik
- Juwet
- Jambu
- Pepaya
- pisang

Potensi Ekonomi

HARGA JALAK BALI

- < 3 bulan = 6 juta/pasang
- < 1 tahun = 8 juta/pasang
- Sudah mampu mengangkut sarang = 12 juta/pasang
- Usia produktif = 30 juta/pasang

Penangkaran Jalak Bali

Harga Rp 6 juta- Rp 30 Juta X
Per pasang

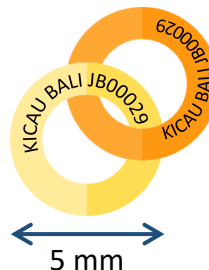
Rata-rata penjualan/
tahun 240 pasang

= Rp 1,44 M – Rp 7,2 M
per tahun

(pendapatan kotor 1
penangkaran burung per
tahunnya jika rata-rata telur
yang menetas per bulan
sebanyak 40 ekor)



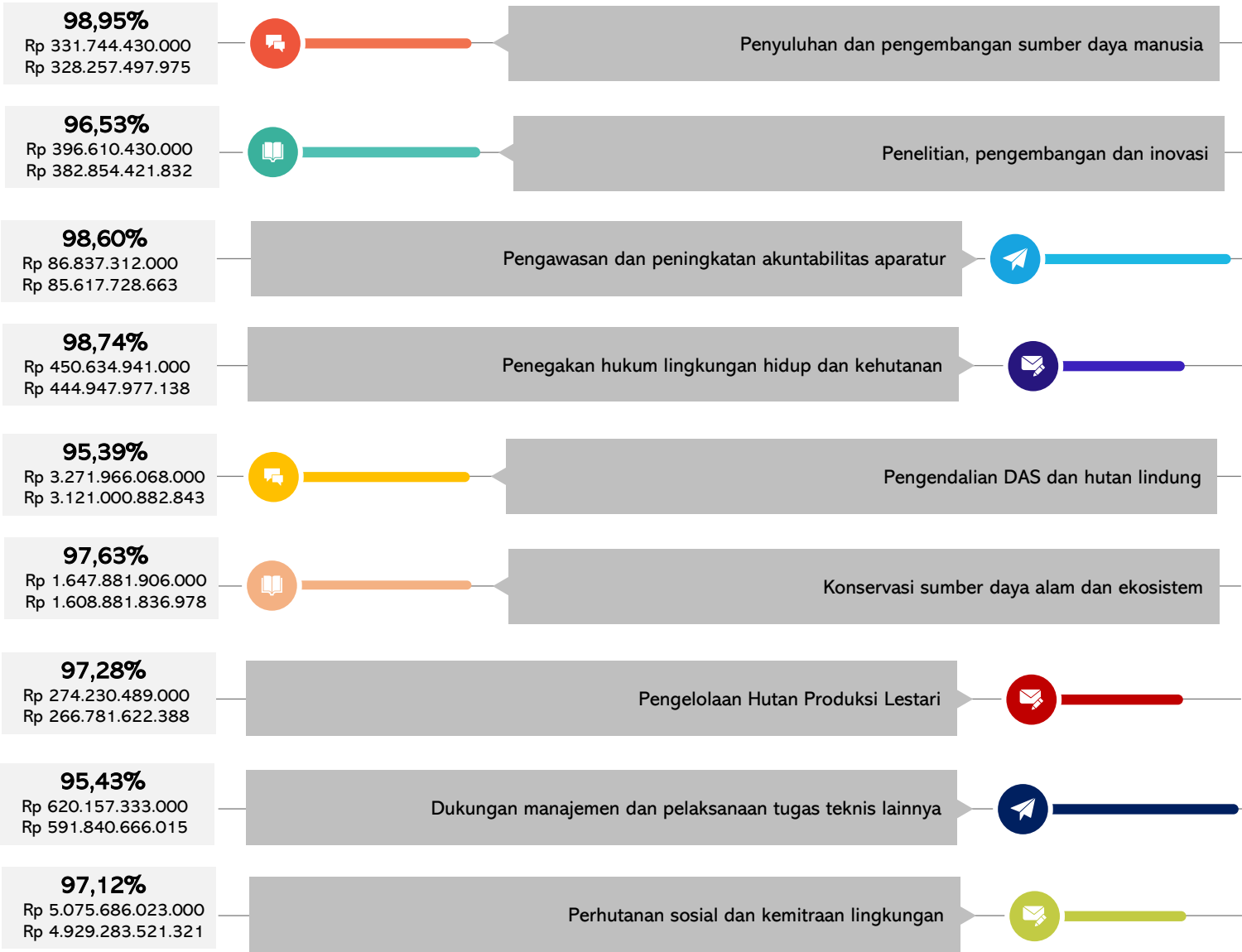
BURUNG BANGSAWAN DARI PULAU RUPAWAN



CLOSED RING

Cincin yang digunakan merupakan cincin tipe closed ring berukuran 5 mm sehingga tidak bisa dibuka kembali. Biasanya, setiap penangkar kelompok akan memiliki kode cincin sesuai nama kelompoknya.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 3



Persentase Realisasi Anggaran (input) **96,48 %**

Persentase Capaian (output) **149,18 %**

Efisiensi **0,64**

kategori **Efisien**

Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 3 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 3, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.



Kripik Jamur Mallawa hasil produksi kelompok binaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Setiap 10% dari keuntungan penjualan disisihkan kelompok untuk membantu merehabilitasi kawasan karst. Foto oleh Indra Pradana.



IKU 4



KAWASAN KONSERVASI

DENGAN NILAI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN MINIMAL 70%

Seiring meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi telah mendorong peran serta dan kontribusi masyarakat dalam mengelola hutan konservasi. Hutan konservasi kini bukan lagi menjadi Kawasan 'terlarang' tetapi telah menjadi tempat "kolaborasi" antara manusia dan alam untuk menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, inilah salah hakekat dari nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Pengelolaan Kawasan konservasi dirasa semakin baik. Tampak dsri tahun ke tahun Kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas diatas 70 poin semakin banyak.

Tahun 2016 Kawasan konservasi yang sudah efektif pengelolaanya hanya 29 unit, meningkat menjadi 40 unit ditahun 2017. ditahun 2018 kembali menunjukan trend positif dimana kawasan konservasi yang telah efektif menjadi 70 unit. Dan ditahun 2019 Kawasan konservasi menjadi 100 unit.

Perbaikan tapak juga dapat dilihat dari geliat ekonomi masyarakat sekitar, dengan semakin banyaknya minat pariwisata ke kawasan konservasi.

2016
29 Unit Kawasan Konservasi



2015

11 Unit Kawasan Konservasi



2018
70 Unit Kawasan Konservasi



2017

40 Unit Kawasan Konservasi



2019

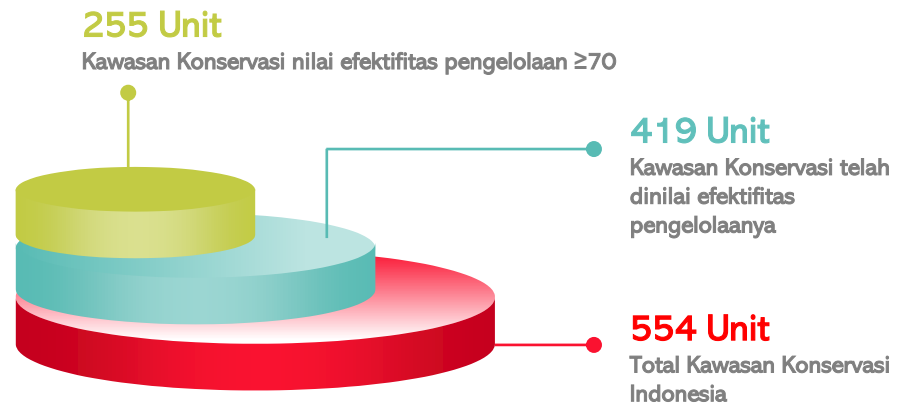
100 Unit Kawasan Konservasi

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menyimpan beragam potensi penggerak ekonomi masyarakat, salah satunya adalah wisata alam air terjun. Selama tahun 2019 tercatat tidak kurang dari 404 ribu orang mengunjungi wisata alam ini. Selain menggerakkan ekonomi masyarakat juga berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak. Foto oleh Chaeril Eril.

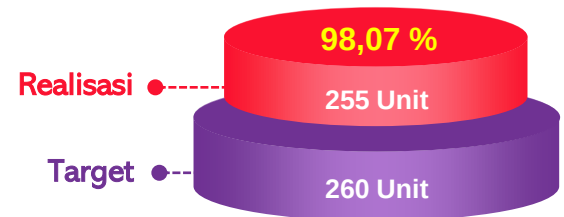




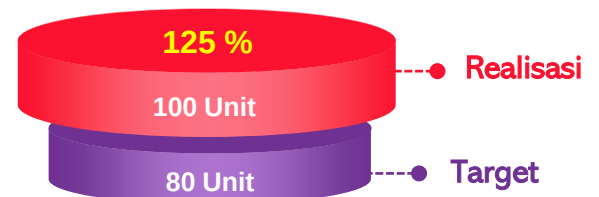
KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



KINERJA LIMA TAHUN
(2015 – 2019)



KINERJA
TAHUN 2019



NILAI EFEKTIFITAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015 - 2018

KAWASAN KONSERVASI	NILAI
1 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	81
2 Taman Nasional Ujung Kulon	80
3 Taman Nasional Alas Purwo	80
4 Taman Nasional Wakatobi	79
5 Taman Nasional Gunung Halimun Salak	77
6 Taman Nasional Bantimurung -Bulusaraung	77
7 Taman Nasional Bali Barat	75
8 Taman Nasional Wasur	75
9 Taman Nasional Danau Sentarum	75
10 Taman Nasional Kepulauan Karimun Jawa	73
11 Taman Nasional Kepulauan Seribu	70
12 Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	80
13 Taman Nasional Kutai	80
14 Taman Nasional Sebangau	78
15 Taman Nasional Gunung Merbabu	76
16 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	76
17 Taman Nasional Gunung Palung	76
18 Taman Nasional Meru Betiri	75
19 Taman Wisata Alam Gunung Papandayan	74
20 Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	74
21 Taman Nasional Taka Bonerate	74
22 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	74
23 Taman Nasional Gunung Ciremai	74
24 Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	74
25 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	74
26 Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Perahu	73
27 Taman Nasional Teluk Cenderawasih	73
28 Taman Nasional Tanjung Puting	73
29 Taman Nasional Komodo	73
30 Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran	72
31 Taman Nasional Lore Lindu	72
32 Taman Nasional Gunung Rinjani	72
33 Cagar Alam Pananjung Pangandaran	72
34 Taman Nasional Bunaken	71

KAWASAN KONSERVASI	NILAI
35 Taman Nasional Baluran	71
36 Taman Wisata Alam Lejja	71
37 Taman Nasional Gunung Merapi	71
38 Taman Nasional Bukit Tigapuluh	70
39 Taman Nasional Gunung Leuser	70
40 Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu	70
41 TWA Angke Kapuk	80
42 TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	78
43 TWA Grojogan Sewu	78
44 CA Ponda-ponda	77
45 CA Gunung Picis	76
46 TWA Telogo Warno/ Telogo Pengilon	75
47 SM Pulau Bawean	75
48 CA Kepulauan Krakatau	75
49 Tahura Sinjai/Abdul Latief	74
50 CA Kalaena	74
51 TWA Pulau Weh	74
52 SM Dangku	73
53 CA Pager Wunung Darupono	73
54 TN Aketajawe Lolobata	73
55 CA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	73
56 Tahura R. Soeryo	72
57 CA Karang Bolong	72
58 CA Gunung Tilu	72
59 TWA Punti Kayu	72
60 TWA Gunung Tunak	71
61 SM Sermo	71
62 CA Lamedae	71
63 CA Waigeo Barat	71
64 CA Gunung Celing	71
65 CA Cabak	71
66 CA Telaga Warna	71
67 Tahura Ngurah Rai	70
68 TWA Sorong	70

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
69	TWA Gunung Selok	70
70	TN Berbak	70
71	TWA Kerandangan	70
72	SM Tanjung Peropa	70
73	SM Paliyan	70
74	CA Pulau Nusa Barung	70
75	CA Gunung Sigogor	70
76	CA Keling II/III	70
77	CA Pringombo I	70
78	SM Cikepuh	70
79	CA Gunung Batu Gamping	70
80	CA Danau Dusun Besar Reg.61	70
81	TN Rawa Aopa Watumohai	78
82	TN Bukit Duabelas	76
83	TN Way Kambas	75
84	TN Kelimutu	75
85	TWAL Teluk Lasolo	74
86	TWA Tanjung Belimbing	74
87	TNL Kepulauan Togean	74
88	TWA Sibolangit	73
89	TWA Ruteng	73
90	TN Zamrud	73
91	TN Tesso Nilo	73
92	TWA Sicikeh-cikeh	72
93	TWA Jantho	72
94	TWA Kawah Kamojang	72
95	TN Sembilang	72
96	TWA Tretes	71
97	TWA Muka Kuning	71
98	TWA Kepulauan Banyak	71
99	TWA Guci	71
100	TWA Linggarjati	71
101	TWA Bukit Kaba	71
102	TWA Cimanggu	71

Tahun 2017

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
103	TWA Sungai Dumai	70
104	TWA Sumber Semen	70
105	TWA Sidrap	70
106	TWAPulau Satonda	70
107	TWA Panelokan	70
108	TWA Gunung Meja	70
109	TWA Gunung Baung	70
110	TWA Air Rami I Reg.87	70
111	TN Siberut	70
112	TN Laiwangi Wanggameti	70
113	TN Batang Gadis	70
114	TB Komara	70
115	SM Rawa Singkil	78
116	CA Mangunan/Imogiri	74
117	CA Gunung Burangrang	74
118	CA Durian Luncuk II	73
119	SM Pulau Rambut dan Perairan dsk.	72
120	CA Pleihari Tanah laut	72
121	CA Telogo Sumurup	72
122	CA Telaga Patengan	72
123	CA Manggis Gadungan	72
124	CA Keling I	72
125	SM Komara	71
126	SM Karang Gading/ Langkat Timur Laut	71
127	SM Gumai Pasemah (Gumai Tebing Tinggi)	71
128	CA Wijaya Kusuma	71
129	CA Teluk Adang	71
130	CA Telogo Dringo	71
131	CA Sibolangit	71
132	CA Nusakambangan Timur	71
133	CA Kecubung Ulolanang	71
134	CA Durian Luncuk I	71
135	SM Siranggas	70
136	SM Pulau Kaget	70

Tahun 2018

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
137	SM Padang Sugihan	70
138	SM Lamandau	70
139	SM Bentayan	70
140	CA Telogo Ranjeng	70
141	CA Taba Penanjung I	70
142	CA S Baheuwo Teluk Klowe	70
143	CA Pulau Bawean	70
144	CA Pinus Jantho	70
145	CA Nyiut Panrissen	70
146	CA Pantodomas	70

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
147	CA Nusakambangan Barat	70
148	CA Moga	70
149	CA Kembang	70
150	CA Sukawayana	70
151	CA Ht. Bakau Pantai Timur	70
152	CA Jatinegara	70
153	CA Gunung Raya Pasi	70
154	CA Dolok Sibual-buali	70
155	CA Bantarbolang	70



Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Taman Nasional melahirkan Desa Wisata Pattalasang. Desa mereka ini merupakan daerah penyangga di Taman Nasional. Foto oleh Chaeril Eril.

NILAI EFEKTIFITAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2019

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
1	Taman Nasional Betung Kerihun	76
2	Taman Nasional Kerinci Seblat	72
3	Taman Nasional Kayan Mentarang	72
4	Taman Nasional Tambora	72
5	Taman Nasional Lorentz	70
6	Taman Nasional Manusela	77
7	Cagar Alam Gunung Papandayan	70
8	Taman Wisata Alam Sukawayana	71
9	Taman Wisata Alam Telaga Patengan	70
10	Cagar Alam Cibanteng	71
11	Taman Wisata Alam Gunung Pancar	70
12	Cagar Alam Kawah Kamojang	71
13	Cagar Alam Nusa Gede Panjalu	71
14	Cagar Alam Talaga Bodas	70
15	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Iyang	77
16	Cagar Alam Goa Nglirip	72
17	Cagar Alam Watangan Puger I-VI	73
18	Cagar Alam Janggangan Rogojampi II	72
19	Cagar Alam Pancur Ijen II	71
20	Cagar Alam Pulau Sempu	70
21	Cagar Alam Saobi	72
22	Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateau	76
23	Taman Wisata Alam Camplong	71
24	Taman Wisata Alam Menipo	71
25	Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi	71
26	Cagar Alam Waigeo Timur	74
27	Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling	76
28	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	72
29	Cagar Alam Pulau Berkeh	70
30	Suaka Margasatwa Bukit Batu	71
31	Cagar Alam Bukit Bungkuk	70
32	Taman Wisata Alam Buluh Cina	70
33	Suaka Margasatwa Kerumutan	70
34	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang	73

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
35	Cagar Alam Faruhumpenai	70
36	Suaka Margasatwa Barumun	73
37	Cagar Alam Dolok Sipirok	73
38	Suaka Margasatwa Dolok Surungan	70
39	Cagar Alam Dolok Tinggi Raja	73
40	Cagar Alam Martelu Purba	70
41	Taman Wisata Alam Lau Debuk-debuk	70
42	Taman Buru Lingga Isaq	78
43	Cagar Alam Serbojadi	74
44	Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan	74
45	Taman Wisata Alam Gunung Batur bukit Payang	70
46	Taman Wisata Alam Sangeh	71
47	Cagar Alam Batukahu I-III	70
48	Taman Wisata Alam Air Hitam	70
49	Cagar Alam Kioyo I dan II	71
50	Cagar Alam Tanjung Laksaha	76
51	Taman Buru Gunung Nanu'ua	71
52	Cagar Alam Pasar Ngalam	71
53	Suaka Margasatwa Muara Angke	73
54	Cagar Alam Pulau Bokor	70
55	Cagar Alam Donoloyo	70
56	Cagar Alam Gunung Butak	75
57	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	71
58	Cagar Alam Bekutuk	76
59	Cagar Alam Peson Subah II	71
60	Taman Wisata Alam Baning	70
61	Taman Wisata Alam Bukit Kelam	71
62	Cagar Alam Muara Kendawangan	70
63	Cagar Alam Gunung Kentawan	72
64	Taman Wisata Alam Pulau Bakut	71
65	Suaka Margasatwa Kuala Lupak	70
66	Taman Wisata Alam Tanjung Keluang	70
67	Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki	70
68	Taman Wisata Alam Gunung Api Banda	75

	KAWASAN KONSERVASI	NILAI
69	Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa	71
70	Suaka Margasatwa Pulau Kasa	75
71	Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu	74
72	Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	70
73	Taman Wisata Alam Suranadi	74
74	Cagar Alam Gunung Sojol	70
75	Suaka Margasatwa Bakiriang	73
76	Cagar Alam Gunung Tinombala	71
77	Cagar Alam Pamona	73
78	Taman Wisata Alam Pulau Pasoso	73
79	Taman Wisata Alam Wera	71
80	Taman Wisata Alam Lembah Harau	71
81	Taman Wisata Alam Mangolo	71
82	Taman Wisata Alam Tirta Rimba/Air Jatuh	73
83	Suaka Margasatwa Buton Utara	71
84	Cagar Alam Kakenauwe	74
85	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	77
86	Suaka Margasatwa Lambusango	73
87	Cagar Alam Napabalano	73
88	Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo	71
89	Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo	71
90	Suaka Margasatwa Isau-isau Pasemah	72
91	Taman Hutan Raya Sultan Adam	70
92	Taman Hutan Raya Gunung Bunder	73
93	Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang	76
94	Taman Hutan Raya Lapak Jaru	70
95	Taman Hutan Raya Banten	71
96	Taman Hutan Raya Lati Petangis	70
97	Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	70
98	Taman Hutan Raya Murhum/Nipa-Nipa	70
99	Taman Hutan Raya Sulteng	71
100	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	70



Hasil produksi kelompok-kelompok binaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Produk-produk tersebut sudah dipasarkan di toko oleh-oleh di Makassar. Foto oleh Indra Pradana.



KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI MELALUI UPAYA PENINGKATAN POPULASI SATWA PRIORITAS

No	Satwa	Site	Jumlah Individu Satwa					
			Baseline	2015	2016	2017	2018	2019
1	Harimau Sumatera	Tambling (TN Bukit Barisan Selatan); Pegunungan Bendahara (TN Gunung Leuser; TERMA (TN Way kambas); TN Berbak; Resort Talang Lakat (TN Bukit Tiga Puluh dan SM Barumun (BBKSDA Sumatera Utara)	71	153	53	96	154	122 ▲
2	Gajah Sumatera	Terma (TN Way Kambas); Way Haru-Way Cangkuk (TN Bukit Barisan Selatan); Site Monitoring 1 dan 2 (TN Tesso Nilo)	313	563	75	607	346	344 ▲
3	Badak	Tenumbang (TN BBS) dan TERMA (TN way kambas)	77	29	23	33	10	90 ▲
4	Banteng	Perkebunan Trebasala dan Hutan Lindung Lebak Harjo (BBKSDA Jatim); Blok Lodadi, Manung, Blok 90an, Blok 80an dan Blok Pantai (TN Meru Betiri), Padang Rumput Long Tua (TN Kayan Mentarang); <i>Feeding ground</i> Sadengan (TN Alas Purwo) dan TN Ujung Kulon	277	394	313	361	244	321 ▲
5	Owa	HL Petungkriyono dan Linggosari (BKSDA Jawa Tengah); Stasiun riset cabang panti (TN Gunung Palung); Cikaniki dan Gunung Luhur (TN Gg Halimun Salak); Pasir Ipis (TN Ujung Kulon)	431	461	165	818	878	1234 ▲
6	Orangutan	Site Hulu, site buluh, site Teringin dan site Mangkung (SM Sungai Lamandau-BKSDA Kalteng); Resort Belaban (TN Bukit Baka Bukit Raya); CA Hutan Pinus Jantho (BKSDA Aceh), Stasiun riset Cabang Panti (TN Gunung Palung); DAS Embaloh, Bukit Semujan dan menyukung (TN BKDS); Sangkima, Mentoko dan Menamang (TN Kutai); Orangutan Sekonyer, tatah Jie dan Tatah Empa (TN Tanjung Putting); CA Dolok Sibual Buali (BBKDA Sumatera Utara)	1441	3200	2451	2818	3940	2408 ▲
7	Bekantan	Sungai Batu Barat (TN Gg. Palung); Sungai Tawang (TN BKDS); Sungai Pari, Sungai Sanggata dan Sungai Sangkima (TN Kutai); TWA P. Bakut, TWA P. Kembang, SM P. Kaget dan SM Kuala Lupak (BKSDA Kalsel); Bekantan Sekonyer (TN Tanjung Putting)	1957	2502	930	1972	2325	2892 ▲
8	Jalak Bali	Lampu Merah, Teluk Brumbun, dan Tanjung Gelap (TN Bali Barat); Nusa Peninda (BKSDA Bali Barat)	147	147	44	61	88	105 ▼
9	Maleo	Tambun, Muara Pusian dan Hungayono (TN Boganinani Wartabone); Sungai Pampea (TN Rawa Aopa Watumohai); dan SM Tanjung Batiko (BKSDA Sulawesi Tenggara)	6397	6787	828	3327	1927	2816 ▼
10	Babi Rusa	Lereng Poniki, Ongka Desa Lolonan dan Pinogu (TN Boganinani Wartabone); Pulau Togean dan Pulau Batudaka (TN Togean)	822	877	77	620	508	551 ▼
11	Anoa	Site Pongko, Site Balabba, Gunung Imandi dan Pinogu (TN Boganinani Wartabone); Rawa Mandu, Laea, Lahalo, Boolo dan Rawa Lampopala (TN Rawa Aopa Watumohai); Hutan Elehaji, Hutan Betau Ronta, Hutan Tanjung Gomo dan Hutan Tambeanga (BKSDA Sulawesi Tenggara)	513	661	128	384	365	285 ▼
12	Elang	CA/TWA Kawah Ijen, CA Gunung Picis dan Blok Pancur (BBKSDA Jawa Timur); Blok Bendolawang dan Blok Coban Trisula (BBTN Bromo Tengger Semeru); Blok Pringtali dan Blok Teparan (TN Meru Betiri); HL Petungkriyono dan HL Gg. Slamet (BKSDA Jawa Tengah); Plawangan dan Tegal Mulyo (TN Gunung Merapi); Senaru, Torean, Sembalun dan Sajang (TN Gunung Rinjani);Cikaniki (TN Gg. Halimun Salak) dan TN Alas Purwo.	65	82	62	109	62	108 ▲

No	Satwa	Site	Jumlah Individu Satwa					
			Baseline	2015	2016	2017	2018	2019
13	Kaka Tua	Pulau Masakambing (BBKSDA Jatim); Ai Manis, Brang Sedo dan Brang Singa (BKSDA NTB); Nusa Penida, Pura Sedihiang dan Pura Dalam Karang (BKSDA Bali Barat); Ubukora, Lokuwatungodu, Lokuhuma, kokur, Billa, Praingkareha dan Mahaniwa (TN. Matalawa); Hoki-hoki dan Resort Tayawi (TN Rawa Aopa Watumohai); Resort Binagara, Resort Akejira dan Resort Buli (TN Aketajawe Lolobata); dan Suaka Alam Gunung Suhuwei (BKSDA Maluku)	1188	1389	954	5606	4944	12042 ▲
14	Macan Tutul Jawa	Resort Sukamade (TN Beru Betiri); Cikaniki, Gg. Luhur dan Wates Cisoka (TN Gg. Halimun Salak); Resort Pancur (TN Alas Purwo).	7	20	13	63	21	49 ▲
15	Cendrawasih	Baraway dan Amay (BBKSDA Papua); Danau Haberna (TN Lorenz)	66	141	46	104	40	93 ▲
16	Tarsius	Sungai Pattanuang (TN Bantimurung Bulusaraung)	82	82	90	106	104	108 ▲
17	Monyet Hitam Sulawesi	Karaenta (TN Bantimurung Bulusaraung); Marjo dan Lejja (BBKSDA Sulsel)	319	319	35	141	147	469 ▲
18	Julang Sumba	Bila, Ubukora, Taman Mas, Wacutidung dan Lokuhuma (TN Matalawa)	30	30	32	74	76	92 ▲
19	Penyu	Pulau Wairudin (BBTN Cendrawasih); SPTN Wil. I Tarupa dan Pualau Peteloran Barat; Pulau Peteloran Barat dan Pulau Peteluran Barat dan Pulau Peteluran Timur (TN. Kepulauan Seribu); TN Bunaken; TN karimun Jawa; Pulau Anano, Pulau Kentiole, Pulau Ndaa dan Pulau Runduma (TN. Wakatobi); Pulau Sukamade (TN Meru Betiri)	7036	4890	2834	7272	7334	7467 ▲
20	Kangguru Pohon	Sungapa (TN Lorenz)	10	10	10	10	22	2 ▼
21	Celepuk Rinjani	Senaru Kembang Kuning (TN Gunung Rinjani)	27	27	260	255	268	263 ▲
22	Komodo	TN Komodo	5933	5494	2100	2788		2932 ▼
23	Rusa Bawean		275	275	303	311		304 ▲
24	Suruili		15	184	114	196		27 ▲
25	Kasturi Tenguk Ungu		8	8	9	14		12 ▲

MENDULANG DEvisa DARI BUMI HUMBA

Gugusan bumi nusa tenggara yang tergelar dengan indah dari Pulau Lombok hingga Pulau Timor, tak pernah lekang untuk dikunjungi. Selain Lombok, Sumbawa, Flores dan Timor, satu Pulau surgawi yang semakin bersolek menanti disinggahi adalah Pulau Sumba. Tanah Humba, demikian penduduk setempat dimana suku Sumba menyebut tanah kelahirannya.

Setelah Mandalika di Lombok dan Labuan Bajo di Flores yang telah dengan sukses menanggung devisa dari pariwisata yang digenjur selama 5 (lima) tahun terakhir, giliran hamparan Nusa Tenggara bagian selatan yakni Pulau Sumba menanti untuk dihampiri oleh para wisatawan di seantero dunia.

Sumba kaya akan budaya dan alam yang sangat unik dan tidak terdapat di pulau-pulau lain di NTT. Di Pulau ini, terdapat 2 (dua) kawasan konservasi yakni TN Manupeu Tanadaru di Sumba Barat dan Sumba Tengah, serta TN Laiwangi Wanggameti di Sumba Barat. Beberapa tipe ekosistem bergabung dalam kawasan tersebut, mulai dari mangrove, hutan pantai, hutan hujan tropis dan savana. 2 kawasan konservasi ini merupakan surge 2 (dua) satwa liar dilindungi yakni Kakatua Sumba dan Julang Sumba.

Selain alam pegunungan dan savana yang unik dan hanya terdapat di Sumba, tanah Humba juga kaya akan pantai-pantai berpasir putih yang eksotis yang terhampar di sisi Utara dan Selatan Sumba. Pulau ini memiliki 2 (dua) pintu utama kedatangan wisatawan yakni Bandara Umu Meheng Kundang di Waingapu, Sumba Timur dan Bandara Tambolaka di Waitabula di Sumba Barat Daya. Pada 2018, tercatat 36.465 wisatawan yang masuk melalui Bandara Umu Meheng Kundang di Sumba Timur. Foto oleh Marwedhi Nurratyo.

Sedangkan dari Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya, tercatat kunjungan wisatawan tertinggi mencapai 65.518. Bila digabungkan dari 2 (dua) pintu utama ini saja, wisatawan yang masuk ke Sumba mencapai 101.983 wisatawan, belum termasuk yang masuk melalui pintu-pintu pelabuhan baik di Waitabula maupun di Waingapu.

 Akomodasi	400 ribu IDR x 101.983 orang = 40,793 Miliar IDR per night untuk 2 orang
 Makan Minum	200 ribu IDR x 101.983 orang = 20,39 Miliar IDR 4 kali makan 2 malam 3 hari
 Paket Wisata (termasuk transportasi dan tiket masuk objek wisata)	2.000.000 x 101.983 orang = 203,96 Miliar IDR Range paket 2juta - 3juta untuk 3D2N
 Souvenir	100.000 x 101.983 orang = 10,19 Miliar IDR
TOTAL = 275,33 Miliar IDR	
Angka berdasar asumsi lama berwisata 3D2N	

Dari angka kunjungan tersebut, sebanyak 7.742 wisatawan atau 7,5% mengunjungi TN Matalawa pada 2018 dengan jumlah PNBPN sebesar 254,35 juta IDR. Dari sini dapat dilihat bahwa sebagian besar rupiah mengalir ke masyarakat Sumba utamanya untuk jasa wisata alam (transportasi dan tour guide).

Dengan potensi sebesar itu, fokus pengembangan wisata alam di tanah humba pada 2020-2024 menjadi hal yang sangat dinanti untuk lebih menanggung pundi-pundi devisa di tanah surgawi ini.





Surga bahari di Utara ibukota, tempat melepas jenuh dan beban rutinitas kerja, perlahan tapi pasti memoles diri, menyambut wisatawan memutar roda ekonomi

*Melestarikan Pulau Seribu,
Memetik Kesejahteraan*

FAKTA & INFORMASI

164 Jumlah pulau sebenarnya, termasuk pulau-pulau pasir (gusong) dan terumbu karang pulau

11 Dihuni masyarakat secara menetap pulau

26 Selam (scuba diving) dan snorkeling di kawasan TN Kp Seribu spot

1:7 Perbandingan Luas kawasan TNKpS dengan Luas Kab.Adm Kepulauan Seribu

PERBANDINGAN

Kawasan TN Kp Seribu dan Kab.Administrasi Kepulauan Seribu

--- TNKpS 

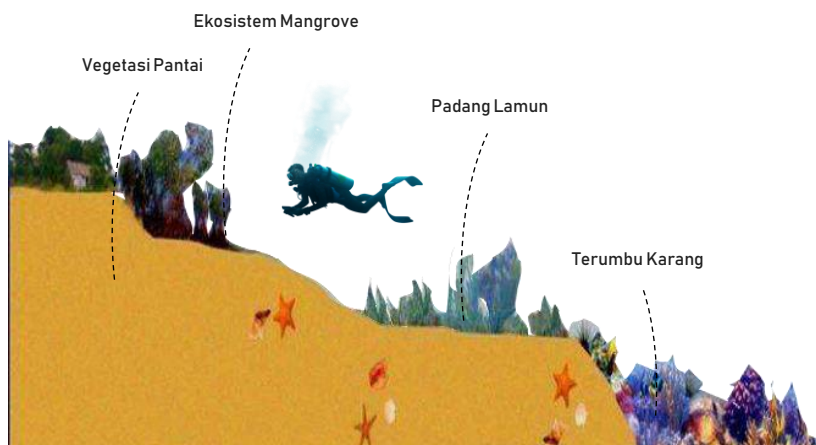
107.489 hektar

— Kab.Adm.Kep Seribu 

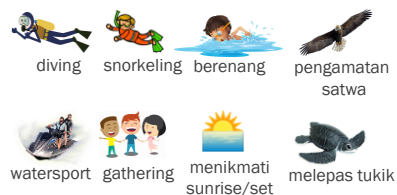
699.700 hektar



EKOSISTEM TN Kp. Seribu



Aktivitas Wisatawan



Penyu merupakan salah satu satwa endemik TN Kepulauan Seribu. Wisatawan dapat ikut serta belajar tentang penyu di Pusat Suaka Satwa Penyu



Jaga Laut demi Kesejahteraan

Sejarah TN Kepulauan Seribu

Habitat Satwa Khas Perairan Laut: Elang Bondol, Elang Laut, Penyu Sisik, Penyu Hijau, Karang Laut, dan ikan-ikan endemik.

2015
Nilai METT 70

1982

Pada mulanya merupakan kawasan Cagar Alam Laut

1995

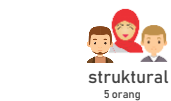
Fungsinya diubah menjadi kawasan Taman Nasional Laut dengan nama TN Laut Kepulauan Seribu

2002

Ditetapkan menjadi kawasan TN Laut Kepulauan Seribu seluas 107.489 ha

2004

Penetapan zonasi taman nasional



staf struktural
5 orang



staf
31 orang



Polisi kehutanan
16 orang



tenaga teknis
13 orang



Sumber daya pengelola TN Kepulauan Seribu

Membangun sarpras menyambut wisatawan



Sebagai salah satu Destinasi Wisata Prioritas, TN Kepulauan Seribu juga turut berperan dengan menyediakan fasilitas wisata baru berbasis konservasi di Pulau Pramuka berupa track mangrove dan Suaka Satwa untuk pengembangbiakan penyu.

Tracking mangrove ini dilengkapi dengan labirin mangrove, suaka padang lamun, flying fox, jembatan gantung dan landmark TN Kepulauan Seribu.

TN Kepulauan Seribu menjadi tempat mata pencaharian puluhan ribu orang, baik yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Seribu maupun yang tinggal di luar wilayah Kabupaten.

Pekerja di Kepulauan Seribu tercatat sebanyak 8.961 angkatan kerja. Saat ini pekerjaan yang mendominasi adalah sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel & restoran dan transportasi dimana sebanyak 5.241 pekerja bekerja di sektor ini. Sedangkan sektor perikanan (nelayan) tercatat sebanyak 1.890 pekerja saja. Artinya usaha pariwisata alam bahari menjadi tulang punggung yang penting di Kepulauan Seribu. Aktivitas nelayan pun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan (katering) untuk aktivitas pariwisata alam.

Sumber: BPS Kab. Adm. Kepulauan Seribu

Salah satu kapal penumpang dari Kaliadem Muara Angke merapat di pelabuhan Pulau Harapan membawa sekitar 200 orang per kapal, dengan jumlah trup 6 kapal per hari per pulau



Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu

Gambaran Geliat Ekonomi

Kegiatan Wisata

= Rp 174,90 Miliar

Transportasi

Jakarta-P.Seribu 40rb-180rb

1,75 juta pergerakan penumpang per tahun (Dishub DKI 2018)

Menginap,

snorkeling dan paket

wisata air

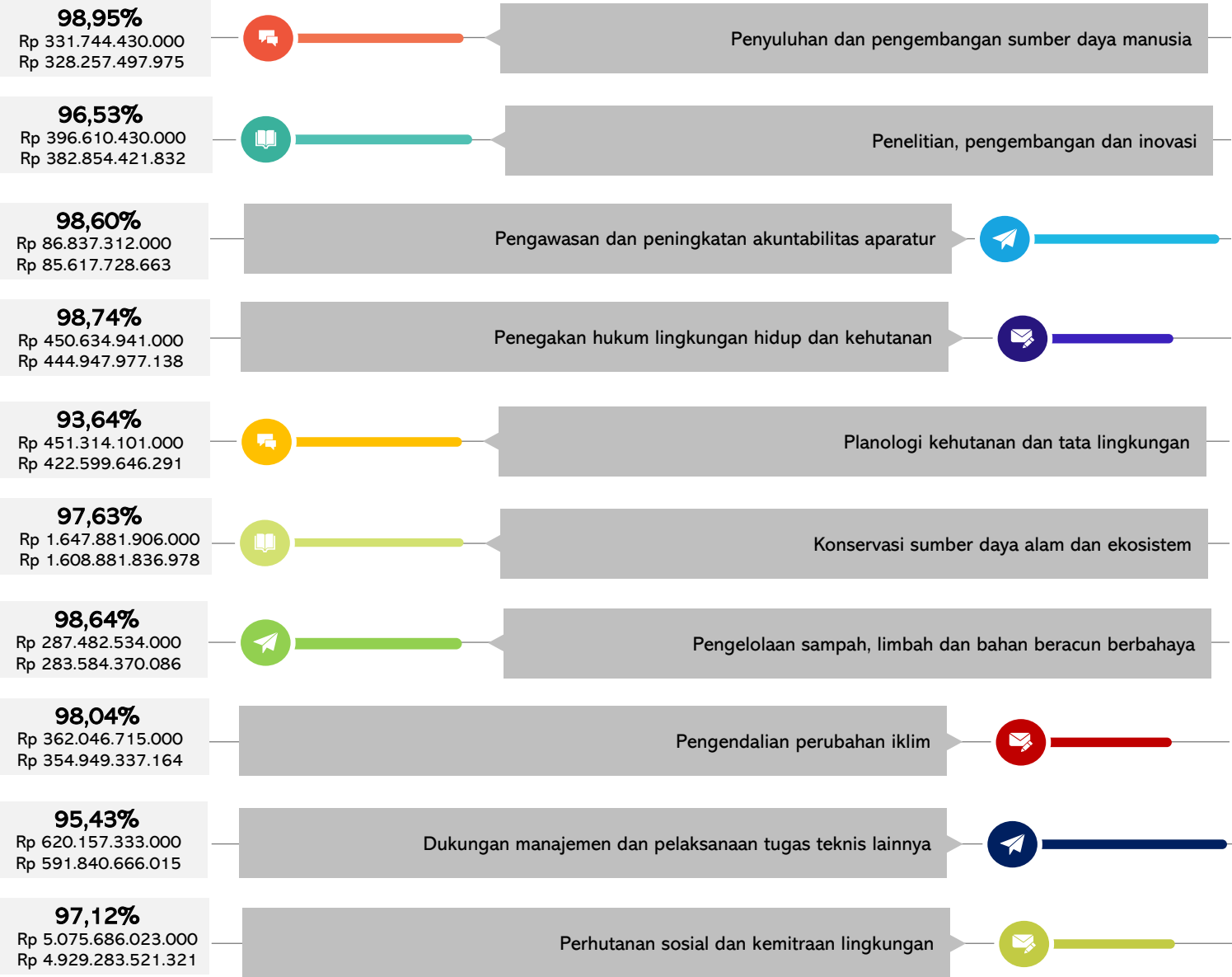
Rata-rata 500 ribu

= Rp 398.56 Miliar

Catatan:

Data dan informasi dalam factsheet disarikan dari berbagai sumber

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 4



Persentase Realisasi Anggaran (input) **97,12 %**

Persentase Capaian (output) **125 %**

Efisiensi

0,78

kategori

Efisien

Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 4 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 4, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.



Fenomena alam Bimasakti diamati dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Langit malam yang cerah menyuguhkan pemandangan gugusan-gugusan bintang di angkasa yang menakjubkan. Foto oleh Indra Pradana.

Pengelolaan hutan ditingkat tapak yang berkeadilan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Mendorong kesatuan pengelolaan hutan senantiasa mampu mengekstrak barang dan jasa secara lestari sesuai dengan potensi dan karakter bentang alam tapak



Alam menganugerahi Batulanteh dengan kesuburan panorama indah dan jasa lingkungan. Kerjasama para pihak untuk tujuan bersama akan menumbuhkan kesejahteraan sosial dan kelestarian hutan. KPHP Puncak Ngengas Batulanteh. Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri.

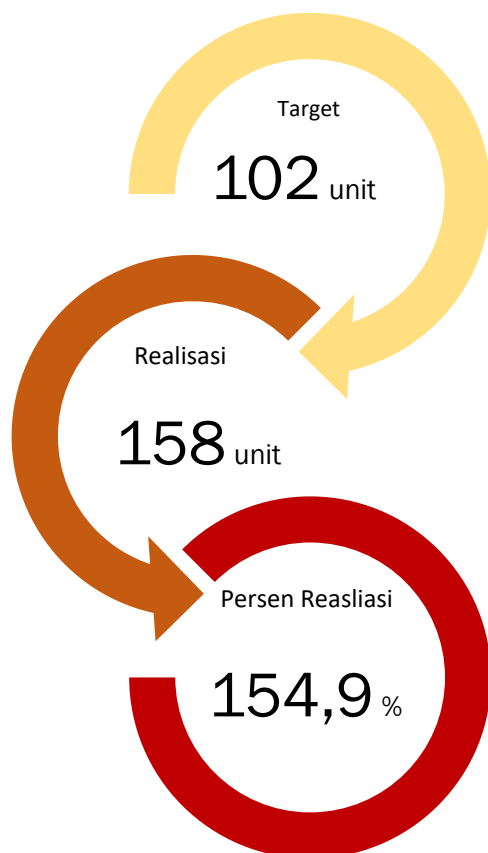
Indikator Kinerja

Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari

Jumlah dan Luas KPH s.d Tahun 2019

KPH	UNIT	LUAS (Ha)
KPHP	381	58.778.985
KPHL	237	25.851.981
KPHK*	148	12.946.252

* Tidak diperjanji kinerjakan



Tahun 2019 merupakan akhir masa rencana strategis kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019. Mendukung sasaran strategis ke tiga yaitu, melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, salah satunya diukur dengan mendorong kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari.

Realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 sebesar 154,90%, dimana target KPH yang mampu memproduksi barang dan jasa ditahun 2019 sebanyak 102 unit, intervensi yang dilakukan ditahun 2019 mendorong 53 KPHP dan 105 KPHL.

Total KPH baik dikawasan produksi maupun lindung yang sudah ditetapkan sebanyak 618 unit dengan luas 84.630.966 Ha. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 381 unit dengan luas 58.778.985 Ha. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 237 unit dengan luas 25.851.981 Ha.

Selain KPHP dan KPHL, terdapat juga Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) diman jumlahnya sebanyak 148 unit dengan luas 12.946.252. KPHK tidak termasuk kedalam KPH yang didorong untuk memproduksi barang dan jasa.

JUMLAH SK KPHP DAN KHPL YANG SUDAH DITETAPKAN

No	Provinsi	KPH Model			2015			2016			2017			2018			2019		
		KPHL	KPHP	Σ	KPHL	KPHP	Σ	KPHL	KPHP	Σ	KPHL	KPHP	Σ	KPHL	KPHP	Σ	KPHL	KPHP	Σ
1	Aceh	1	0	1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	1	3	6	5	11	1	3	4	9	6	15	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	4	2	6	0	0	0	2	0	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	4	4	0	7	7	0	14	14	1	6	7	0	0	0	1	31	32
5	Jambi	1	3	4	0	2	2	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	5	6	4	2	6	0	6	6	5	1	6	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	2	3	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	5	9	4	0	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	4	4	1	3	4	0	1	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	1	1	0	2	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	4	4	8	1	1	2	6	4	10	0	3	3	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	3	2	5	7	4	11	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	0	0
20	Kalimantan Barat	2	2	4	0	3	3	2	6	8	0	0	0	0	0	0	6	28	34
21	Kalimantan Tengah	2	5	7	0	5	5	1	11	12	1	7	8	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	4	5	1	1	2	1	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	3	3	1	5	6	1	0	1	0	10	10	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	9	10	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	7	8	0	4	4	2	1	3	3	3	6	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	2	3	5	3	5	8	3	1	4	0	0	0	2	6	8	0	0	0
29	Gorontalo	1	3	4	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	5	2	7	0	2	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31	Maluku	0	4	4	2	4	6	2	1	3	0	0	0	2	7	9	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	3	3	0	1	1	5	5	10	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	1	2	3	1	3	4	2	0	2	0	0	0	2	11	13	0	0	0
34	Papua	1	4	5	5	4	9	1	7	8	0	0	0	18	16	34	0	0	0
Jumlah		38	78	116	46	67	113	30	65	95	32	68	100	42	44	86	7	59	66

DISTRIBUSI SEBARAN KPH

Region Kalimantan

KPHP: 94 Unit

KPHL: 17 Unit

Region Sulawesi dan Maluku

KPHP: 74 Unit

KPHL: 52 Unit

Region Papua

KPHP: 47 Unit

KPHL: 31 Unit



Region Sumatera

KPHP: 105 Unit

KPHL: 60 Unit

Region Jawa

KPHP: 1 Unit

KPHL: 0 Unit

Region Bali dan Nusa Tenggara

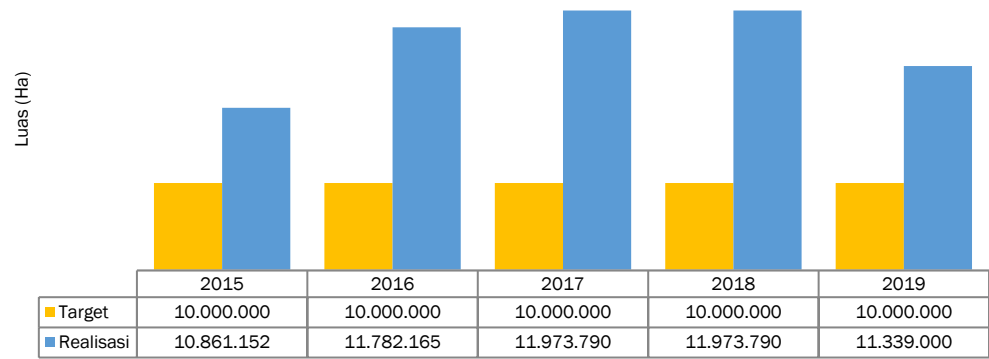
KPHP: 21 Unit

KPHL: 28 Unit

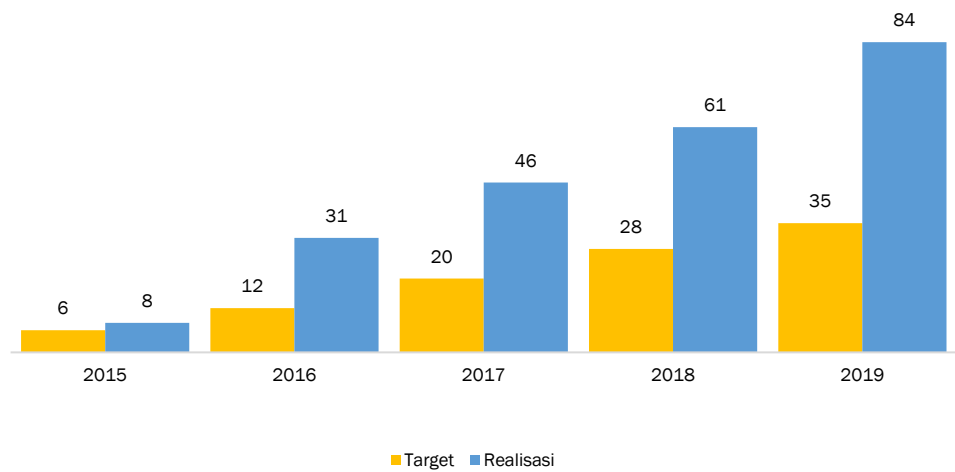
Konsentrasi KPH terbanyak berada pada region Sumatera dengan jumlah 165 unit. Kontribusi KPH di region Sumatera pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 266.793.513,-.

KINERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Luas hutan produksi yang siap dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial



Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTII di hutan produksi





Memanfaatkan potensi alam, KPH Hulu Sungai, Kalimantan Selatan berhasil memanjakan kaum milenial yang haus belanja pengalaman. Foto Dokumentasi Dit. KPHL

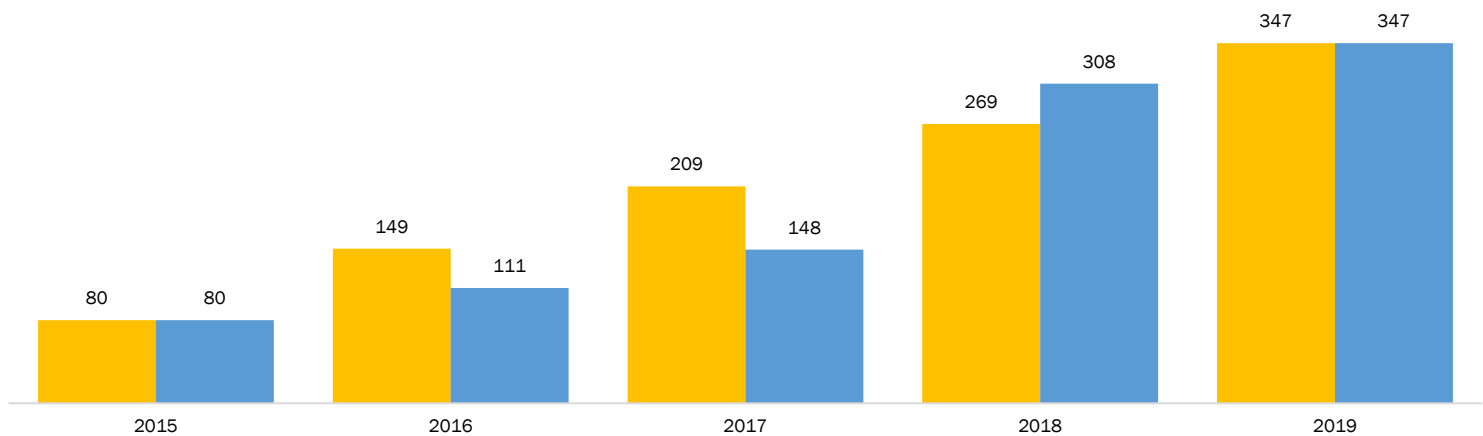
Temaramnya penerangan, Hamsi ketua KTH Brang
Tampu, KPHP Puncak Ngengas Batulanteh, Provinsi
Nusa Tenggara Timur memilah biji kopi secara manual.
Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri.



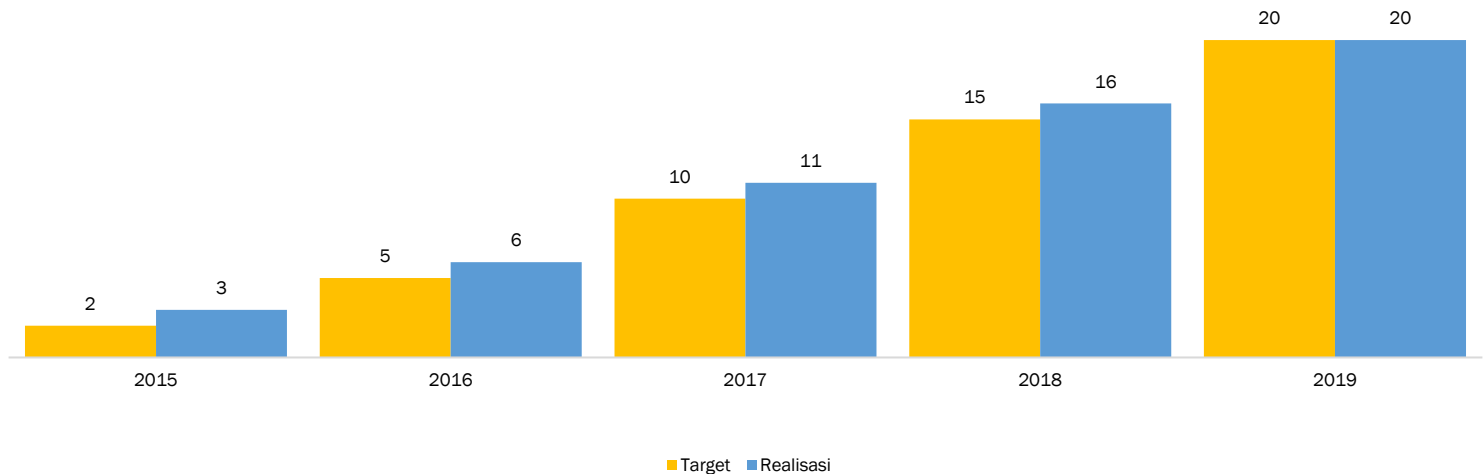


Tata kelola pengelolaan hutan produksi yang semakin baik, tampak dari tahun ketahun meningkatnya unit KPHP yang beroperasi serta unit-unit KPH yang berupaya untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari.

KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi (unit)



Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari



POTENSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

NO	PROVINSI	KPHP	POTENSI
1	Sumatera Utara	Unit XXIX Mandailing Natal (KPH Panyambungan)	Kayu Gaharu 50 Kg, Aren 364 ton, Nilam 27 ton, Getah karet 1.000 ton, Rotan 30 ribu batang, Madu 500 kg, Bambu 6.000 batang/tahun, wisata alam air terjun, gua, arung jeram dan camping ground
2	Sumatera Barat	Unit XI Pesisir Selatan	Rotan 5.000, 350 kg nilam, 2.000 ton karet, wisata alam, mikrohidro, dan air minum dalam kemasan
3	Riau	Unit XVIII Kampar Kiri	Getah damar 24 ton, rotan 120 ribu batang, bamboo 4.800 batang, madu hutan 288 ton, getah karet 480 ton dan wisata alam air terjun
4	Riau	Unit XXII Tasik Besar Serkap	Sagu 2.800 ton, kepiting soka 48 ton, madu hutan 3.780 kg, nanas 7.200 ton, getah karet 2.880, wisata air bono dan danau.
5	Riau	Unit IX Minas Tahura	Lada 60 kg, sarang wallet, wisata danau, track sepeda, out bond dan jasa biofarmaka
6	Riau	Unit XXIV Tebing Tinggi	Sagu 9 ton dan kopi 5 ton
7	Jambi	Unit II Limau Sorolangun	Rotan 104,81 ton, jernang 500 kg, madu hutan 13 ton, minyak kepayang 4 ton, wisata air dan produksi air dalam kemasan
8	Jambi	Unit I Kerinci	Rotan 2 ton, bambu 3.000 batang, kayu manis 2.000 ton, madu hutan 90 ton, kopi 3,5 ton, wisata air, goa dan wisata sejarah
9	Kep. Bangka Belitung	Unit II Jebu Bembang Antan	Madu hutan 4,2 ton, wisata air, pantai, danau dan pengembangan air minum dalam kemasan
10	Kep. Bangka Belitung	Unit V Sungai Sembulan	Madu hutan 6.000 kg dan wisata air sungai
11	Kep. Bangka Belitung	Unit I Rambat Menduyung	Rotan 1000 batang, madu hutan 1 ton, jamur pelawan 500 kg, 1.500 lt madu trigona, wisata hutan adat, patai tungau, kebun durian dan hutan mangrove
12	Kep. Bangka Belitung	Unit IV Sigambir Kotawaringin	Aren 900 kg, wisata pantai, hutan mangrove dan pemandian air panas
13	Kep. Bangka Belitung	Unit III Bubus Panca	Gaharu 230 kg, madu hutan 1.020 kg, karet 4.616 ton, mata air, wisata air dan situs budaya
14	Sumatera Selatan	Unit IV Meranti	Rotan 112 ton, jernang 2,5 ton, madu hutan 30 ton, getah karet 1.050 ton, industri air minum, mikro hidro dan perdagangan karbon
15	Sumatera Selatan	Unit V Rawas	Nilam 250 kg dan wisata alam
16	Sumatera Selatan	Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	Madu hutan 17,4 ton, karet 7.000 ton, jengkol 75 ton, gaharu 7 ton, dan wisata air
17	Sumatera Selatan	Unit VI Lakitan	Gaharu 10 ribu batang, bamboo 450 batang, madu hutan 1.000 kg, getah karet 200 ton, 36 ribu ton jelutong, dan perdagangan karbon

NO	PROVINSI	KPHP	POTENSI
18	Sumatera Selatan	Unit II Lalan Mangsang	Rotan 500 kg, 600 kg jelutong, 42 ribu nanas, 300 ribu lt nipah, penangkaran satwa dan jasa karbon
19	Sumatera Selatan	Unit XIV Suban Jeriji	Bambu 75 ribu batang, madu hutan 90 ton, gaharu 1,24 ton, karet 632 ribu ton
20	Lampung	Unit III Bukit Pungur	Karet 33.800 ton, 10 ribu ton kopi, wisata air terjun, air panas dan arung jeram
21	Lampung	Unit XIV Gedong Wani	Karet 39.400 ton, kelapa sawit 1.578 ton, bamboo 66.500 batang dan wisata batu besar
22	Lampung	Unit IV Muara Dua	Madu hutan 24 liter, getah karet 7.528 ton, minyak kayu putih 26 liter dan wisata rawa
23	Lampung	Unit VI Register 47 Way Terusan	Getah karet 2.400 ton, wisata air sungai dan jasa karbon
24	Yogyakarta	Yogyakarta	Minyak kayu putih 31.247 liter, wisata kali biru, goa, air terjun dan waduk
25	NTB	Unit IX Batulanteh	Rotan 200 ton, kemiri 500 ton, madu trigona 340 lt, kopi 533 ton, madu huta 20.000 lt, kayu putih 350 lt, sereh wqngi 0,67 ton, tengkawang 25 lt, pemasok sumber air PDAM, wisata air terjun dan camping ground
26	NTB	Unit V Sejorang	Rotan 100 ton, kemiri 12 ton, madu hutan 120 lt, porang, 56 ton, bamboo 4.000 batang, aren 150 kg, liana 30 ton dan wisata alam pantai
27	NTB	Unit XXIII Maria Donggomassa	Kemiri 976 kg, madu utan 15 ton, dan wisata alam
28	NTB	Unit XVIII Tambora Utara	Rotan 75 ribu ton, kemiri, 50 ton, madu hutan 3 ton, jasa air dan jasa karbon
29	NTB	Unit XX Madapanga Rompu	Kemiri 8.611 ton, madu hutan 2.500 ton, bambu 3.000 batang, rotan 1883 ton, jasa air dan karbon
30	NTT	Unit XVI Rote Ndao	Aren 96.768 lt, kayu putih 67 lt dan madu hutan 420 lt,
31	NTT	Unit I Manggarai Barat	Pinang 2 ton, kemiri 100 -4100 ton dan jasa karbon
32	Kalimantan Barat	Unit XIX Kapuas Hulu	Bambu 1,2 juta batang, madu hutan 108 ton, karet 2.985 ton dan ekowisata
33	Kalimantan Barat	Unit X Sungai Merakai	Gaharu 300 ton, madu 100 kg, tengkawang 300 ton, wisata air terjun, landskap, dan wisata budaya
34	Kalimantan Tengah	Unit XXI Seruyan	Madu hutan 400 lt, tengkawang 150 ton, wisata air terjun, dan jasa lingkungan
35	Kalimantan Tengah	Unit XVI Gunung Mas	Damar 50 kg, sarang semut 10 kg, madu hutan 20 lt, jahe merah 100 kg, penangkaran burung kua raja, lebah madu, getah jernang, sarang bulung wallet, sarang semut dan tanaman obat

NO	PROVINSI	KPHP	POTENSI
36	Kalimantan Tengah	XXII dan XXVI Kotawaringan Barat	Aren 900 kg, wisata alam dan jasa lingkungan
37	Kalimantan Tengah	Unit XXIII Lamandau	Damar 300 kg, rotan 600 ton, madu hutan 100 lt, bamboo 235 batang, jahe merah 60 ton, jengkol 100 ton, pasak bumi 1 ton dan wisata budaya
38	Kalimantan Tengah	Unit II Murung Raya	Karet 900 ton, mikro hidro, peyediaan air bersih, perdagangan karbon, dan wisata air
39	Kalimantan Selatan	Unit I Banjar	Rotan 81.600 ton, kemiri 6 ton, kayu manis 104 ton, madu kelulut 60 kg, madu hutan 780 kg, rimpang kunyit dan kencur 1.560 ton, jahe merah 10 ton, wisata air terjun dan pendakian gunung.
40	Kalimantan Selatan	Unit V Tabalong	Kopi pasak bumi 60-1.200 kg, kemiri 60-120 ton dan wisata alam
41	Kalimantan Selatan	Unit VI Tanah Bumbu	Kayu manis 12.000 kg, kemiri 6 ton, madu kelulut, wisata alam, pembangkit listrik dan irigasi
42	Kalimantan Selatan	Unit VII Tanah Laut	Madu 1500 lt, jamur tiram 150 kg, wisata air terjun dan gua.
43	Kalimantan Timur	Unit XXXII Bongan	Rotan 10 ton, bamboo 5 ton dan madu hutan 15.500 lt,
44	Kalimantan Timur	Unit XXXIV Kendilo	Rotan 2000 batang, madu hutan 5 ton dan wisata budaya
45	Kalimantan Timur	Unit XII Berau Barat	Madu hutan 160 lt, the manggar 300 kotak, mikro hidro, wisata alam dan wisata budaya
46	Kalimantan Timur	Unit XXVII Santan	Gula aren 3.000 kg dan ekowisata
47	Kalimantan Timur	Unit XXXIII Telakai	Rotan 31.000 batang, jamur tiram 3,6 ton, madu hutan dan wisata alam.
48	Kalimantan Timur	Unit XXVI Sub Das Belayan	Rotan 10 ton, madu hutan 100 lt, sarang wallet 200 kg, aren 48 ton, wisata angrek, dan wisata alam
49	Sulawesi Utara	Unit IV Poigar	Aren 48.480, kemiri 480, arang tempurung, virgin coconut oil, wisata air terjun dan sumber air masyarakat
50	Gorontalo	Unit V Boalemo	Damar 7.308 ton, rotan 33.000 ton, jenang 200 kg, aren 7.300 lt, kain sutera 2.400 kg,, mata air, mikrohydro dan wisata alam
51	Gorontalo	Unit VI Gorontalo	Pinus 290 ton, aren 34 ton, jasa air dan wisata alam
52	Gorontalo	Unit IV Gotrontalo Utara	Pinus 12 ton, rotan 240 ton, minyak nilam 720 lt, aren 12,6 ton dan wisata air terjun
53	Gorontalo	Unit VII Bone Bolango	Aren 25,2 ton, rotan 1563 batang, getah pinus 20 ton, mikrohydro dan wisata alam
54	Sulawesi Tengah	Unit XVII Sivia Patuju	Getah damar 3.458 ton, rotan 180 batang, madu hutan 1.800 liter, kemiri 2.400 kg, wisata air, irigasi dan pemasok air PDAM
55	Sulawesi Tengah	Unit XI Sintuwu Maroso	Damar 5000 ton, pinus 3.037 ton, rptan 10.000 ton, madu hutan 5.000 ton, wisata air terjun irigasi, dan jasa air.

NO	PROVINSI	KPHP	POTENSI
56	Sulawesi Tengah	Unit IV Dampelas Tinobo	Rotan 360 ton, aren 6 ton, minyak nilam 2.160, karet 60 ton, irigasi dan wisata alam.
57	Sulawesi Tengah	Unit V, VI dan IX Dolango Tamggung	Rotan 16.503 ton, aren 180.000 lt, nilam 16, 2 ton dan wisata alam hutan lindung
58	Sulawesi Tengah	Unit I Pogogul	Damar 12 ton, rotan 60 ton, bambu 3.600 batang, aren 13 ton, madu hutan 12.000 kg dan wisata alam
59	Sulawesi Tengah	Unit XX Balantak	Damar 360 ton, rotan 71- 125 ton, bambu 600 ton, aren 1.500 – 2.500 biji, pinang 600-1.200 kg, kemiri 30-50 ton, madu hutan 600-1.200 lt, getah pinus 3-4 ton
60	Sulawesi Tengah	Unit XIX Toili Batu Rube	Damar 600 ton, aren 207 ton, wisata air terjun dan arung jeram
61	Sulawesi Barat	Unit VII Mamasa Barat	Pinus 4.000 ton, rotan 200 ton, bambu 90.000 batang, minyak nilam 6 ton, kopi 1.400 ton, wisata air terjun, pemandian air panas dan wisata arun jeram
62	Sulawesi Barat	Unit V Budong-budong	Aren dan wisata alam
63	Sulawesi Barat	Unit VI Karama	Kemiri 976 kg, madu 15 -50 ton, sumber air baku PDAM, mikrohydro dan wisata alam
64	Sulawesi Barat	Unit IV Karossa	Damar 13 ton, rotan 16.449 ton, aren 30 ton, kopi 36 ton, mikrohydro, wisata alam dan perdagangan karbon
65	Sulawesi Selatan	Unit X Kepulauan Selayar	Kemiri 2.517 ton, cengkeh 40 ton, pala 4 ton, aren 15 ton, kemari 19 ton, wisata air terjun, pantai dan sunagi.
66	Sulawesi Tenggara	Unit XII Ladongi	Pinus 180 ton, rotan 240 ton, aren 1.404 ton, madu hutan 10 ton dan jasa air
67	Sulawesi Tenggara	Unit XXIV Gularaya	Rotan 600 ton, bamboo 6.000 batang, sagu 12 ton, madu hutan 600 lt, wisata air terjun dan pemandian air panas kendi
68	Sulawesi Tenggara	Unit XI Mekongga Selatan	Rotan 5 ton, nilam 1-3 ton, cengkeh 5-100 kg, jasa air dan wisata alam
69	Sulawesi Tenggara	Unit XIX Bina Mahawana Sejuk	Damar 5 ton, rotan 80 ton, lada 132 ton, penakaran buaya dan wisata alam
70	Maluku	Unit II Wae Apu	Sagu 600 ton, gaharu 5-6 ton, damar 7-8 ton, bamboo 7.500 batang, madu 4.200 lt, kayu putih 300 ton dan jasa wisata alam
71	Maluku	Unit III Wae Tina	Damar 144 ton, kayu putih 980 kg dan wisata arum jeram
72	Maluku Utara	Unit X Gunung Sinopa	Gaharu 60 kg, damar 2.160 ton, rotan 12 ton, madu hutan, wisata air terjun dan jasa air.
73	Maluku Utara	Unit XIII Bacan	Damar 180-360 ton, wisata bahari, wisata air terjun dan wisata budaya

NO	PROVINSI	KPHP	POTENSI
74	Maluku Utara	Unit XII Gane	damar 360 ton, wisata air terjun, wisata arung jeram, mikro hydro dan jasa air
75	Maluku Utara	Unit IX Oba	Rotan 12 ton, bambu 2.400 batang, aren 2.400 buah, damar 120 ton, wisata air terjun, mikro hidro dan jasa air
76	Papua Barat	Unit V Sorong Selatan	Sagu 30 ton, damar 3 ton dan usaha air minum dalam kemasan
77	Papua	Unit XVII Waropen	Sagu 75 ton, gaharu 50 ton, pinang 100 ton dan wisata alam
78	Papua	Unit XLIII Nduga	Gaharu 600 kg, damar 400 kg, rotan 300 kg, bambu 50.000 batang dan sarang semut 650 kg

Foto oleh Ineke Tya Claudya S. P.



POTENSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

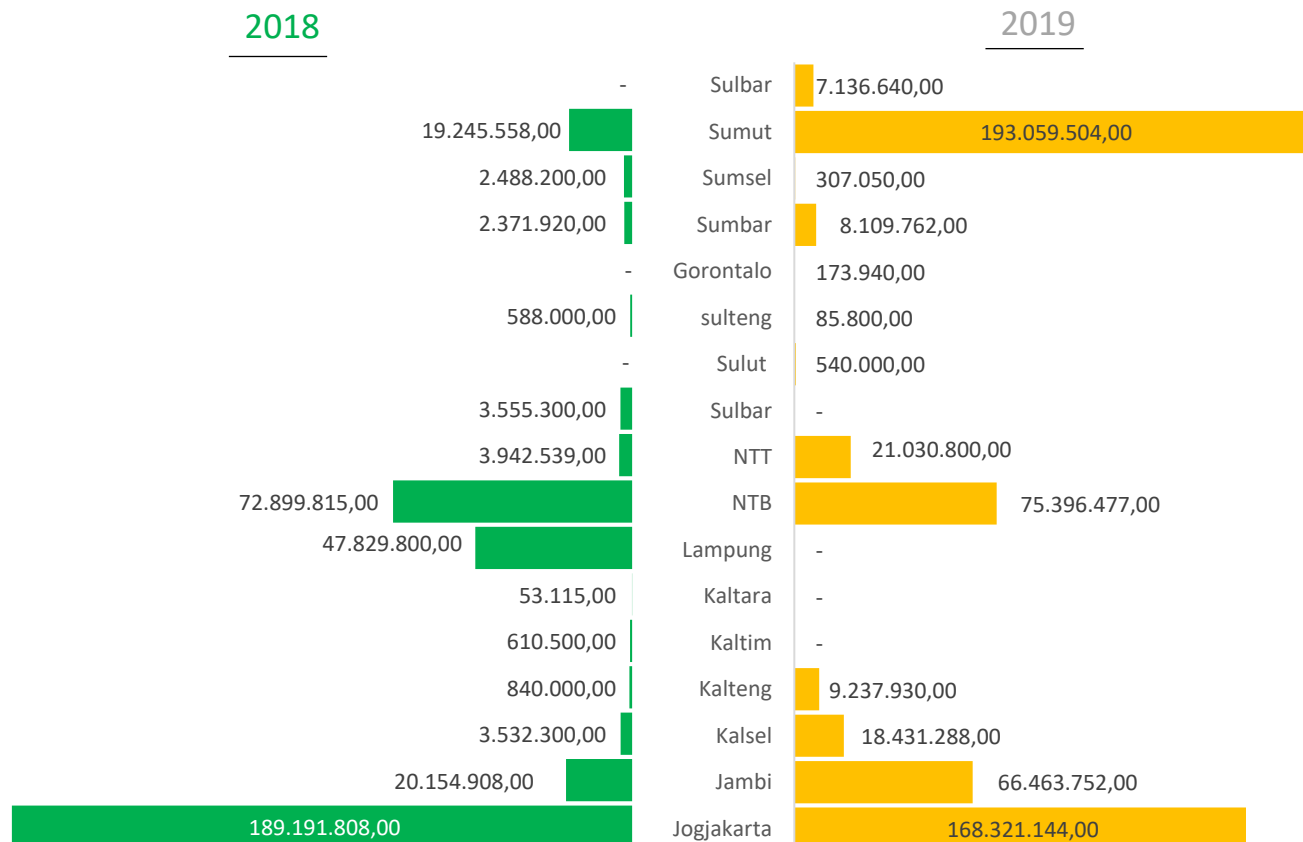
NO	PROVINSI	KPHL	POTENSI
1	Aceh	Unit III	Getah pinus 633 ton/tahun, dan kopal 12 ton/tahun
2	Aceh	Unit IV	Rotan, gaharu dan jenang
3	Aceh	Unit V	Rotan 20 ribu ha dan pinus 50 ha
4	Aceh	Unit VI	Madu hutan 2.000 dirijen/tahun dan gaharu
5	Aceh	Unit I	Rotan 69,3 ton
6	Aceh	Unit II	Getah pinus 11.527 kg/tahun, dan kopi
7	Sumatera Utara	Unit XXII Sumut	Kemenyan 35 ton/th, andaliman 301 kg/th, kulit kayu manis 40 ton/th dan minyak nilam 40,39 ton.
8	Sumatera Utara	Unit XIV Toba Samosir	Aren 43,16 ton, lebah madu 560 liter, rotan 7,5 ton dan nilam 40,39 ton
9	Sumatera Barat	Unit VI KPHL Solok	Rotan 1500 ton/th dan rotan manau 2000 btg/th
10	Sumatera Barat	Unit II lima puluh kota	Aren 4,38 ton/th dan pala 25 ton/th
11	Sumatera Barat	Sijunjung	Madu 18 ton/th, rotan 8 ton/mgg, jernang 9 ton/musim, asam gelugur 600 kg/musim, pinus 18 ton/bulan dan pasak bumi 200 kg/bulan
12	Sumatera Barat	Unit IV Bukit Barisan	Pinus 100 ton/th, rotan 100rb batang/th, madu 1200 kg/th dan jernang 120 kg/th
13	Sumatera Barat	Unit I KPHL Banyuasin	Nipah 1000 ton/th
14	Sumatera Selatan	Ogan Hulu	Markisa 2400 kg, kopi 40rb ton, nangka 20rb buah, alpukat 3 ton dan kulit kayu manis 1,5 ton
15	Sumatera Selatan	Bukit Nanti Martapura	Rotan, bamboo dan lebah madu
16	Sumatera Selatan	Peraduan Gistang	Rotan 8 ton, madu, kopi dan lada
17	Sumatera Selatan	Unit VII Bukit Nanti Martapura	Madu, kemiri, karet dan rotan
18	Sumatera Selatan	Dempo	Kopi, rotan jernang, rotan getah dan rotan sega
19	Sumatera Selatan	Bongan	Lada hitam, danbuah-buahan
20	Sumatera Barat	Agam Raya	Kemiri dan aren
21	Riau	Kuantan Singingi Selatan	Karet 3000 ha, jernang 1000 rumpun dan kepencong 5000 batang
22	Jambi	Sungai Beram Hitam	Kopi 860 kg/th, pinang 1 ton/th dan kelapa dalam 4,6 ton/th
23	Bengkulu	Seluma	Damar mata kucing, damar batu, madu, kopi 20rb ha
24	Bengkulu	Lintas Bukit Daun	Pinus 20 ton/bulan
25	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Rotan 20 ton/th
26	Bengkulu	Kaur Bengkulu	Damar, rotan, pinus dan jernang

NO	PROVINSI	KPHL	POTENSI
27	Bangka Belitung	Unit X Belitung	Madu dan gula aren
28	Lampung	Batu Tegi	Aren 31,8 ton, madu 2,25 ton, kopi 100 ton, kemiri 100,5 ton dan lada 65,25 ton
29	Lampung	Unit X Kotaagung Utara	Aren 18,25 ton/th dan kopi 742 ton/th
30	Lampung	Unit XIV Rajabasa	Aren 5000 kg/th, durian 4 ton/th, pala 100 ha dan belerang
31	Lampung	Unit XII Pesawaran	Pala 250 ton/th dan durian 300 ha
32	Lampung	Gunung Balak	Karet 5 ton/th dan 4 ton/th
33	Lampung	Way Waya Tangki Tebak	Kemiri 43 ton/ha, kopi 109 ton/ha, durian 26 ton/ha dan pinang 63 ton/ha
34	Lampung	Liwa	Kopi 5 kwintal dan aren
35	Bali	Unit I Bali Barat	Madu 300 liter/th dan kayu putih
36	Bali	Unit II Bali Tengah	Kayu putih 2 ton dan lada 100 ton
37	Bali	Unit III Bali Timur	Getah pinus 114 ton/th, lebah madu 5 ha, rumput gajah 1300 ha dan bambu 25 ha
38	NTB	Rinjani Barat	Nilam 2160 liter/th, kayuputih 100 liter/th, pelet kayu 99 ton/th, madu 2250 liter/th dan pinus 663 ton/th
39	NTB	Unit IV Rinjani Timur	Jahe gajah 3 ton/th
40	NTB	Unit XIV Ampang	Rotan 20rb btg/th, madu dorsata 200 liter/th dan bambu 310 ha
41	NTB	Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworanda	Jahe 2,35 ton/th, madu 1500 liter, rotan 5 ton dan kutulak 32,1 ton
42	NTB	Ropang	Rotan, porang, madu, gadung, kemiri dan sarang semut
43	NTB	Puncak Ngengas Batu Lanteh	Kopi, kemiri, durian, bambu dan rotan
44	NTT	Unit III Tastura	Bambu, dan ketak
45	NTT	Unit XIX Mutis Timau	Madu 3000 liter, jambu mete 2 ton dan kemiri 2 ton
46	NTT	Unit X Alor Patar	Kemiri 47,2 ton/th, madu 670 liter/th, kenari 233 ton/th dan pinang 80 ton/th
47	NTT	Unit VIII Flores Timur	Kemiri 854 ton/th, kapuk randu 95 ton/th, sirih hutan 10431 ton/th dan pinang 80 ton/th
48	NTT	Ngada	Pinang kering 17 ton dan kemiri 571 ton
49	NTT	Lembata	Kemiri 114,8 ton/th, asam 13,8 ton/th, 2,1 ton/th dan kutulak 32,1 ton/th
50	Kalimantan Utara	Tarakan	Minyak kayu putih 150 liter/th dan bambu 3,5 ton/th
51	Kalimantan Selatan	Hulu sungai	Damar kopal 50 ton/th, bambu 400 ikat/th dan karet 100 ton/th
52	Kalimantan Tengah	Kapuas Kahayan	Karet 462.168 kg/th, rotan 64284 kg/th, madu 5096 kg/th dan ikan 15933 kg/th

NO	PROVINSI	KPHL	POTENSI
53	Sulawesi Barat	Bonehau Kalumpang	Damar kopal 2,5 ton/th dan rotan batang 1000 ton/th
54	Sulawesi Barat	Unit X Malunda	Kemiri 1500 ton/th, durian 3000 ton/th, damar 150 ton/th, rotan 300 ton/th dan madu
55	Sulawesi Tengah	Kulawi	Rotan, aren, madu dan pinus
56	Sulawesi Tenggara	Unit XXII Laiwoi	Pinus 150 ton/th, rotan 10 ton/th, madu 200 liter/th dan sagu 2476,6 ton/th
57	Sulawesi Tenggara	Unit VII Peropa'ea Gantara	Jambu mete 600 ton/th, rotan batang 2000 ton/th, bambu 2040 rumpun, kayu putih 125rb batang dan rotan 55 ton/th
58	Sulawesi Utara	Unit VI Minahasa Utara	Kenari, kemiri, jahe dan aren
59	Sulawesi Barat	Mapili	Pinus 54,69 ha, damar 480 ton/th dan kemiri 220 ton/th
60	Sulawesi Barat	Lariang	Rotan, damar dan gaharu
61	Sulawesi Barat	Mamasa Tengah	Pinus 38721,86 ha, rotan tohiti 200 ton/th, rotan batang 1000 ton/th, kopi 250 ton/th dan pakis 2 ton/bulan
62	Sulawesi Barat	Unit III Pohuwoto	Rotan 200 ton, damar 300 ton, gaharu 700 ton, aren 40 ha, madu 150 stup dan nilam 1500 liter/th
63	Sulawesi Barat	Mamasa Timur	Getah Pinus seluas 7.479,32 ha
64	Papua Barat	Unit II Remu	Buah merah, pinang, bambu, daun gatal dan kali kuning
65	Papua Barat	Raja Ampat	Bambu dan gaharu
67	Papua	Mimika	Kulit lawang, kulit masosowi, gaharu, nipah, rotan manau dan pandan

KPH BERKONTRIBUSI MEMBANGUN NEGERI

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari KPH

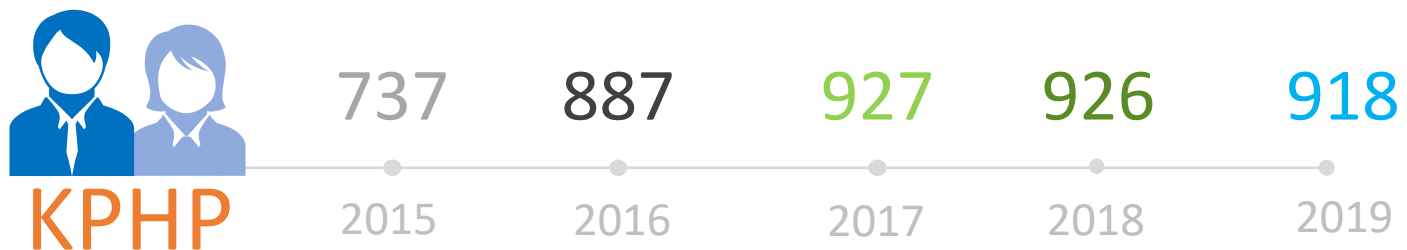
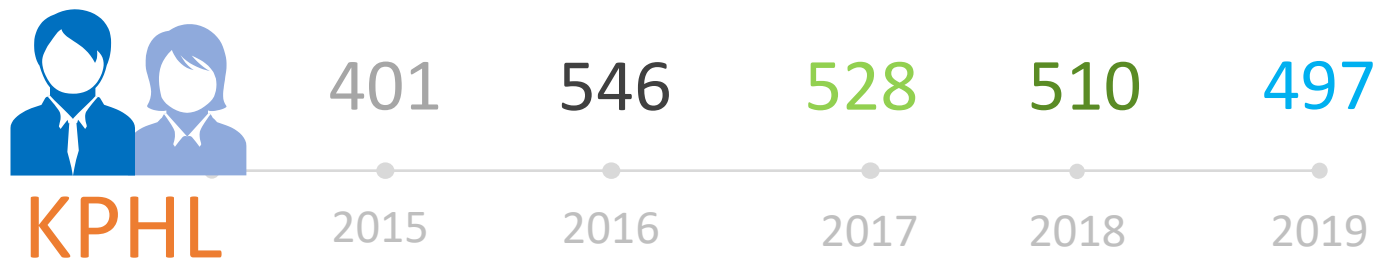


Seiring dengan KPH yang mampu memproduksi barang dan jasa di berbagai tapak, selain meningkatkan perekonomian anggotanya perlahan KPH mampu memberikan sumbangsih untuk membangun negeri. Penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari KPH di tahun 2019 sebesar Rp. 569 juta meningkat 54,92 % YoY dimana pada tahun 2018 sumbangsih PNPB dari KPH sebesar Rp. 367 Juta. Pun demikian dengan transaksi di KPH terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 tercatat 528 transaksi sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 310 transaksi.

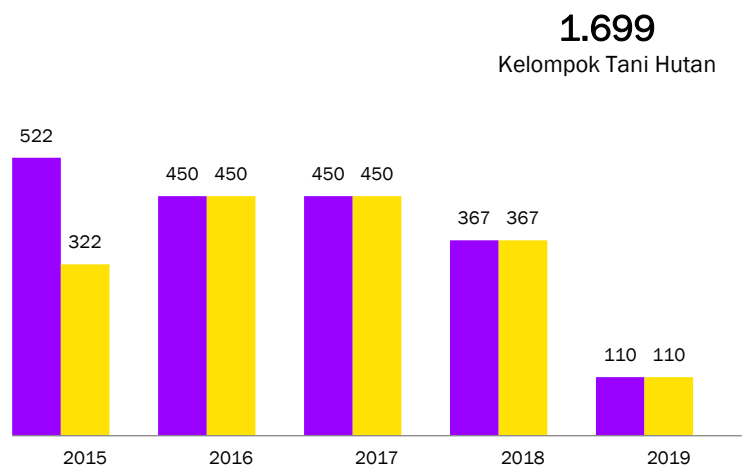
MENGELOLA KPH DENGAN SDM UNGGUL

Menempatkan sumber daya manusia kompeten, melalui program bakti rimbawan.
Diharapkan mampu mengekstrak potensi kesatuan pengelolaan hutan

jumlah tenaga bakti rimbawan di KPH (orang)

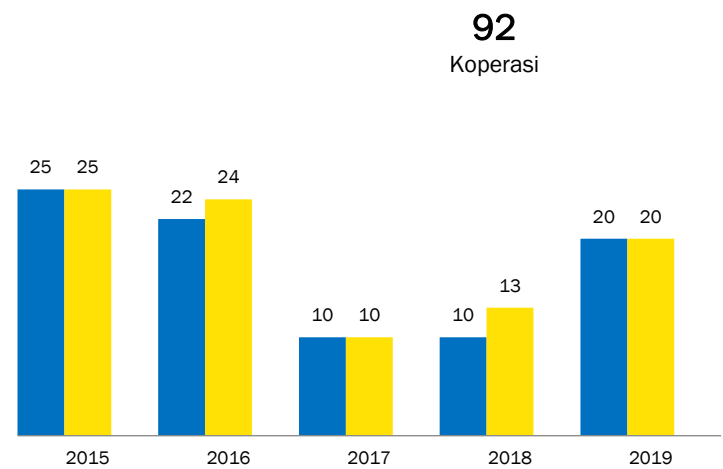


**PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TANI HUTAN
DARI PEMULA MENUJU MADYA**



Sebagai stimulan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari pemula menjadi madya melalui pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan usaha.

**FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI
KELOMPOK TANI HUTAN**



Sebagai upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui usaha produktif agar petani memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.



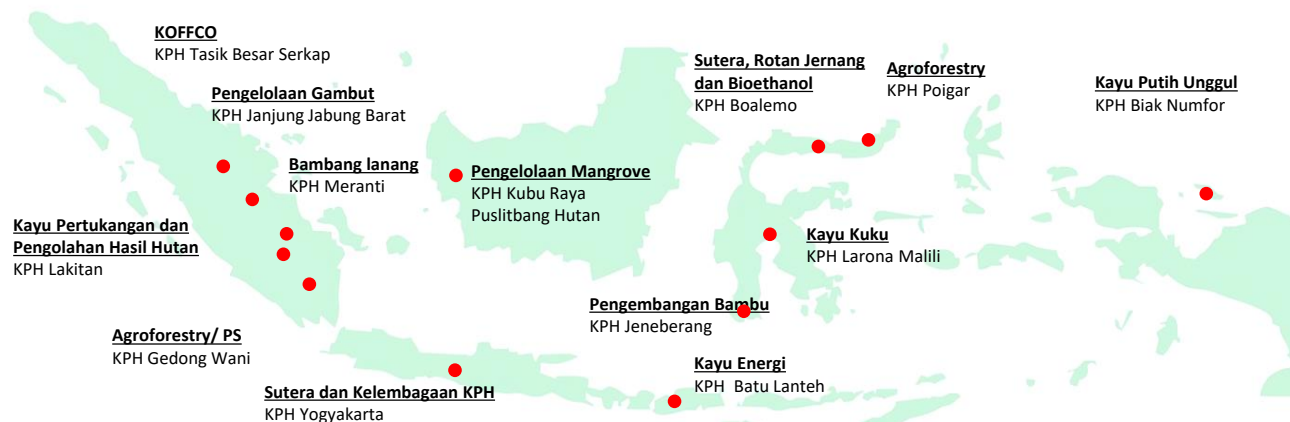
Pembinaan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) oleh KPHP Unit VI Kep. Riau senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola KTH. Dalam suasana kekeluargaan pembinaan di isi dengan saling berbagi informasi, motivasi dan solusi di KTH Karya Bersama Desa Tarempa Selatan, Kab. Anambas. Foto oleh Dian Armayanti



Dukungan iptek litbang untuk KPH diantaranya adalah penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan KPH dan mendorong operasionalisasi KPH melalui teknologi terapan.

DUKUNGAN IPTEK LITBANG PADA KESATUN PENGELOLAAN HUTAN

- BLI melaksanakan kegiatan pembangunan Pilot IPTEK di KPH untuk membantu percepatan operasionalisasi KPH
- Berbagai komoditas kehutanan unggul dikembangkan bersama KPH antara lain: Kayu putih, sutera, rotan jernang, bambu, kayu pertukangan, bioethanol aren, jamur, kayu kuku, serta iptek pengelolaan mangrove, agroforestry/ perhutanan sosial dan mangrove. Sampai tahun 2018, tercatat sudah 17 Pilot Iptek di 13 KPH dikembangkan.
- BLI mengembangkan instrumen untuk menilai keberhasilan KPH. Tahun ke 2017 dilakukan finalisasi draf instrument dengan mengujinya pada beberapa KPH dengan fungsi hutan yang beragam di KPHL Kapuas Kahayan (Kalteng), KPHP Jeneberang (Sulsel) dan KPHP Tasik Besar Serkap (Riau). Hasil penelitian menunjukkan instrumen yang disusun cukup baik untuk mengukur kinerja KPH pada berbagai fungsi kawasan hutan.



PENERAPAN IPTEK UNTUK MENDORONG OPERASIONALISASI KPH

Badan penelitian, pengembangan dan inovasi Kementerian LHK senantiasa mengembangkan teknologi terapan. Masuknya sentuhan iptek diharapkan menjadi akselerasi pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Iptek Litbang di KPH



*KPH Boalemo: Sutera, Rotan
Jernang dan Bioethanol*



KPH Lakitan: Limbah untuk budidaya jamur



KPH Jeneberang, Bambu



KPH Biak Numfor, Kayu Putih Unggul



KPH Kubu Raya: Mangrove



KPH Tasik Besar: KOFFCO



*KPH Yogyakarta:
kelembagaan dan sutera*

TURUT SERTA DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN KPH HULU SUNGAI



BP2LHK BANJARBARU



KPH Hulu Sungai Sangat Potensial dalam Pengembangan Ekowisata. Potensi tersebut sebagian besar yakni ekowisata alam (68,3%: Gua, Air Terjun, dan Pemandangan Alam). Namun demikian, pengelolaan terhadap ekowisata tersebut belum maksimal terutama informasi terhadap wisatawan terkait jalur interpretasi wisata alam. BLI membuat jalur wisata alam yang sesuai dengan kondisi dan pilihan masing-masing wisatawan. Penentuan jalur tersebut berkaitan dengan jenis wisata yang akan dikunjungi (wisata air, gua, dan pegunungan). Pembuatan jalur ekowisata ini diharapkan akan memberikan kemudahan kepada wisatawan yang akan berkunjung dan meningkatkan kepuasan terhadap pengunjung.

IPTEK BIOETANOL AREN DESA BATUMOITO KPHP BOALEMO

Memfaatkan potensi aren menjadi berbagai produk yang prospektif dengan aplikasi IPTEK dan Inovasi



1 liter bioethanol mix memiliki kinerja yang setara dengan gas 3 kg seharga Rp. 20.000, yaitu dapat menyala selama 6 jam. Ini membuka peluang pasar bioethanol mix sebagai alternative bahan bakar selain gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana 60% penduduk menggunakan gas.

Bioethanol murni per bulan yang dihasilkan adalah 216.000 liter. Untuk keperluan pemenuhan bahan bakar rumah tangga 648 KK per bulan hanya dibutuhkan sekitar 118 liter bioethanol murni.

Tiap KK rata-rata menggunakan 2 tabung gas per bulan, dan jika harga jual bioethanol mix Rp. 10.000/liter, maka potensi penghematan keluarga adalah sebesar Rp 20.000 atau sekitar 50%.

Dengan perhitungan seperti diatas, pengolahan nira aren sebesar 90.000 liter akan memberikan pendapatan sebesar Rp. 261.360.000 per hari.

KPH PUNCAK NGENGAS BATULANTEH, NUSA TENGGARA BARAT



Berbagai produk dari KPH Puncak Ngengas Batu lanteh kayu manis, madu dan minyak kemiri yang sudah dikemas secara menarik untuk meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah. Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri.

Di atas hamparan seluas 117 hektar, terjalin sinergi mutualisme antara KPH Puncak Ngengas Batulanteh dengan KTH Brang Tampu. Kelompok tani mampu mengembangkan dan memasarkan produk pertanian, sehingga mensejahterakan anggotanya. Selain itu pada Januari 2019 KTH menyumbang provisi sumber daya hutan sebesar Rp 5,5 juta rupiah juga berkontribusi terhadap retribusi daerah sebesar Rp. 4,3 juta rupiah.

KPH WILAYAH VI GORONTALO

KABAR TAPAK



Profil KPH

- Luas : 71.682 Ha
- HHBK : - 290 ton pinus per tahun
- 33,9 ton aren per tahun
- Jasling : - PLTMH
- Arboretum dan Wisata Alam

MANISNYA GULA SEMUT HUYULA, TERASA HINGGA BELANDA

K T H H U L U Y A

Alamat: Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

- 2015 Mulai Pembinaan KTH oleh KPH
- 2016 Penguatan Kelembagaan KTH
- 2017 Bantuan Mesin Produksi dan Pelatihan
- 2018 Mulai Produksi
- 2019 Perdana Ekspor



Aren Go produk KTH Huluya binaan KPH Wilayah VI Gorontalo yang sudah masuk komoditas ekspor, dengan negara tujuan Kincir Angin Belanda

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 5



Persentase Realisasi Anggaran (input)	95,76 %	Efisiensi	kategori
Persentase Capaian (output)	154,90 %	0,61	Efisien

Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 5 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 5, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.

Energi listrik dari turbin pembangkit tenaga air menyemarakkan kehidupan malam masyarakat Hutan Desa Tibussan. Saat listrik padam, anak-anak kembali memakai lampu penerang minyak damar. Listrik membangkitkan semangat belajar anak-anak untuk meraih masa depan. Foto oleh Triandu





“ Secara kumulatif, 4,04 juta hektar hutan di Indonesia telah diterbitkan izin akses untuk dikelola oleh 818.457 kepala keluarga. Secara rata-rata, setiap kepala keluarga yang telah menerima SK izin hutan sosial mengelola kawasan hutan seluas 4,95 hektar atau 49.500 m² sebuah luasan yang cukup besar untuk dibudidayakan bagi setiap keluarga ”



Petani perhutanan sosial berburu ke dalam hutan, bukan berburu hewan melainkan berburu memanen madu hutan di areal kemitraan konservasi danau Sentarum.
Foto oleh Fajrul Barokah.



Ikhtisar

Target : 1.000.000 Ha
Realisasi : 1.588.954,91 Ha
Kinerja : 158,9%
Y o Y (2018-2019): ▲ 29,02%

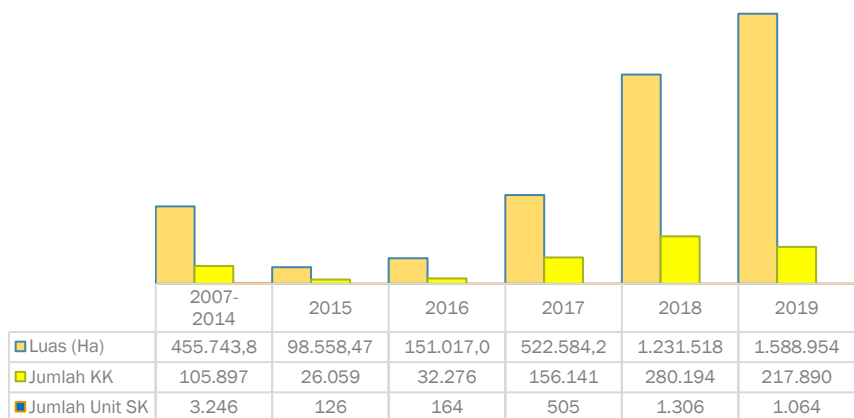
Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Kementerian LHK terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui perhutanan sosial dan telah menyediakan indikatif Hutan Sosial seluas 13.625.710 Ha (sesuai SK Menteri LHK Nomor SK. 6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi IV). Hal ini merupakan langkah untuk memenuhi target Hutan Sosial sebesar 12,7 juta Ha pada Renstra 2015-2019. Untuk tahun 2019, Perjanjian Kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan akses kelola Kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat seluas 1 juta Ha.

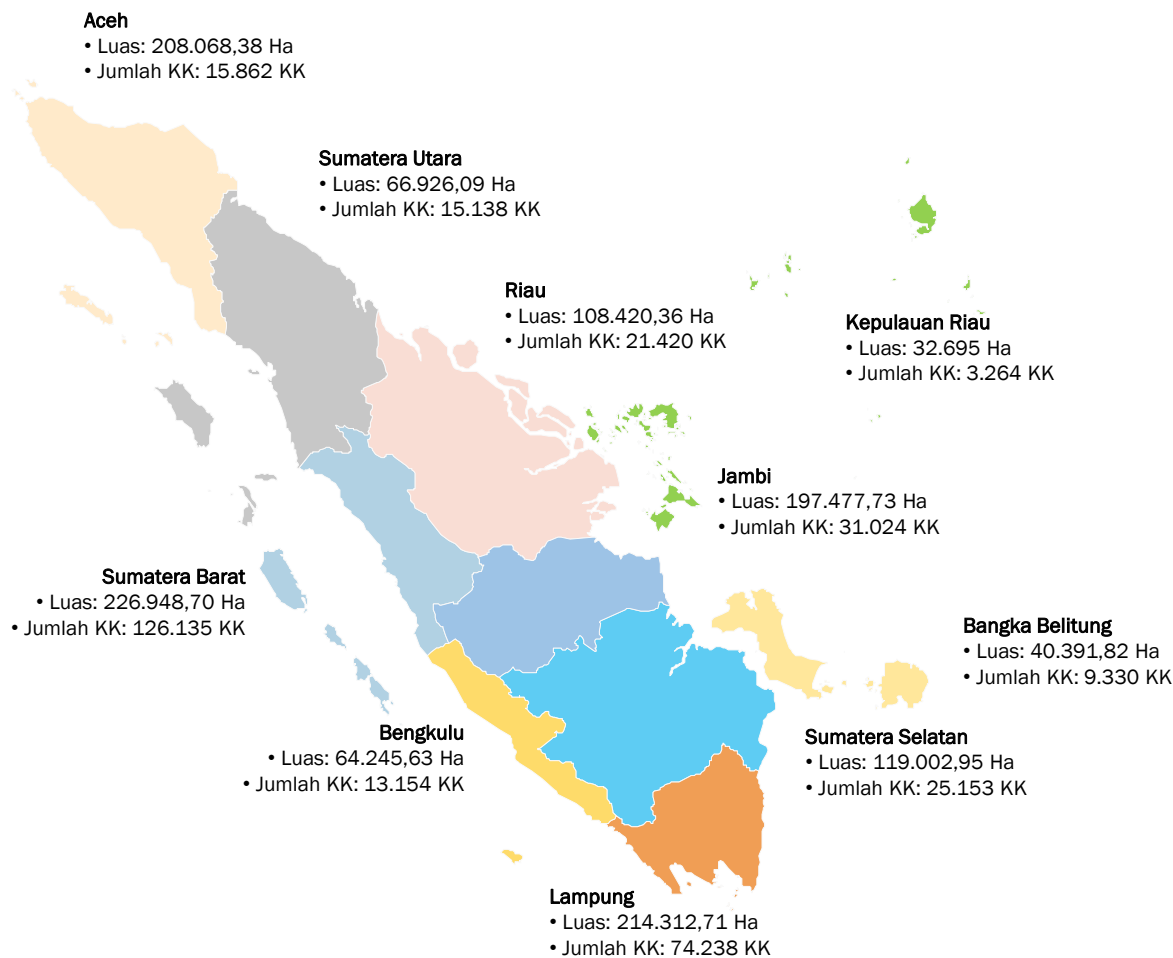
Secara umum capaian kinerja akses kelola perhutanan sosial tahun 2019 sebesar 1,58 juta Ha, jika dibandingkan dengan target yang diperjanjikan maka diperoleh capaian kinerja sebesar 158,9 %, meningkat 29,02 % dari tahun 2018 (1.264.156 Ha). Capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2019 terbagi atas Hutan Desa 274.389,94 Ha, Hutan Kemasyarakatan 148.887 Ha, Hutan Tanaman Rakyat 20.634 Ha, Hutan Adat 932.470,13 Ha, dan Kemitraan seluas 212.022,84 Ha serta IPHPS 551 Ha.



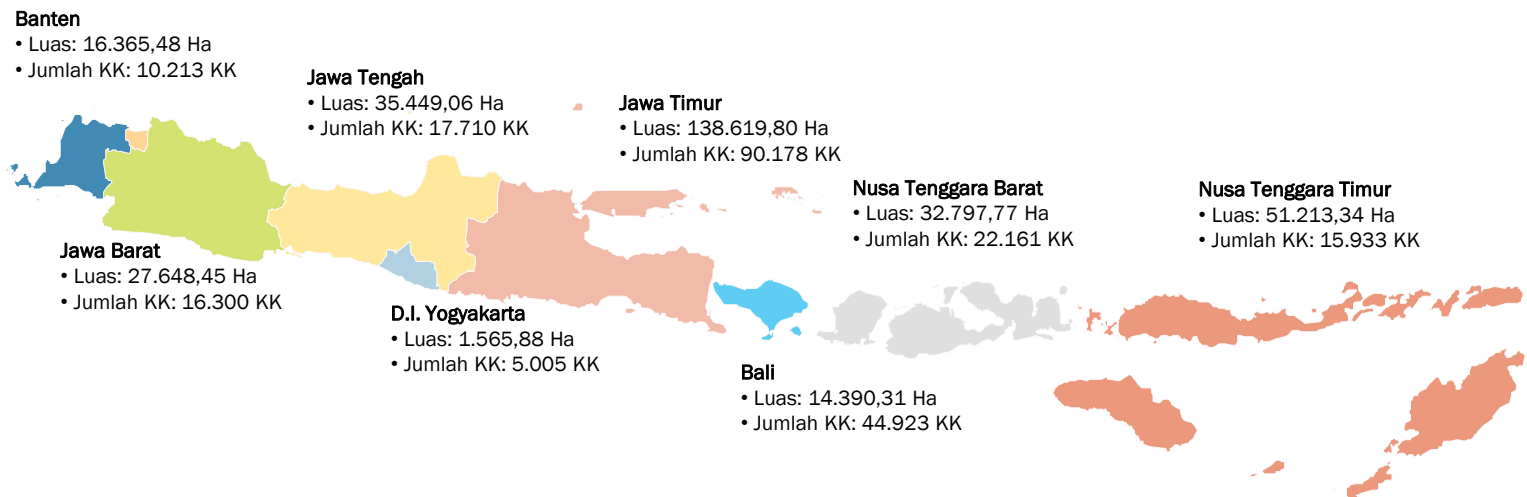
PERKEMBANGAN CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL 2015-2019



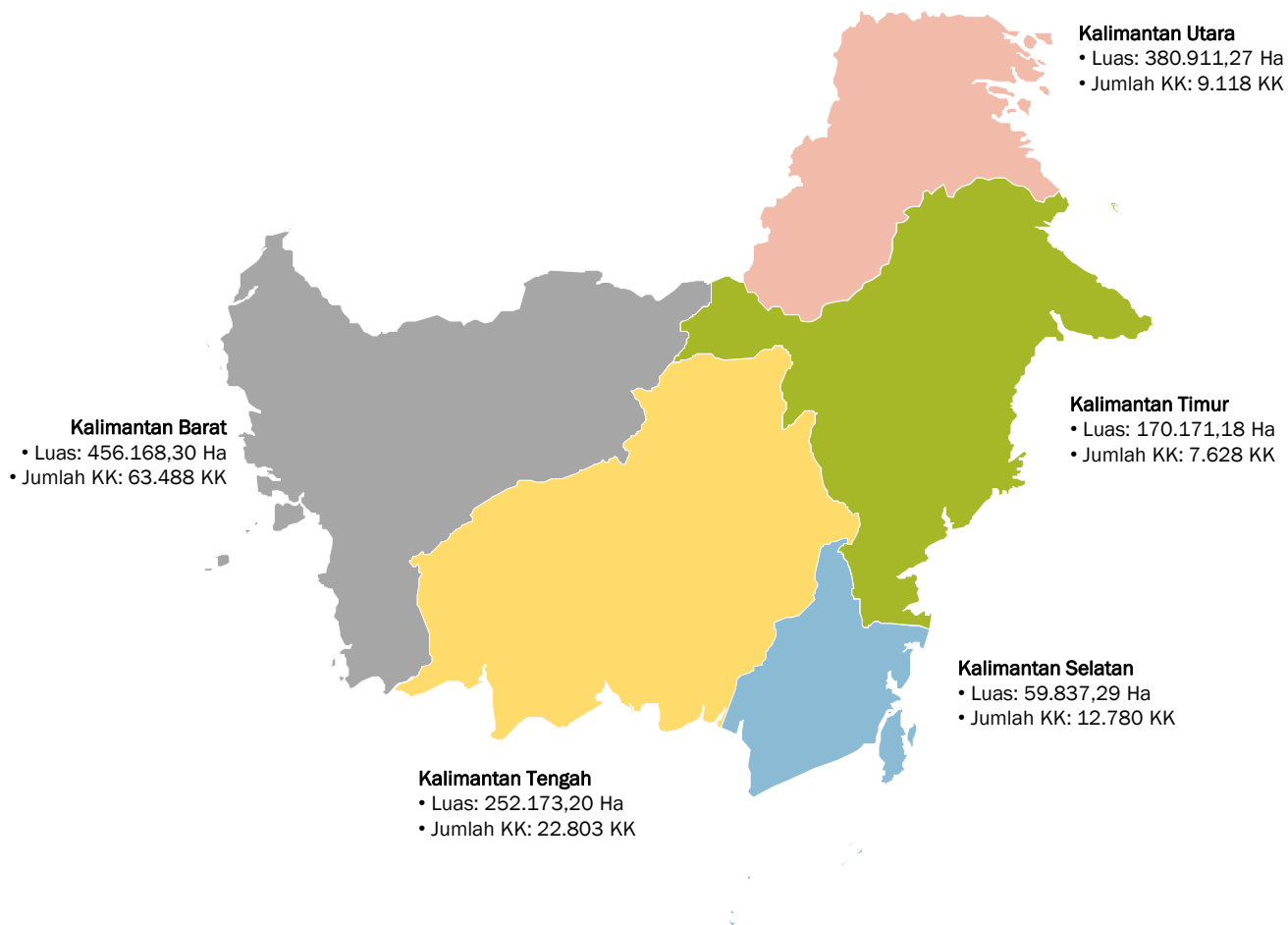
SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL REGION SUMATERA



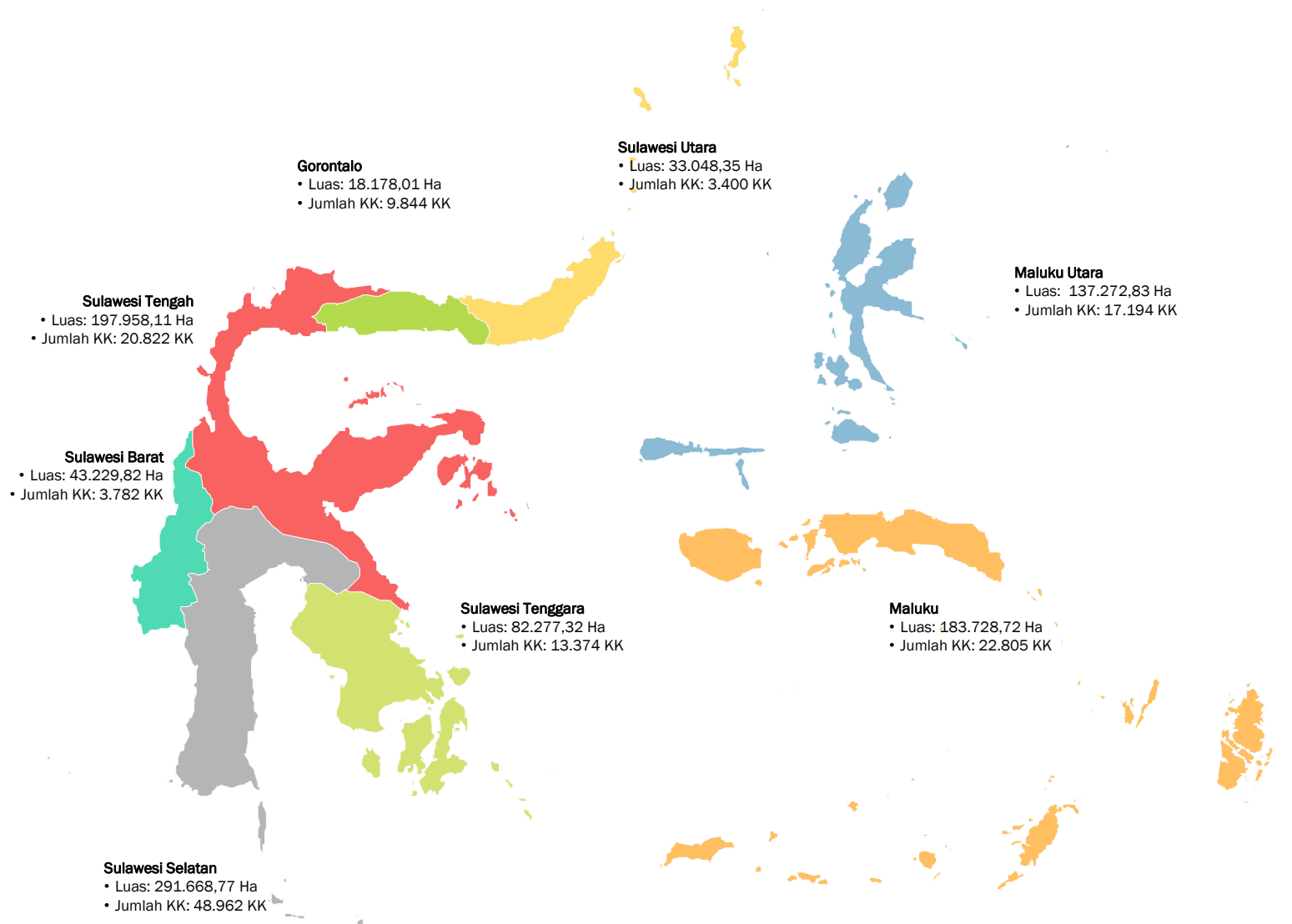
SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL REGION JAWA, BALI, & NUSA TENGGARA



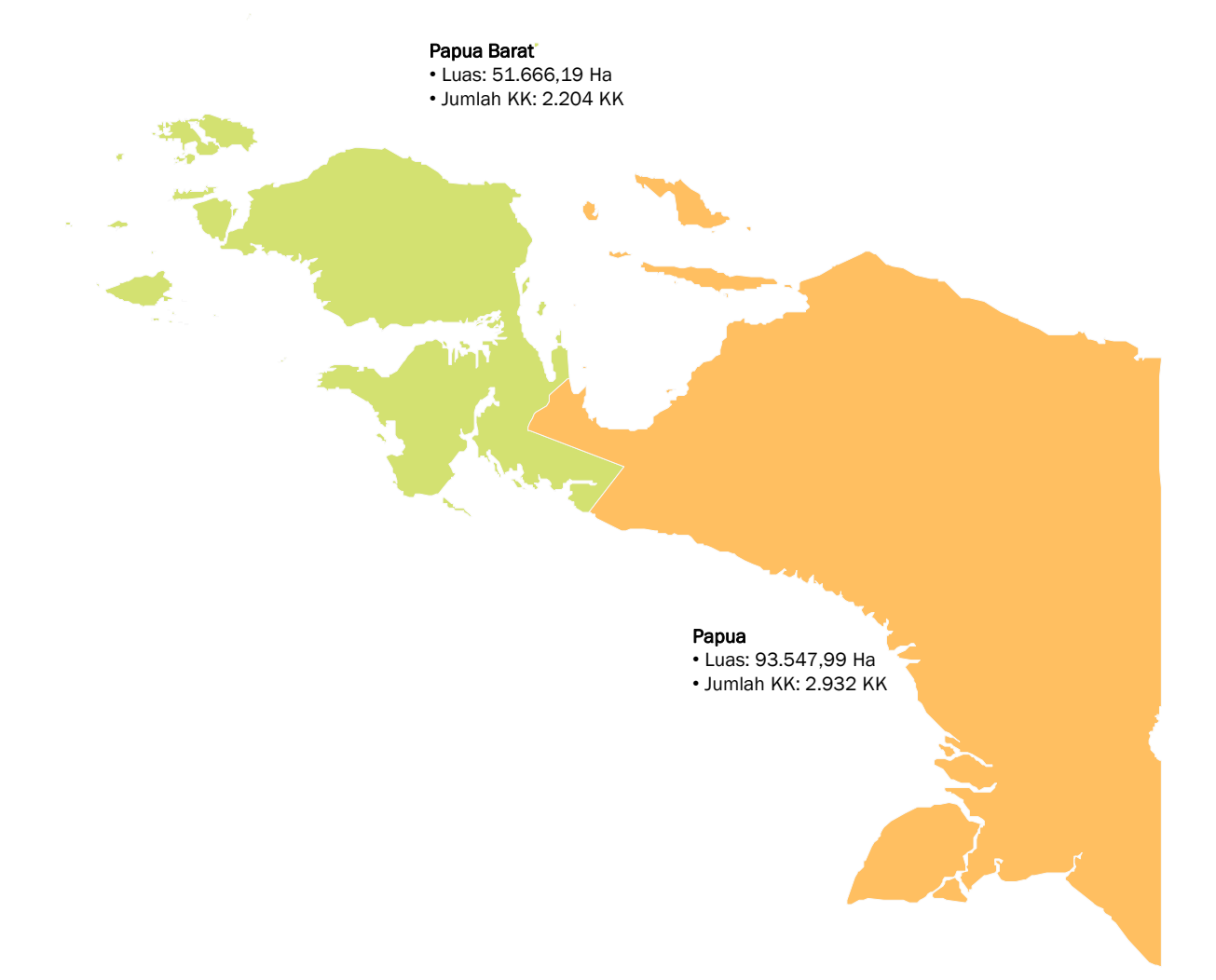
SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL REGION KALIMANTAN



SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL REGION SULAWESI & MALUKU



SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL REGION PAPUA



CAPAIAN HUTAN SOSIAL PER PROVINSI DENGAN SKEMA HUTAN DESA S/D TAHUN 2019

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
1	Aceh	67.790	47	6.951
2	Sumatera Utara	4.195	13	3.596
3	Riau	62.103	23	12.159
4	Kepulauan Riau	3.618	2	201
5	Jambi	99.758	44	11.899
6	Bengkulu	3.625	4	1.137
7	Sumatera Barat	184.620,83	98	120.140
8	Sumatera Selatan	33.068,00	24	9.952
9	Bangka Belitung	3.137,00	7	3.730
10	Lampung	2.015,00	22	9.210
11	Banten	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-
15	DI Yogyakarta	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-
17	Bali	10.441,00	36	39.355
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	340.312,00	106	54.116
21	Kalimantan Selatan	38.555,00	32	9.187
22	Kalimantan Tengah	124.508,00	52	7.394
23	Kalimantan Timur	143.323,38	27	6.119
24	Kalimantan Utara	41.034,00	22	7.689
25	Sulawesi Selatan	49.853,00	78	28.506
26	Sulawesi Tenggara	28.832,00	10	2.599
27	Sulawesi Tengah	39.158,00	53	13.228
28	Sulawesi Barat	9.285,00	4	943
29	Gorontalo	6.777,00	24	7.019
30	Sulawesi Utara	-	-	-
31	Maluku	102.183,00	61	19.465
32	Maluku Utara	48.639,94	57	13.749
33	Papua Barat	48.631,00	32	2.075
34	Papua	56.139,00	21	2.146

CAPAIAN HUTAN SOSIAL PER PROVINSI DENGAN SKEMA HUTAN ADAT S/D TAHUN 2019

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
1	Aceh	94.724,98	Indikatif hutan adat	
2	Sumatera Utara	6.190,88	Indikatif hutan adat	
3	Riau	19.113,82	2	5.246
4	Kepulauan Riau	-	-	-
5	Jambi	11.645,68	27	9.783
6	Bengkulu	10.866,47	Indikatif hutan adat	
7	Sumatera Barat	11.147,06	5	306
8	Sumatera Selatan	380,36	2	578
9	Bangka Belitung	-	-	-
10	Lampung	-	-	-
11	Banten	10.594,11	5	6.376
12	DKI Jakarta	-	-	-
13	Jawa Barat	655,22	1	177
14	Jawa Tengah	64,22	1	121
15	DI Yogyakarta	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-
17	Bali	622,78	3	2.386
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	45.935,89	9	4.160
21	Kalimantan Selatan	-	-	-
22	Kalimantan Tengah	604,25	1	455
23	Kalimantan Timur	7.285,40	1	181
24	Kalimantan Utara	328.691,52	Indikatif hutan ADat	
25	Sulawesi Selatan	132.820,72	5	3.140
26	Sulawesi Tenggara	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	129.193,86	3	212
28	Sulawesi Barat	10.400,76	Indikatif hutan ADat	
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Utara	-	-	-
31	Maluku	49.627,72	Indikatif hutan ADat	
32	Maluku Utara	58.169,89	Indikatif hutan ADat	
33	Papua Barat	2.554,19	Indikatif hutan ADat	
34	Papua	18.839,69	Indikatif hutan ADat	

CAPAIAN HUTAN SOSIAL PER PROVINSI DENGAN SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN S/D TAHUN 2019

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
1	Aceh	42.008,00	13	5.006
2	Sumatera Utara	34.719,00	62	7.193
3	Riau	17.534,00	18	3.520
4	Kepulauan Riau	6.250,00	17	976
5	Jambi	25.875,00	56	4.384
6	Bengkulu	26.703,16	102	9.580
7	Sumatera Barat	28.939,00	45	4.805
8	Sumatera Selatan	34.777,00	65	7.226
9	Bangka Belitung	25.973,00	65	3.764
10	Lampung	148.414,89	182	55.794
11	Banten	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-
15	DI Yogyakarta	1.238,15	42	3.777
16	Jawa Timur	-	-	-
17	Bali	150,00	4	299
18	Nusa Tenggara Barat	19.450,81	58	15.680
19	Nusa Tenggara Timur	47.121,38	175	13.909
20	Kalimantan Barat	18.879,00	21	3.642
21	Kalimantan Selatan	8.063,00	29	1.673
22	Kalimantan Tengah	69.419,99	71	7.399
23	Kalimantan Timur	1.990,00	11	439
24	Kalimantan Utara	7.712,00	7	865
25	Sulawesi Selatan	50.570,89	221	15.468
26	Sulawesi Tenggara	27.385,00	89	7.455
27	Sulawesi Tengah	26.407,55	53	6.282
28	Sulawesi Barat	15.814,00	60	1.978
29	Gorontalo	9.909,00	36	2.482
30	Sulawesi Utara	4.670,00	19	958
31	Maluku	31.918,00	50	3.340
32	Maluku Utara	10.757,00	26	1.478
33	Papua Barat	481,00	4	129
34	Papua	277,00	1	38

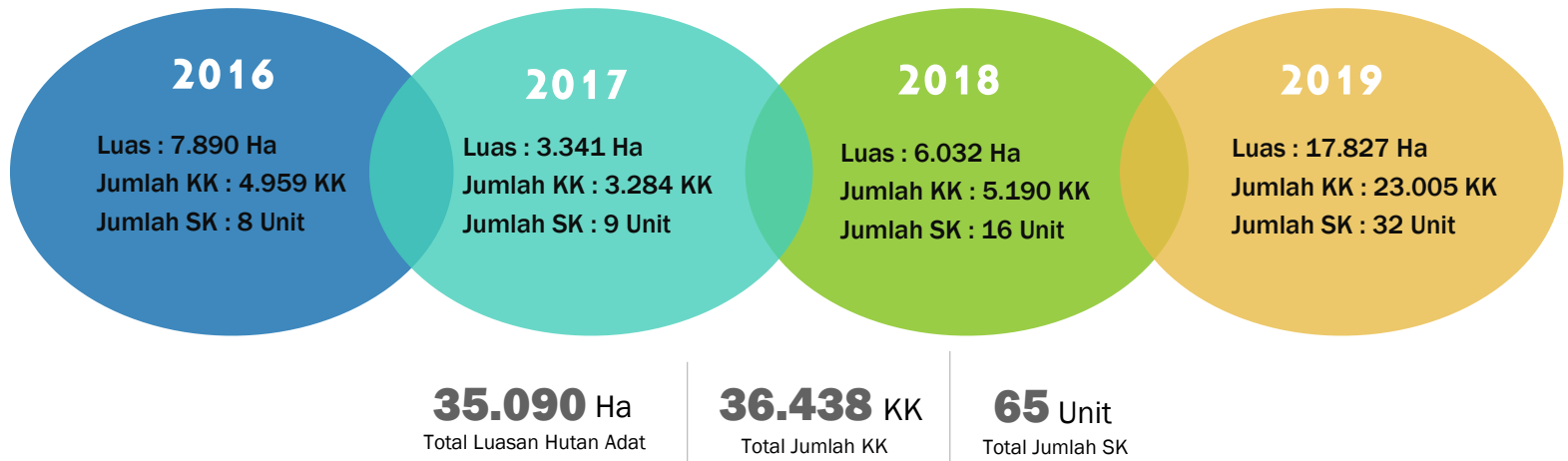
CAPAIAN HUTAN SOSIAL PER PROVINSI DENGAN SKEMA HUTAN TANAMAN RAKYAT S/D TAHUN 2019

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
1	Aceh	3.545,40	6	3.905
2	Sumatera Utara	15.891,61	14	2.699
3	Riau	5.669,54	10	495
4	Kepulauan Riau	22.827,00	6	2.267
5	Jambi	37.730,65	220	4.084
6	Bengkulu	22.177,00	10	2.219
7	Sumatera Barat	2.241,81	91	884
8	Sumatera Selatan	20.956,45	68	3.213
9	Bangka Belitung	11.179,79	288	1.754
10	Lampung	20.159,00	13	7.489
11	Banten	79,00	1	91
12	DKI Jakarta	-	-	-
13	Jawa Barat	6.006,90	20	4.228
14	Jawa Tengah	8.905,00	23	9.272
15	DI Yogyakarta	327,73	3	1.228
16	Jawa Timur	10.956,69	20	10.019
17	Bali	177,00	1	350
18	Nusa Tenggara Barat	3.122,55	12	2.062
19	Nusa Tenggara Timur	3.215,77	17	1.483
20	Kalimantan Barat	3.065,41	32	1.058
21	Kalimantan Selatan	7.925,52	18	656
22	Kalimantan Tengah	57.640,96	51	7.555
23	Kalimantan Timur	12.942,48	15	825
24	Kalimantan Utara	3.150,75	34	472
25	Sulawesi Selatan	7.966,16	259	1.300
26	Sulawesi Tenggara	13.156,02	60	2.884
27	Sulawesi Tengah	3.198,70	1.100	1.100
28	Sulawesi Barat	7.730,06	394	861
29	Gorontalo	1.364,01	63	309
30	Sulawesi Utara	28.104,01	158	2.408
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	19.706,00	5	1.967
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	17.180,30	4	558

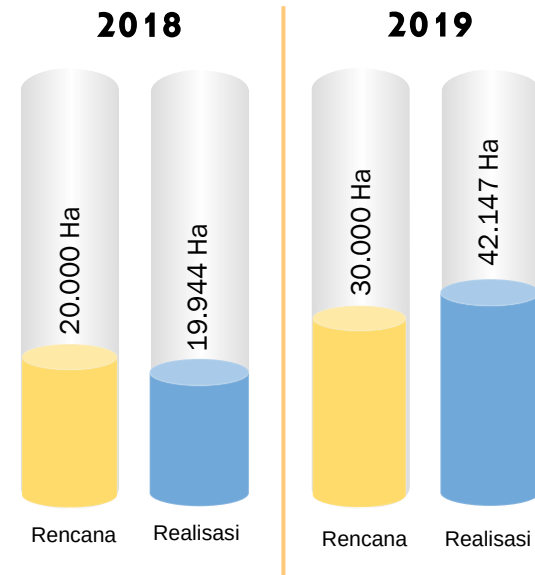
CAPAIAN HUTAN SOSIAL PER PROVINSI DENGAN SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN S/D TAHUN 2019

No.	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.929,60	30	1.650
3	Riau	4.000,00	1	-
4	Kepulauan Riau	-	-	-
5	Jambi	22.468,40	56	874
6	Bengkulu	874,00	7	218
7	Sumatera Barat	-	-	-
8	Sumatera Selatan	29.821,14	9	4.184
9	Bangka Belitung	102,03	4	82
10	Lampung	43.723,82	107	1.745
11	Banten	5.692,37	20	3.746
12	DKI Jakarta	-	-	-
13	Jawa Barat	20.986,33	76	11.895
14	Jawa Tengah	26.479,84	56	8.317
15	DI Yogyakarta	-	-	-
16	Jawa Timur	127.663,11	252	80.159
17	Bali	2.999,53	39	2.533
18	Nusa Tenggara Barat	10.224,41	62	4.419
19	Nusa Tenggara Timur	876,19	14	541
20	Kalimantan Barat	47.976,00	3	512
21	Kalimantan Selatan	5.293,77	35	1.264
22	Kalimantan Tengah	-	-	-
23	Kalimantan Timur	4.629,92	33	64
24	Kalimantan Utara	323,00	4	92
25	Sulawesi Selatan	50.458,00	18	548
26	Sulawesi Tenggara	12.904,30	14	436
27	Sulawesi Tengah	-	-	-
28	Sulawesi Barat	-	-	-
29	Gorontalo	128,00	1	34
30	Sulawesi Utara	274,34	2	34
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	1.112,00	5	190

PENETAPAN HUTAN ADAT



VERIFIKASI HUTAN ADAT

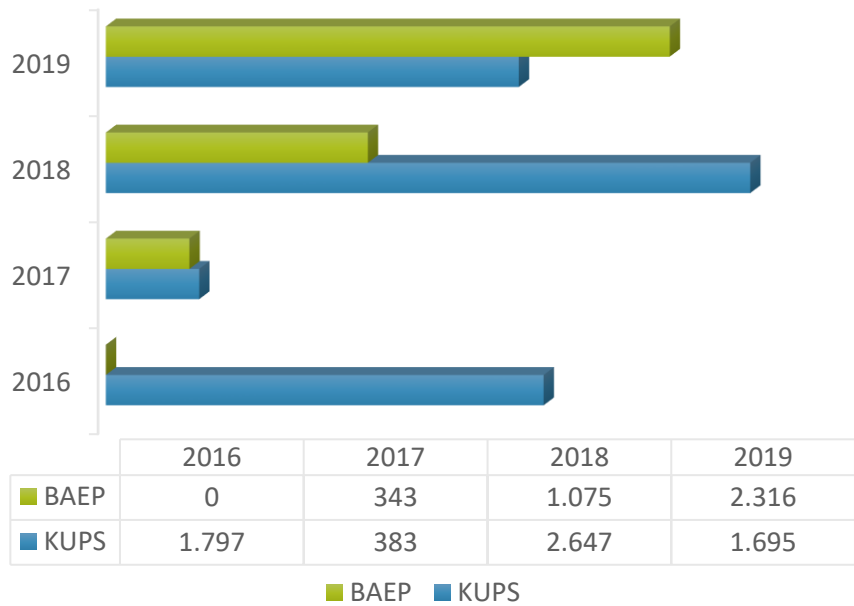


Tahun 2019 wilayah hutan adat telah teridentifikasi dan terverifikasi seluas **42.147 Ha**. Selain itu tahun 2019 dikeluarkan penunjukan wilayah hutan adat seluas **914.927 Ha** melalui SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Program Hutan Sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan, melainkan harus bergulir sebagai aktivitas perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung 818.457 Kepala Keluarga yang telah memperoleh akses kelola perhutanan sosial, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial sebanyak 6.522 KUPS dari berbagai komoditi usaha dan jasa lingkungan serta diberikan stimulan berupa bantuan alat ekonomi produktif dan Bang Pesona sejumlah 3.734 unit bantuan



Dermaga kayu yang dibangun pengelola Hutan Kemasyarakatan Seberang Bersatu untuk memudahkan pengunjung menikmati alam Gusong Bugjs. Foto oleh Feby Fajrin.

POTENSI PENYULUH KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PERHUTANAN SOSIAL

Untuk memastikan program hutan sosial tidak hanya terhenti pada bagi-bagi akses lahan, maka peran penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak akselerator usaha hutan sosial sangatlah penting. Penyuluh kehutanan telah dibekali kemampuan teknis kehutanan dan pertanian yang berguna sebagai *peer consultant* untuk masyarakat dalam mengusahakan kawasan hutan sesuai produk yang paling optimal yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Kehadiran penyuluh kehutanan tersebut juga penting untuk melakukan *debottlenecking* bila ada hal-hal birokratis yang menghambat. Seluruh tenaga pendamping tersebut dipantau menggunakan aplikasi SIMPING (Sistem Informasi Pendamping) khususnya untuk tenaga pendamping KTH.

Selain pegawai negeri sipil, tenaga penyuluh juga berasal dari tenaga swadaya masyarakat dan tenaga penyuluh swasta. Jumlah total penyuluh ada 8.623 orang yang terbagi atas penyuluh PNS 2.712 orang, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) dengan jumlah 5.254 orang serta penyuluh swasta sebesar 657 Orang yang tersebar di sekuruh Indonesia.



No.	Provinsi	PKSM	PKS	PNS
1	Aceh	103	1	53
2	Sumatera Utara	82	40	47
3	Sumatera Barat	53	0	57
4	Riau	96	61	51
5	Kep. Riau	0	0	0
6	Jambi	66	63	66
7	Sumatera Selatan	106	92	37
8	Bangka Belitung	9	0	32
9	Bengkulu	207	4	55
10	Lampung	320	3	132
11	Banten	183	2	16
12	Jawa Barat	1226	38	290
13	DKI Jakarta	4	7	28
14	Jawa Tengah	590	52	447
15	D.I. Yogyakarta	144	5	42
16	Jawa Timur	780	108	278
17	Bali	135	1	38
18	NTB	124	0	94
19	NTT	6	0	120

No.	Provinsi	PKSM	PKS	PNS
20	Kalimantan Barat	114	64	40
21	Kalimantan Tengah	42	2	63
22	Kalimantan Selatan	162	60	69
23	Kalimantan Timur	4	8	53
24	Kalimantan Utara	10	0	16
25	Sulawesi Utara	115	0	47
26	Sulawesi Barat	107	0	19
27	Sulawesi Tengah	126	0	85
28	Sulawesi Tenggara	104	0	79
29	Sulawesi Selatan	217	0	192
30	Gorontalo	6	1	14
31	Maluku	2	31	21
32	Maluku Utara	6	0	30
33	Papua Barat	0	0	59
34	Papua	5	14	42
Total		5.254	657	2.712

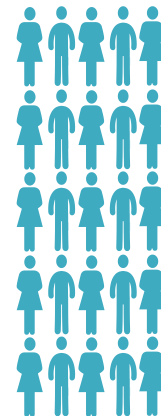
Ket. Penyuluh PNS merupakan tenaga penyuluh di daerah dan penyuluh di Kemnterain LHK



PENERIMA MANFAAT PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL



Jumlah KK
818.457 KK



Jumlah Jiwa
3.273.828 jiwa
*1 KK= 4 jiwa

Jumlah KK yang Memperoleh Akses Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) sudah mampu memberi dampak terhadap masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Masyarakat yang memperoleh akses PS sebanyak 818.457 kepala keluarga. Dengan asumsi tiap keluarga terdapat 4 anggota, maka penerima manfaat dari program PS dapat dirasakan oleh sejumlah 3.273.828 penduduk.

CERITA SUKSES

DUA SEJOLI : KOPI DAN KONSERVASI MANDALAWANGI PENOPANG EKONOMI

**Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Hutan Mandalawangi,
Rancasalak, Garut, Jawa Barat**

Luas hutan yang dikelola : 60 hektare dari total luas 900 hektare
Penggerak : Kelompok Tani Mandalagiri beranggotakan 34 orang
Pendamping : Paguyuban Tani Sunda Hejo

Aktivitas Ekonomi :

Hasil Hutan Bukan Kayu : Kopi, Vanili, Pisang, Alpukat

Kopi :

- Produksi 3,5 ton kopi per hektare dengan harga jual Rp. 9000/Kg
- Penghasilan petani 31,2 juta rupiah per tahun

Di kaki Mandalawangi, Kopi telah menyelamatkan masyarakat dari ancaman longsor. Sebelumnya masyarakat Rancasalak merambah hutan dan membuka lahan untuk ditanami sayuran dan tembakau tanpa menyisakan pohon pelindung. Setelah mendapat izin LMDH pada 2006 dan IPHPS pada 2018 masyarakat diarahkan untuk menanam kopi disela pohon Rasamala, Mahoni dan Dadap, hingga kini jumlah tanaman pelindung mencapai 55 ribu pohon dengan 18 varietas. Melalui Koperasi Klasik beans yang menampung hasil panen kelompok, koperasi berhasil mengekspor 54 ton kopi per tahun dengan omzet mencapai 12 miliar rupiah dalam satu tahun,.



BERDIKARI DI LAHAN HUTAN JATI

Hutan Kemasyarakatan Ketangi, Gunung Kidul, Yogyakarta

Luas hutan yang dikelola : 17 hektare Hutan Produksi

Penggerak : Kelompok Tani HKm Sedyo Rukun

Jumlah anggota inti : 48 orang

Pendamping : Javlec (Java Learning Center)

Aktivitas Ekonomi :

Hasil Hutan Kayu : Kayu Jati

- Dimensi : 8.694 pohon atau 677,83 meter kubik, persentase penutupan 511 pohon/hektare
- Pendapatan kotor : Rp. 134 juta (hasil penebangan 9 hektare atau 151 meter kubik)
- Pendapatan setelah dipotong PNPB : Rp.64 juta

Hasil Hutan Bukan Kayu : Olahan Jahe, Kunir, Temulawak, Garut, Porang, Secang dan Pisang

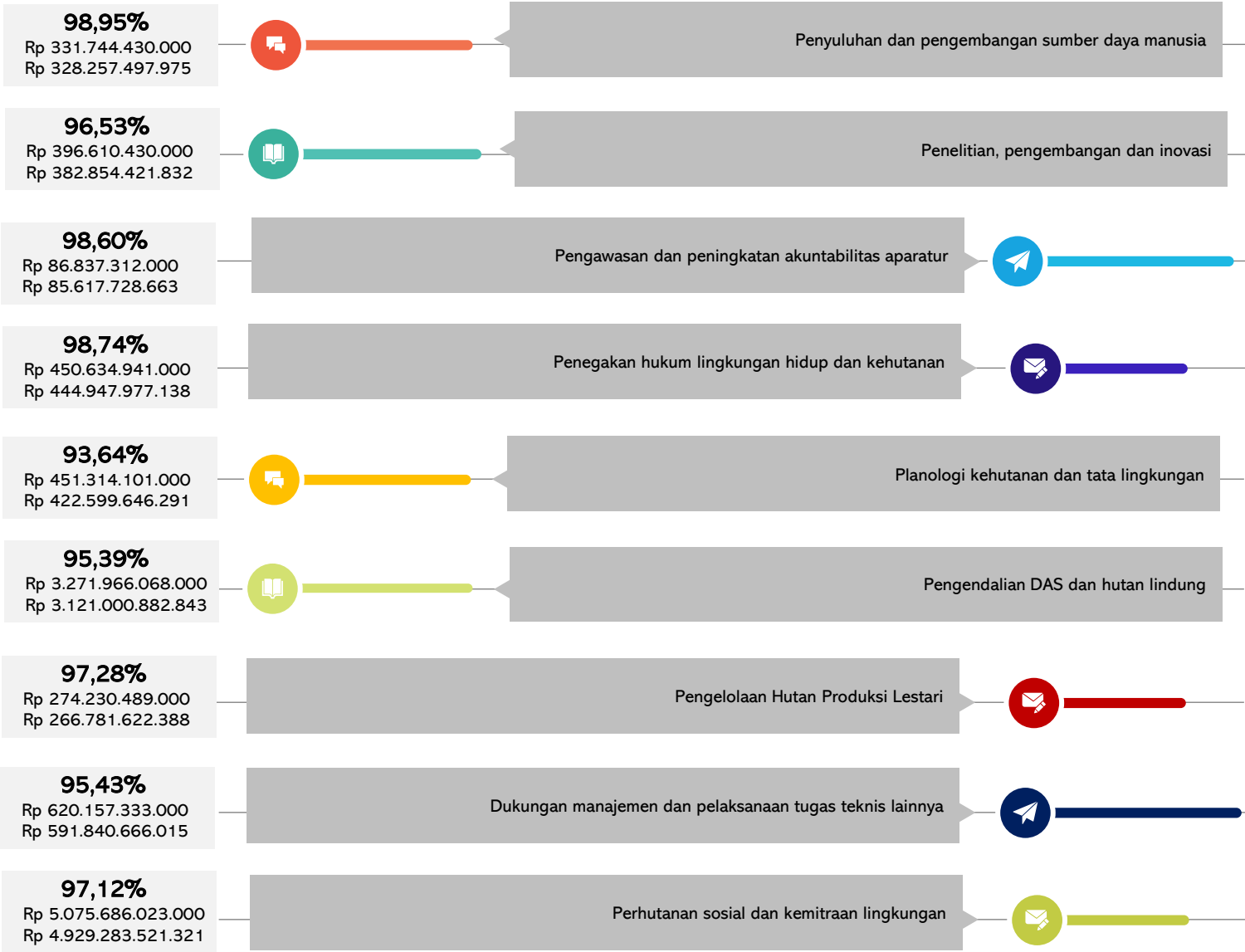
- Penghasilan HHBK: rata-rata Rp 200 ribu per bulan

Potensi jasa lingkungan : Hutan wisata instagrammable.



Ditanam sejak 2003, KTHkm Sedyo Rukun memetik hasil panen untuk pertama kalinya. Kelompok dapat meraup omset hingga Rp 134 juta dari 151 meter kubik atau 4 ribu kayu jati gelondongan. Kelompok tani yang sebagian anggotanya merupakan wanita paruh baya ini juga membudidayakan komoditas lain di bawah sisa tebangan pohon jati seperti jahe, garut, kunyit, temulawak. Selain menjaga agar tanah tidak tandus juga agar tetap memiliki nilai ekonomi. Kelompok juga memiliki pemasukan reguler dari olahan non kayu seperti minuman seduh dan makanan kering. Gula jahe kristal dihargai Rp 80 ribu dan emping garut Rp 60 ribu sementara paket minuman temulawak dibanderol harga Rp 40 ribu sebungkus. Tegakan jati Ketangi juga menawarkan pemandangan menawan yang digandrungi anak muda dan memiliki potensi wisata.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 6



Persentase Realisasi Anggaran (input) **95,97 %**

Persentase Capaian (output) **158,90 %**

Efisiensi

0,60

kategori

Efisien

Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 6 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 6, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.



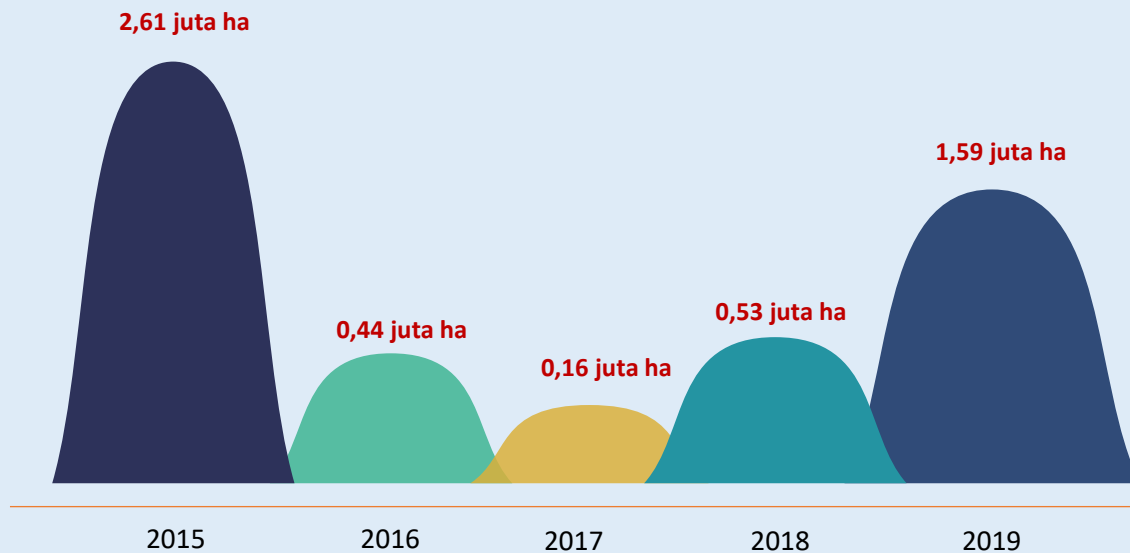
Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh salah satu anggota Daops Tinanggea. Foto oleh Intan Widhiati - Daops Tinanggea.

PERLINDUNGAN KARHUTLA	7 PROVINSI PRIORITAS	7 PROVINSI PRIORITAS	73,28%	▼ 24,67%
Ikhtisar Kinerja	Rencana	Capaian	Kinerja 2019	YoY (2019-2018)

Catatan:

1. Angka kinerja hasil perhitungan frekuensi kebakaran hutan dan lahan setiap bulan di 7 Provinsi Prioritas sesuai P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.
2. 7 Provinsi prioritas adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Indonesia Tahun 2015-2019

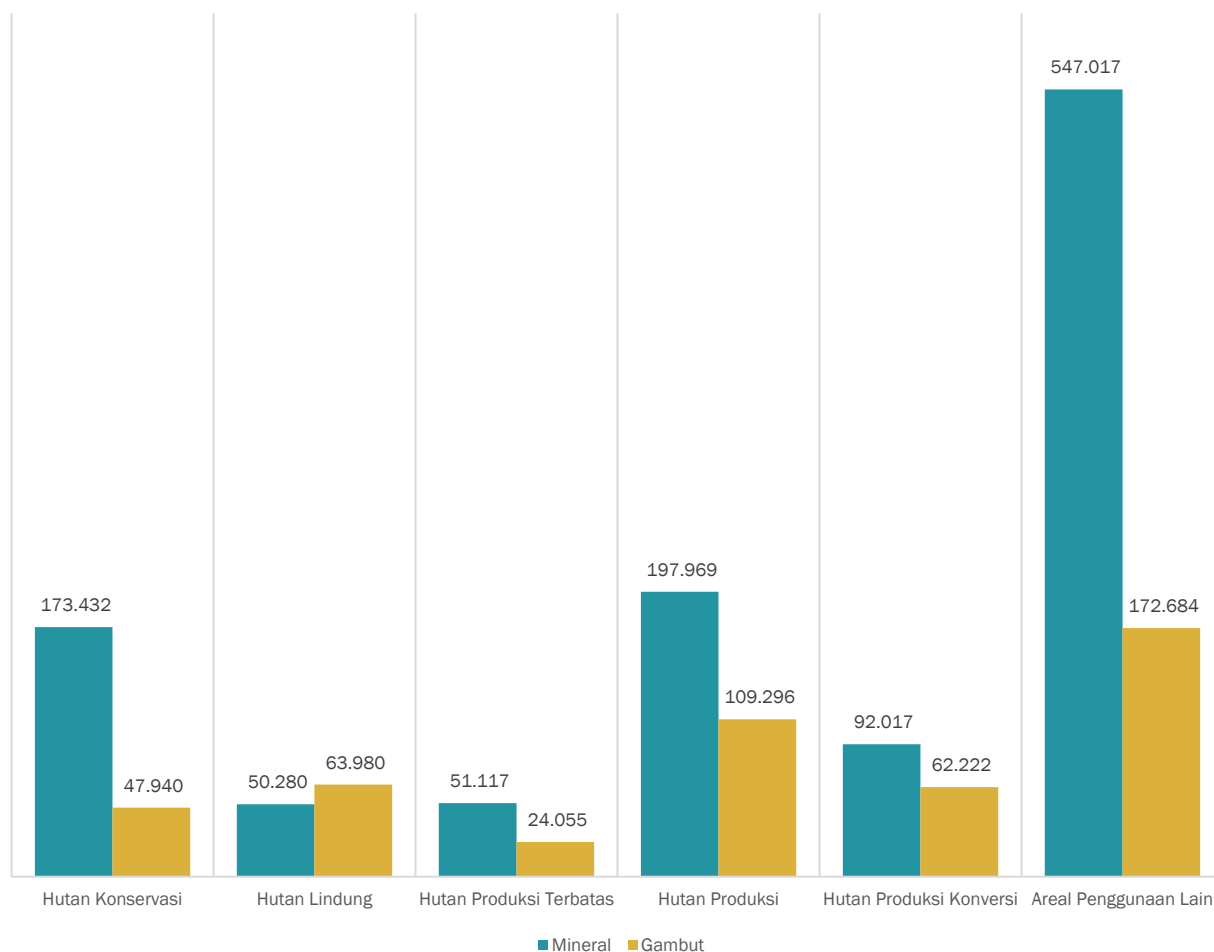


Kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi rawan relatif dapat dikendalikan dan masih pada batas toleransi yang diperkenankan. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2019, terjadi penurunan luasan kebakaran. Luasan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 lebih luas daripada lahan gambut. Luasan kebakaran pada lahan mineral seluas 1,11 juta ha dan pada lahan gambut seluas 480,1 ribu ha.



Pemadaman di vegetasi hutan dan savanna (lalang) jenis tanah mineral Kabupaten Konawe selatan, Bombana, Konawe tahun 2019. Foto oleh Samsir.

Luasan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan fungsi kawasan (dalam ha)



Total luasan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,5 juta ha. Luasan kebakaran tersebut berdasarkan fungsi kawasan antara lain hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi, dan areal penggunaan lain. Jumlah luasan kebakaran hutan dan lahan paling tinggi adalah areal penggunaan lain sejumlah 719.701 ha, disusul dengan hutan produksi sebesar 307.265 ha dan hutan konservasi sebesar 221.372 ha.

Sumber: Posko Kebakaran Hutan dan Lahan, 31 Desember 2019

PENYEBAB KENAIKAN LUAS KARHUTLA TAHUN 2019

7 Faktor Penyebab Kenaikan Luasan Kebakaran

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kebakaran sebesar 970,734 ha, penyebab kebakaran tersebut dipengaruhi oleh 7 faktor

El Nino

Terjadinya El-Nino sedang di sejumlah provinsi rawan karhutla di Indonesia

Hari Tanpa Hujan

Hari tanpa hujan yang panjang dari 30 - 120 hari

Pergerakan Uap Panas

Adanya pergerakan uap panas dari Pasifik - Asia Tenggara khususnya di wilayah Indonesia (Sumatera dan Kalimantan)

Sumber Air

Sulitnya sumber air untuk melakukan pemadaman

Bahan Bakar

Penumpukan Bahan Bakar Sejak Tahun 2015

Kesiagaan

Kesiapsiagaan dari semua pihak yang masih belum maksimal

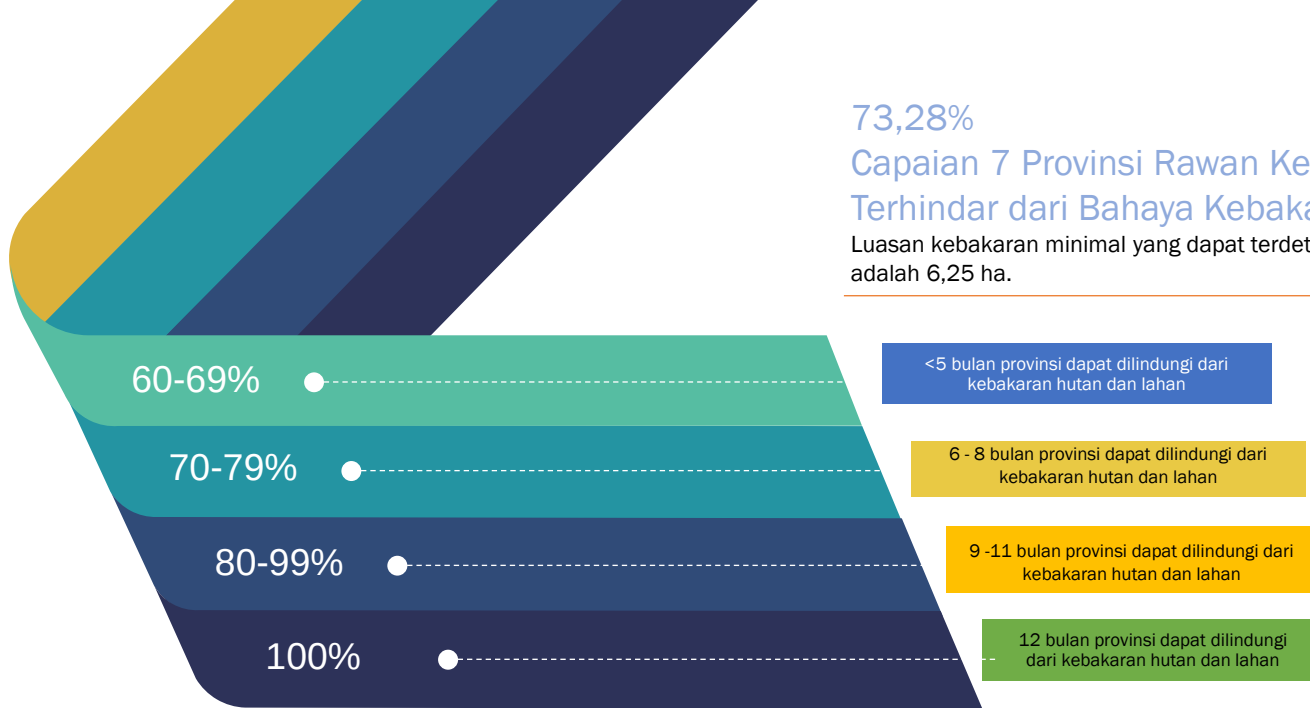
Pembukaan Lahan

Pola pembukaan lahan / pembersihan lahan oleh perorangan/perusahaan masih belum serupa secara menyeluruh

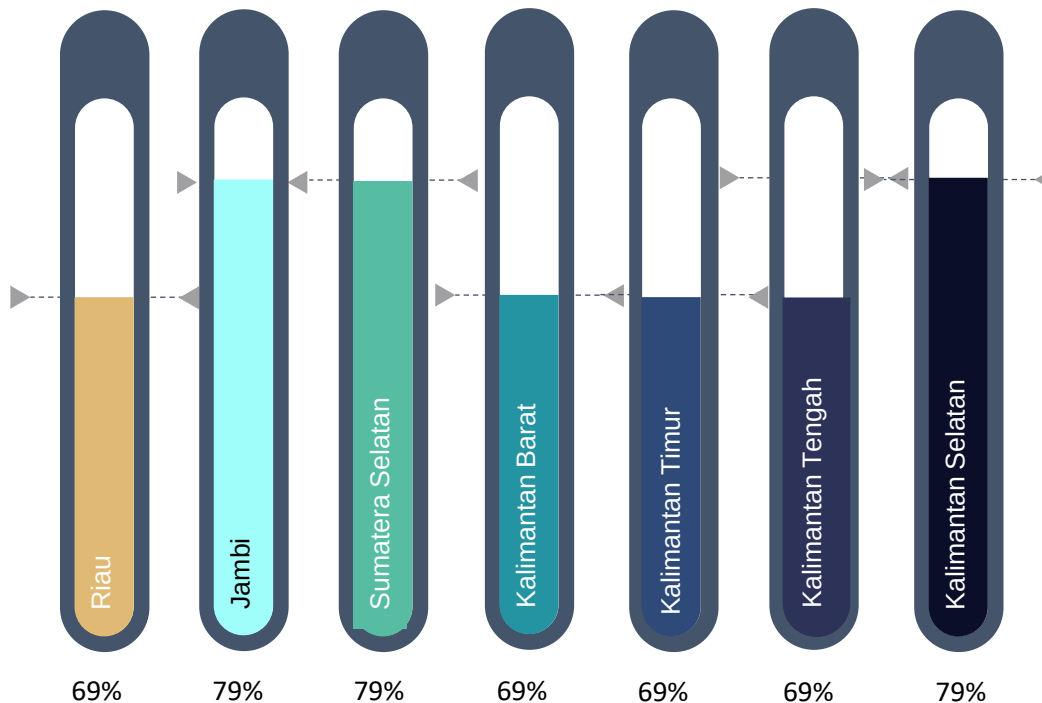
73,28%

Capaian 7 Provinsi Rawan Kebakaran yang Terhindar dari Bahaya Kebakaran Tahun 2019

Luasan kebakaran minimal yang dapat terdeteksi oleh citra satelit adalah 6,25 ha.



Capaian 7 Provinsi Rawan Kebakaran yang Terhindar Dari Bahaya Kebakaran Tahun 2019



Perhitungan terhadap nilai kinerja tahun 2019 dilakukan dengan cara menghitung frekuensi tidak terjadinya kebakaran hutan dalam setahun. Nilai dari masing-masing provinsi di rata-rata untuk mendekati kinerja provinsi yang dapat dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Masing-masing nilai persentase dalam capaian tujuh provinsi rawan kebakaran yang terhindar dari bahaya kebakaran tersebut menunjukkan frekuensi bulan dalam setahun yang dapat dilindungi dari kebakaran hutan dan lahan.

Semakin tinggi nilai frekuensi tersebut menunjukkan semakin terlindungi dari kebakaran hutan dan lahan.

SEBARAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI REGION SUMATERA



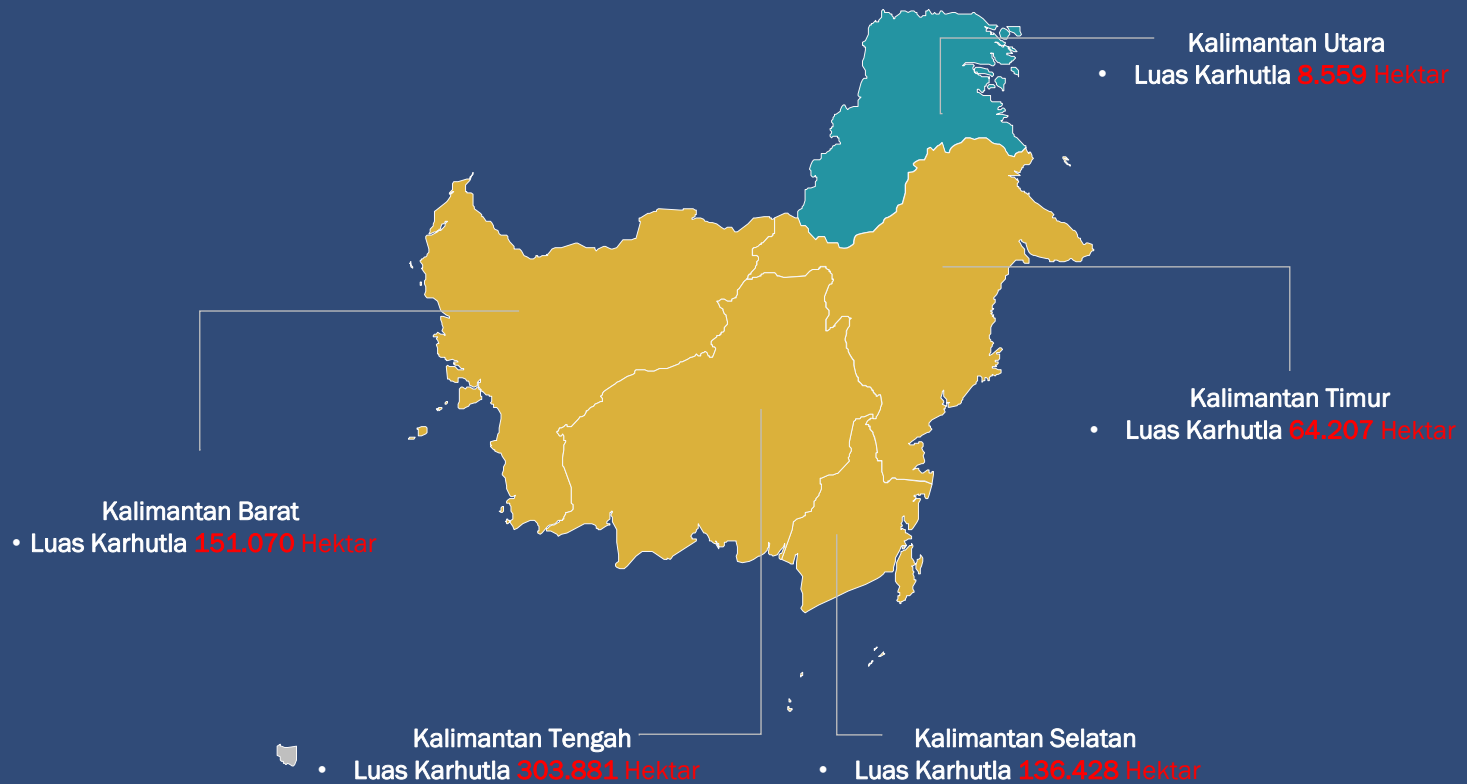
3 provinsi yang paling banyak memiliki luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 berturut-turut adalah Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

SEBARAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI REGION JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA



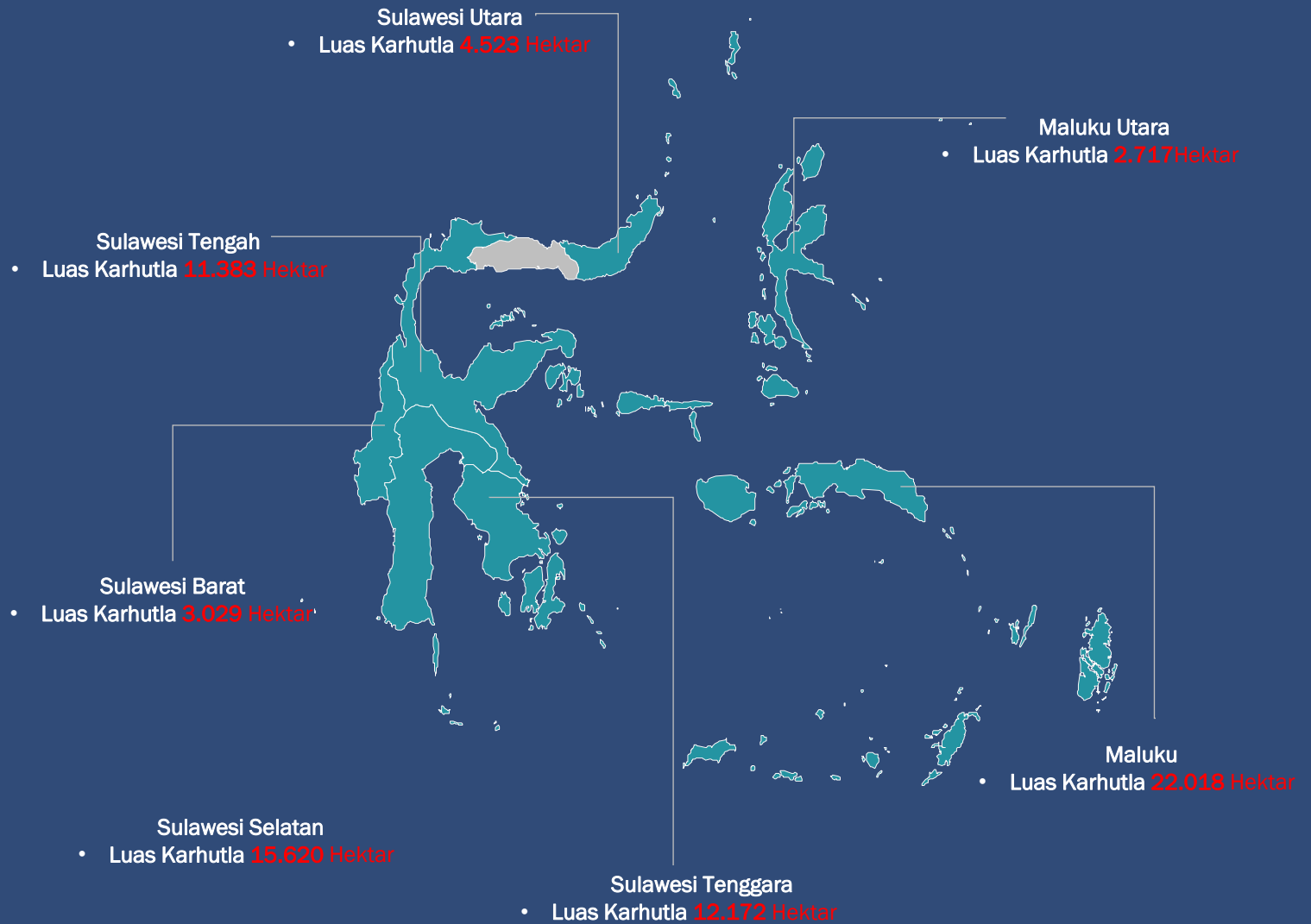
Provinsi yang memiliki luas kebakaran hutan dan lahan lebih dari 100 ribu ha pada tahun 2019 adalah Nusa Tenggara Timur.

SEBARAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI REGION KALIMANTAN

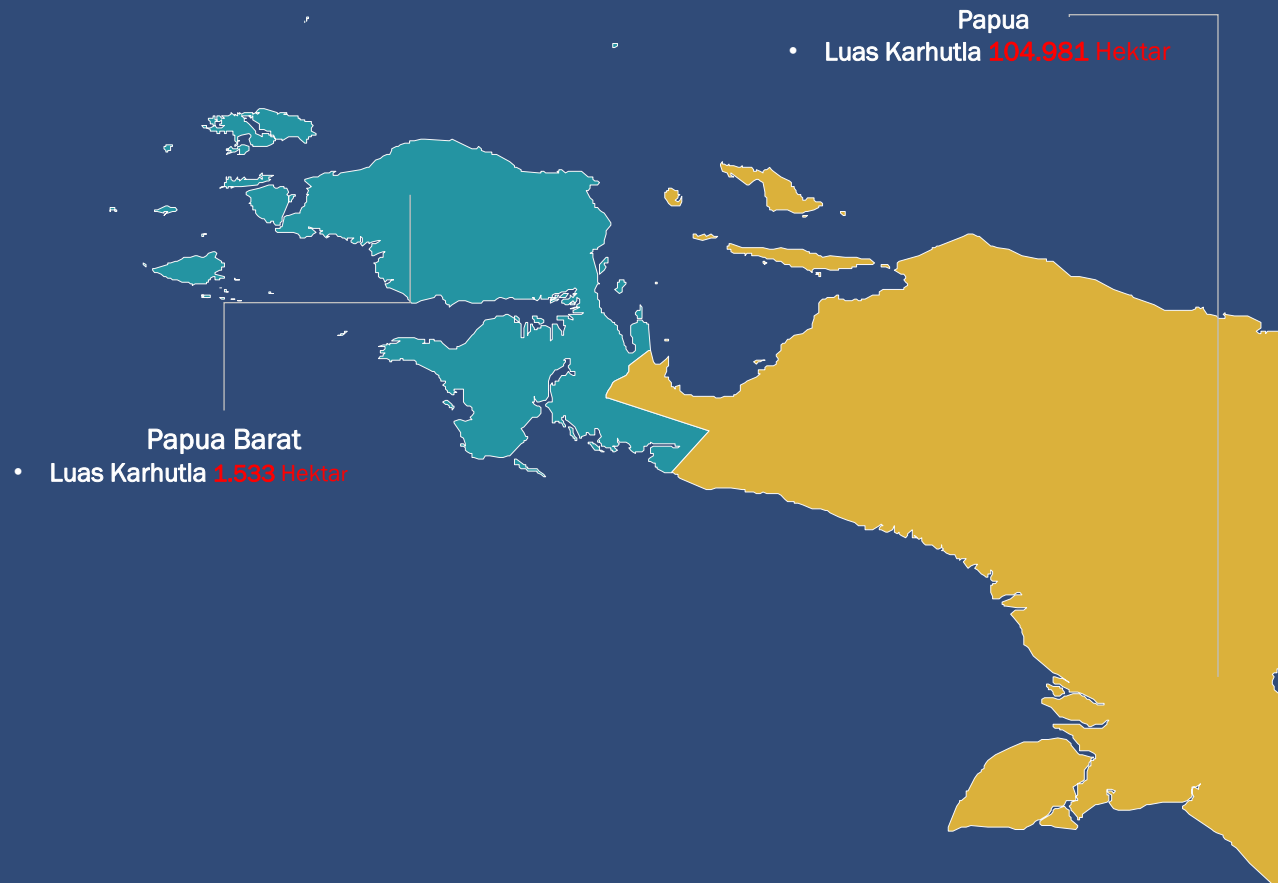


Provinsi yang memiliki luas kebakaran hutan dan lahan lebih dari 100 ribu ha pada tahun 2019 berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan

SEBARAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI REGION SULAWESI DAN MALUKU



SEBARAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI REGION PAPUA





Bangunan sekat kanal, bangunan fisik tata air yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 dalam upaya untuk mempertahankan tinggi muka air pada lahan gambut. Sekat kanal ini mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Foto oleh Arfan Adhi Kurniawan

HOTSPOT NOAA 2015 - 2019

No	Prov.	Hotspot (titik panas) NOAA18/19													
		Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Aceh	2015	31	40	45	7	12	13	12	3	0	1	0	2	166
		2016	5	9	9	11	9	33	17	27	26	14	1	0	161
		2017	1	4	3	-	6	15	23	4	0	0	0	0	56
		2018	2	4	9	4	2	24	17	47	2	1	0	1	113
		2019	0	1	0	0	0	2	9	21	4	1	0	0	38
		TOTAL	96	464	492	57	156	416	361	259	206	71	18	14	2610
2	Riau	2015	125	183	186	47	78	141	519	203	353	86	3	3	1,927
		2016	4	22	54	33	21	15	37	137	16	30	1	12	382
		2017	17	6	7	2	2	5	18	2	4	5	0	2	70
		2018	8	24	20	17	12	8	25	147	27	5	-	1	295
		2019	5	57	92	7	8	6	77	259	242	11	5	-	769
		TOTAL	817	2376	2433	794	1385	4060	3918	3644	2125	1047	212	131	22943
3	Sumsel	2015	30	14	14	8	51	86	309	439	1369	777	161	6	3264
		2016	1	3	-	2	14	17	17	52	47	4	8	6	171
		2017	7	7	7	3	4	13	30	11	67	30	3	3	185
		2018	3	4	8	9	5	6	32	49	150	121	6	1	394
		2019	1	-	8	1	5	1	60	210	512	471	95	-	1364
		TOTAL	186	184	366	258	444	1177	1963	4854	9018	3502	1174	154	23280
4	Jambi	2015	90	21	9	10	48	63	380	367	549	180	21	2	1740
		2016	-	3	1	-	8	6	10	13	6	3	1	8	59
		2017	9	5	4	1	4	3	21	1	7	2	-	1	58
		2018	5	1	3	2	8	8	15	32	23	23	2	2	124
		2019	2	-	4	-	1	4	41	150	328	93	2	-	625
		TOTAL	333	295	523	172	362	960	1329	2033	2623	738	104	128	9600
5	Kalbar	2015	31	43	93	22	33	68	255	1021	996	123	21	5	2711
		2016	2	2	6	1	7	4	25	780	666	69	3	11	1576
		2017	18	8	10	9	9	18	81	131	331	23	1	3	642
		2018	5	92	22	5	14	10	137	1129	129	12	1	8	1564
		2019	1	-	20	7	22	8	66	666	1047	42	16	-	1895
		TOTAL	609	921	873	569	437	1222	2894	11448	8842	1855	295	89	30054
6	Kalteng	2015	45	36	36	23	16	53	265	811	1831	1099	67	7	4289
		2016	6	-	1	-	-	4	9	37	82	106	11	7	263
		2017	-	19	4	2	1	1	9	13	29	12	1	2	93
		2018	8	17	4	2	8	6	39	204	221	65	1	1	576
		2019	1	1	3	-	12	5	56	278	1135	121	63	-	1675
		TOTAL	312	426	361	266	252	532	1183	4433	9703	5673	630	90	23861
7	Kalsel	2015	3	-	3	-	4	4	23	157	525	513	54	11	1297
		2016	13	-	-	-	-	1	1	15	12	12	2	-	56
		2017	-	-	2	1	-	1	12	18	17	11	-	1	63
		2018	-	-	1	-	3	-	8	42	105	30	-	-	189
		2019	-	-	1	1	3	6	14	61	275	54	18	-	433
		TOTAL	30	48	69	46	54	130	507	1045	2478	1840	195	32	6474
8	Kaltim	2015	24	15	41	42	23	10	105	350	635	861	69	48	2223
		2016	86	90	46	18	4	3	8	26	14	19	13	2	329
		2017	-	5	3	4	5	1	7	31	29	29	-	4	118
		2018	1	5	11	3	12	12	9	38	182	38	3	2	316
		2019	1	18	26	7	4	-	10	76	314	70	7	-	533
		TOTAL	287	446	663	292	231	375	543	1689	3193	3049	440	166	11374
9	NTB	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOTSPOT TERRA/AQUA 2015 - 2019

No	Prov.	Tahun	Hotspot (titik panas) TERRA/AQUA NASA												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Aceh	2015	3	25	26	3	16	22	10	4	3	-	1	-	113
		2016	5	7	10	13	2	6	5	9	3	8	-	-	68
		2017	4	9	4	2	3	3	-	8	-	27	-	-	60
		2018	-	15	3	6	3	9	13	47	3	-	1	1	101
		2019	3	1	2	5	-	3	5	17	-	-	-	-	36
		TOTAL	101	724	846	106	173	262	314	152	275	177	8	18	3156
2	Riau	2015	54	253	316	74	33	208	1039	321	667	229	4	6	3204
		2016	1	61	120	92	5	10	33	366	11	24	-	4	727
		2017	14	32	-	4	-	-	8	18	1	17	-	-	94
		2018	2	110	4	14	3	4	95	644	170	15	-	-	1061
		2019	8	251	478	6	20	19	134	725	1229	32	13	-	2915
		TOTAL	593	8785	10221	806	546	10128	5303	5486	2847	644	98	74	45531
3	Jambi	2015	30	2	2	5	27	125	287	992	1499	741	26	2	3738
		2016	-	1	-	1	1	1	7	1	1	-	-	1	14
		2017	5	5	-	1	-	-	-	9	1	4	-	1	26
		2018	8	3	1	-	1	-	17	31	13	4	-	-	78
		2019	1	-	1	-	3	-	71	263	2810	549	2	-	3700
		TOTAL	81	123	523	69	116	607	652	1816	4731	1525	81	33	10357
4	Sumsel	2015	10	7	6	6	52	66	313	931	6863	7962	616	14	16846
		2016	-	1	-	1	-	7	7	33	6	1	1	-	57
		2017	2	-	2	-	-	-	6	16	51	10	1	2	90
		2018	3	1	1	2	3	2	22	20	98	80	3	2	237
		2019	-	-	-	-	4	8	16	318	1529	1401	594	2	3872
		TOTAL	44	37	105	54	188	315	738	2387	12330	12780	2532	35	31545
5	Kalbar	2015	3	5	22	2	13	15	394	1236	2095	409	24	3	4221
		2016	-	-	2	1	2	-	6	282	190	11	1	-	495
		2017	6	5	2	-	1	-	27	99	215	7	-	2	364
		2018	6	56	12	4	-	3	209	1737	166	16	-	2	2211
		2019	1	-	36	10	24	2	71	1172	2634	19	58	-	4027
		TOTAL	394	1380	568	177	117	613	3278	7163	8129	1867	425	27	24138
6	Kalteng	2015	14	-	4	2	7	10	210	2548	6242	5874	416	26	15353
		2016	-	1	-	-	1	-	2	30	54	3	5	-	96
		2017	-	7	-	-	-	1	2	1	32	27	2	1	73
		2018	2	6	1	1	-	5	21	444	671	197	1	-	1349
		2019	1	-	-	-	3	2	103	665	5721	365	539	-	7399
		TOTAL	94	283	33	56	65	137	498	4688	19622	12376	3261	49	41162
7	Kalsel	2015	1	-	1	2	1	1	33	368	1273	1107	114	16	2917
		2016	26	1	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	33
		2017	-	-	-	-	-	-	2	-	41	9	-	-	52
		2018	-	-	1	-	1	-	12	21	177	123	5	3	343
		2019	2	6	1	-	10	30	7	68	520	144	113	3	904
		TOTAL	38	20	14	14	38	45	85	745	3688	2990	718	29	8424
8	Kaltim	2015	8	8	23	17	9	7	107	634	1079	2164	210	62	4328
		2016	110	63	78	51	4	3	6	13	6	1	9	1	345
		2017	-	-	-	-	1	-	1	14	36	31	-	-	83
		2018	-	-	1	-	1	1	5	60	181	75	4	10	338
		2019	2	15	4	6	-	-	6	95	707	108	27	-	970
		TOTAL	182	197	252	154	124	91	204	1240	3558	4329	494	110	10935
9	NTB	2015	2	-	10	1	7	9	16	54	104	263	198	22	686
		2016	-	-	-	5	9	3	-	3	5	15	4	-	44
		2017	-	-	2	-	-	-	5	43	82	48	8	2	190
		2018	1	1	9	13	11	10	18	12	78	102	21	3	279
		2019	-	7	1	5	4	13	25	28	78	319	39	1	520
		TOTAL	3	13	34	36	51	204	276	384	1015	1428	542	51	4037

Kualitas udara dan cuaca penerbangan

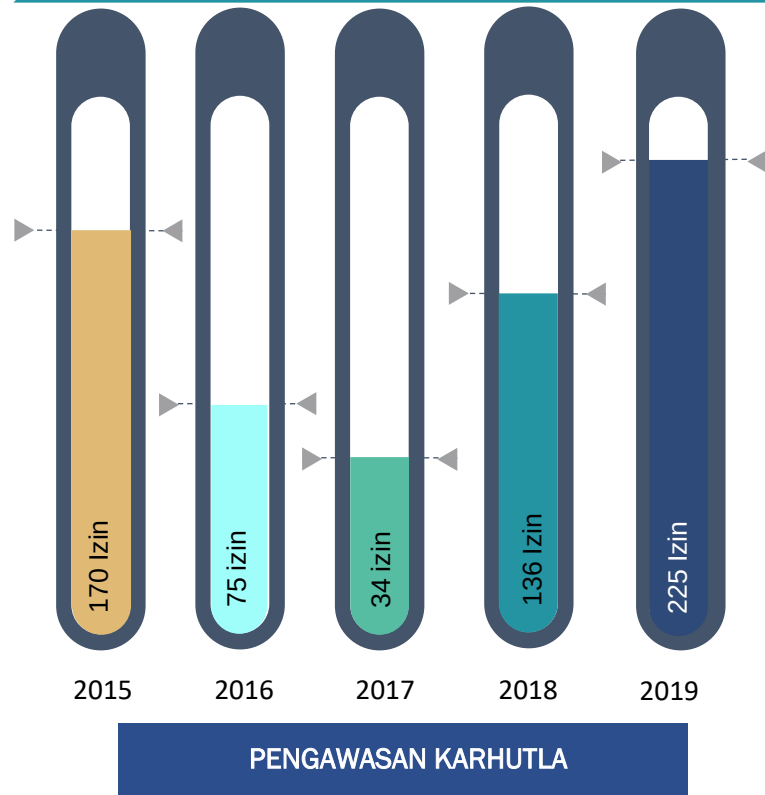
No.	Indonesia (10 Provinsi Rawan)	Lokasi	Kualitas Udara (PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$))		Cuaca		
			Terkini	Tertinggi	Jarak Pandang (Km)	Kondisi	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)
1.	Sumut	Medan	0	0	4,0	Halimun	24
2.	Riau	Pekanbaru	20,00	20,00	8,0	Berawan	25
3.	Jambi	Jambi	13,00	13,00	7,0	Berawan	25
4.	Sumsel	Palembang	26,00	26,00	0,7	Berkabut	25
5.	Kalbar	Pontianak	20,00	20,00	8,0	Cerah Berawan	24
6.	Kalteng	Palangkaraya	22,00	22,00	6,0	Berawan	25
7.	Kalsel	Banjarmasin	13,00	13,00	4,2	Halimun	24
8.	Kaltim	Samarinda	0	0	3,0	Halimun	26
9.	Kaltara	Tanjung Selor	0	0	7,0	Berawan	24
10.	Papua	Jayapura	0	0	≥ 10	Cerah Berawan	28

Keterangan:

PM10: 0-50 = BAIK; 50-150 = SEDANG; 150-250 = TIDAK SEHAT; 250-350 = SANGAT TIDAK SEHAT; >350 = BERBAHAYA

Kualitas udara PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$) dan cuaca penerbangan pada tahun 2019 terlihat masih berada pada batas yang masih dapat ditoleransi. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan meskipun capaian kualitas udara diatas 0 namun tetap berada pada rentang 0-50 dengan keterangan baik. Hasil pemantauan terhadap kualitas udara dan jarak pandang diperoleh dari <http://bmkg.go.id/kualitas-udara/informasi-partikulat-pm10.bmkg> (BMKG – Kualitas Udara), <http://aviation.bmkg.go.id/web/observation.php> (BMKG – Jarak Pandang), dan <http://iku.menlhk.go.id/> (Ditjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan).

PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



5 Gugatan Perdata

SANKSI PERDATA



25 sanksi administratif oleh KLHK

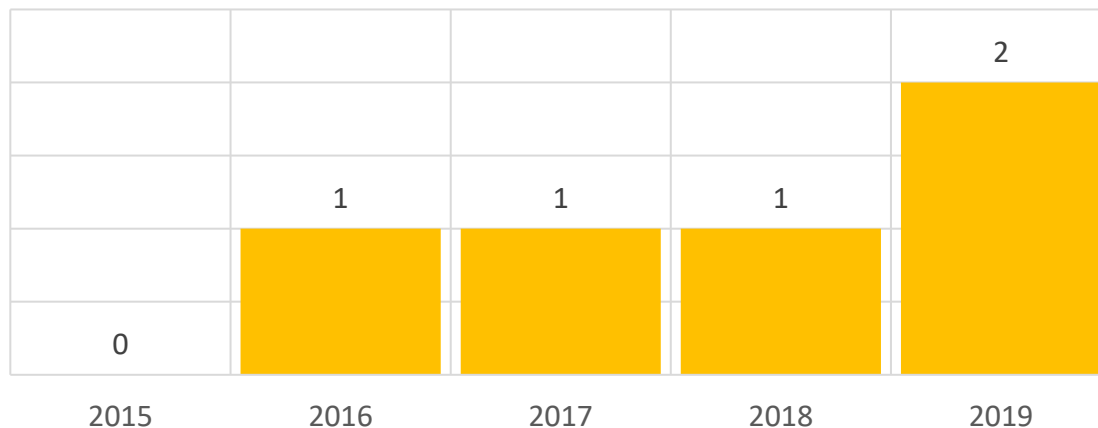
SANKSI ADMINISTRATIF



10 Fasilitasi dengan Polri

FASILITASI POLRI

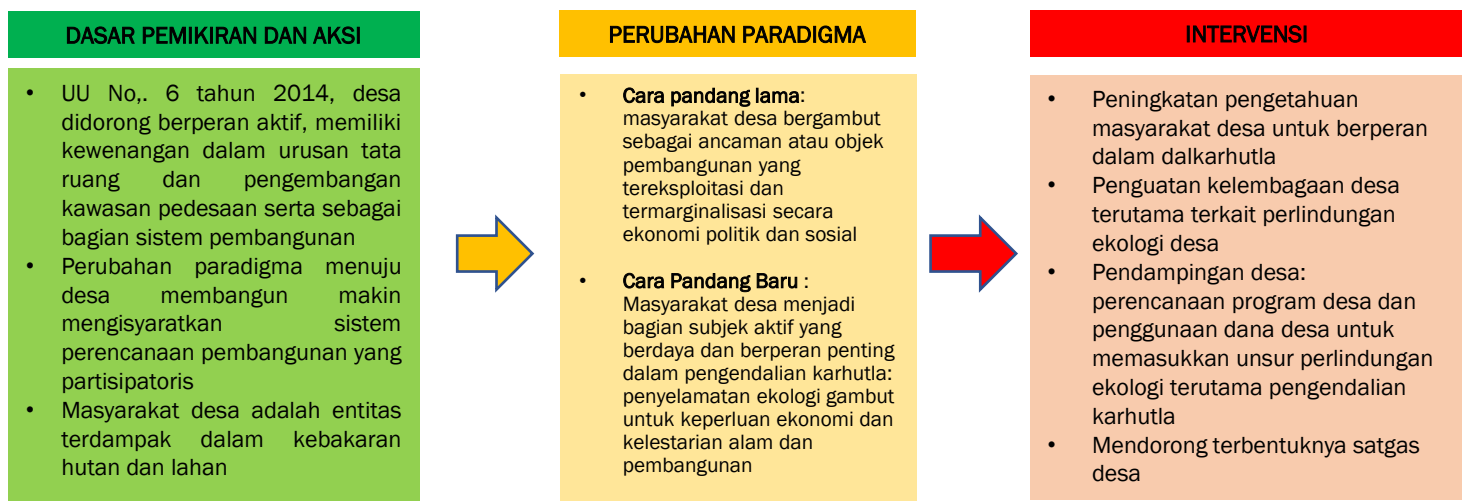
Penegakan Hukum Pidana (P21) Karhutla



UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLA YANG TERUS DI TINGKATKAN



Penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak (desa) menjadi salah satu terobosan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2020. Masyarakat akan dilibatkan secara aktif untuk menjaga lingkungannya.



AKSI LAPANGAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS DESA



SOSIALISASI

Upaya penyadartahuan melalui sosialisasi dan upaya lain untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



SIGNAGE

Pembuatan papan peringatan dan informasi peringkat bahaya kebakaran



NORMALISASI SUNGAI

Pembuatan sekat bakar dan perbaikan tata air melalui normalisasi sungai, pembangunan sekat kanal, embung, serta sumur bor



RADIO KOMUNITAS

Pembuatan radio komunitas sebagai sarana pemberian informasi, peringatan dini dan kampanye pencegahan



EARLY WARNING SYSTEM

Upaya deteksi dini melalui patroli dan siskamling dengan melakukan analisa sederhana melihat kondisi vegetasi dan tinggi muka air



IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KARHUTLA

Pelibatan terhadap masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mencegah dari kebakaran hutan dan lahan yang sudah diterapkan oleh Kementerian LHK, salah satu contohnya pada Daops Dumai, Riau.

STRATEGI PENGENDALIAN KARHUTLA 2020

AKSI PENCEGAHAN YANG HARUS DILAKUKAN DI TINGKAT TAPAK BERBASIS DESA

Inventarisasi potensi setiap desa-desa rawan karhutla pada wil. rawan karhutla, meliputi : jumlah masyarakat, jumlah pemilik lahan pertanian/ perkebunan, luas lahan eksisting, peruntukan lahan tersedia.

Mengembangkan penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pengolahan kompos, cuka kayu, briket arang dan mekanisasi pertanian yang disertai dengan pelatihan/ pendampingan.

Meningkatkan *livelihood* masyarakat desa, melalui diversifikasi usaha pertanian. Pemerintah memberikan insentif sesuai potensi desa, contoh : potensi perikanan harus diberikan dukungan bibit dari KKP, pembangunan infrastruktur (embung, saluran air) oleh PUPR, pendampingan, sampai dengan pemasaran yang dapat didukung melalui program CSR.

Perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian

Dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, dari Pemerintah Pusat (APBN), Dana Desa, Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR)

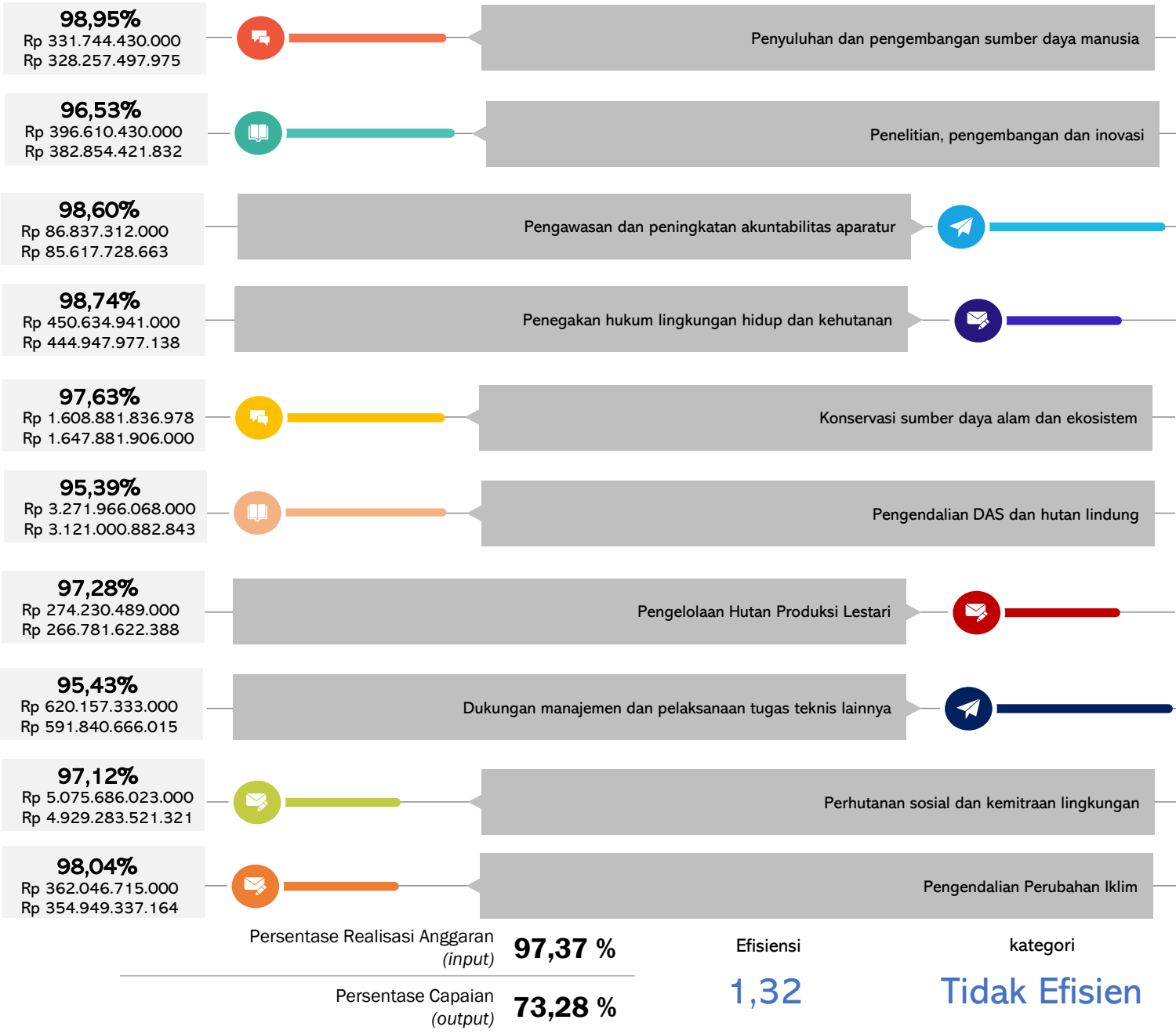
PENDAMPINGAN PIHAK DESA OLEH:

- Pemerintah Daerah
- Babinsa/Babinkamtibmas
- Manggala Agni,
- Penyuluh (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan)
- Tokoh Masyarakat
- LSM (KTPA, MPA)
- Swasta (CSR)



@Dokumentasi Posko Karhutla
Kementerian LHK
Pelibatan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mencegah dari kebakaran hutan dan lahan

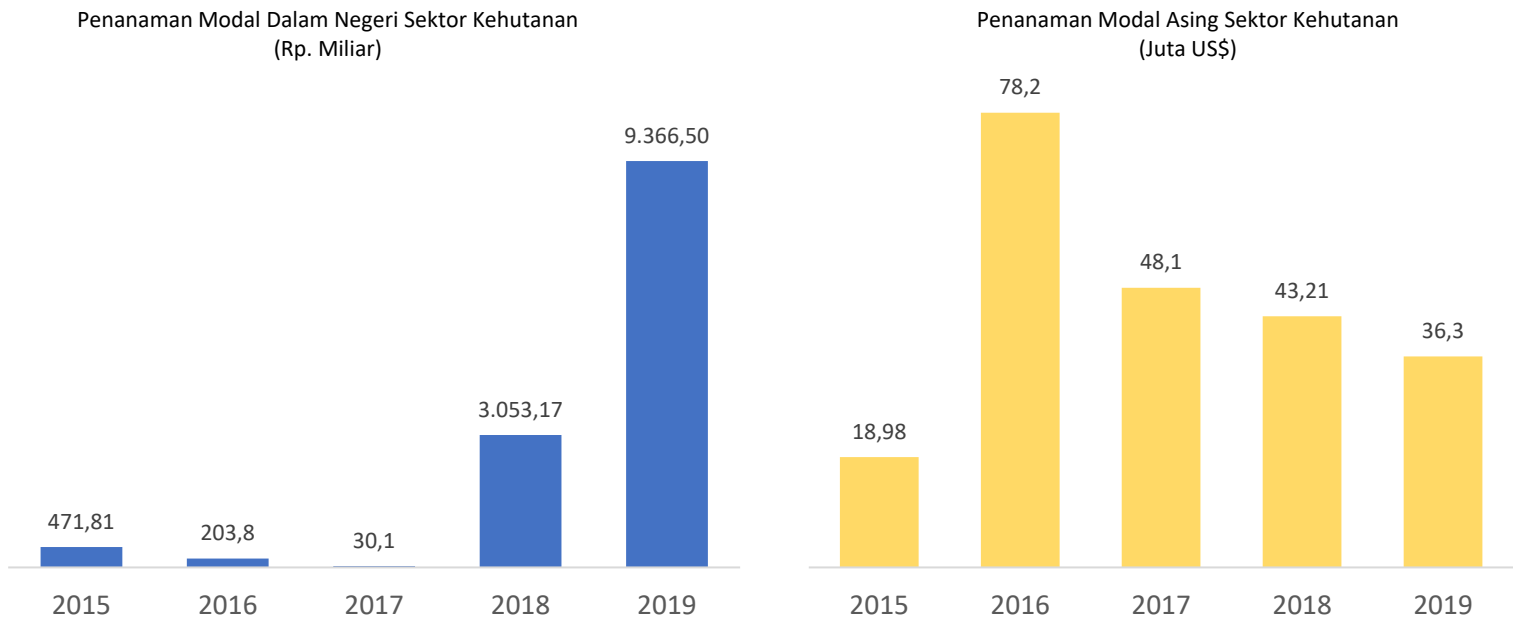
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 7



Catatan:
Persentase Realisasi Anggaran IKU 7 dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran program-program yang mendukung pencapaian IKU 7, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.78/Menlhk/Setjen/Set-1/2016.

PERKEMBANGAN INVESTASI BIDANG LHK

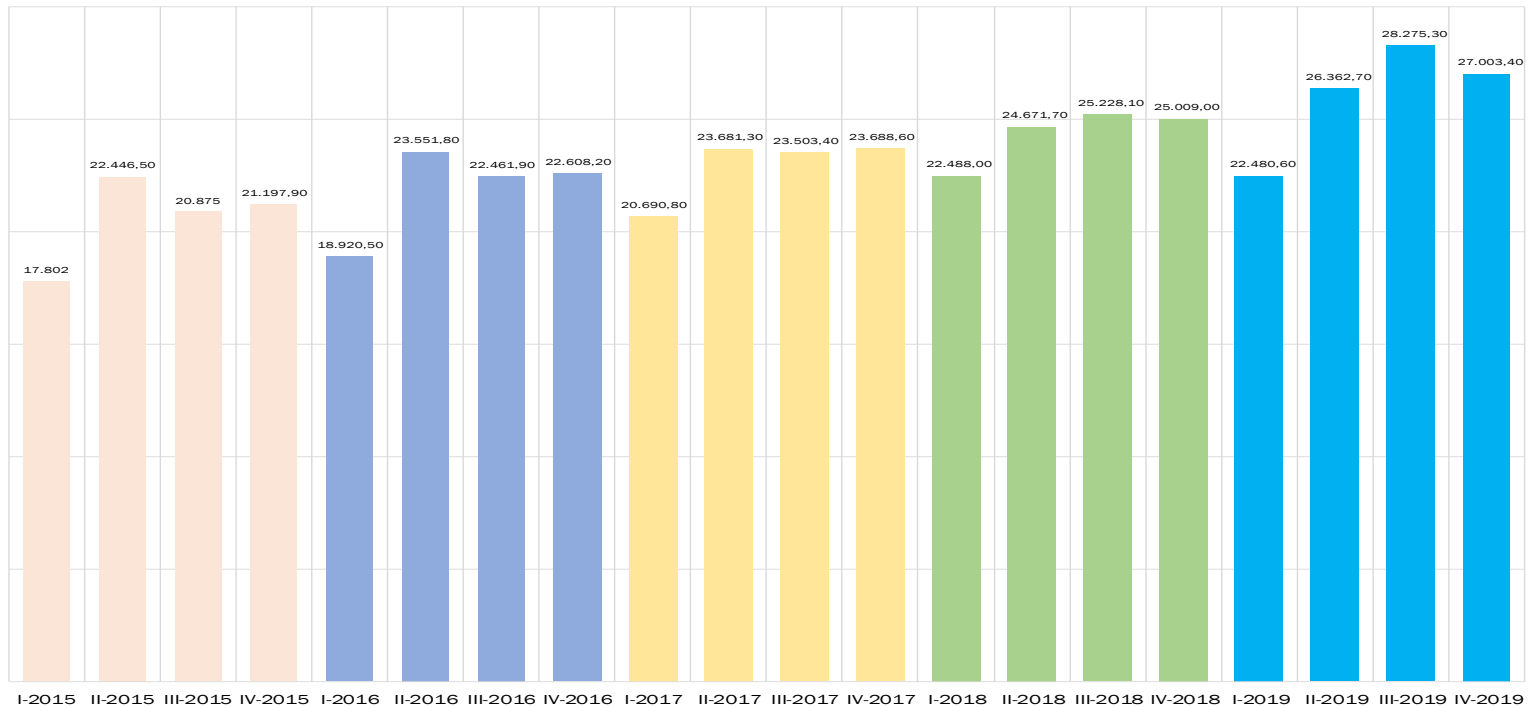
Di tengah ketidakpastian perekonomian global, serapan investasi dalam negeri di bidang LHK menunjukkan tren yang meningkat. Sebagai perbandingan, angka penanaman modal dalam negeri pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,053 triliun meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi Rp. 9,36 triliun pada 2019. di bidang Industri Kehutanan juga menunjukkan peningkatan investasi dari Rp. 1,53 triliun pada 2018 menjadi Rp. 1,58 triliun di 2019. Penanaman modal asing merespon kelesuan ekonomi global tercatat menurun dari US\$ 43,21 juta pada tahun 2018 menjadi US\$ 36,3 juta pada 2019.



Catatan : Angka bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

SUMBANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBENTUKAN PDB (Rp. Miliar, harga berlaku)

Sumbangan kehutanan di wilayah hulu bagi pembentukan produk domestik bruto yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. sub sektor Angka tahun 2019 sebesar Rp. 104,11 triliun, meningkat 6,9 % (Year on Year) dibanding tahun 2018. Angka pada tahun 2018 Rp. 97,39 tahun 2017 Rp 91,56 Triliun, tahun 2016 Rp 87,54 Triliun, dan tahun 2015 Rp 82,32 Triliun.







Taman Nasional Komodo menjadi salah satu tempat wisata yang menunjang PNBK. Wisatawan mancanegara dan nusantara mendaki bukit di Pulau Padar untuk mencari matahari terbit dari ufuk timur. Foto oleh Iskandar.



4 PENUTUP

Tarsius fuscus hewan yang banyak dijumpai di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Keunikan hewan ini menjadikan wisata khusus yang dilakukan di malam hari. Foto oleh Indra Pradana.



MERAWAT ALAM, MENUMBUHKAN GELIAT EKONOMI DARI PELOSOK NEGERI

Tuhan menciptakan hutan yang menghijau, satwa yang beragam, lingkungan yang sehat, serta kita semua untuk hidup berdampingan. Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk hidup dengan menghargai alam, dan kita mengerti bahwa manusia tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan alam, dengan pemahaman tersebut harusnya kita semakin prihatin dengan apa yang terjadi pada alam dan masa depan bumi nanti.

Saat ini, banyak generasi “millennial” sudah mulai *concern* akan pentingnya menjaga alam, mereka mulai sadar bahwa segala yang kita konsumsi semua berasal dari alam, dan semakin kita mengkonsumsi dengan berlebih, keseimbangan alam akan semakin terganggu. Kemudian apa yang telah kita lakukan agar alam dan lingkungan tetap terjaga?

Pertanyaan itu mungkin akan sedikit terjawab dengan data dan cerita tentang bagaimana masyarakat menjaga, dan mengelola alam sehingga kelestarian serta geliat pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan,

Cerita tentang sampah yang tidak lagi menjadi beban bagi lingkungan, tentang areal bekas tambang yang telah dipulihkan, tentang semangat para penjaga hutan untuk menyelamatkan hutan dari perambahan dan ancaman kebakaran, serta cerita tentang masyarakat yang tersenyum setelah memetik hasil panen di hutan sosial.

Semua kisah di atas tentu bukan sebuah muara dari segala ikhtiar, namun sebuah upaya untuk meneruskan langkah yang telah kita rintis bersama untuk alam dan lingkungan yang lestari, untuk masyarakat yang makin sejahtera dan untuk Indonesia yang lebih maju.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

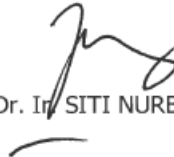
Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan.

Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Jakarta, Desember 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	<i>Indeks kualitas lingkungan hidup</i>	<i>berada pada kisaran 66,5-68,6</i>
b.	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	<i>Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB nasional :</i>	
		Jumlah PNBPN dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019	sebesar Rp. 3,9 Trilyun
		Nilai ekspor hasil hutan pada tahun 2019	sebesar US\$ 9,28 Milyar dan Rp. 5,8 Trilyun
c.	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<i>Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun :</i>	
		Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70	sebanyak 80 unit
		Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari	102 unit
		Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa	1.000.000 Ha
		Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran	sebanyak 7 provinsi

Jakarta, Desember 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Program	Anggaran (x Rp.1000,-)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	585.645.937
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	86.837.312
3.	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	265.005.339
4.	Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung	3.512.913.670
5.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.589.553.025
6.	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	442.985.426
7.	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	270.854.125
8.	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	310.840.945
9.	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	450.556.380
10.	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	443.634.941
11.	Pengendalian Perubahan Iklim	297.068.857
12.	Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan B3	282.282.534
13.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	538.294.191
	JUMLAH	9.076.472.682

Jakarta, Desember 2018

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.



Entitas pengelolaan tapak yang semakin dapat mengayunkan pendulum ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Taman nasional, kesatuan pengelolaan hutan dan perhutanan sosial yang mulai mendorong produktifitas masyarakat untuk ketahanan pangan dan penganekaragaman destinasi wisata. Transformasi ini juga diikuti dengan pengelolaan sampah dan limbah sebagai sumber energi. Secara statistik, sumbangan sub sektor kehutanan dalam pembentukan produk domestik bruto juga semakin kokoh. Mengetengahkan peran Kementerian sebagai penjaga peradaban masyarakat yang geliatnya terus tumbuh membantu pemerataan antar wiayah.

ISBN 978-602-51606-8-4

